BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan* Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang* Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang *Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan* Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Nomor 2022 Nomor 180);

27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

7 | X.

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5);

37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 57);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 98);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Katingan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
12. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
13. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
14. Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
15. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dart berfungsinya suatu output/keluaran.
17. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

19. Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
20. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
21. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
22. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
23. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
27. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen yang memuat struktur dengan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
29. Pengendalian dan evaluasi adalah suatu proses pemantauan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029 merupakan:

(1) Landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun, melalui RKPD Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 dan APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Tahun Anggaran 2030.
(2) Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke Dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c. Terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinyan bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

CHRISTIAN RAIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025
NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 58/2025

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Kabupaten Katingan merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tanggal 27 Maret 2025, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

RPJMD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Katingan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di Kabupaten Katingan.

Peraturan Daerah ini mengatur substansi yang terkait dengan ruang lingkup RPJMD yang meliputi visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, sistematika RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

41 X.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 101

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GRAFIK ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR **1**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Penyusunan 2

1.2 Dasar Hukum 5

1.3 Hubungan Antardokumen 9

1.4 Maksud dan Tujuan 20

1.5 Sistematika RPJMD Tahun 2025–2029 21

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **22**

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 23

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 23

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 55

2.1.3 Aspek Daya Saing 82

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 103

2.2 Gambaran Kondisi Keuangan Kabupaten Katingan 123

2.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) 2020–2024 123

2.2.2 Neraca Daerah 126

2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan (2025–2030) 131

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis 140

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 140

2.3.2 Isu Strategis 161

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **193**

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 196

3.1.1 Visi 196

3.1.2 Misi 198

3.1.3 Tujuan dan Sasaran 206

3.1.4 Keselarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 217

3.1.5 Keselarasan Target Pembangunan Kabupaten Katingan dengan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah 220
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah 221
3.2.1 Strategi Penahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025–2029 221
3.2.2 Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029 233
3.2.3 Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 263
3.2.4 Implementasi Strategi Pembangunan Prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 320
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 371
4.1 Program Perangkat Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 372
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 434
4.2.1 Indikator Kinerja Utama 434
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 443
BAB V PENUTUP 488
5.1 Skema Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029 489
5.2 Saran Pelaksanaan 492

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Target Indikator Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 11
Tabel 1-2 *Highlight* Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 11
Tabel 1-3 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 Berdasarkan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 17
Tabel 2-1 Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Katingan 25
Tabel 2-2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota di Kabupaten Katingan 26
Tabel 2-3 Luasan Tata Guna Lahan di Kabupaten Katingan 27
Tabel 2-4 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Katingan Tahun 2019–2024 28
Tabel 2-5 Daya Dukung dan Daya Tampung per Kecamatan 36
Tabel 2-6 Jumlah Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan 39
Tabel 2-7 Potensi Banjir Setiap Kecamatan 47
Tabel 2-8 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatan Tahun 2019–2024 49
Tabel 2-9 Potensi Kebakaran Setiap Kecamatan di Kabupaten Katingan 51
Tabel 2-10 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 52
Tabel 2-11 Perkembangan Jumlah Penduduk Katingan Menurut Kelompok Umur Tahun 2023–2024 53
Tabel 2-12 Distribusi dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2024 53
Tabel 2-13 Proyeksi Demografi Kabupaten Katingan Tahun 2025 - 2029 54
Tabel 2-14 Indikator Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 58
Tabel 2-15 Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020-2024 69
Tabel 2-16 Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020-2024 70
Tabel 2-17 Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2021–2024 74
Tabel 2-18 Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 79
Tabel 2-19 Capaian i–Bangga kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 80

Tabel 2-20 Perkembangan Indikator Komponen IPA Kabupaten Katingan Tahun 2024 80
Tabel 2-21 Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 . 82
Tabel 2-22 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 83
Tabel 2-23 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 85
Tabel 2-24 Kategori Inovasi Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 88
Tabel 2-25 Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Katingan Tahun 2019 – 2024 94
Tabel 2-26 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 94
Tabel 2-27 Persentase Penduduk Mengakses Internet/Telekomunikasi di Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 95
Tabel 2-28 Indeks Infrastruktur Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 95
Tabel 2-29 Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2023 96
Tabel 2-30 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2020 – 2024 97
Tabel 2-31 Inflasi Kota Palangkaraya dan Kota Sampit Tahun 2020 – 2024 100
Tabel 2-32 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku 102
Tabel 2-33 Angka Kriminalitas Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 107
Tabel 2-34 Indeks Daya Saing Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 109
Tabel 2-35 Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022–2024 110
Tabel 2-36 Capaian Indikator Kinerja Kunci *Outcome* Tahun 2020 – 2024 112
Tabel 2-37 Gambaran Kondisi Realisasi APBD Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 123
Tabel 2-38 Gambaran Kondisi Anggaran APBD Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 124
Tabel 2-39 Gambaran Capaian Realisasi APBD Terhadap Target APBD Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 124
Tabel 2-40 Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 126
Tabel 2-41 Neraca Daerah Kabupaten Katingan (Dalam Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2024 128
Tabel 2-42 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 129
Tabel 2-43 Definisi dalam Analisis Rasio Keuangan 129

Tabel 2-44 Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2030 138
Tabel 2-45 Transformasi dan Arah Kebijakan RPJMN 2025–2029 163
Tabel 2-46 Isu Strategis Nasional 166
Tabel 2-47 Analisis Isu Strategis Daerah 178
Tabel 2-48 Penurunan GRK Kumulatif 192
Tabel 3-1 Penyusunan Misi Definitif Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 200
Tabel 3-2 Misi dan Pokok–Pokok Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 204
Tabel 3-3 Komparasi Visi dan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, dan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 205
Tabel 3-4 Visi, Slogan, Tujuan, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 207
Tabel 3-5 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 211
Tabel 3-6 Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 dengan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 218
Tabel 3-7 Perbandingan Target Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dengan Target Sasaran Ekonomi Makro RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029 220
Tabel 3-8 Penahapan Pembangunan Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 224
Tabel 3-9 Misi dan Arah Kebijakan RPJPD Tahap 1 Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 233
Tabel 3-10 Proyeksi Demografi Klaster Palangka Raya Tahun 2025–2045 237
Tabel 3-11 Arah Kebijakan Kewilayahan Klaster Palangka Raya Tahun 2025–2045 238
Tabel 3-12 Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 257
Tabel 3-13 Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan 264
Tabel 3-14 Program Nomenklatur Kabupaten Katingan 310
Tabel 3-15 Komparasi Program Prioritas RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, dan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 322

Tabel 3-16 Strategi Pembangunan Kepala Daerah.....326
Tabel 3-17 Kegiatan Prioritas Utama 345
Tabel 3-18 Program Strategis Nasional (ProSN) 351
Tabel 3-19 Program Dukungan Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029.....365
Tabel 4-1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 .373
Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Katingan 435
Tabel 4-3 Perbandingan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Katingan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Katingan 438
Tabel 4-4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Katingan 444
Tabel 4-5 Indikator Kinerja Kunci *Outcome* Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 450
Tabel 5-1 Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029 490
Tabel 5-2 Jenis Forum Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029 491

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2-1 Jumlah Hari Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Katingan Tahun 2024 27
Grafik 2-2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah 37
Grafik 2-3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah 38
Grafik 2-4 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah 40
Grafik 2-5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 42
Grafik 2-6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2023 43
Grafik 2-7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 46
Grafik 2-8 Komparasi Dinamika Indeks Risiko Bencana Kabupaten Katingan dengan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020–2024 46
Grafik 2-9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024 56
Grafik 2-10 Indeks Gini Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024 57
Grafik 2-11 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024 59
Grafik 2-12 PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 59
Grafik 2-13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024 60
Grafik 2-14 IPM Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 61
Grafik 2-15 Usia Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 62
Grafik 2-16 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 63
Grafik 2-17 Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 63
Grafik 2-18 Usia Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 64
Grafik 2-19 *Stunting* di Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 65
Grafik 2-20 Persentase Balita dengan Gizi Buruk Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 66

Grafik 2-21 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 67
Grafik 2-22 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 67
Grafik 2-23 Cakupan Kepersertaan JKN di Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 .68
Grafik 2-24 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 71
Grafik 2-25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024.....72
Grafik 2-26 Skor Literasi dan Numerasi Kabupaten Katingan Tahun 2021–2024 73
Grafik 2-27 Skor Literasi dan Numerasi SMP Kabupaten Katingan Tahun 2021–2024 74
Grafik 2-28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2024.....76
Grafik 2-29 Perbandingan IKG Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020–2024 81
Grafik 2-30 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 83
Grafik 2-31 Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 84
Grafik 2-32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten KatinganTahun 2020–2024 87
Grafik 2-33 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 89
Grafik 2-34 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Katingan,.....89
Grafik 2-35 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Miliar Rupiah) Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 91
Grafik 2-36 Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 92
Grafik 2-37 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 97
Grafik 2-38 Rata-rata Nilai IDM Kabupaten Katingan Tahun 2020-2024.....98
Grafik 2-39 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024 99
Grafik 2-40 PDRB ADHB dan PDRB ADHK (miliar rupiah) Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 101
Grafik 2-41 Indeks Reformasi Hukum Tahun 2021-2023 103
Grafik 2-42 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Katingan Tahun 2021-2024 105

Grafik 2-43 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024 106
Grafik 2-44 Pengukuran IDSD Kabupaten Katingan Tahun 2022–2024 108
Grafik 2-45 Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020–2024.....126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 10
Gambar 2-1 Komoditas Unggulan Kabupaten Katingan 29
Gambar 2-2 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya (Ha) 35
Gambar 2-3 Peta Potensi Banjir 48
Gambar 2-4 Peta Perkiraan Dampak dan Risiko Lahan Kebakaran 50
Gambar 2-5 Struktur Ekonomi Kabupaten Katingan Tahun 2024 101
Gambar 2-6 Kerangka Indeks Daya Saing Daerah 108
Gambar 2-7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) 163
Gambar 3-1 Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 . 195
Gambar 3-2 Visi Jangka Menengah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 197
Gambar 3-3 Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029. 202
Gambar 3-4 Huma Betang Katingan sebagai Simbol Rumah Besar Asa Pembangunan Jangka Menengah Daerah 217
Gambar 3-5 Penahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Katingan 221
Gambar 3-6 Penahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan.. 222
Gambar 3-7 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Katingan Tahun 2019–2039 235
Gambar 3-8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Katingan Tahun 2019–2039 .. 236
Gambar 3-9 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Katingan Tahun 2019–2039 237
Gambar 3-10 Zonasi Pembangunan Kabupaten Katingan 248
Gambar 3-11 Zona Utara Pembangunan Kabupaten Katingan 249
Gambar 3-12 Zona Tengah Pembangunan Kabupaten Katingan 250
Gambar 3-13 Zona Selatan Pembangunan Kabupaten Katingan 251
Gambar 3-14 Arah Pengembangan Koridor Infrastruktur Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 253
Gambar 3-15 Peta Konektivitas Transportasi Kabupaten Katingan 255
Gambar 3-16 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Ekowisata dan Sejarah Bukit Batu Kasongan dan Sekitarnya 335
Gambar 3-17 Lokasi Objek Wisata Danau Mare 336

Gambar 3-18 Peta Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Ekowisata Punggualas Sebangau dan Sekitarnya 337
Gambar 3-19 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Koridor Wisata Petualangan 338



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sekaligus tonggak awal dari serangkaian upaya mewujudkan cita–cita jangka panjang daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045: **Kabupaten Katingan yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Terbuka.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Sementara itu, dokumen perencanaan perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 260 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 263 ayat 3 (tiga), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Kemudian, berdasarkan waktu penetapan pelaksanaan dokumen RPJMD, pasal 264 ayat (1), RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, di mana pada ayat (4) dinyatakan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Pembangunan daerah sendiri merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus juga merupakan bagian dari pelaksanaan

pemerintahan daerah. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

RPJMD menekankan pentingnya menerjemahkan visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses akan menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut:

1. Pendekatan politis yang memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing–masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda–agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
2. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan atas–bawah (*top down*) dan bawah–atas (*bottom up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas–bawah dan bawah–atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Selain itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut:

1. Pendekatan holistik–tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan terfokus pada kebijakan yang relevan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2. Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah.
3. Pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan pembangunan di lapangan.

Adapun dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 ialah visi pembangunan nasional tahun 2025–2029, yaitu **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi tersebut selanjutnya diejawantahkan dalam 8 (delapan) misi pembangunan yang disebut Asta Cita. Kedelapan misi pembangunan nasional tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 (delapan) prioritas nasional pembangunan jangka menengah dan 17 program prioritas nasional. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta indikator dan target pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan dirumuskan selaras dan mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi.

Selanjutnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029. Sebagian substansi Renstra merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa di samping RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 menjabarkan visi, misi, dan program bupati, dan wakil bupati terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025–2029.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan 2025–2029 dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan–peraturan sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);

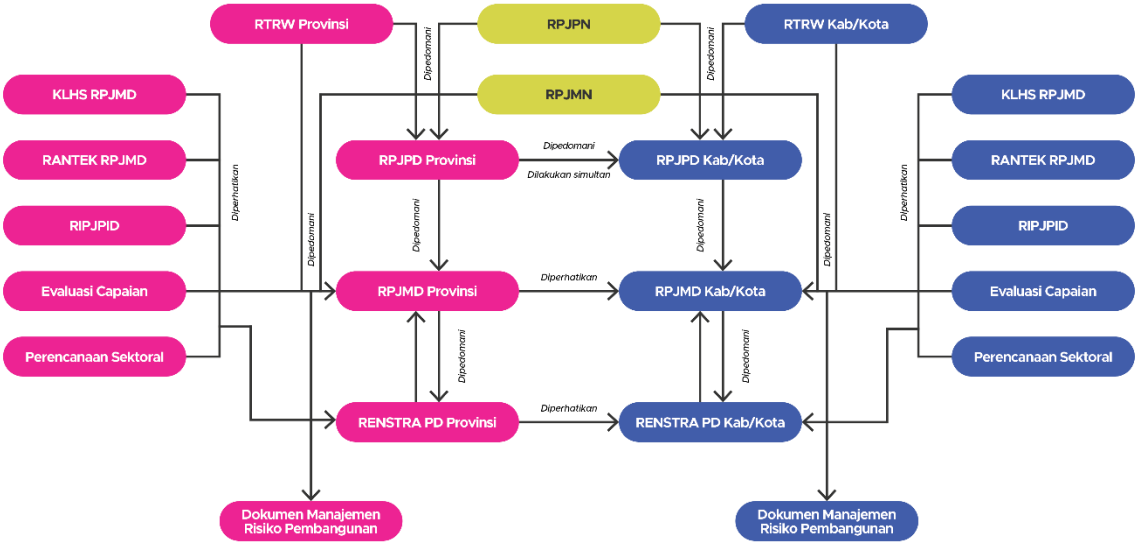
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Nomor 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 57);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 98);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76).

1.3 Hubungan Antardokumen

Secara umum, RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 adalah turunan dari RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 berupa operasionalisasi tahap 1 dari RPJPD.

Dokumen RPJMD ini juga memuat mandat dari berbagai dokumen perencanaan lainnya mulai dari tingkat nasional, yaitu RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029. Dalam penyusunannya, dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 memperhatikan dokumen RPJPD dan RPJMD di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Katingan. Menurut proses *cascading*, posisi RPJMD dalam sistem perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:



Gambar 1-1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD menjadi dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan program pembangunan selama 5 (lima) tahun, proses perencanaannya harus berpedoman pada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Di dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun rencana strategis yang berdurasi 5 (lima) tahun dan rencana kerja yang berdurasi 1 (satu) tahun.

1.3.1 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025–2029

Dokumen RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025–2029 sehingga pembangunan yang dijalankan dapat berkontribusi dalam mencapai target perencanaan yang ditetapkan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah, terdapat beberapa isu kewilayahan yang dianggap strategis untuk wilayah Kalimantan, yaitu:

a) Degradasi lingkungan karena aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

b) Minimnya hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA.
c) Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar.
d) Belum optimalnya pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal, dan terluar
e) Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM karena terbatasnya kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan.
f) Masih rentannya ketahanan air, energi, dan pangan.
g) Belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah.

Tema pembangunan untuk wilayah Kalimantan Tengah pada tahun 2025–2029 adalah "Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional". Berdasarkan dengan tema tersebut, ditentukan target–target indikator pembangunan untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada periode RPJMD tahun 2025–2029 yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1-1 Target Indikator Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029

Tahun	Rata-Rata LPE (%)	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	Share PDRB (%)	Kemiskinan (%)
2025	6,4	6,4	85,3	1,0	4,11–4,61
2029		7,3	124,0	1,0	2,43–3,43

Tahun	Gini Ratio	Indek Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	0,311–0,315	0,55	76,00	76,34	3,32–3,91
2029	0,242–0,246	0,58	90,18	77,01	2,92–,3,61

Sumber : RPJMN Tahun 2025–2029

Dalam rangka mencapai target indikator pembangunan yang telah ditentukan, terdapat *highlight* arah kebijakan/indikasi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada tabel berikut.

Tabel 1-2 *Highlight* Arah Kebijakan/Indikasi Intervensi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Agro Industri Kalimantan Tengah: Kabupaten Kotawaringin Barat; Kabupaten Kotawaringin Timur;	Pengembangan pusat-pusat industri dan hilirisasi industri sumber daya hayati (sawit dan kelapa) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, melalui: • Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas bahan baku komoditas sawit dan kelapa, dengan *output:* penetapan kriteria standar *Crude Palm Oil* (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit dan peralatan fasilitas laboratorium/*workshop*/layanan industri hasil perkebunan; penyebaran benih unggul; peningkatan riset dan inovasi kelapa; peningkatan kualitas dan kuantitas produksi benih tanaman

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	perkebunan; penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan pertanian regeneratif • Pengembangan industri oleokimia dan *biofuel* berbasis minyak sawit disertai *rebranding* dan promosi produk sawit berkelanjutan • Peningkatan diversifikasi dan daya saing produk, dengan *output*: pengembangan produk hilir dan restrukturisasi mesin/peralatan perkebunan industri pengolahan kelapa, fasilitasi sertifikasi produk, disertai bimbingan teknis pengembangan produk dan kemasan • Peningkatan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) pengolahan kelapa dan investasi industri pengolahan kelapa, dengan *output*: pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro dan keberlanjutan investasi disertai restrukturisasi mesin/peralatan industri
Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah: **Kota Palangkaraya;** **Kabupaten Kapuas;** **Kabupaten Barito Utara;**	Pengembangan Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah khususnya untuk komoditas Gabus, Nila, dan Patin di Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Utara, melalui: • Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap (PUD) • Penyediaan input produksi perikanan • Peningkatan kualitas, mutu dan daya saing hasil perikanan • Penguatan kapasitas dan perlindungan terhadap masyarakat, kelembagaan dan kewirausahaan perikanan
Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah: **Kabupaten Pulang Pisau;** **Kabupaten Kapuas;**	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang didukung Kawasan Transmigrasi Lamunti–Dadahup di Kabupaten Kapuas, melalui: • Pengembangan kawasan secara geospasial, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan infrastruktur • Pengembangan kawasan secara *on farm*, dengan *output*: penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian • Pengembangan kawasan secara *off farm* dengan *output*: penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani
Kawasan Transmigrasi (KT): **Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas,** **Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) di Kabupaten Sukamara;** **Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat**	Pengembangan Kawasan Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas, Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) di Kabupaten Sukamara, serta Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui: • Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman. • Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: pengadaan bantuan sarana produksi pertanian • Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi • Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: pengelolaan perpindahan dan penempatan transmigran

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Konversi Kalimantan Tengah: Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat; Taman Nasional Sebangau Kota Palangka Raya	Pengembangan wisata berkelanjutan berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya dengan pelibatan mitra lokal, melalui: • Pengelolaan wisata alam secara berkelanjutan , dengan *output*: pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata alam, peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), dan fasilitasi usaha ekonomi produktif • Pelibatan peran masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, dengan output: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kompetensi masyarakat pemanfaat kawasan konservasi
Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan *(Heart of Borneo)* Kabupaten Katingan; Kabupaten Gunung Mas; Kabupaten Murung Raya; Kabupaten Barito Utara	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan Tengah termasuk Heart of Boneo disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui: • Pengendalian kebakaran serta rehabilitasi hutan dan lahan, dengan output: penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) • Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan output: pemulihan dan restorasi lahan gambut, pengelolaan data informasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), dan peningkatan layanan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut • Peningkatan kualitas ekosistem mangrove, dengan output: pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove, penguatan data dan informasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (RPPE) Mangrove • Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan output: inventarisasi dan verifkasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan • Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi
Provinsi Kalimantan Tengah	Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya mineral seperti bauksit dan tembaga sesuai potensi daerah, melalui: • Tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri, dengan output: rekomendasi keprospekan sumber daya mineral dan rekomendasi kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral • Pengembangan industri hilir/antara olahan sumber daya mineral, dengan output: riset dan inovasi hilirisasi sumber daya alam tidak terbarukan, kebijakan penguatan industri logam, monitoring dan evaluasi perkembangan industri smelter/pemurnian/pengolahan logam dasar beserta turunannya • Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular, dengan output: fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi industri smelter logam bukan besi dan turunannya dan peningkatan manajemen energi dan air serta pemanfaatan EBT *(Renewable Energy)* dalam rangka efisiensi sumberdaya industri
Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui:

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
	• Penguatan konektivitas jalan, udara, darat, dan laut, dengan output: pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, pembangunan dan pengembangan bandara termasuk Bandara Murung Raya dan Bandara Kuala Kurun • Pembuatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan output: pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan jalan koridor logistik, dan Pembangunan jembatan koridor logistik khususnya penuntasan Missing Link Jalan Lintas Tengah Kalteng-Kalbar -Tumbang Samba
Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, melalui: • Revitalisasi prasarana pendidikan, dengan output: pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan • Pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan output: pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling* di Provinsi Kalimantan Tengah disertai fasilitasi keikutsertaan diklat dan pendidikan kecakapan wirausaha • Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan output: peningkatan kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri • Penguatan pendidikan menengah vokasi, dengan output: pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi pusat keunggulan, pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan, pendampingan peningkatan mutu, dan pengembangan pengajaran berbasis pabrik *(teaching factory)*
Provinsi Kalimantan Tengah	Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal, melalui: • Penyediaan air baku kawasan sulit air, bencana kekeringan, dan kawasan terpencil, dengan output: pembangunan tampungan air dan prasarana air baku • Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal, dengan *output*: pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rehabilitasi/peningkatan prasarana irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal
Provinsi Kalimantan Tengah	Peningkatan konektivitas tenaga listrik disertai pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan digitalisasi, melalui: • Pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, dengan output: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu • Pembangunan dan peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi terbarukan, dengan output: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) • Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk • Perluasan jaringan telekomunikasi, akses internet cepat, dan layanan penyiaran digital disertai pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan digitalisasi masyarakat

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui: • Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan output: peningkatan kompetensi Rumah Sakit (RS) dalam layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi (KJSU) dan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) untuk pelayanan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal di RS sesuai standar; dan pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk RS • Pengenbangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan output: pemenuhan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar, peningkatan keterampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar, pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar, dan revitalisasi posyandu dsn pemberdayaan masyarakat di puskesmas pembantu • Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan output: penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan pada Fasyankes Primer
Provinsi Kalimantan Tengah	Pengembangan permukiman dan pemenuhan akses air minum, sanitasi aman, serta pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan inklusif, melalui: • Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir, dengan output: pengembangan dan pengelolaan SPAM • Peningkatan utilitas dasar perdesaan, dengan output: peningkatan sistem pengelolaan persanpahan berbasis masyarakat dan setempat skala individu • Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, dengan output pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, sistem pengelolaan persampahan skala regional, skala kota, skala kawasan, dan berbasis masyarakat • Fasilitasi pembangunan rumah baru, dengan output: bantuan pembangunan rumah swadaya dan bantuan rehabilitasi rumah keluarga penerima manfaat (KPM)
Provinsi Kalimantan Tengah	Penguatan pencegahan dan percepatan panurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular, melalui: • Pengendalian penyakit malaria, dengan output: pengadaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria; pembinaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; fasilitasi dan pembinaan pencegahan dan pengendalian malaria • Penguatan intervensi spesifik dan sensitif stunting, dengan output: penerapan konvergensi Pencegahan dan penurunan stunting di daerah, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi, balita, ibu, dan bayi baru lahir, fasilitasi dan pembinaan: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Implementasi 5 Pilar: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan penganekaragaman pangan

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Provinsi Kalimantan Tengah	Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), melalui: • Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan output: sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik lnduk) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial • Penyaluran bantuan sosial adaptif dan penguatan JKN, dengan output: penduduk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah, penyediaan elpiji 3kg yang tepat sasaran • Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan output: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, tenaga kerja mandiri (TKM) pemula dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha

Sumber : RPJMN Tahun 2029–2025

1.3.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah provinsi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029. Adapun visi dan misi yang disusun di tingkat kabupaten ditujukan untuk menjawab tantangan berupa isu strategis yang juga berangkat dari isu di tingkat regional Kalimantan Tengah, baik dimuat dalam RPJPD maupun KLHS RPJMD Kalimantan Tengah. Dengan demikian, kesinambungan pembangunan dan bagaimana mandat pembangunan diamanahkan ke kabupaten dapat terlihat.

1.3.3 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045

RPJPD Kabupaten Katingan menjadi dokumen perencanaan jangka panjang selama periode 20 tahun yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) periode jangka menengah. Adapun RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari operasionalisasi Tahap 1 RPJPD dengan tema **“Pemantapan Fondasi”**. Dokumen RPJMD mencakup kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,

program OPD dan lintas OPD, serta program kewilayahan dengan rencana kerja yang mengacu pada regulasi dan pendanaan secara indikatif. RPJMD kemudian diuraikan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi panduan untuk penyusunan rencana strategis OPD (Renstra OPD) Kabupaten Katingan.

RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 merupakan RPJMD periode pertama dari RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, prioritas utama RPJMD periode pertama ini adalah **Penguatan Modal Dasar Transformasi Kabupaten Katingan**. Pada tahap awal pembangunan, fokus diberikan pada modal dasar transformasi, terutama di sektor pendidikan. Selain itu, peningkatan modal transformasi di bidang kesehatan juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah juga perlu mengembangkan rencana perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi bagi mereka yang belum aktif secara ekonomi.

Tabel 1-3 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 Berdasarkan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045

Misi	Arah Kebijakan
Mewujudkan transformasi sosial untuk pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	1. Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan 2. Peningkatan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan 3. Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat terhadap perlindungan sosial
Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif	1. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja 2. Pengembangan kawasan strategis pariwisata 3. Optimalisasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta pariwisata 4. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha 5. Peningkatan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptif	Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi dan peningkatan kolaborasi
Mewujudkan kondusivitas dan stabilitas daerah serta kepemimpinan daerah	Peningkatan kolaborasi dalam mendukung kondusivitas wilayah dan stabilitas ekonomi daerah
Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	1. Perlindungan budaya, nilai dan tradisi budaya masyarakat 2. Peningkatan pelayanan akses dasar pembangunan anak, keluarga dan kesetaraan gender 3. Penyiapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim 4. Peningkatan tata kelola perlindungan lingkungan hidup 5. Peningkatan infrastruktur sumber daya air

Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan	Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten
Mewujudkan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang berkualitas	1. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi berupa infrastruktur jalan, transportasi, air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya yang menunjang keunggulan wilayah. 2. Pembangunan perumahan dan permukiman yang terjangkau
Mewujudkan keberlanjutan pembangunan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah

Sumber : RPJPD Kabupaten Katingan 2025–2045

1.3.4 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dengan RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019–2039

Rencana tata ruang dan RPJMD saling terkait dan tidak dapat dipisahkan mengingat rencana tata ruang menjadi dasar utama dalam manajemen pemanfaatan ruang di daerah. Integrasi antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak–hak dasar masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan itu, salah satu acuan utama penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan Tahun 2019–2039. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Katingan akan mengikuti struktur ruang dan pola ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta memperhatikan aspek lingkungan dan harmoni antara manusia dan alam.

Berdasarkan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan Tahun 2019–2039, perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten Katingan terdiri dari:

1) Perencanaan pusat–pusat kegiatan yang terdiri dari pusat kegiatan lokal (PKL) Kota Kasongan; Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
2) Rencana jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan sistem transportasi, rencana sistem pengembangan jaringan energi, rencana sistem pengembangan jaringan telekomunikasi, rencana sistem pengembangan sumber daya air, dan rencana sistem pengembangan prasarana lingkungan.

Selain struktur ruang, terdapat pula pola ruang wilayah Kabupaten Katingan yang terdiri dari

1) Rencana Kawasan Lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan lindung setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam.

2) Rencana Kawasan Budidaya meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan konversi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan/tanaman tahunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan industri, pariwisata, perumahan dan permukiman, kawasan pertahanan keamanan, kawasan pesisir dan laut, pengembangan hutan kota, dan pengembangan kawasan perkotaan.

1.3.5 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Katingan

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) beserta riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Periode berlaku RIPJPID ialah selama 5 (lima) tahun mengikuti jangka waktu RPJMD. Penyusunannya sendiri didasarkan pada program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk mempercepat ketercapaian target program.

RIPJPID disusun dengan tujuan untuk (1) menjelaskan gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi daerah, (2) menetapkan dan menjelaskan tema prioritas riset dan inovasi di daerah, (3) menetapkan dan menjelaskan tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah, (4) menetapkan dan menjelaskan kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah, (5) menetapkan dan menjelaskan strategi riset dan inovasi di daerah, dan (6) menetapkan dan menjelaskan peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi daerah Kabupaten Katingan yang relevan, terpadu, dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya di Kabupaten Katingan, utamanya RPJMD.

Melalui dokumen ini, riset dioptimalkan untuk mendukung kebijakan yang efektif guna mencapai tujuan pembangunan dan kebijakan publik yang tepat sasaran. Adapun fungsi riset di daerah dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 5 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023. Ditinjau dari fungsi risetnya, penelitian sendiri memiliki beberapa tujuan utama, yakni (1) meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah; (3) memberdayakan masyarakat dan mengaktifkan partisipasinya; (4) meningkatkan daya saing daerah; dan (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari tujuan ini, maka telah

semestinya riset dan inovasi menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan publik, salah satunya adalah menjadi katalis terlaksananya program prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Katingan.

1.3.6 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Katingan 2025–2029 menjadi sumber kajian permasalahan dan isu daerah, serta aspirasi pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dari daerah. Sinergisme antara RPJMD dan KLHS RPJMD sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya mencapai tujuan ekonomi dan sosial, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Integrasi KLHS dalam proses perencanaan RPJMD membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan, kohesi sosial, serta mendorong praktik pembangunan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan 2025–2029 ini ialah menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah Kabupaten Katingan ke tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
2. Menyediakan pedoman bagi prioritas pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun mendatang;
3. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
4. Menyediakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika RPJMD Tahun 2025–2029

Penyusunan RPJMD mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan data statistik dan gambaran umum kondisi saat ini di daerah dengan tujuan untuk memahami situasi di berbagai sektor dan aspek pembangunan yang akan diperbaiki melalui kebijakan dan program daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Adapun pembagian urusannya diuraikan ke dalam empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Selain itu, bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah dan ditutup dengan jabaran mengenai permasalahan dan isu strategis daerah yang dikurasi dari berbagai dokumen pembangunan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan penjelasan tentang visi dan misi dari kepala daerah yang diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran. Lebih lanjut, dimuat pula strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program perangkat daerah untuk periode lima tahun ke depan dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah serta indikator program, target, dan pagu indikatifnya. Pada bagian kedua bab ini terdapat uraian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang didukung menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis aspek geografi dan demografi dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi geografis dan kependudukan di suatu wilayah. Kedua aspek tersebut menjadi informasi dasar yang penting untuk mengenali dan menggali berbagai potensi sumber daya alam maupun manusia untuk merencanakan pembangunan wilayah yang maju dan berkelanjutan. Oleh karena itu, berikut dijabarkan lebih rinci terkait dengan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan demografi di Kabupaten Katingan.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Dalam konteks pembangunan, posisi dan peran strategis suatu daerah merujuk pada letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi strategis dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, yaitu:

1. Terletak di jalan trans Kalimantan, sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Katingan pada masa yang akan datang.
2. Kabupaten Katingan yang secara geografis berdekatan dengan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah penyangga atau hinterland bagi pengembangan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Implikasi tidak langsung mengakibatkan Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan, menjadi wilayah yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi pola dan jalur pergerakan kegiatan penduduk menuju ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

Dilihat dari Peta Regional Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan terletak di tengah-tengah wilayah provinsi ini sehingga hal ini menjadikan Kabupaten Katingan memiliki posisi geostrategis. Posisi geostrategis ini akan meningkatkan keunggulan komparatif apabila Pelabuhan Pegatan-Mendawai di Kecamatan Katingan Kuala sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional dan Bandar Udara Perintis Tumbang Samba di Kecamatan Katingan Tengah dikembangkan lagi. Di samping keberadaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Bandara Perintis, pembangunan Jalan Trans Kalimantan yang melewati wilayah tengah-utara Kabupaten Katingan menuju Batas Kalimantan Barat menjadi potensi besar untuk pengembangan wilayah Kabupaten Katingan dan meningkatkan potensi posisi geostrategis. Hal tersebut yang kemudian akan meningkatkan pengembangan konektivitas darat dengan mendorong pengembangan jaringan

transportasi perdagangan antar kabupaten/kota yang juga akan berdampak pada perkembangan ekonomi Kabupaten Katingan.

Ditinjau dari RTRW Nasional Tahun 2008-2028, Kabupaten Katingan berperan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan keanekaragaman hayati Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka dan Taman Nasional Sebangau dan kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*). Pada RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, Kabupaten Katingan berperan sebagai kawasan strategis untuk pengembangan perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa), pengembangan agropolitan, pengembangan minapolitan, dan pengembangan peternakan.

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Katingan merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota kabupaten yang terletak di Kasongan, wilayah tengah dari kabupaten yang bentuk geografisnya membujur panjang dari pesisir Laut Jawa di selatan hingga Bukit Raya di utara. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002, Kabupaten Katingan dibentuk bersama dengan beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur. Permendagri No. 137 Tahun 2017 mencatat luas wilayah Kabupaten Katingan sebagai 17.500 km^2, sedangkan Kepmendagri Nomor 100.1.1.6117 Tahun 2022 memperbarui luas wilayah ini menjadi 20.382,259 km^2. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039, luas wilayah administrasi Kabupaten Katingan adalah 20.393,86 km^2 atau 2.039.386 hektar. Berdasarkan penataan administrasi wilayah, Kabupaten Katingan berbatasan dengan daerah–daerah berikut:

a. **Sebelah Utara:** berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat.
b. **Sebelah Barat:** berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.
c. **Sebelah Timur:** berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangkaraya.
d. **Sebelah Selatan:** berbatasan dengan Laut Jawa.

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Katingan terletak antara 0°20' sampai 3°38' Lintang Selatan dan 112°00' sampai 113°45' Bujur Timur. Kecamatan terluas di Kabupaten Katingan adalah Kecamatan Petak Malai dengan luas 2.997,93km^2 yang mencakup sekitar 14,70 persen dari total luas wilayah Kabupaten Katingan. Sementara itu, kecamatan terkecil adalah Kecamatan Pulau Malan dengan luas 649,30 km^2 atau 3,18 persen dari luas wilayah Kabupaten Katingan.

Tabel 2-1 Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Katingan

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase (%)	Kelurahan	Desa
1	Katingan Kuala	1.483,71	7,28	2	14
2	Mendawai	2.392,06	11,73	0	7
3	Kamipang	2.854,34	14,00	0	9
4	Tasik Payawan	808,26	3,96	0	8
5	Katingan Hilir	665,80	3,26	2	6
6	Tewang Sangalang Garing	900,34	4,43	1	9
7	Pulau Malan	649,30	3,18	0	14
8	Katingan Tengah	1.635,47	8,02	1	15
9	Sanaman Mantikei	1.413,48	6,93	0	14
10	Petak Malai	2.997,93	14,70	0	7
11	Marikit	2.123,48	10,41	0	18
12	Katingan Hulu	1.475,30	7,23	1	22
13	Bukit Raya	994,22	4,88	0	11
Katingan		20.393,69	100	7	154

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Katingan, 2024

Kabupaten Katingan terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan dan 154 desa. Wilayah ini dialiri oleh Sungai Katingan sepanjang 650 km yang mengalir dari utara ke selatan dan memiliki banyak anak sungai. Wilayah Kabupaten Katingan terbagi menjadi dua kawasan besar: **bagian selatan** adalah kawasan pasang surut dengan potensi pertanian tanaman pangan, sedangkan **bagian utara** adalah kawasan non pasang surut dengan potensi lahan perkebunan.

2.1.1.1.3 Topografi Wilayah

Secara topografi, Kabupaten Katingan terbagi menjadi beberapa bagian:

a. Bagian Selatan adalah daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut, dengan ketinggian 0–50 meter dari permukaan laut.
b. Bagian Tengah adalah dataran dengan ketinggian 50–200 meter dari permukaan laut.

c. Bagian Utara adalah perbukitan dengan ketinggian 200–1.500 meter dari permukaan laut.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Katingan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 10–50 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan ketinggian wilayah per kecamatan, Kecamatan Bukit Raya memiliki ketinggian 50 meter di atas permukaan laut, sementara Kecamatan Katingan Kuala adalah dataran terendah dengan ketinggian 13 meter di atas permukaan laut.

Tabel 2-2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota di Kabupaten Katingan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL (m)	Jarak ke Ibukota (km)
Katingan Kuala	Pegatan	13,00	365
Mendawai	Mendawai	15,00	317
Kamipang	Baun Bango	17,00	90
Tasik Payawan	Petak Bahandang	19,00	60
Katingan Hilir	Kasongan	22,00	0
Tewang Sangalang Garing	Pendahara	32,00	23
Pulau Malan	Buntut Bali	27,00	40
Katingan Tengah	Tumbang Samba	30,00	97
Sanaman Mantikei	Tumbang Kaman	32,00	115
Petak Malai	Tumbang Baraoi	40,00	230
Marikit	Tumbang Hiran	40,00	180
Katingan Hulu	Tumbang Sanamang	40,00	219
Bukit Raya	Tumbang Kajamei	50,00	291

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2024

2.1.1.1.4 Hidrologi

Kabupaten Katingan dilintasi oleh Sungai Katingan yang memiliki panjang 650 km. Sungai ini bermuara di Laut Jawa dan melewati hampir semua kecamatan di kabupaten tersebut, seperti Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai, dan Katingan Kuala.

Selain sungai utama tersebut, wilayah Kabupaten Katingan juga dialiri oleh puluhan anak sungai dan danau. Beberapa anak Sungai Katingan yang dapat dilayari antara lain:

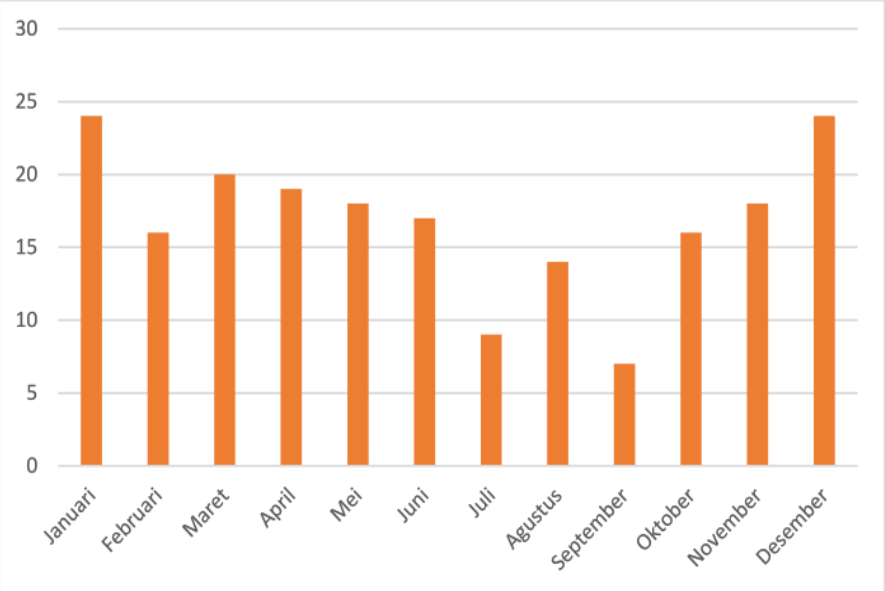
1. Sungai Kalanaman, dengan panjang sekitar 35 km;
2. Sungai Samba, dengan panjang sekitar 100 km;
3. Sungai Hiran, dengan panjang sekitar 75 km;
4. Sungai Bemban, dengan panjang sekitar 18 km;
5. Sungai Sanamang, dengan panjang sekitar 23 km;
6. Sungai Mahop, dengan panjang sekitar 13 km;

7. Sungai Bulan, dengan panjang sekitar 29 km;
8. Sungai Kamipang, dengan panjang sekitar 12 km.

Sungai-sungai dan danau-danau tersebut biasanya menjadi jalur penghubung antar perkampungan atau pedukuhan.

2.1.1.1.5 Klimatologi

Pada tahun 2024, rata-rata suhu udara di Kabupaten Katingan berada pada kisaran 28,50°C hingga 30,50°C. Lalu, rata-rata kelembaban udara Kabupaten Katingan tahun 2024 berada pada kisaran 66,40 hingga 71,35 persen. Sementara itu, curah hujan tertinggi di Kabupaten Katingan tahun 2024 terjadi pada Bulan Maret sebesar 667,00 mm^3 dengan jumlah hujan terbanyak terjadi pada Bulan Januari dan Desember 2024 sebanyak 24 hari. Data mengenai suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, dan jumlah hujan diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.



Grafik 2-1 Jumlah Hari Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Katingan Tahun 2024

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Pada tahun 2020, sekitar ±60 persen wilayah Kabupaten Katingan masih berupa hutan belukar dan hutan lebat. Secara keseluruhan tata guna lahan di wilayah Kabupaten Katingan sebagai berikut:

Tabel 2-3 Luasan Tata Guna Lahan di Kabupaten Katingan

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan lahan kering primer	187.729,38	9,19
2	Hutan lahan kering sekunder	550.006,12	26,93
3	Hutan tanaman	7.217,58	0,35
4	Semak belukar	127.009,19	6,22

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
5	Perkebunan	68.077,45	3,33
6	Pemukiman	3.450,58	0,17
7	Tanah terbuka	40.467,89	1,98
8	Tubuh air	17.027,00	0,83
9	Hutan mangrove sekunder	5.337,10	0,26
10	Hutan rawa sekunder	475.023,29	23,26
11	Semak belukar rawa	251.234,79	12,30
12	Pertanian lahan kering	26.756,89	1,31
13	Pertanian lahan kering campur semak	190.869,11	9,35
14	Sawah	20.042,55	0,98
15	Transmigrasi	1.239,34	0,06
16	Tambang	26.222,84	1,28
17	Rawa	44.288,90	2,17
	Total	2.042.000,00	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan, 2018–2023

2.1.1.1.7 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada pasal 26-31 diatur kewajiban daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Wilayah kota Kasongan sendiri sebagai ibukota Kabupaten Katingan telah ditetapkan mencakup tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan, dan Tewang Sanggalang Garing. Seiring bertambahnya luas wilayah perkotaan ini, maka RTH publik di Kabupaten Katingan yang harus tersedia adalah 8.425,4 ha.

Tabel 2-4 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Katingan Tahun 2019–2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas ruang terbuka hijau (Ha)	9.028	9.028	9.028	9.028	9.028	9.028
Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha)	0,86	25,595	25,595	25,595	25,595	25,595
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	10,498	35,273	35,273	35,273	35,273	35,273

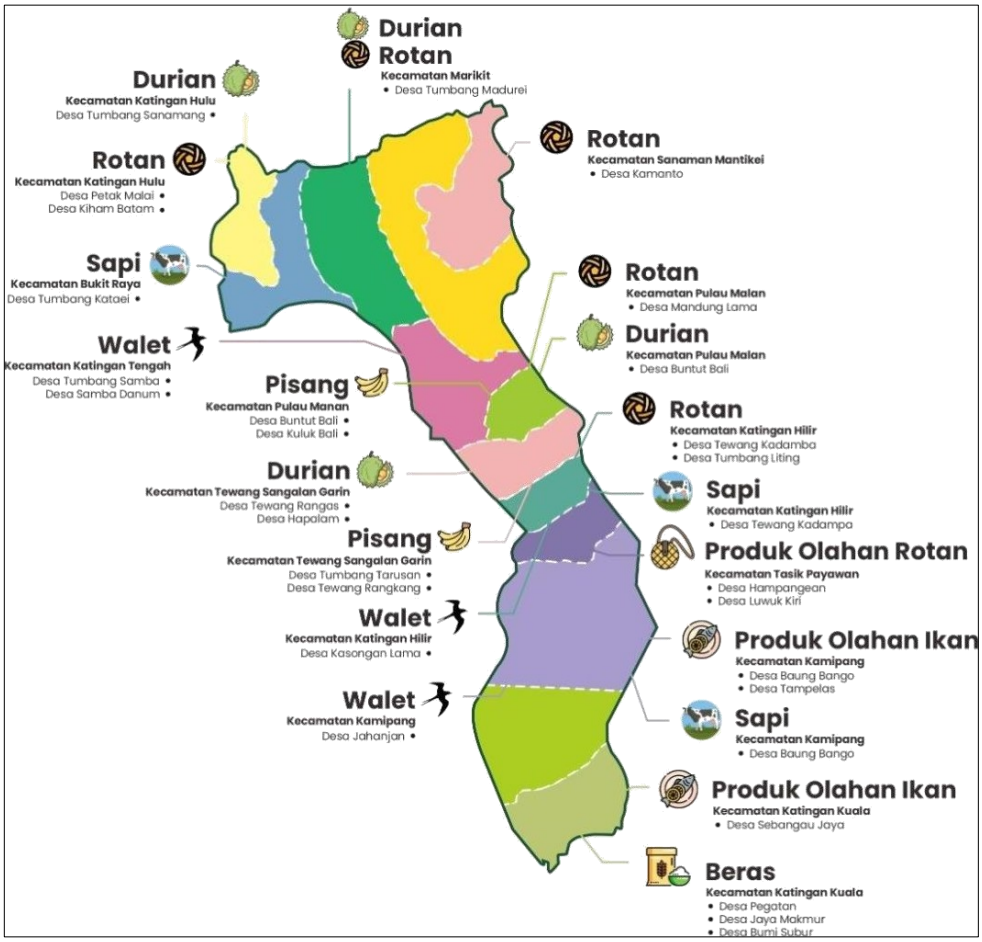
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Katingan, 2025

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Ditinjau dari RTRW Nasional Tahun 2008-2028, Kabupaten Katingan berperan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan keanekaragaman hayati Taman

Nasional Bukit Raya Bukit Baka dan Taman Nasional Sebangau dan kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*). Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, Kabupaten Katingan berperan sebagai kawasan strategis untuk pengembangan perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa), pengembangan agropolitan, pengembangan minapolitan, dan pengembangan peternakan.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039.



Gambar 2-1 Komoditas Unggulan Kabupaten Katingan
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Katingan

Sawit, merupakan salah satu komoditas penting yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Katingan. Areal perkebunan sawit swasta seluas 139.704 ha yang dikelola oleh 12 perusahaan, dan perkebunan sawit swadaya/mandiri seluas 17.168,44 ha yang dikelola oleh 5.878 pekebun swadaya. Inisiatif sawit berkelanjutan merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Katingan, korporasi

sawit swasta dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Pemerintah Kabupaten Katingan dan parapihak melakukan bebagai upaya untuk memperkuat inisiatif sawit berkelanjutan ini, termasuk mendorong sertifikasi RSPO dan ISPO untuk sawit swasta dan memfasilitasi petani swadaya untuk melakukan pendaftaran usaha budidaya sawit mandiri melalui STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya). Karena itu, peningkatan kapasitas parapihak dan memperkuat platform multipihak menjadi agenda penting Pemerintah Kabupaten Katingan dalam memperkuat sawit berkelanjutan.

Rotan, sejak lama merupakan salah satu komoditas andalan Kabupaten Katingan. Rotan asal Katingan merupakan salah satu rotan dengan kualitas terbaik di Pulau Kalimantan. Luas areal rotan asalan di Katingan mencapai 325.000 ha, dengan potensi 7.000 – 8.000 ton per tahun. Sementara di wilayah KPHP Katingan Hulu, terdapat areal rotan asalan seluas 190,118 hektar, dengan potensi produksi sebanyak 593.173 ton, dengan rata-rata panen 3,12 ton/hektar. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Katingan sedang memperkuat kembali posisi rotan sebagai komoditas andalan. Hal ini dilakukan melalui sejumlah kebijakan daerah, alokasi anggaran untuk penguatan kapasitas petani rotan dan strategi pasar melalui pengembangan industri pengolahan rotan di Katingan.

Paludikultur, merupakan budidaya tanaman tanpa drainase pada lahan gambut basah. Kabupaten Katingan mempunyai lahan gambut seluas 725.934 ha. Luas ini mencapai 35,6 persen dari luas Kabupaten Katingan, yakni 2.039.370 ha. Dari luas tersebut, terdapat non kubah gambut seluas 461.693 ha yang bisa digunakan untuk keperluan budidaya paludikultur. Kabupaten Katingan mempunyai kawasan pertanian untuk tanaman pangan seluas 26.691,18 ha dan kawasan hortikultura seluas 102,47 ha. Luas areal padi di Katingan adalah 12.010 ha, dimana total produksi tahun 2023 sebesar 36.292 ton dengan produktivitas 3,021 ton per ha. Pemerintah sudah membangun jaringan irigasi untuk lumbung di Katingan 1. Untuk produksi durian Katingan tahun 2021 sebesar 696,1 ton, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 168,1 ton, dan produksi durian tahun 2023 sebesar 996,1 ton. Sementara itu,produksi pisang tahun 2021 mencapai 950,3 ton, tahun 2022 menurun menjadi540 ton, dan tahun 2023 mencapai 677,5 ton. Penurunan produksi pada tahun 2022 untuk komoditi pisang dan durian tersebut diakibatkan banjir tahun yang terjadi pada tahun 2021 menyebabkan banyak tanaman yang mengalami kematian. Pemanfaatan pisang di Katingan masih berupa buah segar, belum dikembangkan menjadi produk olahan industri.

Hasil Hutan Bukan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan salah satu potensi ekonomi berkelanjutan yang masih bisa terus dikembangkan di Kabupaten

Katingan. Beberapa jenis HHBK yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai komoditas ekonomi penting adalah madu kelulut, bambu, aren, dan minyak atsiri. Lebih dari 80 persen wilayah Kabupaten Katingan merupakan kawasan hutan negara sebagai lahan pengembangan HHBK. Kawasan hutan di Katingan terbagi dalam sejumlah fungsi, terdiri dari kawasan konservasi seluas 451.080 ha (terdiri dari TN Bukit Baka Bukit Raya seluas 126.400 ha dan TN Sebangau dengan luas 324.680 ha); kawasan hutan lindung seluas 58.429,7 ha25; kawasan hutan produksi tetap seluas 495.528,31 ha; hutan produksi terbatas seluas 373.383,45 ha; dan hutan produksi konversi seluas 400.461,30 ha.

Perhutanan Sosial, merupakan salah satu program pengelolaan kawasan hutan negara oleh masyarakat melalui sejumlah skema, termasuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Berbagai potensi ekonomi dan perlindungan lingkungan bisa dilakukan masyarakat lokal melalui Perhutanan Sosial, termasuk produksi hasil hutan bukan kayu (HHNK), jasa lingkungan, dan produksi kayu untuk skema HTR. Sampai tahun 2023, di Kabupaten Katingan terdapat 23 Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) seluas 70.192 ha, 12 Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 17.318 ha, dan 6 Izin Usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHTR) seluas 2.318 ha.21 Selain itu, terdapat 3 usulan baru Perhutanan Sosial yang perizinannya masih berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Restorasi Ekosistem (RE), merupakan salah satu jenis perizinan kehutanan dibawah skema PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan). PBPH RE diberikan untuk untuk membangun kawasan hutan yang memiliki ekosistem penting dan unik. Saat ini terdapat 1 PBPH Restorasi Ekosistem di Kabupaten Katingan, yakni RE yang dikelola oleh PT. Rimba Makmur Utama (RMU). Sedangkan PBPH Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Katingan, khususnya yang berada dalam wilayah KPHK Katingan Hulu, seluas 53.210 ha yang dikelola oleh 4 perusahaan HTI. Namun, sampai tahun 2023, keempat perusahaan HTI ini kondisinya tidak aktif atau mati suri.

Taman Nasional, TN Sebangau merupakan salah satu kawasan pelestarian rawa gambut terbesar di Indonesia, dengan luas 568.700 ha yang terletak di tiga kabupaten/kota, yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Katingan. Taman Nasional Sebangau merupakan salah satu kawasan pelestarian rawa gambut terbesar di Indonesia, dengan luas 568.700 ha yang terletak di tiga kabupaten/kota, yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Katingan. Seluas 324.680 ha (57 persen) TN Sebangau berada di Kabupaten Katingan. TN Sebangau ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.423/Kpts-II/2004 tanggal 19

Oktober tahun 2004. TN Sebangau mempunyai keanekaragaman hayati yang berlimpah, termasuk 808 spesies flora, 65 spesies mamalia, 43 spesies reptil, dan 182 spesies burung. Sebangau menjadi pusat tumbuh bagi spesies dipterocarpa: agathis (Agathis spp), belangeran (Shorea belangeran), bintangur (Challophyllum sclerophyllum), jelutong (Dyera costullata), keruing (Dipterocarpus spp) dan ramin (Gonystylus bancanus). Tanaman ini terancam punah karena pembalakan liar, dan kebakaran hutan gambut.

Ekowisata, merupakan salah satu potensi ekonomi berkelanjutan yang terus berkembang di Kabupaten Katingan. Ekowisata bisa dikembangkan berbasis pada keindahan bentang alam maupun berdasarkan potensi yang ada di desa-desa, termasuk kekhasan budaya masyarakat. Untuk memperkuat ekowisata ini, Bupati Katingan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata. Potensi ekowisata di Kabupaten Katingan sangat besar. Karena itu, pengembangan ekowisata akan membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di satu sisi, dan memperkuat konservasi manggrove dan taman nasional yang ada di kabupaten ini.

Pertambangan, Potensi tambang di Kabupaten Katingan cukup banyak, seperti emas, batubara, zircon, perak, besi, dan lainnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Katingan tidak memiliki kewenangan untuk urusan tersebut.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil analisis data numerik dan data spasial dalam Pemetaan DDDT–LH di Kabupaten Katingan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

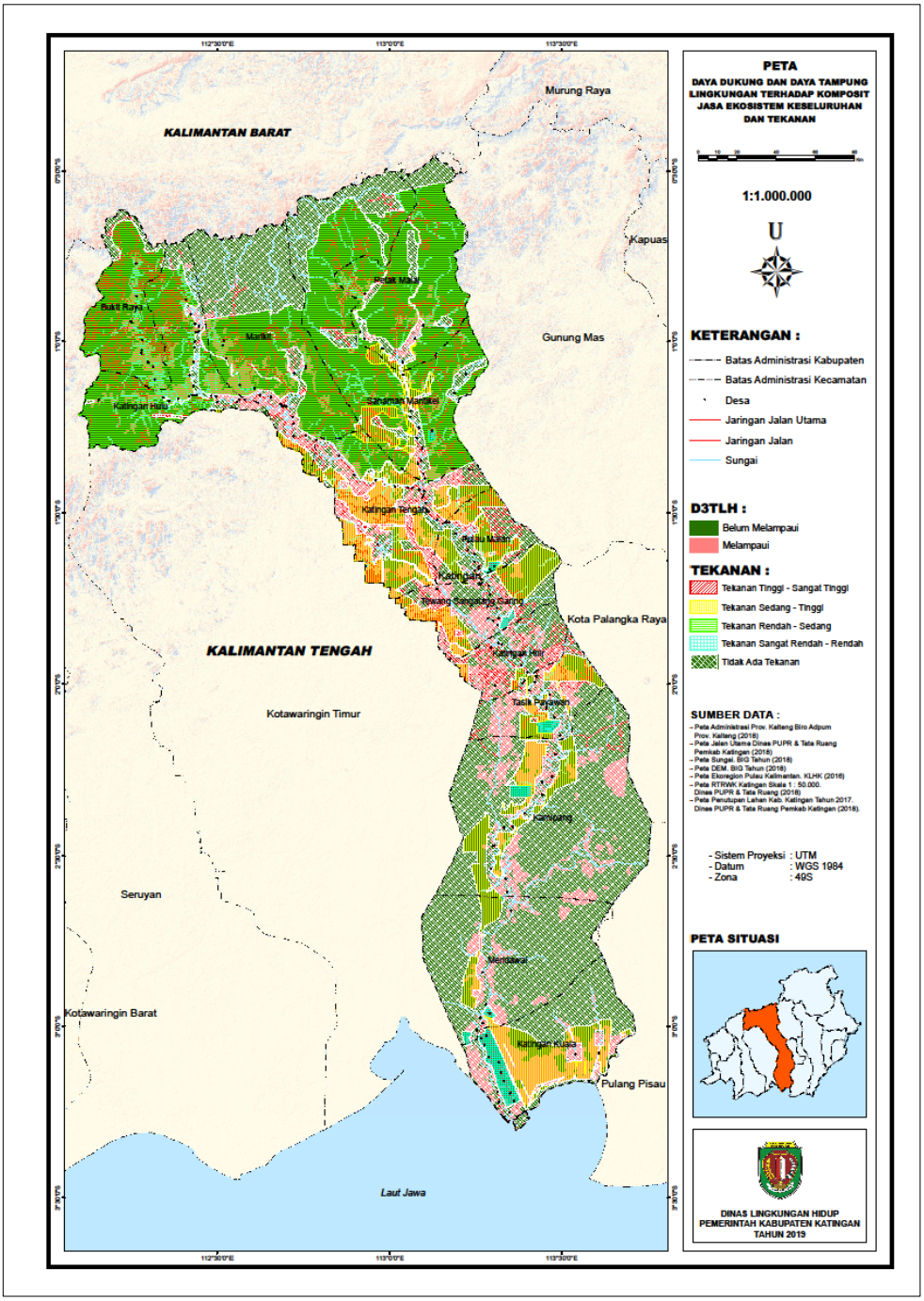
1. Terdapat 24 tipe ekoregion dan 22 kelas tutupan lahan, di mana ekoregion Pegunungan Denudasional (D1) dan Dataran Gambut merupakan ekoregion terluas, dengan masing-masing luasan 740.051,82 Ha dan 510.711,59 Ha. Sedangkan ekoregion terkecilnya adalah Tanggul Alam dan Teras Sungai (F5) dan Dataran Aluvial Rawa/Dataran Rawa Payau (F2) dengan masing-masing luasan 6,25 Ha dan 8,43 Ha, Kemudian untuk penutupan lahan, didominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran (VBP12B) dan Hutan Lahan Basah Primer Gambut, dengan luasan masing-masing adalah 524.621,96 Ha dan 500.152,49 Ha. Sementara, tutupan lahan terkecilnya adalah Bangun Industri (VTB28) dan Lahan Terbangun Non Permukiman (VTB31) dengan luas masing-masing adalah 31,80 Ha dan 37,89 Ha.

2. Hasil analisis perbandingan berpasangan dari penilaian pakar terhadap jasa ekosistem yang sudah dinormalisasi, menunjukkan bahwa pada ekoregion: Dataran Gambut (O1), Dataran Tinggi (F11), dan Dataran Aluvial (F1) memiliki nilai tertinggi dengan masing–masing nilai adalah 1,000 dan 0,700, serta 0,436. Sedangkan untuk penutupan lahan ditemukan pada: Perkebunan Karet (VP7c), Perkebunan Campuran (VP8), dan Permukiman (VTB27) dengan masing–masing nilai adalah 1,000, dan 0,609, serta 0,554. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ekoregion dan penutupan lahan tersebut merupakan daerah-daerah penting untuk menyediakan jasa ekosistem bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat.
3. Indeks Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan tidak mengindikasikan adanya kisaran Sangat Rendah. Kisarannya adalah Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi, di mana kisaran Rendah, Sedang, dan Tinggi berada di tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Kamipang, Mendawai, dan Petak Malai. Kisaran Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi, berada di empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Katingan Hilir, Katingan Kuala, Sanaman Mantikei, dan Tewang Sangalang Garing. Kisaran Sedang dan Tinggi, berada di Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Katingan Tengah, Marikit, Pulau Malan, dan Tasik Payawan.
4. Isu lingkungan strategis yang dihadapi Kabupaten Katingan dan menjadi tekanan utama terhadap jasa ekosistem adalah: Perijinan kebun, tambang, dan IUPHHK (HA maupun HT), Pencemaran air dan udara, baik akibat limbah cair maupun limbah padat serta berupa pembakaran hutan dan lahan, Pembukaan lahan oleh masyarakat, Perkembangan pemukiman, Pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan darat.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual untuk Jasa Ekosistem Komposit Penyediaan (P), Pengaturan (R), dan Pendukung (S), dan Keseluruhannya yang sudah melampaui adalah seluas 385.860,40 Ha (18,90 %) dan yang Belum Melampaui seluas 1.655.451,23 Ha (81,10 %). Sedangkan untuk Jasa Ekosistem Budaya (C) seluruhnya masih Belum Melampaui. Selanjutnya, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya untuk Kecamatan Bukit Raya yang Belum Melampaui, yaitu seluas 87.903,98 Ha dan Melampaui seluas 12.883,79 Ha, untuk Kecamatan Kamipang yang Belum Melampaui seluas 279.682,90 Ha dan yang Melampaui seluas 49.127,33 Ha, untuk Kecamatan Katingan Hilir yang Belum Melampaui, yaitu seluas 40.031,10 Ha dan Melampaui seluas 19.991,44 Ha, untuk Kecamatan Katingan Hulu yang Belum Melampaui, yakni seluas 121.347,52 Ha dan Melampaui seluas 24.073,10

Ha, untuk Kecamatan Katingan Kuala yang Belum Melampaui, yaitu seluas 101.968,74 Ha dan Melampaui seluas 46.874,89 Ha, untuk Katingan Tengah yang Belum Melampaui, yaitu seluas 83.746,96 Ha dan Melampaui seluas 72.768,47 Ha, untuk Kecamatan Marikit yang Belum Melampaui, yaitu seluas 189.372,94 Ha dan Melampaui seluas 30.340,74 Ha, untuk Kecamatan Mendawai yang Belum Melampaui, yaitu seluas 181.655,15 Ha dan Melampaui seluas 21.666,04 Ha, untuk Kecamatan Petak Malai yang Belum Melampaui, yaitu seluas 153.088,75 Ha dan Melampaui seluas 10.654,93 Ha, untuk Kecamatan Pulau Malan yang Belum Melampaui, yaitu seluas 46.241,79 Ha dan Melampaui seluas 18.300,16 Ha, untuk Kecamatan Sanaman Mantikei yang Belum Melampaui, yaitu seluas 265.923,41 Ha dan Melampaui seluas 13.829,42 Ha, untuk Kecamatan Tasik Payawan yang Belum Melampaui, yaitu seluas 49.919,49 Ha dan Melampaui seluas 24.284,20 Ha, ,untuk Kecamatan Tewang Sangalang Garing yang Belum Melampaui, yaitu seluas 54.568,49 Ha dan Melampaui seluas 23.106,86 Ha.

Adapun gambaran tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kabupaten Katingan secara jelas dan ringkas disajikan pada peta berikut:



Gambar 2-2 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya (Ha)
Sumber: KLHS RPJMD, 2025–2029

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual untuk Jasa Ekosistem Komposit Penyediaan (P), Pengaturan (R), dan Pendukung (S), dan Keseluruhannya yang sudah melampaui adalah seluas 385.860,40 Ha (18,90 persen) dan yang belum melampaui seluas 1.655.451,23 Ha (81,10 persen). Sedangkan untuk Jasa Ekosistem Budaya (C) seluruhnya masih belum melampaui. Adapun Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya untuk

masing–masing kecamatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2-5 Daya Dukung dan Daya Tampung per Kecamatan

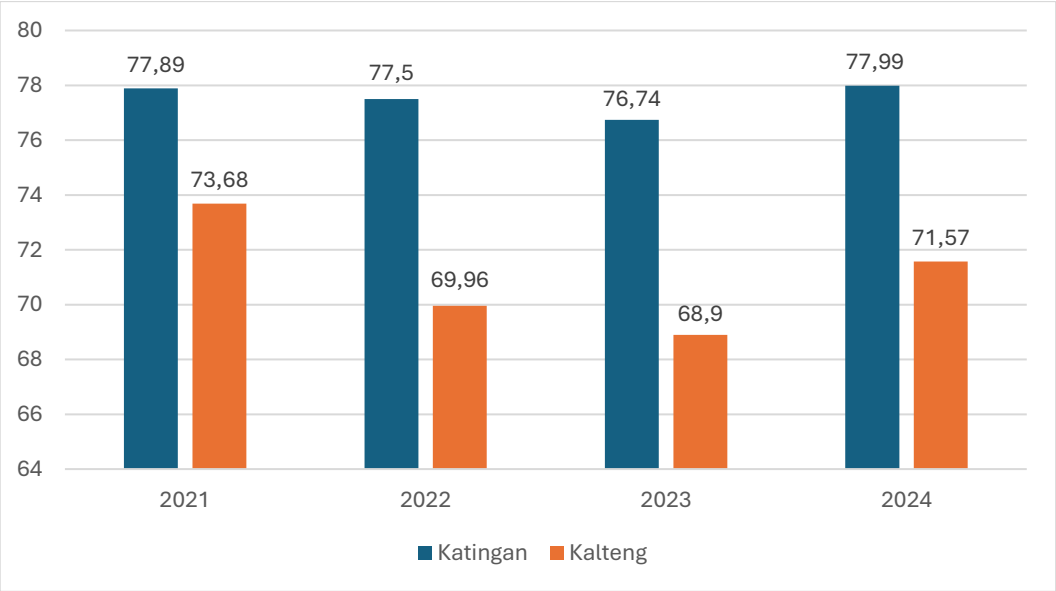
Kecamatan	Belum Melampaui (ha)	Melampaui (ha)
Bukit Raya	87.903,98	12.883,79
Kamipang	279.682,90	49.127,33
Katingan Hilir	40.031,10	19.991,44
Katingan Hulu	121.347,5	24.073,10
Katingan Kuala	101.968,74	46.874,89
Katingan Tengah	83.746,96	72.768,47
Marikit	189.372,94	30.340,74
Mendawai	181.655,15	21.666,04
Petak Malai	153.088,75	10.654,93
Pulau Malan	46.241,79	18.300,16
Mantikei	265.923,41	13.829,42
Tasik Payawan	49.919,49	24.284,20
Tewang Sangalang Garing	54.568,49	23.106,86

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Katingan, 2025–2045

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.4.1 Ketahanan Pangan

Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Katingan diukur menggunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mulai diukur oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional dari tahun 2021 hingga 2024. IKP adalah ukuran yang menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan di suatu wilayah. Di Kabupaten Katingan, IKP menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 sampai dengan 2023, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan, yang perlu diantisipasi karena kebutuhan pangan akan terus meningkat ke depannya, sementara krisis iklim dapat mengganggu produksi pangan. Kondisi tanah di Kabupaten Katingan, yang mayoritas berupa lahan gambut, juga memerlukan perhatian khusus, dan perlu dipersiapkan serta dicadangkan lokasi yang sesuai untuk pertanian pangan.



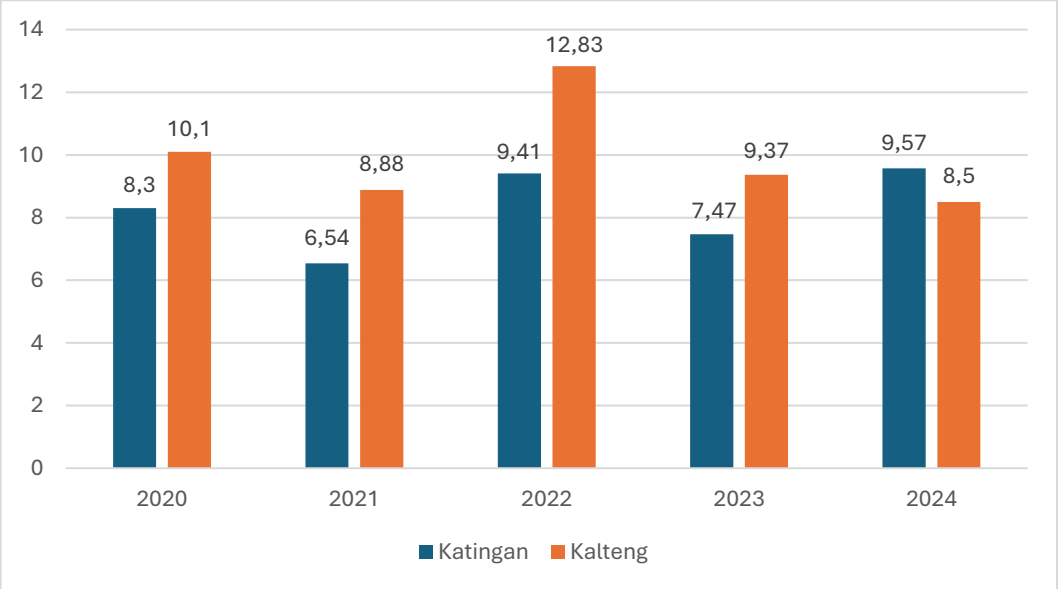
Grafik 2-2 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2024 (diolah)

Analisis lebih lanjut pada penurunan IKP di tahun 2021 hingga 2023 merupakan tanda adanya masalah mendesak dalam ketahanan pangan yang perlu segera di atasi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan, jika tren penurunan IKP tidak segera di atasi, Kabupaten Katingan bisa menghadapi krisis pangan yang serius di masa depan. Krisis iklim dapat memperparah situasi dengan mengganggu produksi pangan melalui cuaca yang tidak menentu, banjir, dan kekeringan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk penggunaan teknologi pertanian yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrem dan manajemen sumber daya air yang lebih baik. Selain itu, lahan gambut yang mendominasi Kabupaten Katingan memerlukan pengelolaan yang tepat agar bisa mendukung produksi pangan secara berkelanjutan.

2.1.1.4.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment atau PoU) merupakan indikator yang menggambarkan persentase populasi yang mengalami keterbatasan dalam memperoleh makanan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Ketidakcukupan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi, ketimpangan distribusi pangan, perubahan iklim, bencana alam, serta konflik sosial dan politik yang menghambat akses terhadap bahan pangan. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai ketahanan pangan suatu wilayah, karena mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Jika angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tinggi, berarti masih

banyak penduduk yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan makanan yang layak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat kesehatan, produktivitas, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks capaian indikator ini, nilai yang tercatat pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan di Katingan berada di atas rata-rata capaian Provinsi Kalimantan Tengah, yang tercatat sebesar 8,5%. Adapun capaian prevalensi ketidakcukupan pangan di Katingan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut.



Grafik 2-3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber:

1. Badan Pusat Statistik. (2025). *Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen) Per Kabupaten/kota (Persen), 2024*. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI2OSMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan-persen-per-kabupaten-kota.html
2. Badan Pusat Statistik. (2025). *Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (persen), 2024*. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan--persen-.html

Pada Tahun 2024, angka PoU menunjukkan bahwa sekitar 9,57% dari populasi Katingan sedang mengalami kenaikan. Upaya untuk menurunkan angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan produksi pangan lokal, penguatan program bantuan sosial bagi kelompok rentan, pemberdayaan ekonomi masyarakat agar memiliki daya beli yang lebih baik, serta pengembangan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan distribusi pangan. Selain itu, edukasi mengenai pola konsumsi yang sehat dan berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara jangka panjang.

2.1.1.4.3 Konsumsi Listrik Per Kapita

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Maret 2024 mencatat ada 86,43 persen penduduk Katingan menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama. BPS Kabupaten Katingan mencatat, dari tiga belas kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan terdapat sembilan kecamatan yang terdistribusi listrik dari PLN yaitu Kamipang, Tasik Payawan, Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Marikit dan Katingan Hulu. Jumlah pelanggan PLN pada tahun 2022 ada sebanyak 36.667 pelanggan, tahun 2021 ada sebanyak 32.012 pelanggan, dan tahun 2020 ada sebanyak 30.525 pelanggan, sedangkan tahun 2023 dan dan 2024 belum tersedia datanya.

Tabel 2-6 Jumlah Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Katingan Kuala	-	-	-	-	-
Mendawai	-	-	-	-	-
Kamipang	845	892	1060	-	-
Tasik Payawan	1694	1769	1916	-	-
Katingan Hilir	13282	14067	16500	-	-
Tewang Sangalang Garing	3141	3249	3580	-	-
Pulau Malan	2189	2289	2823	-	-
Katingan Tengah	6209	6450	7183	-	-
Sanaman Mantikei	1548	1638	1875	-	-
Petak Malai	-	-	-	-	-
Marikit	753	752	806	-	-
Katingan Hulu	864	906	924	-	-
Bukit Raya	-	-	-	-	-
	30525	**32012**	**36667**	**-**	**-**

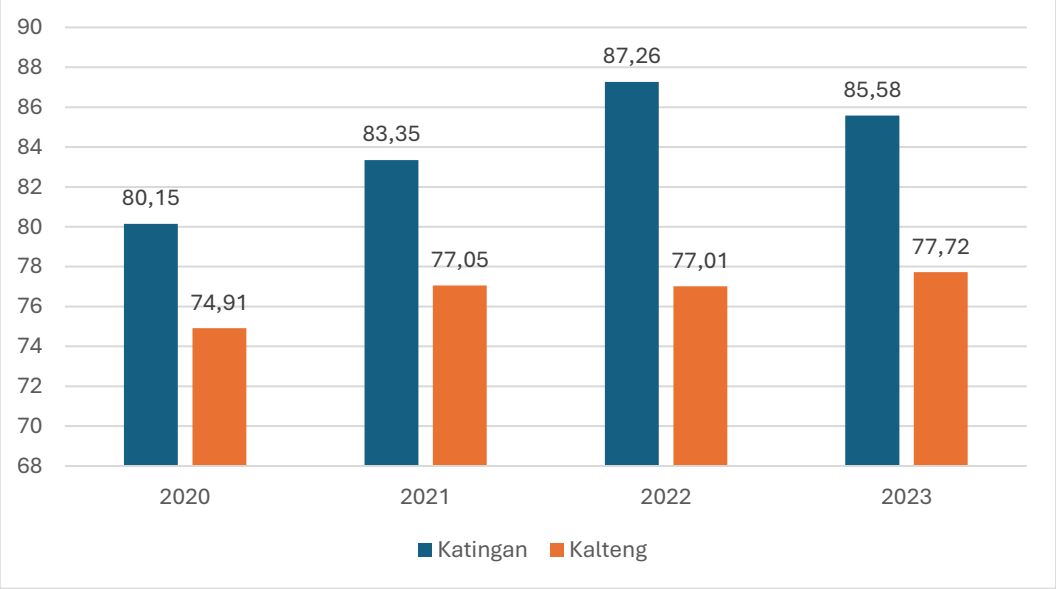
Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2025

Berdasarkan data PT. PLN Cabang Kasongan, listrik yang terjual ke 50.809 pelanggan di tahun 2024 mencapai 62.969.428,69 kWh, dan jika dihitung dengan jumlah penduduk Katingan tahun 2024 sebanyak 171.860 jiwa maka konsumsi listrik per kapita adalah 366,39 kWh per kapita.

2.1.1.4.4 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Air minum dapat dikatakan layak jika air minum rumah tangga tersebut telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan tetapi telah memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kondisi akses masyarakat terhadap air minum layak dapat ditunjukkan melalui indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak.

Persentase akses rumah tangga terhadap air minum di Kabupaten Katingan terus mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2020 hingga 2023 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,66 persen poin per tahun.



Grafik 2-4 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). *Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023*. Diakses dari https://kalteng.bps.go.id/en/statistics-table/3/TUU0eE4xbE9hMWhSVjNCSGNYaFpWRUKUjFSTlp6MDkjMw==/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sumber-air-minum-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah--2018.html?year=2023

Berdasarkan rilis BPS buku Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2025, dari tiga belas kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan terdapat lima kecamatan yang terdistribusi air bersih dari PDAM atau Akses air minum berupa jaringan perpipaan PDAM yaitu Mendawai, Tasik Payawan, Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, dan Katingan Tengah . Jumlah pelanggan PDAM pada tahun 2023 ada sebanyak 5.106 pelanggan dengan total air bersih yang disalurkan PDAM sebanyak 966.987 meter kubik dengan nilai sebesar Rp 1.873.091.340 dan Jumlah pelanggan PDAM pada tahun 2024 ada sebanyak 5.038 pelanggan dengan total air bersih yang disalurkan PDAM sebanyak 967.887 meter kubik dengan nilai sebesar Rp 4.056.389.800.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

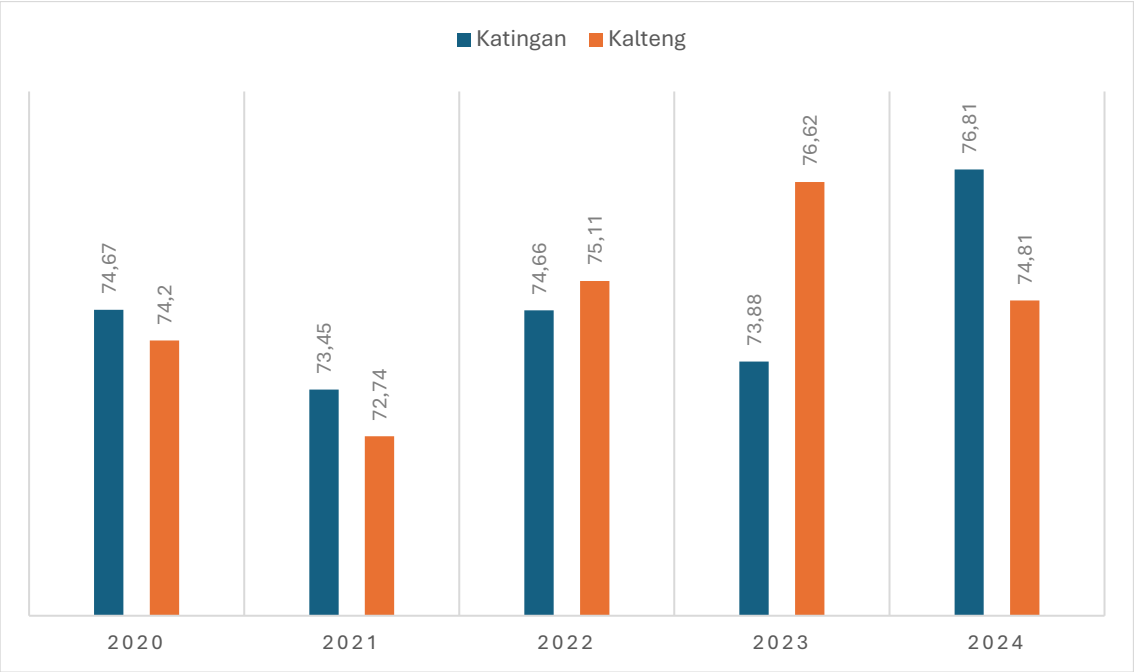
2.1.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kondisi ekologis suatu wilayah sekaligus menjadi acuan dalam mengukur

keberhasilan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Hubungan antara IKLH dan penurunan GRK bersifat erat, karena perbaikan kualitas lingkungan—terutama pada aspek tutupan lahan, kualitas udara, dan kualitas air—secara langsung mendukung pengurangan emisi yang berkontribusi pada perubahan iklim. Bagi daerah seperti Kabupaten Katingan, yang memiliki mandat sebagai wilayah konservasi skala internasional, peningkatan IKLH tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem lokal, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen nasional dan global dalam mitigasi perubahan iklim.

Tekanan pembangunan telah menyebabkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Katingan mengalami kontraksi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mulai membaik di tahun 2021 ke tahun 2022 yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Katingan, tetapi menurun pada 2023 dan meningkat lagi di pada 2024. Meski demikian, nilai IKLH Kabupaten Katingan harus menjadi perhatian karena berada di bawah provinsi, padahal Kabupaten Katingan merupakan satu dari beberapa daerah yang dimandatkan tugas sebagai wilayah konservasi skala internasional.

Jika dicermati lebih dalam, IKLH Kabupaten Katingan masih perlu peningkatan pada komponen kualitas air dilihat dari nilainya yang paling rendah dibandingkan dengan komponen lain. Rendahnya kualitas air ini mengindikasikan bahwa masih banyaknya pencemaran air yang terjadi dan belum optimalnya konservasi air di Kabupaten Katingan, baik pada skala rumah tangga maupun regional. Perlu diketahui bahwa faktor tersebut sangat penting mengingat banyaknya jumlah sungai di Kabupaten Katingan, baik pada skala rumah tangga maupun regional. Perlu diketahui bahwa faktor tersebut sangat penting mengingat banyaknya jumlah sungai di Kabupaten Katingan.

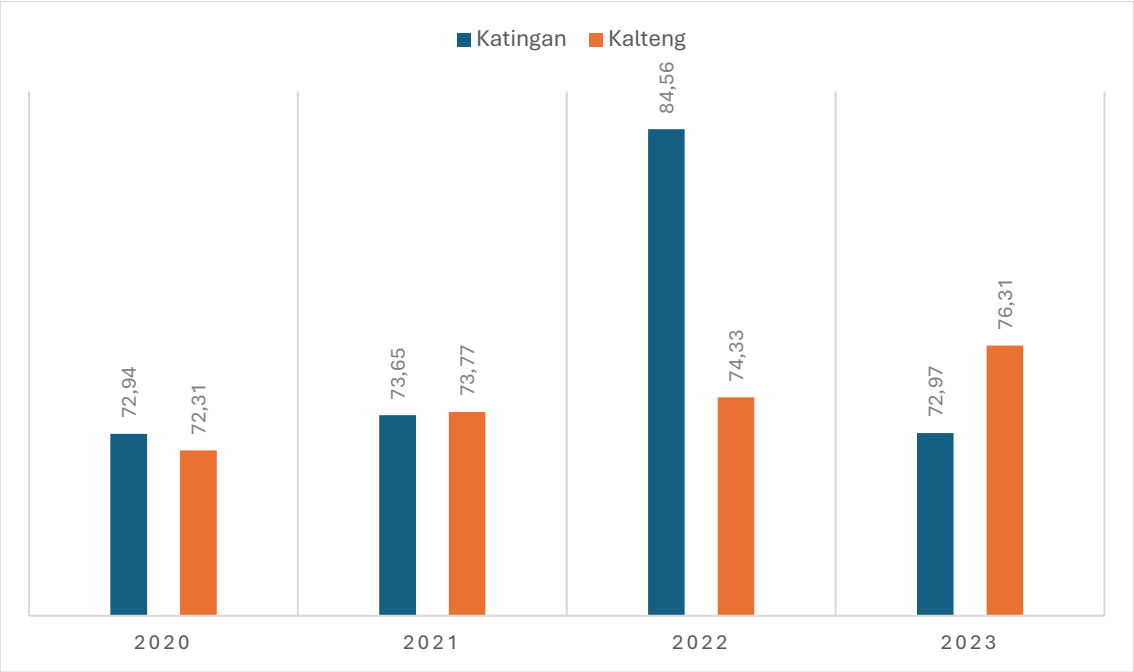


Grafik 2-5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024; Satu Data Kalteng

2.1.1.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman adalah kondisi ketika rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi milik sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa, serta bangunan bawah berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam lima tahun terakhir dan lumpurnya diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Alternatif lain adalah rumah tangga tersambung langsung dengan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Perhitungan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, masih belum tersedia di Kabupaten Katingan. Kondisi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Katingan dapat digambarkan menggunakan “Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak”.



Grafik 2-6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2023

Sumber:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimanten Tengah. (2024). *Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2023*. Diakses dari https://kalteng.bps.go.id/id/statistics-table/3/VGtGTU5qbDFlQzl1VWxCTVNWZElXbWRhWkUwMFVUMDkjMyM2MjAw/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah.html?year=2023

Perkembangan di Kabupaten Katingan pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak mencapai 72,94%, angka ini mengalami kenaikan relatif kecil, menjadi 72,97% pada tahun 2023. Secara umum, capaian sanitasi layak di Kabupaten Katingan sudah berada pada tingkat cukup tinggi, yakni lebih dari 70% rumah tangga. Namun, tren peningkatan yang sangat lambat (hanya naik 0,03 poin persentase dalam tiga tahun) menunjukkan bahwa program perlu mendapat penguatan pada aspek kualitas layanan pengelolaan limbah tinja, khususnya terkait penyedotan septik secara berkala dan keberfungsian IPLT. Kenaikan kecil ini bisa mengindikasikan bahwa sebagian rumah tangga memang sudah memiliki fasilitas sanitasi layak, tetapi belum memenuhi standar aman karena keterbatasan layanan penyedotan atau pengolahan lumpur tinja.

2.1.1.5.3 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kondisi data Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Katingan masih belum tersedia. Indikator ini menggambarkan jumlah timbulan sampah yang tidak hanya dikumpulkan dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi benar-benar diolah melalui fasilitas pengolahan sampah seperti TPST 3R (Reduce,

Reuse, Recycle), bank sampah, komposting, maupun fasilitas konversi sampah menjadi energi atau produk lain.

Di Kabupaten Katingan, pengelolaan sampah telah menjadi perhatian penting seiring dengan meningkatnya timbulan harian yang diperkirakan mencapai 12–20 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masih didominasi oleh sampah anorganik, terutama plastik, yang berpotensi menimbulkan pencemaran apabila tidak dikelola dengan baik. Upaya pengolahan sampah di fasilitas resmi dapat didorong, antara lain melalui:

1. TPST 3R yang memungkinkan sebagian sampah dipilah dan didaur ulang sebelum menuju TPA.
2. Bank Sampah yang berfungsi mengurangi timbulan sampah anorganik dengan pendekatan ekonomi sirkular, di mana masyarakat dapat menukar sampah dengan nilai ekonomis.
3. Pengolahan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) untuk mengurangi ketergantungan pada TPA.

Porsi sampah yang benar-benar terolah di fasilitas pengolahan masih relatif kecil dibandingkan total timbulan harian. Sebagian besar sampah tetap berakhir di TPA dengan metode *open dumping* atau penimbunan sederhana. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, kapasitas fasilitas pengolahan yang masih terbatas, serta rendahnya tingkat pemilahan sampah di sumber (rumah tangga).

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengolahan sampah di Kabupaten Katingan perlu diperkuat dan diperbaiki, baik melalui perluasan kapasitas TPST/TPA modern, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan di rumah tangga, maupun integrasi sistem pengangkutan agar lebih banyak sampah yang masuk ke jalur pengolahan, bukan hanya pembuangan.

2.1.1.5.4 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator ini mengukur sejauh mana rumah tangga di Kabupaten Katingan terlayani secara penuh oleh sistem pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga. Layanan penuh berarti sampah rumah tangga diangkut secara rutin (harian atau beberapa kali dalam seminggu) dari sumber (rumah tangga) menuju TPS/TPST dan selanjutnya ke TPA atau fasilitas pengolahan.

Di Kabupaten Katingan, cakupan layanan pengumpulan sampah belum menjangkau seluruh rumah tangga, terutama karena kondisi geografis yang luas, keterbatasan armada, serta rendahnya kepadatan penduduk di beberapa wilayah

pedesaan. Layanan penuh umumnya lebih terkonsentrasi di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Katingan Hilir (Kasongan) dan Kecamatan Katingan Tengah (Tumbang Samba), sementara wilayah pedesaan banyak yang masih mengelola sampah secara mandiri, seperti dibakar, ditimbun, atau dibuang ke lingkungan.

Diperkirakan, proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah masih berkisar 20–40% dari total rumah tangga di Katingan. Sisanya belum terlayani secara memadai, sehingga penanganan sampah masih sangat bergantung pada inisiatif individu atau masyarakat setempat.

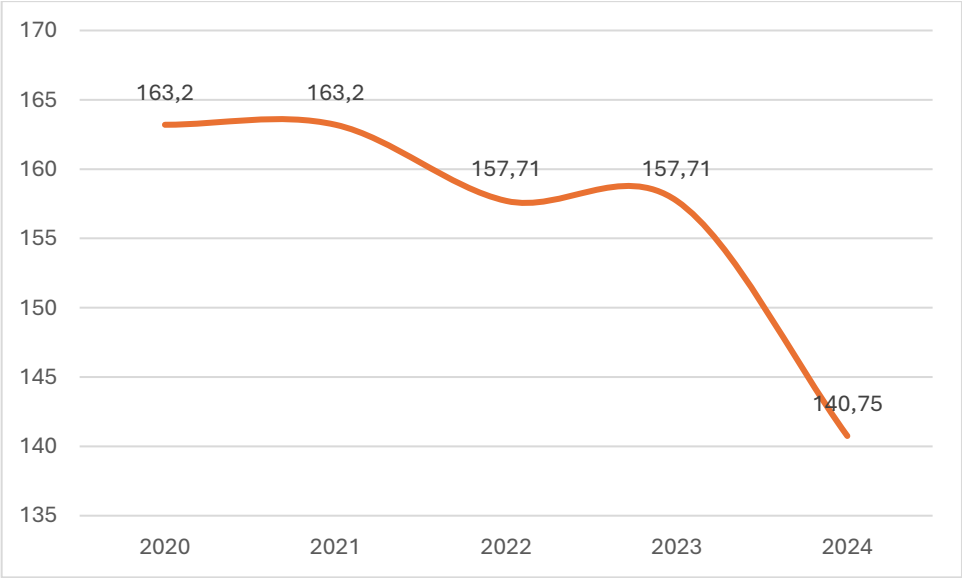
2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.6.1 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kontribusi penurunan emisi Gas Rumah Kaca menunjukan upaya dalam mitigasi perubahan iklim, dan hal ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan mengurangi emisi GRK seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, yang merupakan indikasi positif dari pembangunan berkelanjutan. Data kondisi kontribusi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk level Kabupaten Katingan sampai saat ini masih “belum tersedia”.

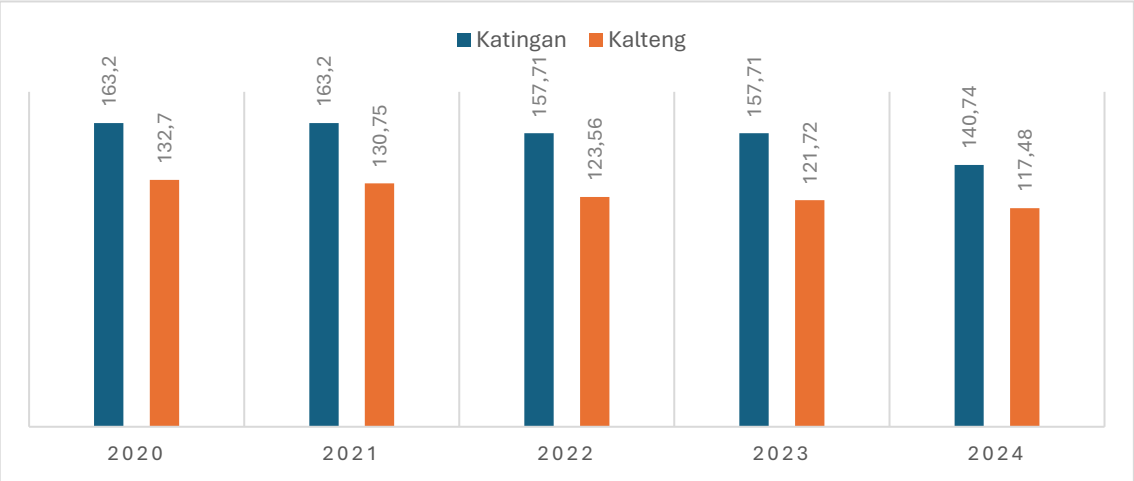
2.1.1.6.2 Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana, Kabupaten Katingan merupakan wilayah dengan indeks sedang seperti kebanyakan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Katingan stabil secara geologis dan relatif aman dari gempa vulkanik. Namun, daerah ini sangat rentan terhadap bencana banjir, longsor, dan kebakaran hutan/lahan. Secara hidrologi, Kabupaten Katingan memiliki banyak sungai dengan pola dendritik yang menyebabkan puncak banjir yang tinggi jika terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai (DAS), sehingga berpotensi besar menggenangi daerah sekitar aliran sungai, terutama di bagian hilir. Adapun ditinjau dari segi nilai indeks, terdapat nilai indeks yang tidak mengalami perubahan karena disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan.



Grafik 2-7 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024

Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, capaian Kabupaten Katingan lebih rendah meskipun keduanya masuk dalam kategori sedang. Dinamika keduanya serupa dengan pertumbuhan yang cenderung stagnan. Meski demikian, Kabupaten Katingan memiliki peningkatan yang lebih tinggi dalam periode lima tahun terakhir dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai indeks 163,2 pada tahun 2020 menjadi 140,75 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini tak lepas dari adanya upaya peningkatan kapasitas daerah dalam manajemen kebencanaan, baik mitigasi secara struktural maupun non-struktural.



Grafik 2-8 Komparasi Dinamika Indeks Risiko Bencana Kabupaten Katingan dengan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020–2024
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025 (diolah)

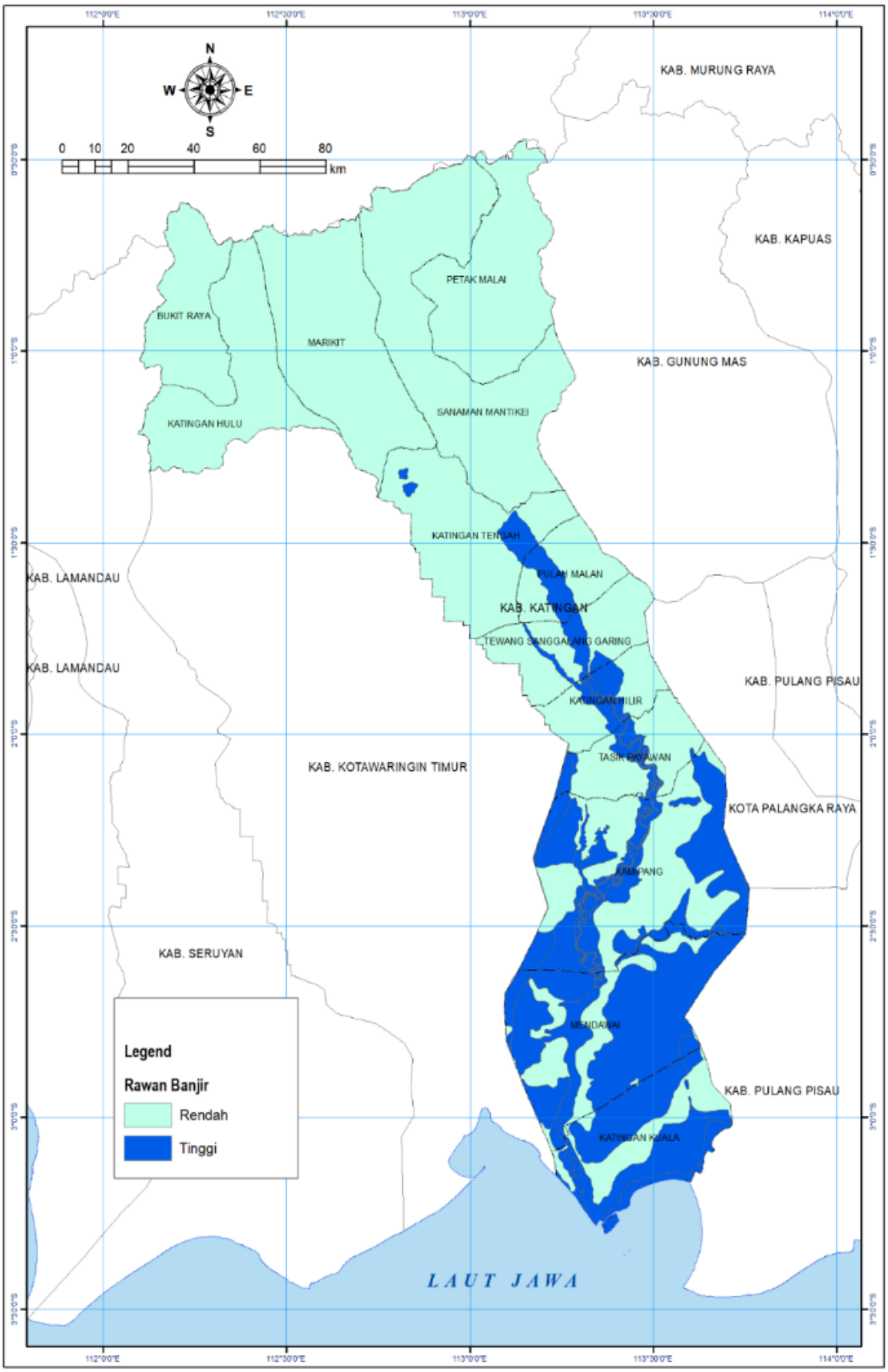
Berdasarkan Perda tentang RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019–2039, kawasan rawan bencana alam mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan, termasuk kawasan rawan banjir dan kebakaran hutan/lahan. Dampak dan risiko lingkungan hidup di Kabupaten Katingan dari aspek banjir, kebakaran lahan, dan lahan kritis ditentukan oleh topografi, daya tampung sungai, dan curah hujan. Kabupaten Katingan memiliki potensi banjir rendah sebesar 74,77% dan potensi banjir tinggi sebesar 25,23%. Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Petak Malai, dan Sanaman Mantikei memiliki potensi banjir rendah karena topografi yang lebih tinggi, sedangkan Kecamatan Mendawai (78%), Katingan Kuala (70,1%), dan Kamipang (51,9%) memiliki potensi banjir tinggi karena merupakan daerah rawa dengan topografi rendah.

Potensi banjir juga meningkat karena berkurangnya kemampuan sungai menampung debit air akibat pendangkalan yang disebabkan oleh aktivitas PETI, terutama di segmen Sanamang–Marikit. Pendangkalan ini ditandai dengan terbentuknya delta di tengah sungai akibat erosi. Curah hujan yang tinggi (>300 mm per bulan) juga meningkatkan potensi banjir, terutama karena minimnya daerah tangkapan air akibat pembukaan lahan di sekitar DAS.

Tabel 2-7 Potensi Banjir Setiap Kecamatan

Kecamatan	Potensi Banjir		
	Rendah	Tinggi	Total
Bukit Raya	100.419		100.419
Kamipang	137.199	147.909	285.109
Katingan Hilir	45.397	17.734	63.131
Katingan Hulu	145.876		145.876
Katingan Kuala	44.339	104.033	148.372
Katingan Tengah	151.746	11.614	163.360
Marikit	211.370		211.370
Mendawai	52.500	186.471	238.971
Petak Malai	165.938		165.938
Pulau Malan	49.610	15.129	64.739
Sanaman Mantikei	277.165		277.165
Tasik Payawan	62.808	17.906	80.714
Tewang Sanggalang Garing	79983	13.581	93.563
Total	1.524.351	514.377	2.038.727
Persentase	74,77	25,23	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan, 2018–2023



Gambar 2-3 Peta Potensi Banjir
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan, 2018–2023

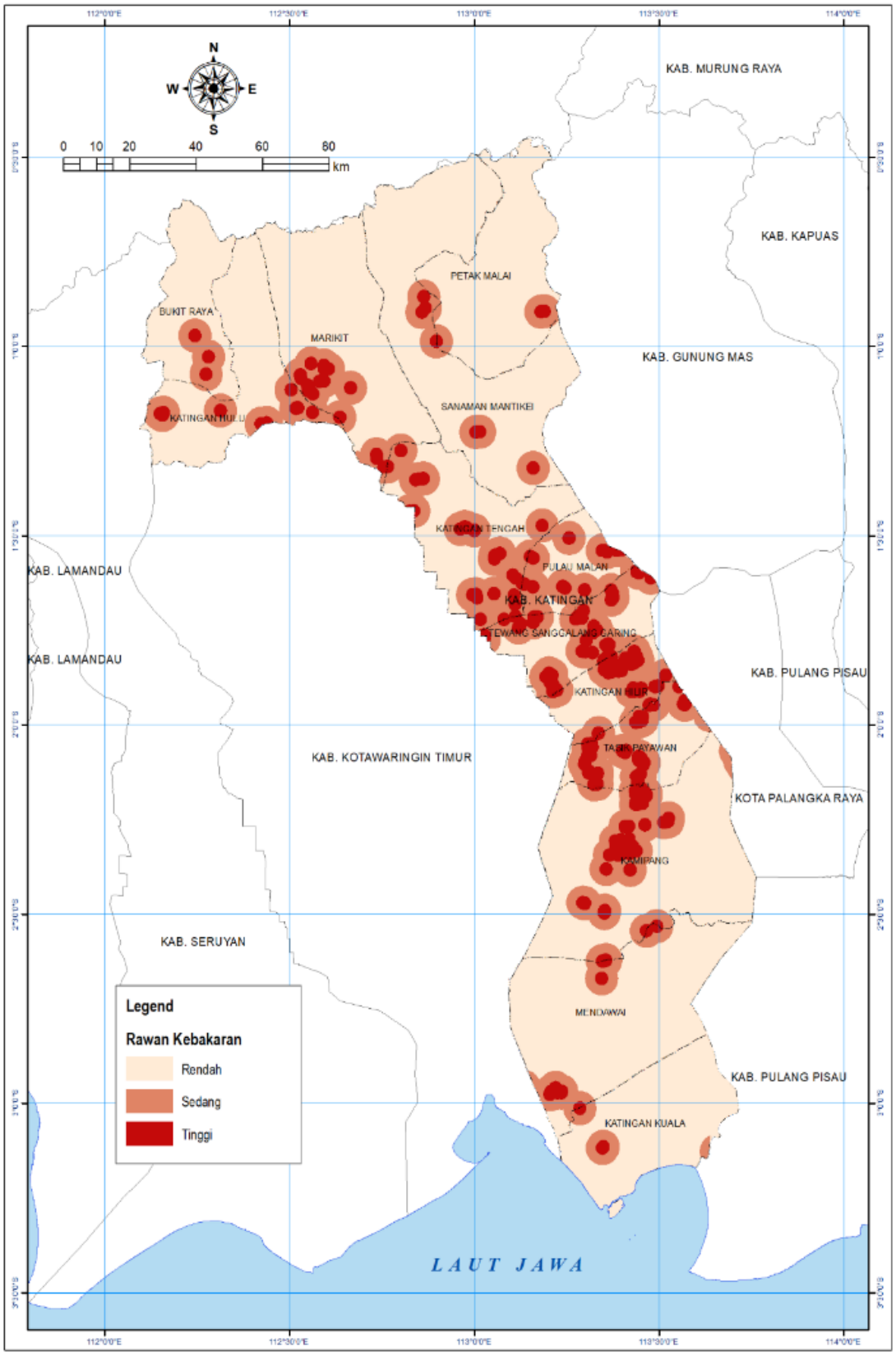
Seluruh warga masyarakat di Kabupaten Katingan berpotensi terdampak bencana. Pada tahun 2020, dari 13 kecamatan di wilayah ini, 10 kecamatan terdampak banjir, 1 kecamatan berada di dataran tinggi, dan 2 kecamatan terdampak pasang surut air laut. Dari 10 kecamatan yang terdampak banjir, antara lain adalah Kecamatan Petak Malai, Katingan Hulu, Marikit, Sanaman Mantikei, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan, dan Kamipang. Kecamatan Bukit Raya relatif lebih aman karena berada di dataran tinggi, sedangkan Kecamatan Mendawai dan Katingan Kuala terdampak oleh pasang surut air laut.

Adapun berdasarkan jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana banjir pada periode 2019 sampai 2021, terdapat peningkatan jumlah seiring waktu dengan banjir terparah yang terjadi pada tahun 2021. Berdasarkan pendataan BPBD Kabupaten Katingan, peristiwa banjir tahun yang dipicu oleh faktor cuaca tersebut telah merendam beberapa wilayah di 13 kecamatan yang ada di kabupaten Katingan. Hujan yang mengguyur secara terus menerus selama beberapa hari menyebabkan debit air Sungai Katingan dan Sungai Samba meluap, tak terelakkan hal tersebut kemudian berdampak pada 15.911 KK atau 25.443 jiwa. Selain itu, sebanyak 15.439 unit rumah, 67 unit tempat ibadah, 78 unit fasilitas pendidikan, 36 unit fasilitas kesehatan, 40 unit perkantoran, 19 pos PPKM dan 794.100 hektar luas wilayah juga terdampak banjir.

Tabel 2-8 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatan Tahun 2019–2024

No	Kecamatan	Banjir			
		2019	2020	2021	2024
1	Katingan Kuala	-	-	-	-
2	Mendawai	1	-	1	1
3	Kamipang	-	8	9	8
4	Tasik Payawan	-	6	8	8
5	Katingan Hilir	1	-	8	5
6	Tewang Sangalang Garing	1	-	9	4
7	Pulau Malan	4	2	14	5
8	Katingan Tengah	15	7	16	3
9	Sanaman Mantikei	7	2	5	10
10	Petak Malai	7	2	6	5
11	Marikit	-	12	18	2
12	Katingan Hulu	-	2	15	9
13	Bukit Raya	-	-	11	5
Katingan		36	41	120	65

Sumber: Katingan Dalam Angka, BPS, 2025



Gambar 2-4 Peta Perkiraan Dampak dan Risiko Lahan Kebakaran
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan, 2018–2023

Sebaran daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan meliputi 6 dari 13 kecamatan yang mayoritas memiliki lahan gambut dan rawa, sedangkan 7 kecamatan lainnya memiliki mayoritas lahan mineral. Kecamatan dengan mayoritas lahan gambut dan rawa, seperti Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai, dan Katingan Kuala, memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran di hampir seluruh wilayah desa dan kelurahan. Sementara itu, kecamatan dengan mayoritas lahan mineral, seperti Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit Raya, relatif lebih aman. Meskipun demikian, secara keseluruhan, hampir seluruh wilayah Kabupaten Katingan masih berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan.

Potensi kebakaran di Kabupaten Katingan terbagi dalam kategori rendah (72,45%), sedang (19,5%), dan tinggi (8%). Kecamatan dengan potensi kebakaran tinggi adalah Katingan Hilir (26,48%), Tewang Sangalang Garing (26,37%), dan Tasik Payawan (25,09%) yang memiliki banyak lahan semak belukar mudah terbakar. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan paling sulit dilakukan di lahan gambut, khususnya di Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai, dan Katingan Kuala. Sebaliknya, lahan non–gambut di kecamatan seperti Bukit Raya, Katingan Hulu, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Pulau Malan, dan Tewang Sangalang Garing, lebih mudah dikendalikan.

Tabel 2-9 Potensi Kebakaran Setiap Kecamatan di Kabupaten Katingan

Kecamatan	Potensi Kebakaran			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Bukit Raya	80.622	16.031	3.766	100.419
Kamipang	202.109	58.060	24.940	285.109
Katingan Hilir	21.740	24.673	16.717	63.131
Katingan Hulu	110.071	27.209	8.596	145.876
Katingan Kuala	134.901	11.305	2.167	148.372
Katingan Tengah	82.879	58.764	21.717	163.360
Marikit	168.149	29.474	13.747	211.370
Mendawai	210.034	21.727	7.210	238.970
Petak Malai	151.556	12.169	2.213	165.938
Pulau Malan	16.251	37.968	10.519	64.739
Sanaman Mantikei	245.927	24.556	6.682	277.165
Tasik Payawan	24.347	36.113	20.254	80.714
Tewang Sanggalang Garing	28.411	40.483	24.669	93.563
Total	1.476.997	398.532	163.199	20.38.727
Persentase	72,45	19,55	8,00	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018–2023

2.1.1.7 Demografi

2.1.1.7.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Katingan mencapai 171.860 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2020–2024 adalah 1,55 persen. Jumlah penduduk laki-laki tahun 2023 sebanyak 87.722 dan 81.633 penduduk perempuan. Berdasarkan hal tersebut, rasio jenis kelamin pada tahun 2023 sebesar 107 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini bermakna bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Katingan terdapat sekitar 107 penduduk laki-laki.

Tabel 2-10 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024

Kecamatan	Penduduk (ribu)					Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020–2024 (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Katingan Kuala	18,6	18,7	18,7	18,7	18,71	0,19
Mendawai	4,2	4,2	4,2	4,3	4,33	1,10
Kamipang	7,2	7,2	7,2	7,5	7,61	1,59
Tasik Payawan	7,9	7,9	8,0	8,6	8,65	2,36
Katingan Hilir	38,8	39,3	39,9	42,0	42,86	2,66
Tewang Sangalang Garing	13,1	13,1	13,1	13,7	13,81	1,50
Pulau Malan	10,5	10,5	10,6	11,2	11,43	2,33
Katingan Tengah	29,2	29,3	29,4	29,7	30,71	1,36
Sanaman Mantikei	10,9	10,9	11,0	11,4	11,55	1,54
Petak Malai	3,6	3,6	3,6	3,7	3,65	0,18
Marikit	6,8	6,8	6,8	6,9	6,93	0,48
Katingan Hulu	8,2	8,2	8,3	8,4	8,37	0,42
Bukit Raya	3,2	3,2	3,2	3,6	3,25	0,19
Kabupaten Katingan	**162,2**	**163,1**	**164,0**	**169,4**	**171,86**	**1,55**

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2021–2025 (diolah)

2.1.1.7.2 Komposisi Penduduk

Ditinjau berdasarkan kelompok umur, dalam lima tahun terakhir ini kelompok usia antara 0 tahun sampai 34 tahun memiliki jumlah terbanyak. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Katingan akan mendapatkan bonus demografi akibat dari prospek penambahan jumlah penduduk usia produktif. Berikut rincian perkembangan jumlah penduduk Katingan menurut kelompok usia.

Tabel 2-11 Perkembangan Jumlah Penduduk Katingan Menurut Kelompok Umur Tahun 2023–2024

Kelompok Umur	2023				2024			
	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan			Laki-laki	Perempuan		
0–4	7.935	7.559	15.494	104,97	8.100	7.740	15.850	104,65
5–9	7.479	7.102	14.581	105,31	7.450	7.070	14.520	105,37
10–14	7.853	7.474	15.327	105,07	7.760	7.360	15.120	105,43
15–19	7.944	7.540	15.484	105,36	7.990	7.590	15.580	105,27
20–24	7.244	6.932	14.176	104,50	7.430	7.070	14.500	105,09
25–29	6.753	6.679	13.432	101,11	6.750	6.650	13.410	101,50
30–34	7.084	6.741	13.825	105,09	7.030	6.790	13.820	103,53
35–39	6.952	6.404	13.356	108,56	7.050	6.470	13.520	108,96
40–44	6.470	5.922	12.392	109,25	6.510	6.020	12.520	108,14
45–49	5.988	5.279	11.267	113,43	6.100	5.410	11.520	112,75
50–54	5.064	4.324	9.388	117,11	5.220	4.530	9.750	115,23
55–59	4.037	3.351	7.388	120,47	4.190	3.490	7.680	120,06
60–64	2.862	2.491	5.353	114,89	3.070	2.670	5.740	114,98
65–69	1.777	1.664	3.441	106,79	1.880	1.750	3.630	107,43
70–74	1.161	1.128	2.289	102,93	1.220	1.200	2.410	101,67
75+	1.119	1.043	2.162	107,29	1.180	1.120	2.300	105,36
Total	87.722	81.633	169.355	107,46	88.930	82.930	17.1860	107,24

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2024 dan 2025 (diolah)

2.1.1.7.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2024, jumlah total penduduk di Kabupaten Katingan adalah sebesar 177.1860 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Katingan adalah sebesar 8 jiwa/km^2. Di mana kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Katingan Hilir sebesar 64 jiwa/km^2. Hal tersebut sesuai dengan besarnya jumlah penduduk, Kecamatan Katingan Hilir menjadi kecamatan dengan jumlah total penduduk di tertinggi di Kabupaten Katingan. Di sisi lain, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Katingan adalah Kecamatan Mendawai. Secara detail, distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2-12 Distribusi dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)
	km^2	%	Jumlah (ribu)	(%)	
Katingan Kuala	1.484,81	7,27	18,71	10,89	13
Mendawai	2.391,58	11,72	4,33	2,52	2
Kamipang	2.854,27	13,98	7,61	4,43	3
Tasik Payawan	808,12	3,96	8,65	5,03	11
Katingan Hilir	665,22	3,26	42,86	24,94	64
Tewang Sangalang Garing	903,39	4,43	13,81	8,04	15

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan penduduk (jiwa/km²)
	km²	%	Jumlah (ribu)	(%)	
Pulau Malan	647,48	3,17	11,43	6,65	18
Katingan Tengah	1.635,65	8,01	30,71	17,87	19
Sanaman Mantikei	2.772,38	13,58	11,55	6,72	4
Petak Malai	1.661,65	8,14	3,65	2,12	2
Marikit	2.117,36	10,37	6,93	4,03	3
Katingan Hulu	1.461,27	7,16	8,37	4,87	6
Bukit Raya	1.007,72	4,94	3,25	1,89	3
Kabupaten Katingan	**20.410,90**	**100,00**	**171,86**	**100**	**8**

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2025 (diolah)

2.1.1.7.4 Proyeksi Demografi Lima Tahun ke Depan

Proyeksi demografi dilakukan untuk melihat komposisi penduduk menggunakan data dasar yang diproyeksi berdasarkan klasifikasi rentang umur maupun jenis kelamin, rasio ketergantungan, jumlah penduduk, hingga kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2020 (SP2020), jumlah penduduk Kabupaten Katingan pada tahun 2029 diperkirakan sebanyak 183,86 ribu jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan diproyeksikan mengalami tren peningkatan hingga tahun 2029, yaitu 94,64 ribu jiwa untuk penduduk laki-laki dan 89,21 ribu jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2-13 Proyeksi Demografi Kabupaten Katingan Tahun 2025 - 2029

Parameter	2025	2026	2027	2028	2029
Penduduk					
Laki-laki (ribu jiwa)	90,12	91,28	92,43	93,55	94,64
Perempuan (ribu jiwa)	84,22	85,48	86,75	87,99	89,21
Total (ribu jiwa)	174,34	176,76	179,18	181,53	183,86
Kepadatan (jiwa/km2)	8,54	8,66	8,77	8,89	9,00
Komposisi Umur (%)					
0–14	45,62	45,8	46,03	46,3	46,59
15–64	119,86	121,54	123,11	124,53	125,89
65+	8,86	9,42	10,04	10,7	11,38
Depedency Ratio (%)	45,45%	45,43%	45,54%	45,77%	46,05%

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2023 (diolah)

Sementara itu, untuk proyeksi usia produktif dan non-produktif Kabupaten Katingan mengalami tren peningkatan hingga tahun 2029. Dalam hal ini, jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif yang mana diproyeksikan berjumlah 125,89 ribu jiwa di tahun 2029. Angka ketergantungan turut mengalami tren peningkatan yang mana

pada tahun 2029 diproyeksikan sebesar 46,05%. Hal ini ditunjukkan dengan adanya laju pertumbuhan usia non produktif yang mengalami tren peningkatan dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk usia produktif. Oleh karena itu, beban kerja yang akan ditanggung oleh kelompok usia produktif semakin meningkat. Angka rasio ketergantungan yang masih berada di bawah 50% mengartikan bahwa Kabupaten Katingan masih mendapatkan bonus demografi hingga tahun 2029. Dengan demikian, diperlukan berbagai langkah untuk memaksimalkan potensi usia produktif sembari tetap mengendalikan angka kelahiran dan memberdayakan usia lanjut.

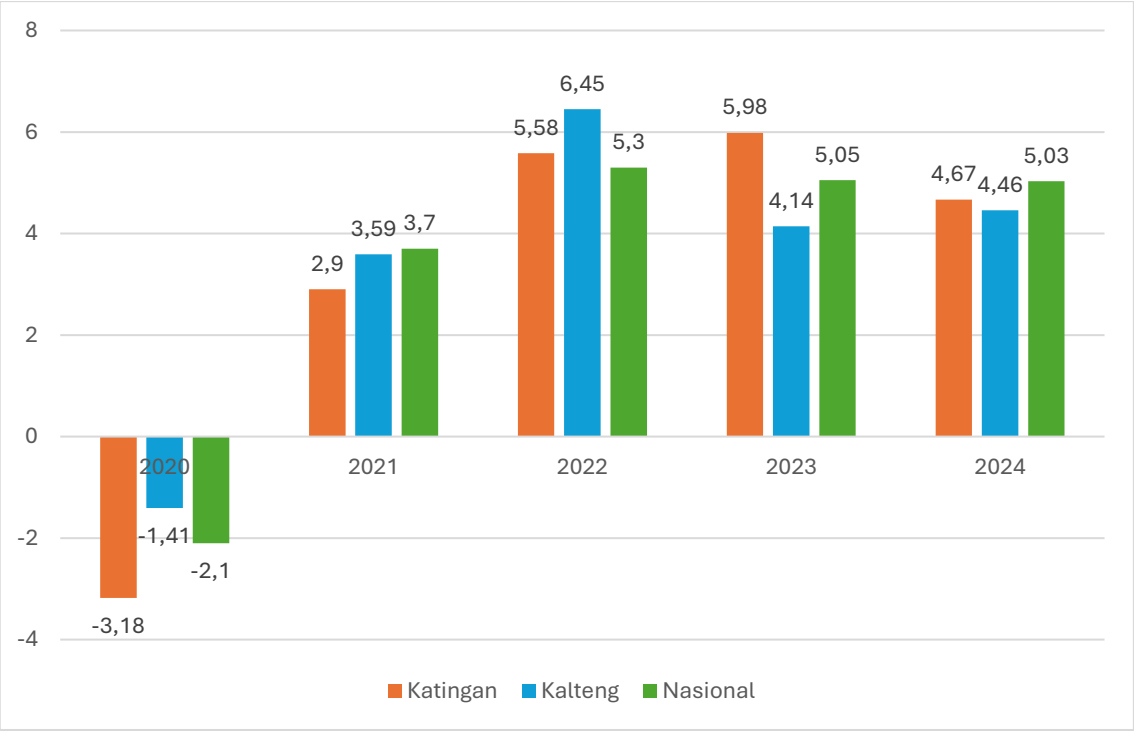
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus pembangunan daerah, yaitu fokus kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kedua aspek tersebut dapat memberikan gambaran dan hasil evaluasi terhadap kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan di suatu wilayah.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses jangka panjang yang meningkatkan kapasitas suatu daerah dalam memproduksi dan menyediakan berbagai barang dan jasa untuk penduduknya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Dengan kata lain, suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika nilai PDRB daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut merupakan komparasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan nasional.



Grafik 2-9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024
Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2025

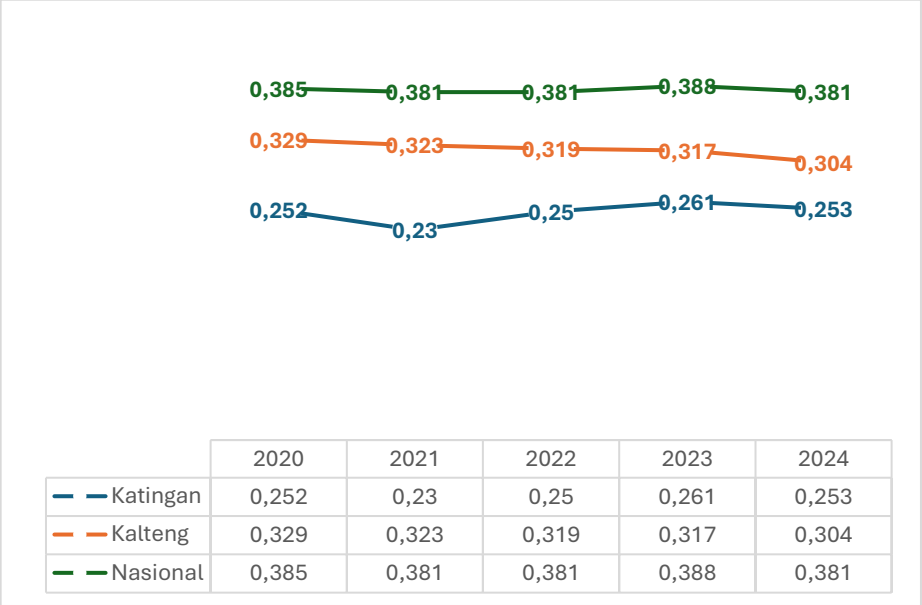
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan mengalami kontraksi hingga –3,18 persen, di mana angka tersebut jauh lebih dalam dibanding dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Kontraksi tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Tahun 2021 perekonomian mulai membaik di mana angkanya mencapai 2,9 persen dan terus tumbuh hingga mencapai angka 5,98 persen pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 turun menjadi 4,67 persen, tetapi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan masih tinggi dibanding dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.2.1.2 Indeks Gini

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan pemerataan. Fokus yang terpusat pada pertumbuhan dapat memperparah jurang ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Ketidaksetaraan ekonomi terjadi ketika distribusi pendapatan tidak merata secara signifikan, mengakibatkan perbedaan kesejahteraan di antara kelompok masyarakat. Jika kelompok berpendapatan rendah tumbuh lambat atau menurun sementara kelompok berpendapatan tinggi tumbuh

pesat, ketidaksetaraan ekonomi dapat memburuk hingga bisa berimplikasi pada ketidakpuasan sosial dan politik.

Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan telah menjadi masalah serius di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun isu pemerataan selalu muncul dalam pembangunan, penting untuk mengendalikan dampaknya. Pemerataan distribusi pendapatan harus selalu dipantau agar kebijakan yang tepat dapat diambil untuk mengurangi ketimpangan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pemerataan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Berikut merupakan Indeks Gini Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan nasional.



	2020	2021	2022	2023	2024
Katingan	0,252	0,23	0,25	0,261	0,253
Kalteng	0,329	0,323	0,319	0,317	0,304
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Grafik 2-10 Indeks Gini Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Gini Kabupaten Katingan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2021 ketika angkanya mencapai 0,23 dan kemudian meningkat hingga mencapai 0,261 pada tahun 2023 dan turun kembali di tahun 2024 menjadi 0,253. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional, Indeks Gini Kabupaten Katingan tergolong lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Katingan lebih merata, tetapi tetap perlu menjadi perhatian karena angka tersebut meningkat selama dua tahun terakhir.

2.1.2.1.3 Kemiskinan

Seseorang dikategorikan sebagai miskin apabila pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Kemiskinan cenderung meningkat seiring dengan semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan

miskin. Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan yang diukur berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan menetapkan standar minimum kebutuhan (baik makanan maupun non-makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk hidup layak. Standar minimum kebutuhan ini disebut garis kemiskinan. Berikut merupakan perkembangan indikator kemiskinan di Kabupaten Katingan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2-14 Indikator Kemiskinan Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

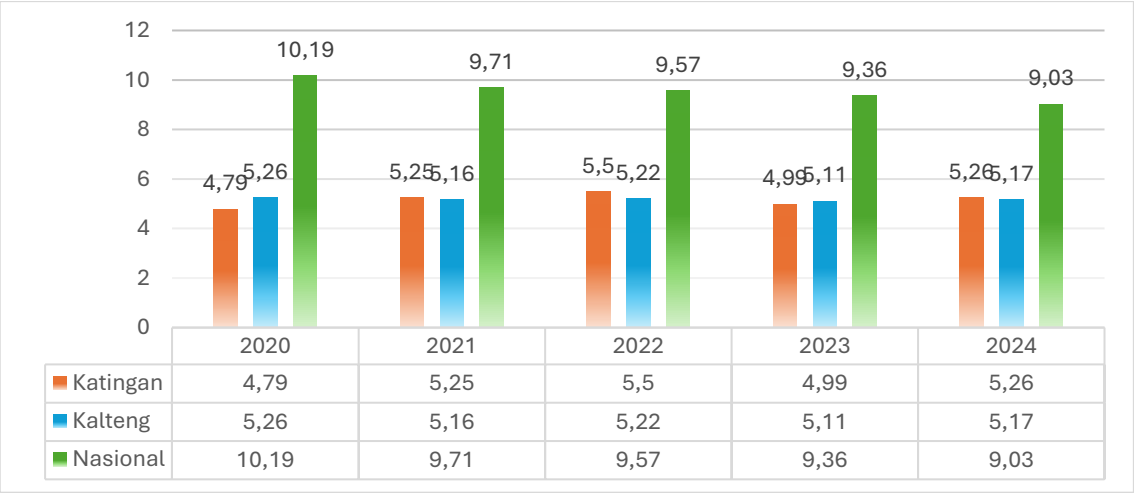
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	8,23	9,15	9,71	8,95	9,55
2	Garis Kemiskinan (Rp)	474.056	498.487	553.082	589.596	615.575
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	4,79	5,25	5,50	4,99	5,26
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,51	0,47	0,67	0,68	0,60
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,09	0,07	0,11	0,16	0,10

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan Tahun 2424 (diolah)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Katingan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 di mana jumlah penduduk miskin mencapai 9,71 ribu. Kemudian untuk garis kemiskinan Kabupaten Katingan, selalu meningkat selama lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2020 sebesar Rp 474.056 meningkat hingga mencapai Rp 615.575 pada tahun 2024.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami fluktuasi, di mana angka tertinggi terjadi pada tahun 2023 yakni mencapai 0,68 (P1) dan 0,16 (P2). Pada tahun 2024, angka masing–masing mencapai 0,60 (P1) dan 0,10 (P2).

Sebagaimana jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin Kabupaten Katingan juga mengalami fluktuasi. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2022, yakni mencapai 5,50 persen dan kemudian menurun menjadi 5,26 persen pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, keduanya berfluktuasi. Namun, jika dibandingkan dengan nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah masih jauh lebih rendah.

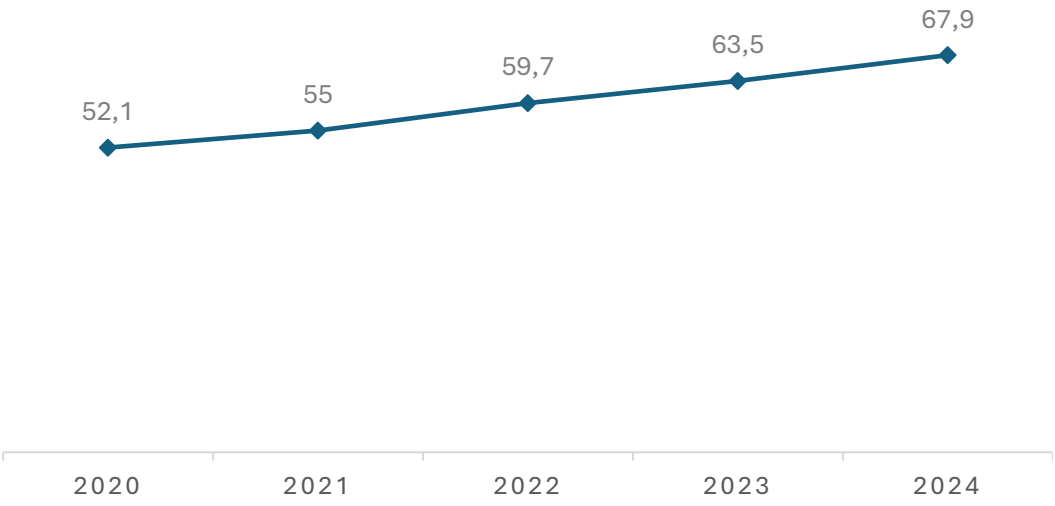


	2020	2021	2022	2023	2024
Katingan	4,79	5,25	5,5	4,99	5,26
Kalteng	5,26	5,16	5,22	5,11	5,17
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03

Grafik 2-11 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024
Sumber: BPS, 2025

2.1.2.1.4 PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita, atau PDRB per kapita, adalah indikator ekonomi yang dihitung dengan membagi nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun tersebut dengan jumlah penduduk pada periode yang sama. PDRB per kapita memberikan gambaran tentang estimasi pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap individu di suatu wilayah. Berikut adalah PDRB per kapita Kabupaten Katingan selama lima tahun terakhir.



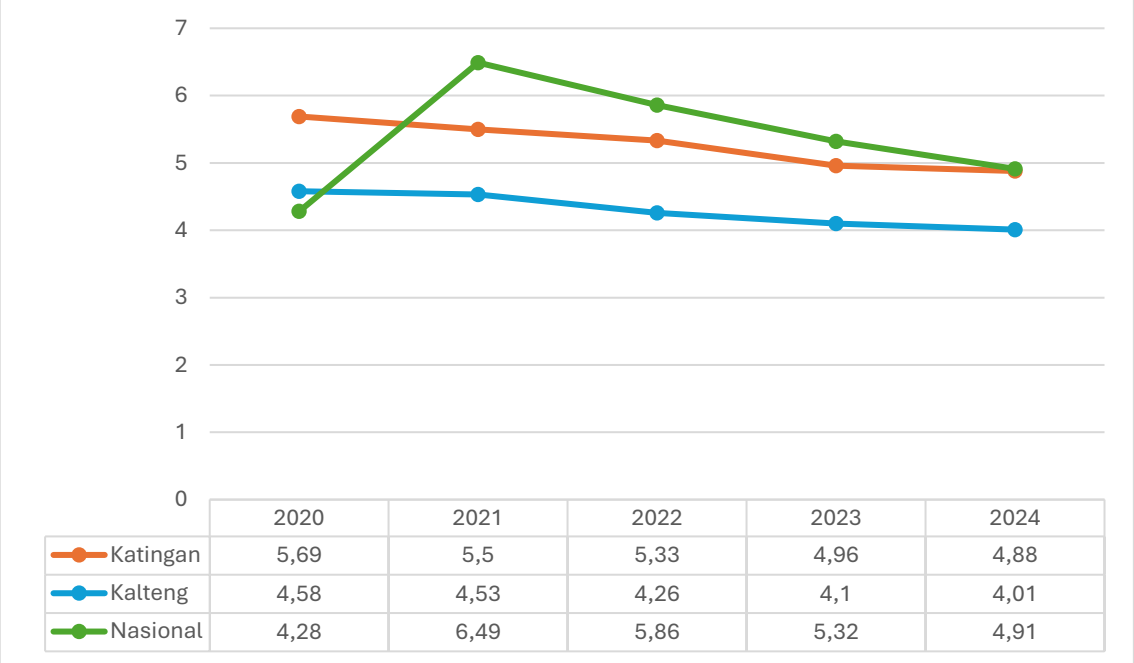
Grafik 2-12 PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024
Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2025

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan selama lima tahun terakhir memiliki tren yang positif di mana angkanya selalu

meningkat dari 52,1 juta pada tahun 2020 menjadi 67,9 juta pada tahun 2024 dan menjadi yang tertinggi selama periode tersebut.

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja. Angka TPT mencerminkan seberapa banyak tenaga kerja yang belum terserap. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran mencakup orang–orang yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau telah diterima bekerja namun belum mulai bekerja. Berikut merupakan data tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan nasional selama lima tahun terakhir.



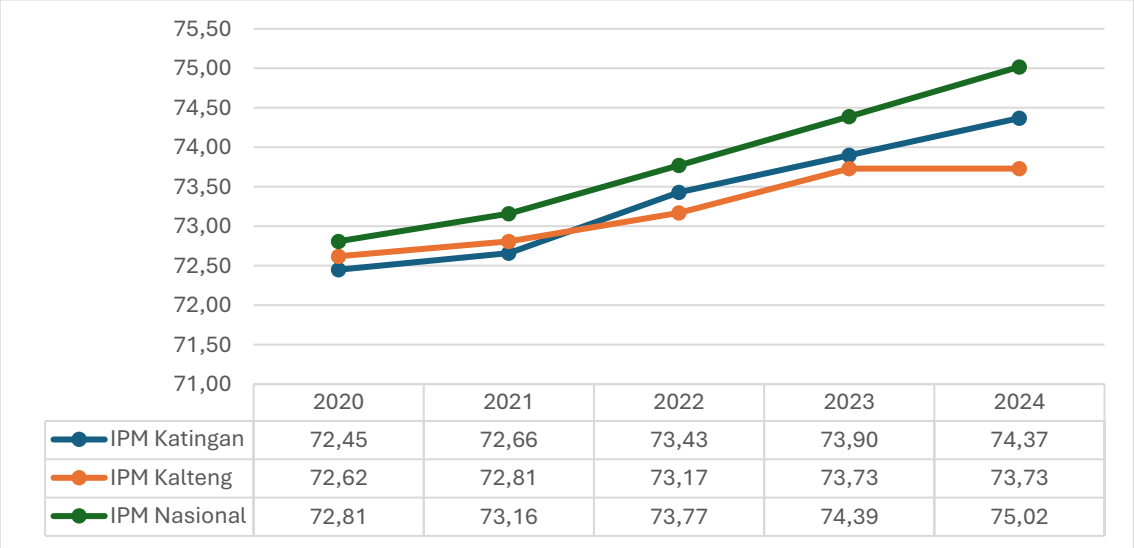
	2020	2021	2022	2023	2024
Katingan	5,69	5,5	5,33	4,96	4,88
Kalteng	4,58	4,53	4,26	4,1	4,01
Nasional	4,28	6,49	5,86	5,32	4,91

Grafik 2-13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024
Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Katingan cenderung menurun selama lima tahun terakhir di mana pada 2024 angkanya mencapai 4,88, meskipun sempat meningkat mencapai 5,69 persen pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, angka TPT Kabupaten Katingan masih lebih tinggi meskipun dalam tiga tahun terakhir angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional.

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup penduduk. Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan dapat dilihat dari pencapaian perkembangan IPM dari tahun ke tahun. Selama periode 2020–2024 angka IPM Kabupaten Katingan menunjukkan tren yang meningkat.



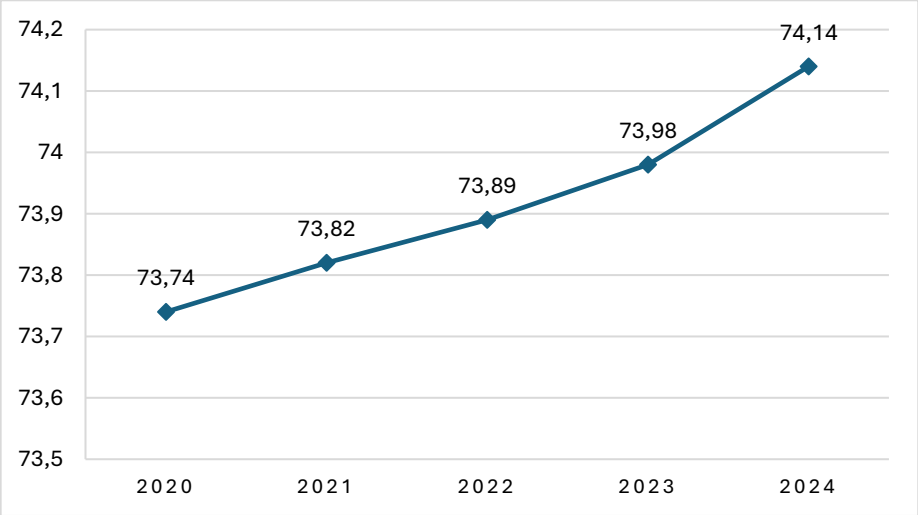
	2020	2021	2022	2023	2024
IPM Katingan	72,45	72,66	73,43	73,90	74,37
IPM Kalteng	72,62	72,81	73,17	73,73	73,73
IPM Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Grafik 2-14 IPM Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024
Sumber: Berita Resmi Statistik, 2025

IPM di Kabupaten Katingan selama periode 2020–2022 masih berada pada kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), tetapi pada tahun 2023 nilai IPM Kabupaten Katingan sebesar 70,28 meningkat 0,54 poin dan mampu berada pada kategori tinggi (70 ≤ IPM ≤ 80) dan IPM pada tahun 2024 mencapai 74,37. Jika dilihat perkembangannya nilai IPM Kabupaten Katingan pada periode 2020–2024 masih berada di bawah nilai rata-rata IPM provinsi maupun nasional. Hal tersebut disebabkan karena nilai Usia Harapan Hidup yang masih rendah dan berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Katingan harus menjadi prioritas pembangunan kesejahteraan oleh pemda Katingan ke depannya. Walaupun demikian, secara umum perkembangan IPM Kabupaten Katingan selalu membentuk pola yang meningkat atau semakin baik dan mengikuti tren peningkatan IPM provinsi maupun nasional.

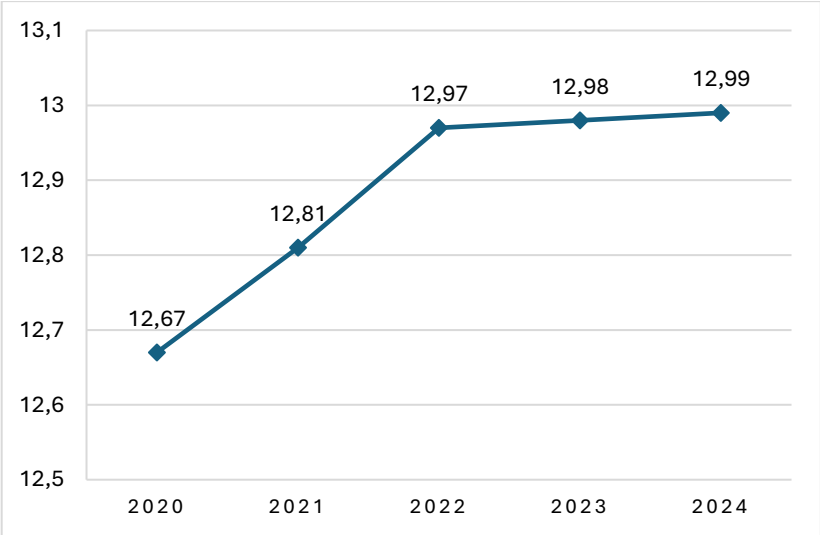
Terdapat tiga dimensi penyusun IPM yang mencakup dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Di Kabupaten Katingan, dimensi umur panjang dan sehat yang diukur melalui usia harapan hidup menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, usia harapan hidup

di Kabupaten Katingan adalah 73,74 tahun, yang meningkat menjadi 74,14 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas hidup, serta upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Meskipun peningkatan tersebut relatif kecil, hal ini positif mengingat tantangan geografis dan infrastruktur yang mungkin mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Katingan.



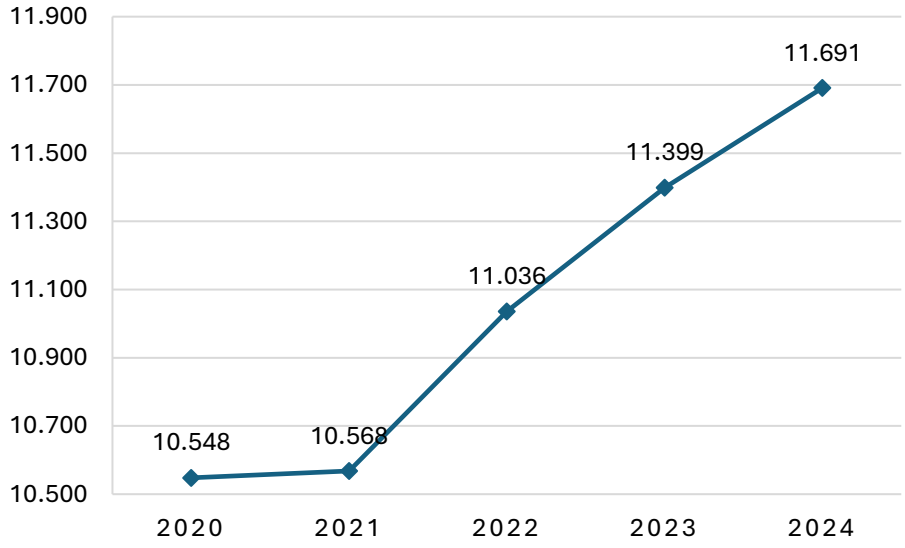
Grafik 2-15 Usia Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024
Sumber: Berita Resmi Statistik, 2025

Dimensi pengetahuan yang diukur melalui harapan lama sekolah juga menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah di Kabupaten Katingan adalah 12,67 tahun, naik menjadi 12,99 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan ketersediaan tenaga pendidik, serta program-program untuk meningkatkan partisipasi dan tingkat kelulusan di sekolah-sekolah.



Grafik 2-16 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024
Sumber: Berita Resmi Statistik, 2025

Sementara itu, dalam dimensi standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita, Kabupaten Katingan juga mengalami peningkatan meskipun ada fluktuasi yang terlihat, terutama terpengaruh oleh situasi eksternal seperti pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita mencapai Rp10.548.000, naik menjadi Rp11.691.000 pada tahun 2024. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya mencerminkan upaya pemulihan ekonomi dan mungkin adanya dukungan dari program-program sosial atau perekonomian lokal yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup penduduk Kabupaten Katingan secara keseluruhan.



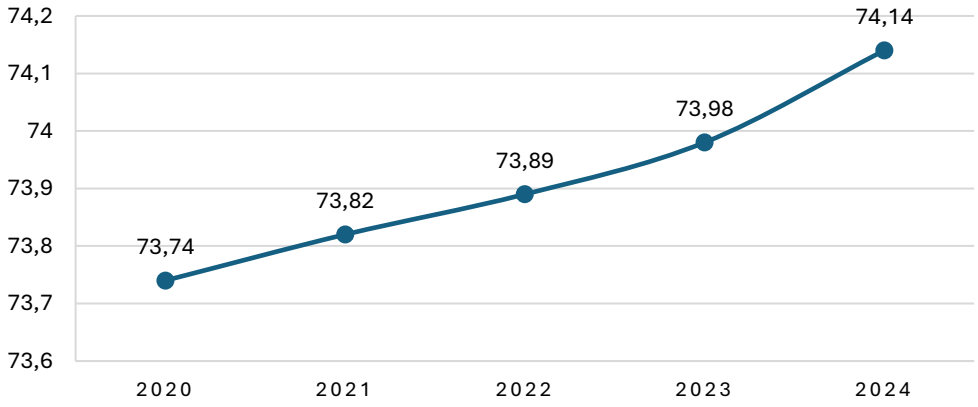
Grafik 2-17 Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah) Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024
Sumber: BPS Kabupaten Katingan, 2025

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah perkiraan tahunan rata-rata yang dapat diharapkan individu untuk hidup dan sering digunakan sebagai indikator kesehatan dan kualitas hidup suatu populasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, usia harapan hidup pada tahun tertentu dihitung dengan mempertimbangkan faktor mortalitas pada kelompok umur yang berbeda dalam populasi. Data usia harapan hidup di Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 73,74 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,14 tahun pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan beberapa kemungkinan perubahan positif dalam kondisi kesehatan dan kualitas hidup penduduk Kabupaten Katingan selama periode tersebut. Faktor–faktor seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan kesehatan masyarakat, dan perbaikan dalam infrastruktur sanitasi dan gizi dapat berkontribusi terhadap peningkatan usia harapan hidup. Implikasi dari peningkatan usia harapan hidup ini termasuk peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan, potensi penurunan angka kematian prematur, serta dampak positif terhadap produktivitas ekonomi dan pembangunan sosial di Kabupaten Katingan.



Grafik 2-18 Usia Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Berita Resmi Statistik, 2023

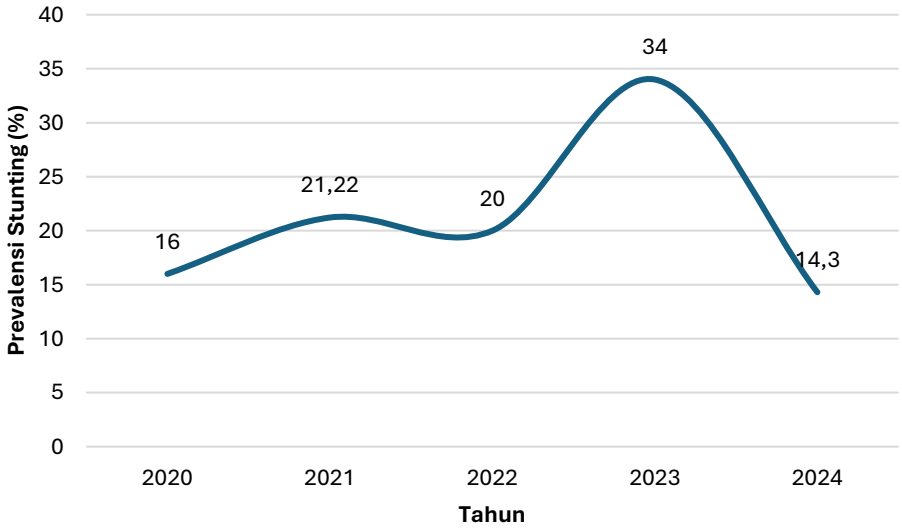
2.1.2.2.2 Prevalensi Stunting

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), *stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. *Stunting* ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar umur dan anak yang tampak lebih kecil dibandingkan anak seusianya. Kekurangan gizi yang dialami anak *stunting* tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga

menghambat perkembangan otak sehingga berdampak pada kemampuan kognitif dan produktivitas di masa dewasa.

Data *stunting* di Kabupaten Katingan dari 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi tahunan. Prevalensi *stunting* naik drastis dari 16% pada 2020 menjadi 21,22% pada 2021 sebelum menurun lagi pada tahun-tahun setelahnya. Penurunan signifikan ini menunjukkan bahwa upaya intervensi dan program kesehatan yang diterapkan cukup efektif, meskipun ada tantangan yang menyebabkan peningkatan sementara pada 2021.

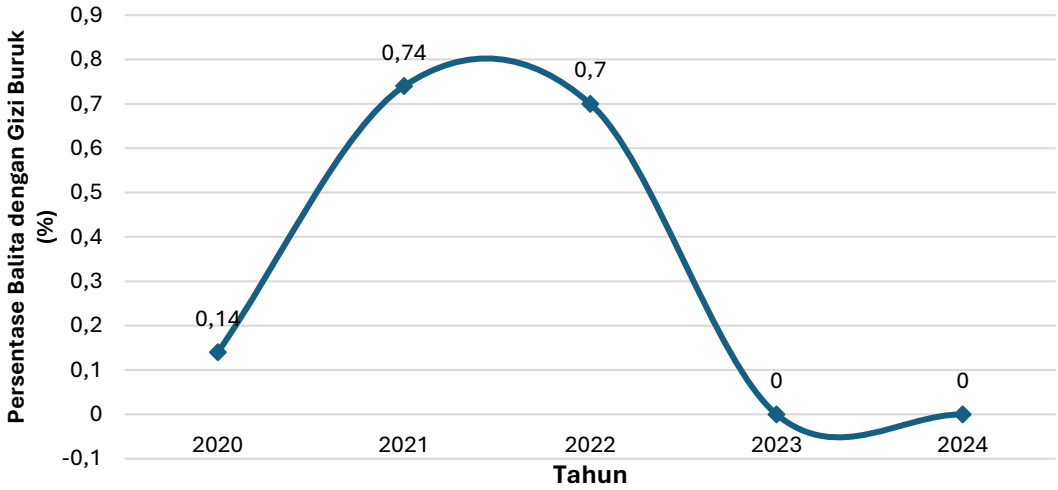
Untuk menjaga dan mempercepat penurunan angka *stunting*, penting untuk melanjutkan kebijakan dan program intervensi yang adaptif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan gizi, akses layanan kesehatan yang memadai, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan. Monitoring dan evaluasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan data dan kondisi lapangan.



Grafik 2-19 *Stunting* di Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2024; SKI, 2024; SSGI, 2025

Analisis data tentang persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Katingan antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif namun positif dalam penurunan angka tersebut. Terjadi peningkatan drastis dari 0,14% menjadi 0,74% pada tahun 2021, yang bisa disebabkan oleh faktor–faktor seperti perubahan dalam pola makan atau faktor lingkungan. Pada 2022 hingga 2023, tercatat penurunan yang signifikan hingga mencapai 0%, yang menandakan pencapaian yang luar biasa dalam menangani masalah gizi buruk di Kabupaten Katingan. Implikasi dari penurunan ini adalah peningkatan kualitas hidup dan kesehatan bagi balita di wilayah tersebut. Balita dengan gizi buruk yang rendah

memiliki risiko tinggi terhadap berbagai penyakit dan gangguan pertumbuhan yang dapat memengaruhi masa depan mereka. Tercapai angka 0% pada 2023 dan 2024, Kabupaten Katingan memperlihatkan bahwa strategi intervensi yang efektif dan berkelanjutan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

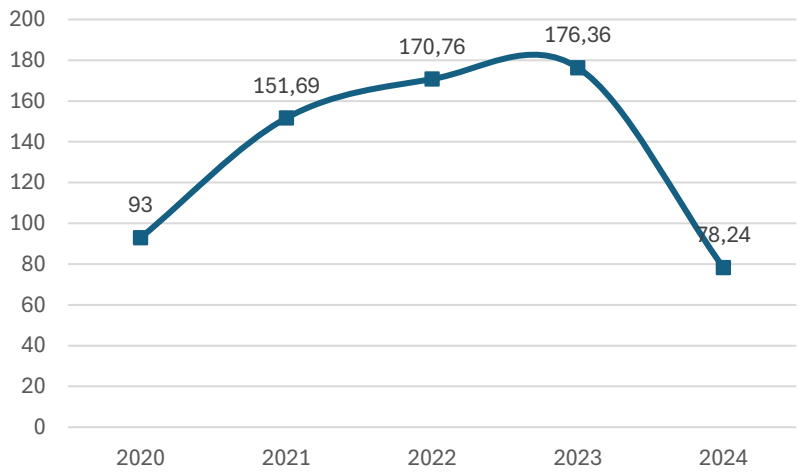


Grafik 2-20 Persentase Balita dengan Gizi Buruk Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2025

2.1.2.2.3 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

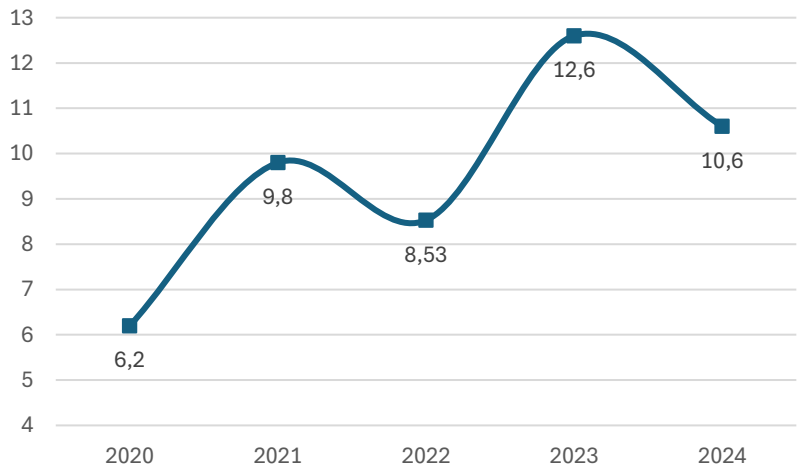
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah kematian perempuan akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau dalam periode 42 hari setelah persalinan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu di suatu negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2020, AKI di Indonesia setelah melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup dan di Kalimantan Tengah 200 per 100 ribu kelahiran hidup (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxOSMx/angka-kematian-ibu-aki--maternal-mortality-rate-mmr---hasil-long-form-sp2020-menurut-provinsi--2020.html), sedangkan di Katingan sebagaimana grafik dibawah ini



Grafik 2-21 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2025

Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan bayi. Data untuk Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif yang mencerminkan dinamika dalam upaya peningkatan kesehatan dan kehidupan anak–anak di wilayah tersebut. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 9,8 per 1000 kelahiran hidup, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti fluktuasi dalam kualitas layanan kesehatan atau kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan bayi. Meskipun turun kembali pada 2022 menjadi 8,53%, tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan hingga 12,6%. Peningkatan ini bisa jadi disebabkan oleh faktor–faktor seperti lonjakan penyakit menular, perubahan dalam praktik perawatan kesehatan, atau faktor eksternal seperti akses terhadap layanan kesehatan.

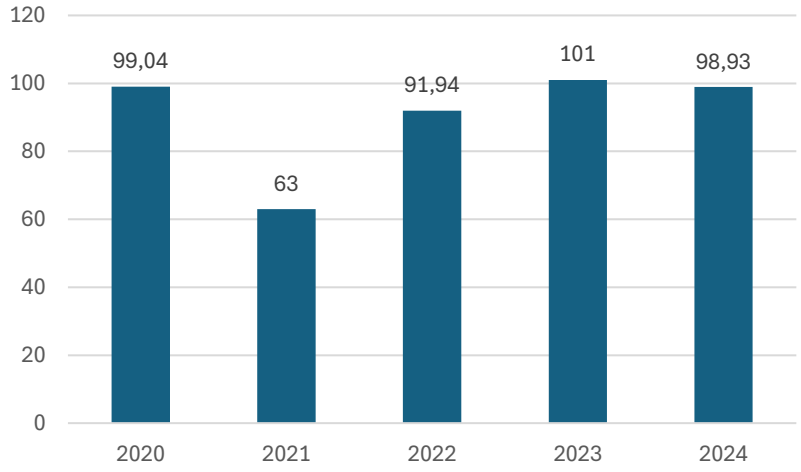


Grafik 2-22 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2025

Masalah-masalah kesehatan yang telah disebutkan sebelumnya, berpotensi untuk menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan harapan hidup di Kabupaten Katingan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan kembali.

2.1.2.2.4 Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk memastikan setiap warganya memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu serta terjangkau. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tingginya cakupan JKN di Kabupaten Katingan tidak hanya mencerminkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi sebagian besar penduduk, tetapi juga menandakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi kesehatan. Selain itu, hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduk ke program JKN, sebagai langkah krusial menuju pencapaian universal health coverage (UHC), yaitu kondisi di mana setiap individu dapat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa menghadapi kesulitan finansial. Capaian kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Katingan mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 99,04% menjadi 98,93% di tahun 2024. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2-23 Cakupan Kepersertaan JKN di Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2025

2.1.2.2.5 Capaian SPM Kesehatan dan Rencana Induk Bidang Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan adalah ukuran keberhasilan pemerintah dalam menyediakan jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan

yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Kesehatan meliputi berbagai layanan dasar seperti pelayanan ibu hamil, persalinan, bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah, usia produktif, hipertensi, diabetes, gangguan jiwa berat, tuberkulosis, dan HIV. Adapun capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Katingan adalah berikut:

Tabel 2-15 Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020-2024

Komponen SPM Kesehatan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase	79,18	87,41	83,72	85,72	81,1
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase	52,11	52,21	61,32	84,48	65,4
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase	83,26	85	78,54	83,46	78,6
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase	83,31	53,48	62,9	75,12	70,0
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	44,89	52,24	90,47	91,4	96,6
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	52,18	50,03	83,5	63,7	80,1
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	90,57	28,16	57,98	85	94,7
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	53,13	70,7	83.22	84,2	92,6
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	47,27	78,95	92,02	101,5	99,6
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase	84,88	81,3	90,6	116,7	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase	50	76,31	80,72	81,2	88,8
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase	67,52	57,39	83,12	83,6	87,1

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Sesuai amanat UU. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun alokasi anggaran kesehatan sesuai program kesehatan nasional yang tercantum dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), sebagai bentuk penyelarasan program kesehatan nasional dalam RIBK 2025-2029 dengan program

kesehatan di daerah, telah ditentukan indikator kinerja kesehatan dan ketercapaiannya di Katingan adalah berikut:

Tabel 2-16 Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020-2024

Uraian Indikator RIBK	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	Tahun	73,74	73,82	73,89	73,98	74,14
TFR (Angka Kelahiran Total)		2,48	-	-	2,41	2,26
Jumlah Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	93	151,69	170,76	176,36	78,24
Jumlah Kematian Balita	Per 1000 Kelahiran Hidup	6,78	20,86	9,22	2,39	-
Prevalensi Stunting	Persentase	16	21,22	20	34	14,3
Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	-	-	-	-	-
Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	73.4	63,3	85.4	78.2	63,3
Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persentase	99,04	63	91,42	101	98,93
Angka keberhasilan pengobatan TB	Persentase	82,44	83,67	65,84	63,56	69,40
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	53,71	70,1	83,22	84,18	92,64
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persentase	44	44	100	100	100

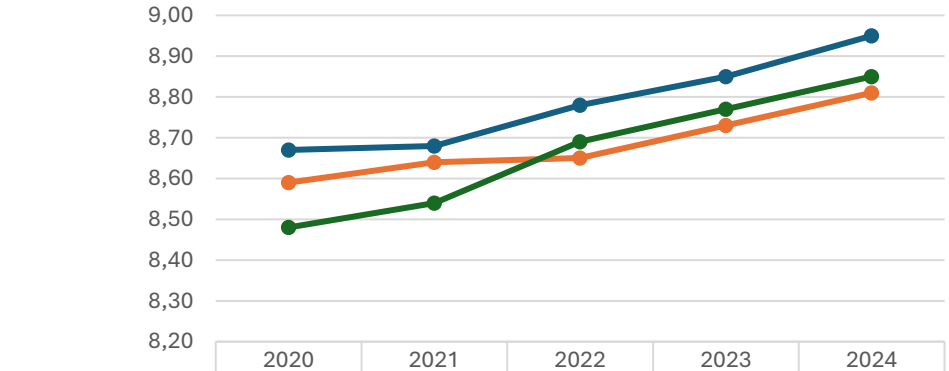
Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah ukuran statistik yang menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan seseorang dalam pendidikan formal, baik tingkat dasar maupun tingkat menengah. Data rata-rata lama sekolah penting karena mencerminkan tingkat akses dan partisipasi dalam pendidikan, serta memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan di suatu wilayah. Di Kabupaten Katingan, data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah mencapai 8,67 tahun, yang naik menjadi 8,95 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Faktor–faktor seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan ketersediaan tenaga pendidik, serta program-program untuk meningkatkan partisipasi dan tingkat kelulusan dapat menjadi penyebab utama dari peningkatan ini.

Dalam konteks perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan rata-rata nasional, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Katingan selalu lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Katingan memiliki fokus yang kuat terhadap pendidikan dan telah berhasil mencapai prestasi yang membanggakan dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya. Implikasi positif dari peningkatan rata-rata lama sekolah ini termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, potensi peningkatan produktivitas dan kemampuan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.



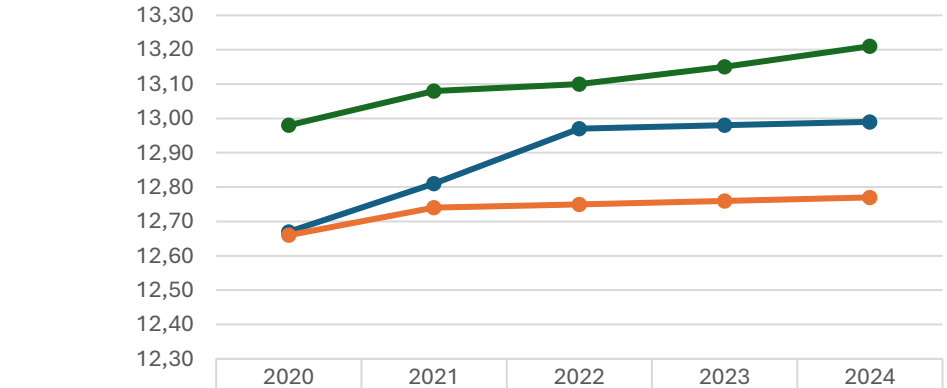
	2020	2021	2022	2023	2024
RLS Katingan	8,67	8,68	8,78	8,85	8,95
RLS Kalteng	8,59	8,64	8,65	8,73	8,81
RLS Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Grafik 2-24 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Berita Resmi Statistik, 2025

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah mengacu pada jumlah tahun yang diharapkan seseorang akan menghabiskan dalam sistem pendidikan. Ini adalah indikator penting dalam mengukur tingkat partisipasi dan aksesibilitas terhadap pendidikan di suatu wilayah. Data untuk Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dalam harapan lama sekolah. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah di Kabupaten Katingan adalah 12,67 tahun, yang kemudian meningkat menjadi 12,99 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta masyarakat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Faktor seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan ketersediaan tenaga pendidik, serta program-program untuk meningkatkan partisipasi dan kelulusan sekolah dapat menjadi penyebab dari peningkatan ini.

Meskipun harapan lama sekolah di Kabupaten Katingan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan yang signifikan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan lebih lanjut agar dapat mencapai atau melebihi standar nasional. Upaya untuk terus meningkatkan harapan lama sekoaslah akan memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, potensi peningkatan produktivitas, serta kesempatan yang lebih baik bagi individu untuk mencapai potensi penuh mereka.



	2020	2021	2022	2023	2024
HLS Katingan	12,67	12,81	12,97	12,98	12,99
HLS Kalteng	12,66	12,74	12,75	12,76	12,77
HLS Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

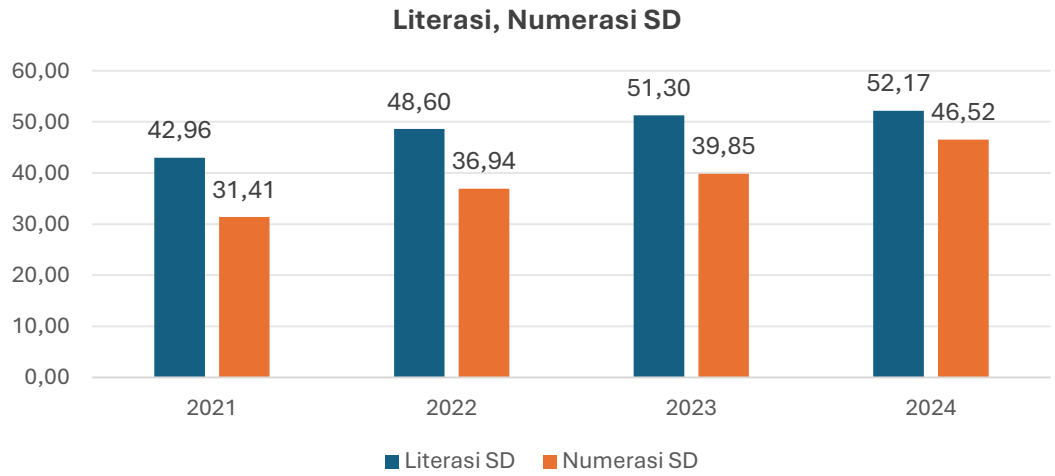
Grafik 2-25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Berita Resmi Statistik, 2025

2.1.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Skor literasi mengukur kemampuan individu dalam membaca dan memahami teks, termasuk kemampuan untuk menganalisis informasi tertulis dan menerapkan pemahaman bacaan dalam konteks yang lebih luas. Sementara itu, skor numerasi menilai keterampilan seseorang dalam memahami dan menggunakan konsep matematika dasar, seperti operasi aritmetika dan aplikasi konsep matematika dalam situasi sehari–hari. Kedua skor ini memberikan gambaran penting tentang kemampuan akademis dan potensi seseorang dalam pendidikan serta kehidupan sehari–hari.

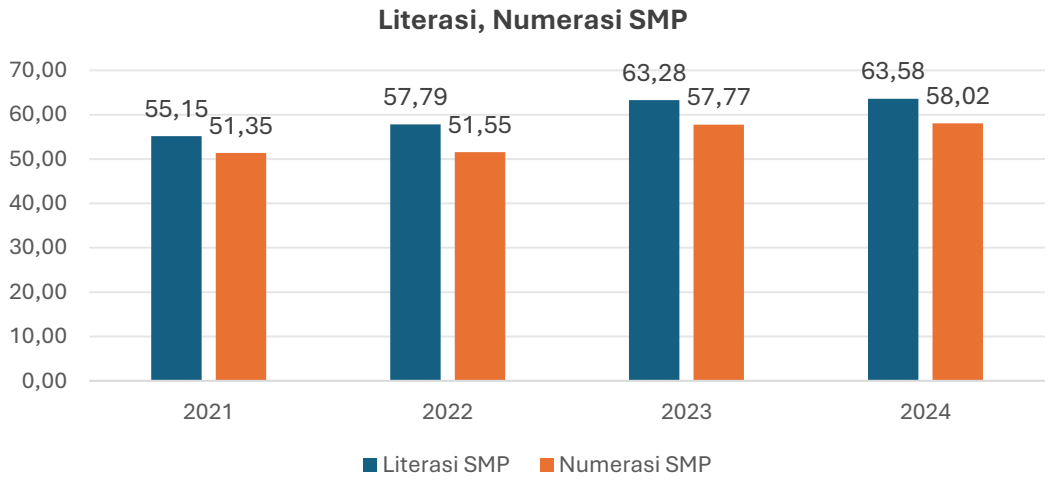
Terdapat peningkatan signifikan dalam kemampuan literasi dan numerasi SD dari tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Katingan. Pada 2022, kemampuan literasi dan numerasi SD masing–masing tercatat sebesar 1,63 dan 1,49. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan data mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh aturan kabupaten dan kota sebelumnya, dengan kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan anggaran disusun secara bertahap. Pada tahun 2023, kegiatan di setiap bidang dirancang dengan persetujuan

dari Kabupaten dan Kota, mencerminkan adanya penyesuaian dan perencanaan yang lebih terstruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terjadi peningkatan besar pada tahun 2023, dengan kemampuan literasi meningkat menjadi 52,59 dan kemampuan numerasi menjadi 39,6. Pada tahun 2024, kemampuan literasi terus meningkat menjadi 58,43, sementara kemampuan numerasi mencapai 48,36, menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pendidikan Kabupaten Katingan.



*data tahun 2022 dan 2023 merupakan nilai skor; **data tahun 2024 merupakan nilai capaian
Grafik 2-26 Skor Literasi dan Numerasi Kabupaten Katingan Tahun 2021–2024
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, 2024

Selain pencapaian di tingkat SD, terdapat peningkatan signifikan dalam kemampuan literasi dan numerasi di tingkat SMP dari tahun 2022 hingga 2024 di Kabupaten Katingan. Pada tahun 2022, kemampuan literasi dan numerasi SD masing–masing tercatat sebesar 1,59. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan data yang mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh aturan kabupaten dan kota sebelumnya, dengan kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan dan anggaran yang disusun secara bertahap. Terjadi peningkatan besar pada tahun 2023, dengan kemampuan literasi meningkat menjadi 36,66 dan kemampuan numerasi menjadi 56,33. Pada tahun 2024, kemampuan literasi terus meningkat menjadi 59,84, sementara kemampuan numerasi mencapai 63,78, menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pendidikan di Kabupaten Katingan.



*data tahun 2022 dan 2023 merupakan nilai skor; **data tahun 2024 merupakan nilai capaian
Grafik 2-27 Skor Literasi dan Numerasi SMP Kabupaten Katingan Tahun 2021–2024
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, 2024

2.1.2.3.4 Capaian SPM Pendidikan

Berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 dan Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025, terdapat 15 indikator SPM yang harus menjadi parameter penilaian mutu aspek pendidikan. Tabel di bawah menunjukkan capaian indikator SPM pendidikan di Kabupaten Katingan dalam kurun waktu 2021 hingga 2024 yang memiliki perkembangan beragam.

Tabel 2-17 Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2021–2024

No.	Indikator	Jenjang	2021	2022	2023	2024
1	A 1 Skor Kemampuan Literasi	SD	42,96	48,60	51,30	52,17
2	A 1 Skor Kemampuan Literasi	SMP	55,15	57,79	63,28	63,58
3	A 2 Skor Kemampuan Numerasi	SD	31,41	36,94	39,85	46,52
4	A 2 Skor Kemampuan Numerasi	SMP	51,35	51,55	57,77	58,02
5	B 10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	72.95	73.23	73,74	66,83
6	B 13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	SD/SMP	99,07	98,66	98,84	97,62
7	B 15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Kesetaraan	11,88	15,43	25,73	36,33
8	B 8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	58.20	54.25	55,35	52,11

No.	Indikator	Jenjang	2021	2022	2023	2024
9	C 1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	59.09	63.43	73,74	73,75
10	D 10 Iklim Inklusivitas	SD	65,55	73,55	54,51	56,89
11	D 10 Iklim Inklusivitas	SMP	67,01	77,88	58,73	58,37
12	D 4 Iklim Keamanan	SD	66,45	79,17	71,81	73,27
13	D 4 Iklim Keamanan	SMP	75,67	78,96	72,85	71,35
14	D 8 Iklim Kebinekaan	SD	60,11	85,88	71,70	69,37
15	D 8 Iklim Kebinekaan	SMP	63,59	78,39	75,29	71,90

Sumber: Surat Mendikbusristek No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 dan Surat Mendikdasmen No. 1422/MDM.A/PR.07.05/2025.

Pada aspek literasi dan numerasi, terjadi peningkatan signifikan, terutama untuk tingkat SD. Skor literasi SD naik dari 42,96 pada 2021 menjadi 52,17 pada 2024, sementara numerasi SD melonjak dari 31,41 menjadi 46,52 dalam periode yang sama. Namun, capaian ini masih tertinggal dibandingkan dengan tingkat SMP yang lebih stabil, mengindikasikan perlunya intervensi khusus untuk memperkuat dasar literasi dan numerasi di jenjang dasar. Di sisi lain, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk SD/SMP relatif stabil di atas 97%, meski mengalami penurunan kecil pada 2024. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah turunnya partisipasi PAUD dari 73,74% pada 2023 menjadi 66,83% pada 2024 yang disebabkan oleh faktor akses hingga kesadaran masyarakat. Sementara itu, partisipasi pendidikan kesetaraan menunjukkan kemajuan pesat, dari 11,88% menjadi 36,33%, mencerminkan keberhasilan program inklusi.

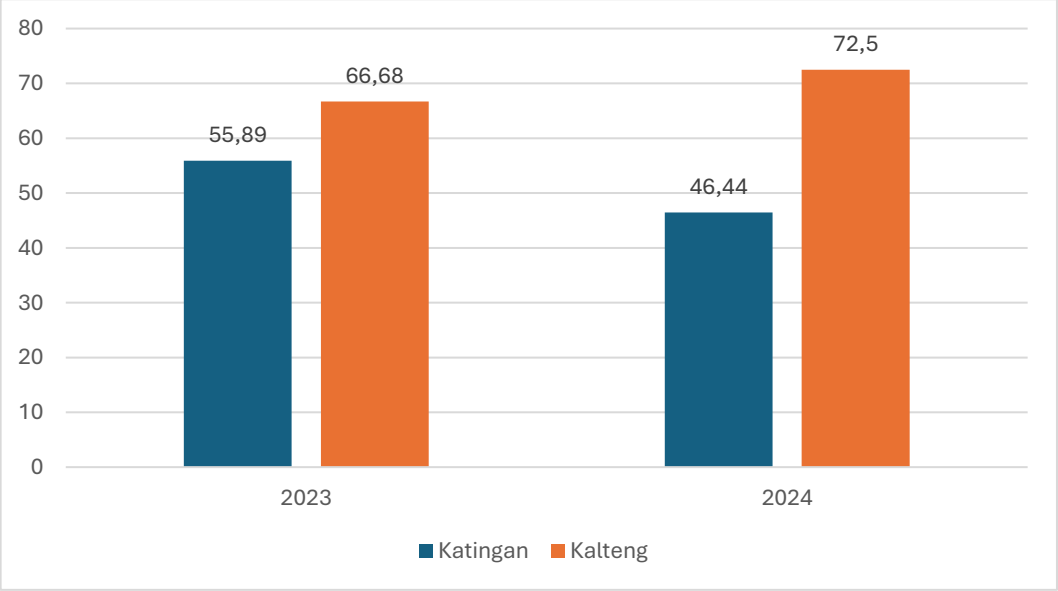
Ditinjau dari kualitas satuan pendidikan, proporsi PAUD terakreditasi minimal B mengalami penurunan dari 58,20% menjadi 52,11%, menandakan perlunya perbaikan dalam standar pengelolaan. Di sisi positif, kualifikasi guru PAUD meningkat signifikan, dengan 73,75% bergelar S1/D4 pada tahun 2024. Namun, peningkatan kualifikasi ini perlu diimbangi dengan penguatan kompetensi pedagogik. Pada aspek iklim pendidikan, indikator inklusivitas, keamanan, dan kebinekaan menunjukkan tren fluktuatif. Sebagai contoh, iklim kebinekaan SD sempat mencapai 85,88% pada 2022 tetapi turun menjadi 69,37% pada 2024, sementara iklim keamanan SMP justru mengalami penurunan. Hal ini mengisyaratkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang berkaitan dengan kondusivitas lingkungan sekolah.

Berdasarkan temuan ini, terdapat urgensi terkait peningkatan kualitas pembelajaran literasi dan numerasi di SD, revitalisasi program PAUD untuk mendongkrak partisipasi, serta penguatan akreditasi dan kapasitas guru. Selain itu, penting untuk memperbaiki iklim pendidikan melalui program yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui pendekatan yang

terarah dan berkelanjutan, target SPM pendidikan dapat dicapai secara lebih merata dan konsisten dalam lima tahun mendatang.

2.1.2.3.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Katingan pada tahun 2023 tercatat sekitar 55,89 dan pada tahun 2024 turun menjadi 46,44, yang menunjukkan kondisi pengembangan literasi masyarakat yang masih dalam tahap perkembangan dan perlu perbaikan. IPLM mengukur berbagai aspek literasi, mulai dari akses dan minat baca masyarakat, kualitas sumber daya perpustakaan, hingga keterlibatan komunitas dalam aktivitas literasi.



Grafik 2-28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2024

Sumber:
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. (2025). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2024. Diakses dari https://kalteng.bps.go.id/id/statistics-table/3/Ved0V05FTjBaRVJuYzA1bVkwcHlhVk5KUjJGTlVUMDkjMw==/society-literacy-development-index-and-composer-elements-by-regency-municipality-in-kalimantan-tengah-province—2023.html?year=2024

Nilai ini mengindikasikan bahwa pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu terus menggalakkan program-program literasi, seperti peningkatan fasilitas perpustakaan, pelatihan tenaga perpustakaan, dan penyelenggaraan kegiatan literasi yang dapat merangsang minat baca masyarakat lebih luas. Perbaikan juga diarahkan pada pemerataan akses informasi dan bahan bacaan, khususnya di wilayah yang lebih terpencil di Kabupaten Katingan.

Dengan upaya berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan perpustakaan, diharapkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Katingan dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

2.1.2.3.6 Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengetahuan serta kecakapan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jarigan internet dan lainnya. Indeks Literasi Digital bentuk dari 4 pilar utama yaitu Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture. Data Indeks Literasi Digital untuk Kabupaten Katingan tidak tersedia karena perhitungan Indeks Literasi Digital masih hanya pada level Nasional dan Provinsi, untuk tetap dapat menggambarkan kemampuan penggunaan teknologi oleh masyarakat maka dapat digunakan indeks pengganti, yaitu Indeks Masyarakat Digital Indonesia.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-sehari maupun terkait pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-seharinya, di mana semua aktivits yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (paperless) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua ini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Terdapat empat pilar utama pembentuk Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Katingan pada tahun 2022 adalah 37,63, pada tahun 2023 adalah 41,73 dan pada tahun 2024 turun menjadi 40,32 dengan klasifikasi cukup. (sumber : https://imdi.sdmdigital.id/home)

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan indikator penting dalam menilai tingkat perlindungan sosial bagi pekerja di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan sejauh mana tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, telah

memiliki akses terhadap jaminan sosial yang melindungi mereka dari berbagai risiko ketenagakerjaan, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, dan/atau saat memasuki masa pensiun. Penyediaan jaminan sosial bagi tenaga kerja berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan ekonomi pekerja serta keluarganya. Semakin luas cakupan kepesertaan, semakin tinggi tingkat perlindungan yang diberikan kepada pekerja. Adapun kondisi data Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Katingan masih "belum tersedia".

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan antarumat beragama di suatu wilayah atau negara. Indeks ini sangat penting karena mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat hidup berdampingan dalam keberagaman agama. Dengan adanya IKUB, kita dapat mengetahui tingkat toleransi, sikap saling menghormati, serta hubungan antarumat beragama yang ada di suatu daerah. Beberapa indikator yang dinilai dalam IKUB antara lain adalah tingkat toleransi antaragama, interaksi sosial yang terjalin antara kelompok agama yang berbeda, serta adanya kebijakan yang mendukung kehidupan beragama yang harmonis. Selain itu, IKUB juga mengukur potensi konflik atau ketegangan yang mungkin muncul di masyarakat akibat perbedaan keyakinan. Melalui penilaian IKUB, pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi kerukunan umat beragama, yang bisa menjadi dasar untuk merancang kebijakan atau program yang mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan damai. Dengan meningkatnya nilai IKUB, diharapkan tercipta kehidupan yang penuh kedamaian, saling menghargai, dan tanpa diskriminasi antar umat beragama. IKUB diukur dengan mengacu pada tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Kriteria capaian IKUB adalah IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), IKUB Sangat Tinggi (80-100). Data IKUB untuk Kabupaten Katingan "belum tersedia".

2.1.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koorfinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri

dari 31 indikator yang dikelomopokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuah dimensi tersebut mecakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Kriteria capain IPK adalah IPK ≤ 20 (Kurang), 20 < IPK ≤ 40 (Sedang), 40 < IPK ≤ 60 (Cukup), 60 < IPK ≤ 80 (Baik), 80 < IPK ≤ 100 (Amat Baik). Data IPK untuk Kabupaten Katingan "belum tersedia"

2.1.2.5.3 Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah indikator penting dalam mengukur upaya pelestarian warisan budaya suatu daerah. Indikator ini menggambarkan sejauh mana benda-benda bersejarah, situs-situs penting, dan kawasan yang memiliki nilai budaya tinggi dijaga dan dilestarikan agar tetap ada dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pelestarian ini mencakup berbagai upaya, mulai dari pemeliharaan fisik, restorasi, hingga pengaturan hukum dan kebijakan yang melindungi warisan budaya dari kerusakan atau perusakan. Tingkat pelestarian ini penting untuk mempertahankan identitas budaya, mendukung pariwisata, dan menjaga keberlanjutan sejarah dan tradisi lokal. Berikut data terkait persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Katingan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2-18 Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (situs)	9	9	7	7	7*
Total Benda, Situs, dan Kawasan yang dimiliki daerah (situs)	9	9	15	15	15*
Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)	100	100	47	47	100*

*: perkiraan
Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu untuk memastikan akses keluarga terhadap pendidikan, kesehatan, gizi dan sanitasi yang layak. Pembangunan keluarga di Indonesia diukur dengan beberapa indikator, salah satunya ialah Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Lebih

lanjut, iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan.

Pada tahun 2024, iBangga Kabupaten Katingan sebesar 64,00 yang mana berada pada kategori berkembang. Jika dibandingkan dengan nilai provinsi nilai iBangga Kabupaten Katingan lebih tinggi sebesar 1,52 poin. Berikut merupakan perbandingan capaian iBangga antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2-19 Capaian i–Bangga kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	iBangga
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	64,27
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	62,02
3	Kabupaten Kapuas	57,45
4	Kabupaten Barito Selatan	61,98
5	Kabupaten Barito Utara	64,27
6	Kabupaten Katingan	64,24
7	Kabupaten Seruyan	64,43
8	Kabupaten Sukamara	66,67
9	Kabupaten Lamandau	64,02
10	Kabupaten Gunung Mas	61,17
11	Kabupaten Pulang Pisau	60,17
12	Kabupaten Murung Raya	66,11
13	Kabupaten Barito Timur	65,47
14	Kota Palangkaraya	64,05
Provinsi Kalimantan Tengah		62,72

Sumber: Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk, 2025

2.1.2.6.2 Indeks Perlindungan Anak

Capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia dapat digambarkan melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indikator tersebut disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA), meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus anak. Berikut merupakan perbandingan capaian nilai IPA, IPHA, dan IPKA pada tahun 2024.

Tabel 2-20 Perkembangan Indikator Komponen IPA Kabupaten Katingan Tahun 2024

No.	Keterangan	IPA	IPHA	IPKA
1	Kabupaten Katingan	61,00*	59,00*	77,00*
2	Provinsi Kalimantan Tengah	61,00*	55,00*	81,00*
3	Nasional	67,00*	61,00*	76,00*

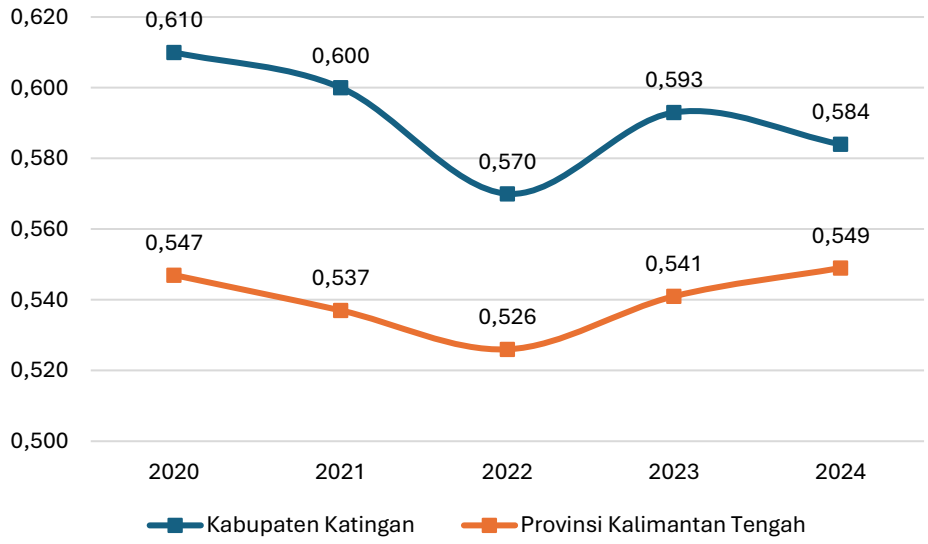
*: perkiraan

Sumber: Kementerian PPPA Indeks Perlindungan Anak, 2025

2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah indikator yang digunakan dalam mengukur pemberdayaan perempuan. Indeks tersebut menunjukkan kesenjangan gender pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Angka IKG semakin bagus apabila nilainya semakin kecil yang mana menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender.

Angka capaian IKG Kabupaten Katingan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Provinsi selama lima tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih perlu adanya perbaikan. Sejak tahun 2020 hingga 2024, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Katingan mengalami tren penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan ketimpangan gender di Kabupaten Katingan sebesar 0,593 atau meningkat 0,023 poin dari tahun 2022.



Grafik 2-29 Perbandingan IKG Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020–2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonrsia. IPP digunakan sebagai tolok ukur pembangunan berdasarkan tiga lapisan, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan yang dipetakan dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Data IPP untuk Kabupaten Katingan “tidak tersedia”.

Adapun untuk melihat partisipasi pemuda dapat dilihat melalui organisasi pemudaan, dimana organisasi pemuda adalah kelompok pemuda yang bekerja sama dengan merancang rencana kerja dan aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung berdasarkan jumlah organisasi pemuda yang aktif hingga tahun pengukuran. Organisasi olahraga adalah organisasi resmi yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang mencintai olahraga, bekerja sama dengan merancang rencana kerja dan aturan.

Kegiatan kepemudaan meliputi kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan, upacara, dan peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung berdasarkan jumlah kegiatan yang diadakan dalam satu tahun. Kegiatan olahraga adalah acara olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Kegiatan ini dapat berupa pertandingan, perlombaan, atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung berdasarkan jumlah acara olahraga yang diadakan dalam satu tahun. Berikut adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2-21 Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Pemuda	126	166	122	122	122*

*: perkiraan

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan, 2025

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Analisis aspek daya saing daerah dapat dianalisis melalui berbagai aspek, meliputi daya saing ekonomi daerah, daya saing SDM, daya saing fasilitas/infrastruktur, serta daya saing iklim investasi.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berusia 0–14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas (disebut sebagai bukan angkatan kerja), dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia 15–64 tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk mendukung penduduk yang belum produktif dan yang tidak lagi produktif. Sebaliknya, semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, semakin kecil beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif

untuk mendukung penduduk yang belum dan yang tidak lagi produktif. Berikut merupakan data terkait rasio ketergantungan Kabupaten Katingan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2-22 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024

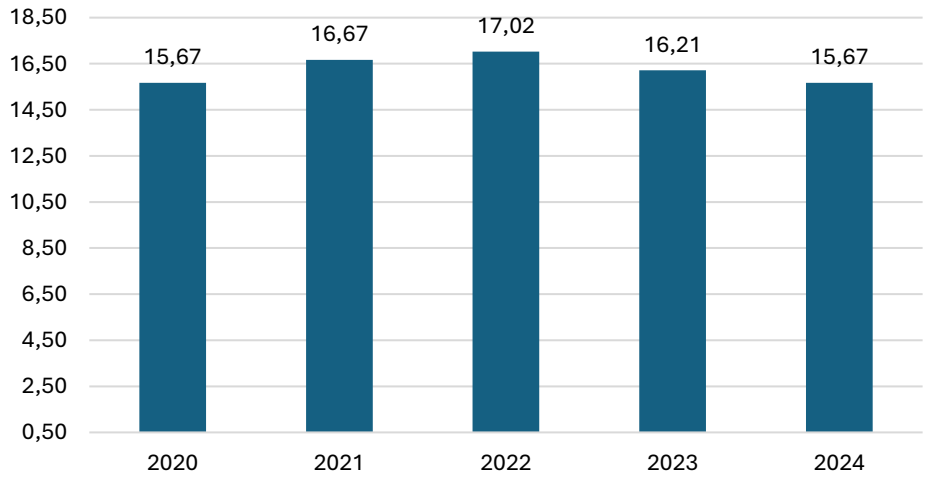
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
0–14 tahun	42,13	44,80	44,32	45,40	45,49
15 – 64 tahun	113,60	111,15	112,13	116,06	118,04
>64 tahun	6,51	7,15	7,53	7,89	7,89
Rasio Ketergantungan	42,82	46,74	46,24	45,92	45,22

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2021 – 2025 (diolah)

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.1.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Kategori Industri Pengolahan ini merupakan kontributor terbesar kedua setelah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Industri CPO (Crude Palm Oil) yang ada di Katingan memiliki peranan yang besar terhadap nilai tambah kategori ini. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Katingan menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020-2024. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan mengalami penurunan dari 15,67% di tahun 2020 menjadi 15,67% di tahun 2024. Meskipun terdapat fluktuasi, peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan, baik dengan maupun tanpa migas, secara umum mengindikasikan peningkatan peran sektor ini dalam perekonomian daerah. Selengkapnya perkembangan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Katingan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada berikut.



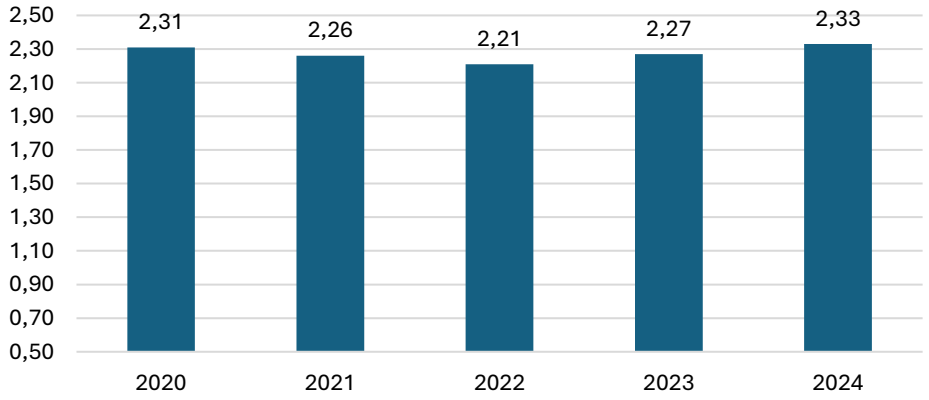
Grafik 2-30 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2025

Secara nominal, Industri Pengolahan berkembang dari 1.292,9 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 1.829,7 miliar rupiah di tahun 2024, dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi. Laju pertumbuhan kategori ini tahun 2024 sebesar 0,78 persen. Kategori ini tumbuh melambat karena penurunan produksi industri CPO. Meskipun begitu, industri lainnya secara keseluruhan masih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.3.1.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan penunjang terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan Analisis Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016, di Katingan, kategori ini adalah aktivitas ekonomi terbesar kedua setelah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum juga menunjukan persen bagian PDB Regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi : Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum. Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Katingan dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020 proporsinya sebesar 2,31%, kemudian di tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 2,33%. Peningkatan Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum ini menunjukkan bahwa pariwisata di Kabupaten Katingan juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada berikut



Grafik 2-31 Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan, 2025

Kasongan dan Hampalit merupakan penghubung dua kota besar di Kalimantan Tengah, yaitu Palangka Raya dan Sampit. Hal ini tentu mendorong perkembangan penyediaan akomodasi dan makan minum di wilayah tersebut. Dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, Kasongan dan Hampalit berpotensi menjadi lokasi alternatif untuk beristirahat dan makan minum bagi masyarakat yang melintas.

2.1.3.1.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dijelaskan bahwa Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Subsektor Ekonomi Kreatif yang tercantum berdasarkan nomenklatur resmi pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015, terdiri dari 16 subsektor ekonomi kreatif. Lapangan-lapangan usaha yang membentuk 16 subsektor tersebar pada KBLI 2015 menurut definisi yang digunakan BPS. Lapangan-lapangan usaha yang tersebar tersebut, dikelompokkan ke dalam 16 subsektor ekonomi kreatif, pada klasifikasi lapangan usaha tingkat 5 digit KBLI 2015. Kontribusi ekonomi untuk setiap indikator-indikator, selanjutnya dihitung dengan melihat kontribusi ekonomi di tingkat lapangan usaha 5 digit tersebut.

Lingkup sektoral mencakup ruang lingkup dari masing-masing subsektor kegiatan Ekonomi Kreatif, berdasarkan konsep ekonomi kreatif yang telah dipublikasikan oleh Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, secara makro perekonomian kreatif diklasifikasikan menjadi 16 subsektor yaitu: 1) Arsitektur 2) Desain Interior 3) Desain Komunikasi Visual 4) Desain Produk 5) Film, Animasi, Video 6) Fotografi 7) Kriya 8) Kuliner 9) Musik 10) Fashion 11) Aplikasi dan Game Developer 12) Penerbitan 13) Periklanan 14) Televisi dan Radio 15) Seni Pertunjukkan 16) Seni Rupa

Adapun untuk data Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif untuk level kabupaten “tidak tersedia”

2.1.3.1.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan dihitung berdasarkan jumlah orang yang berusaha dibantu oleh buruh tetap atau buruh yang dibayar dibandingkan dengan jumlah total angkatan kerja setiap tahunnya. Berikut merupakan data rasio kewirausahaan Kabupaten Katingan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2-23 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

Tahun	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	Jumlah Angkatan Kerja	Rasio Kewirausahaan (%)
2020	3.634	82.135	4,42
2021	2.590	83.436	3,10
2022	2.441	87.022	2,81
2023	2.609	80.066	3,26
2024	4.458	81.684	5,46

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2021 – 2025 (diolah)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rasio kewirausahaan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 4,42%, namun pada tahun 2021 rasio tersebut menurun menjadi 3,10%, diikuti dengan penurunan lebih lanjut menjadi 2,81% pada tahun 2022, selanjut pada tahun 2023 kembali meningkat rasio tersebut menjadi 3,26% dan pada tahun 2024 rasio kewirausahaan terus meningkat menjadi 5,46%.

Fluktuasi ini menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam sektor kewirausahaan di Kabupaten Katingan. Namun, penurunan pada tahun 2021 hingga 2022 mungkin mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha, seperti kondisi ekonomi atau perubahan kebijakan. Peningkatan kembali pada tahun 2023 bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk upaya pemerintah dalam mendorong kewirausahaan dan adanya dukungan bagi pengusaha dan juga mengindikasikan adanya perbaikan atau adaptasi yang berhasil dilakukan oleh para pengusaha dalam menghadapi tantangan tersebut sehingga terus meningkat pada tahun 2024. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor–faktor spesifik yang mempengaruhi fluktuasi ini dan bagaimana kebijakan atau program intervensi dapat meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan sektor kewirausahaan di wilayah tersebut.

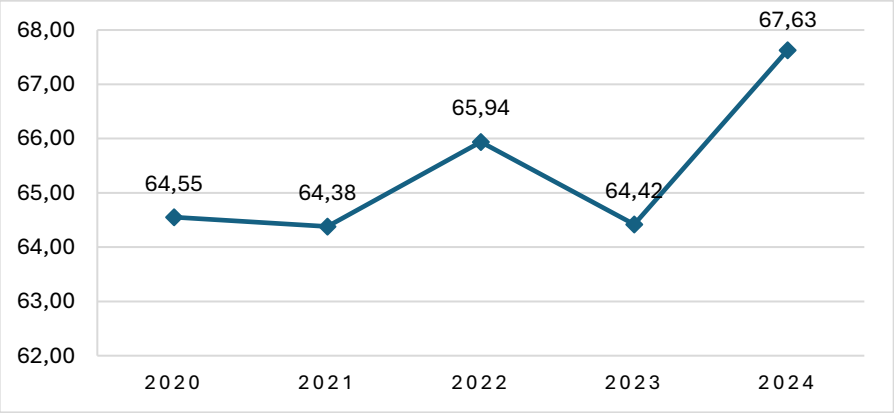
2.1.3.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengacu pada persentase individu yang aktif secara ekonomi dalam usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun mencari pekerjaan. Hal tersebut adalah indikator kunci dalam mengukur kontribusi ekonomi potensial suatu populasi dalam kegiatan produksi. Data untuk Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya kecenderungan meningkat dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Katingan mencapai 64,55%, namun mengalami penurunan yang menjadi 64,38% pada tahun 2021, terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 65,94%. Meskipun data tahun 2023 menunjukkan penurunan kembali menjadi 64,42%, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan menjadi 67,63%.

Penurunan drastis pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, yang mempengaruhi banyak sektor ekonomi dan menurunkan permintaan tenaga kerja. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun 2022, penurunan kembali pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi mungkin belum stabil atau terdapat faktor–faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja.

Faktor–faktor seperti kurangnya peluang kerja, kesenjangan keterampilan, atau kondisi pasar kerja yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk masuk atau tetap dalam pasar tenaga kerja.

Implikasi dari penurunan ini dapat dirasakan secara luas dalam perekonomian lokal, termasuk potensi penurunan pendapatan per kapita dan meningkatnya tingkat kemiskinan. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja juga dapat mengurangi produktivitas ekonomi wilayah dan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja memerlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan keterampilan, serta penciptaan peluang kerja yang lebih banyak dan beragam. Dengan memperkuat infrastruktur ekonomi, mendukung pelatihan keterampilan, dan meningkatkan kesiapan pasar kerja lokal, Kabupaten Katingan dapat memperbaiki tingkat partisipasi angkatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Grafik 2-32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten KatinganTahun 2020–2024
Sumber: BPS Kabupaten Katingan, 2025

2.1.3.1.6 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi adalah salah satu aspek krusial yang berperan penting dalam meningkatkan daya saing suatu daerah, baik di tingkat regional, nasional, maupun global. Dalam era globalisasi, pembangunan harus lebih menekankan pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta inovasi sebagai faktor utama pembentuk daya saing, yang dikenal sebagai pembangunan berbasis inovasi *(innovation–driven development)*. Pertumbuhan pembangunan harus didorong oleh strategi yang tidak hanya semakin efisien, tetapi juga menekankan pada inovasi melalui pemanfaatan iptek.

Sebuah sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID). IID berfungsi untuk mengukur dan memantau penerapan inovasi daerah, serta menyediakan data dan informasi terkait inovasi yang telah berhasil dilaksanakan. Penilaian

IID dilakukan berdasarkan indikator–indikator tertentu yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran IID Kabupaten Katingan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2-24 Kategori Inovasi Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kategori
2020	Kurang Inovatif
2021	Inovatif
2022	Kurang Inovatif
2023	Inovatif
2024	Inovatif

Sumber: Kemendagri, 2024

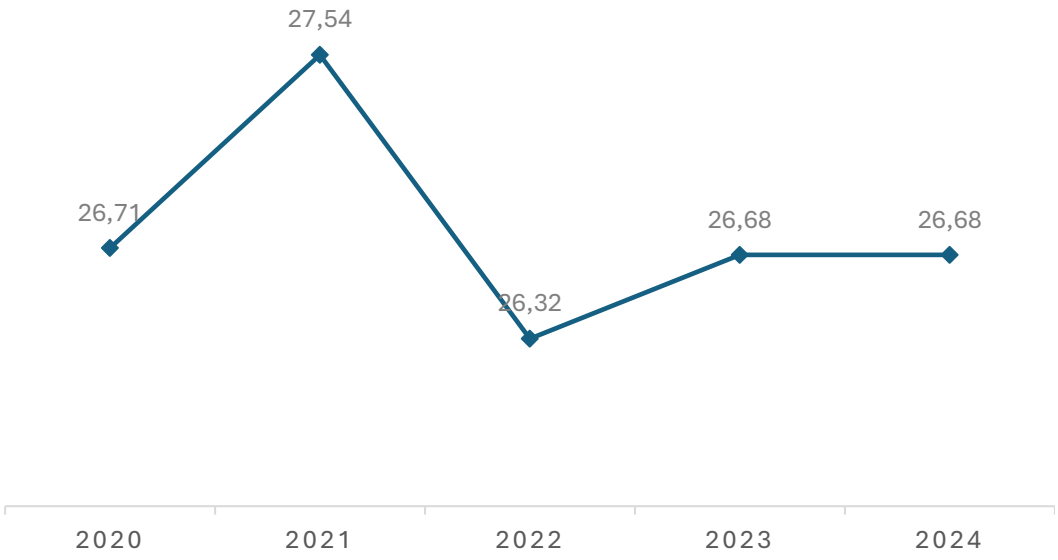
Pada tahun 2024, Kabupaten Katingan termasuk dalam kategori inovatif dengan skor indeks sebesar 42,44. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya tambahan agar inovasi bisa menjadi bagian dari budaya pemerintahan dan mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mulai mengembangkan ekosistem inovasi di Kabupaten Katingan.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.1.3.3.1 Indek Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau atau Green Economy Index/GEI) adalah sebuah alat ukur yang dirancang untuk menilai seberapa efektif suatu negara atau wilayah dalam melakukan transformasi ekonomi menuju pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan kata lain, IEH berfungsi sebagai “rapor” yang menunjukkan sejauh mana suatu wilayah telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam aktivitas ekonominya. Data IEH untuk level kabupaten “tidak tersedia”

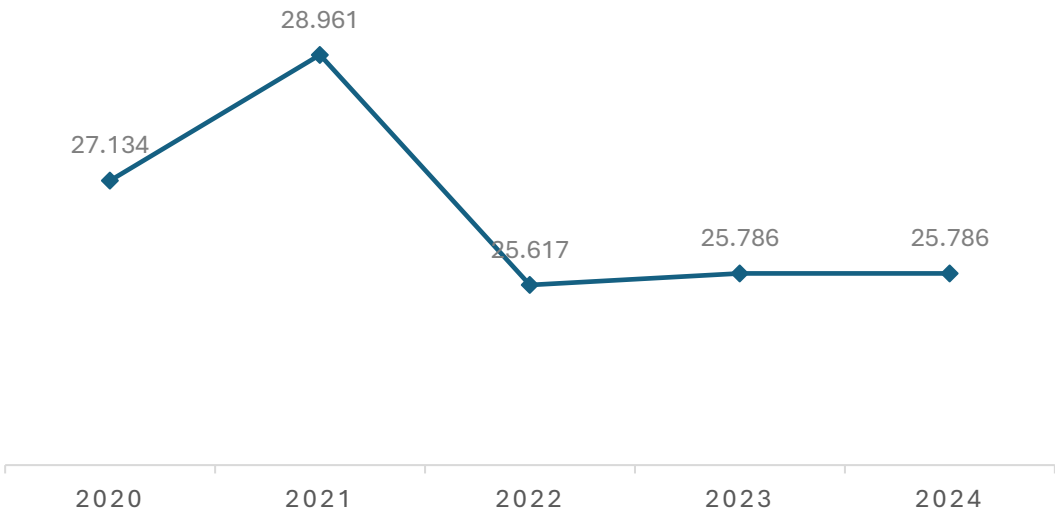
Pendekatan yang dapat dilakukan adalah melihat perkembangan kontribusi terhadap PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebagai sektor primer dalam struktur ekonomi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Katingan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB. Berikut merupakan data perkembangan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama lima tahun terakhir.



Grafik 2-33 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2025 (diolah)

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami fluktuasi. Dari tahun 2020 hingga 2021, angkanya meningkat dari 26,71 persen hingga mencapai 27,54 persen. Namun pada 2022 angka tersebut turun menjadi 26,32 persen, kemudian naik kembali pada tahun 2023 menjadi 26,68 persen dan pada tahun 2024 tetap di angka 26,68 persen. Berikut juga dapat dilihat data mengenai tenaga kerja pada sektor tersebut di mana trennya juga fluktuatif.



Grafik 2-34 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Katingan, 2020 – 2024

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2025 (diolah)

2.1.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari nol hingga seratus dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi biru di masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan.

Secara umum, IBEI yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam mengelola sumber daya lautnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan pemberdayaan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup. Data IBEI untuk level kabupaten “tidak tersedia”

2.1.3.3.3 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014). Porsi EBT dalam bauran energi primer adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) dalam satu tahun. Data Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer untuk level kabupaten “tidak tersedia”

2.1.3.4 Transformasi Digital

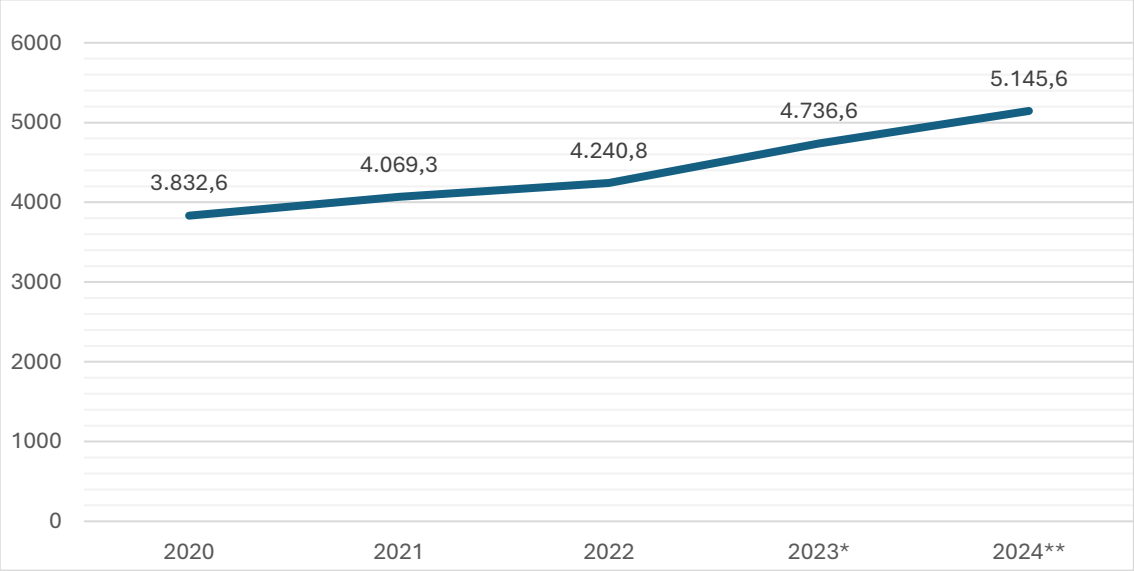
2.1.3.5.1 Indek Pembangunan Teknologi Informasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah ukuran standar untuk menilai tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). Indeks ini bertujuan mengukur, membandingkan, serta menunjukkan pertumbuhan kesenjangan digital dan potensi pembangunan TIK antarwaktu dan antarwilayah. IP-TIK tersusun dari tiga subindeks utama Akses dan Infrastruktur TIK, Penggunaan TIK, dan Keahlian TIK. Data Indek Pembangunan Teknologi Informasi untuk level kabupaten “tidak tersedia”

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.6.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto merupakan investasi fisik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, sektor swasta, dan masyarakat dalam bentuk bangunan, jalan, jembatan, mesin, peralatan, serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pelayanan publik dalam jangka panjang. Implementasi PMTB di tingkat kabupaten sangat vital karena menjadi indikator utama dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mencerminkan komitmen investasi yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan infrastruktur esensial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



**angka sementara*
**angka sangat sementara*

Grafik 2-35 Pembentukan Modal Tetap Bruto (Miliar Rupiah) Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024
Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2025

Berdasarkan grafik tersebut, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Katingan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga perkiraan tahun 2024. Nilainya secara bertahap naik dari Rp3.832,6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5.145,6 miliar yang diproyeksikan pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya pertumbuhan investasi yang berkelanjutan di kabupaten tersebut.

2.1.3.6.2 Ekspor Barang dan Jasa

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha

untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri. Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

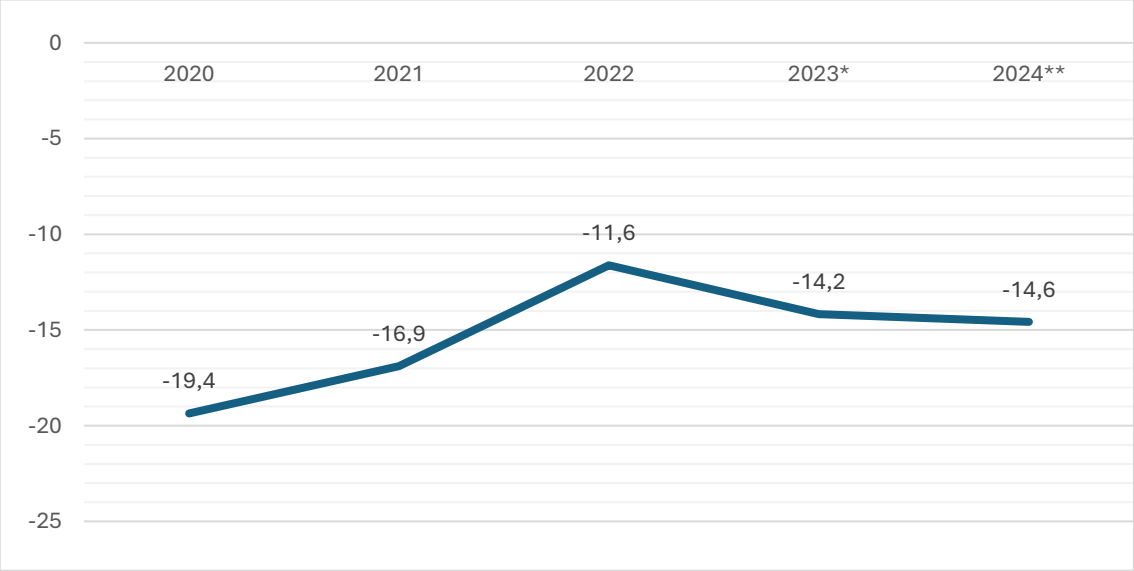
Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antarresiden wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri). Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

a. Ekspor keluar provinsi/kabupaten/kota

b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yangditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan mengunakan metode tidak langsung.



angka sementara

angka sangat sementara

Grafik 2-36 Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2025

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan net ekspor atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Kontribusi Net Ekspor yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). Perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang lebih rendah dari nilai impor (defisit).

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai ketersediaan, kualitas, dan pemerataan sarana serta prasarana dasar yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Indeks ini biasanya disusun dari beberapa indikator kunci yang mencerminkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas layanan infrastruktur.

Indeks Infrastruktur memberikan gambaran mengenai ketersediaan layanan dasar fisik untuk mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Indeks Infrastruktur dapat diukur dengan 5 indikator:

1. Akses Jalan Mantap (% panjang jalan mantap 93isbanding total jalan)
2. Rasio Elektrifikasi (% rumah tangga berlistrik)
3. Akses Air Minum Layak (% rumah tangga dengan air minum layak)
4. Akses Sanitasi Layak (% rumah tangga dengan sanitasi layak)
5. Akses Internet/Telekomunikasi (% penduduk yang mengakses internet)

Kondisi Infrastruktur Jalan

Sistem jaringan prasarana dirancang untuk menghubungkan berbagai wilayah di tingkat kabupaten dan mendukung beragam kegiatan dalam area pelayanan prasarana skala kabupaten. Salah satu contoh dari sistem jaringan ini adalah sistem transportasi, yang mencakup jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Katingan. Pada tahun 2023, total panjang jalan di Kabupaten Katingan mencapai 839,377 km. Dari jumlah tersebut, 293,686 km berada dalam kondisi baik, dan 315,086 km dalam kondisi mantap. Pada tahun yang

sama, jalan dalam kondisi mantap mencapai 37,538 persen, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2-25 Kondisi Infrastruktur Jalan Kabupaten Katingan Tahun 2019 – 2024

Kondisi Jalan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	25,84	26,61	32,30	34,20	34,90	35,67
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Mantap (%)	29,40	30,56	35,70	36,60	37,50	37,88

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Katingan, 2025

Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan dan kualitas infrastruktur di suatu daerah. Ketersediaan listrik yang stabil dan andal sangat penting untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas. Ketersediaan listrik yang memadai berperan sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan rumah tangga.

Tabel 2-26 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Elektrifikasi PLN (%)	55,34	55,09	58,46	61,92	64,20
Rasio Elektrifikasi Non PLN (%)	14,29	14,90	13,36	13,31	14,35
Rasio Elektrifikasi (%)	69,63	69,99	71,82	75,24	78,55

Sumber: Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kabupaten Katingan, 2025

Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak

Air minum yang aman dan terjangkau adalah hak dasar masyarakat. Tingginya akses rumah tangga terhadap air minum layak menunjukkan bahwa kebutuhan dasar akan kesehatan dan kebersihan telah terpenuhi. Sebaliknya, jika akses masih rendah, masyarakat rentan terhadap penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan infeksi saluran pencernaan. Infrastruktur air minum yang memadai juga mendukung produktivitas masyarakat karena mengurangi beban mencari sumber air.

Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak

Sanitasi layak memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat. Akses sanitasi yang rendah biasanya berkorelasi dengan tingginya angka stunting, penyakit infeksi, serta pencemaran lingkungan. Dengan meningkatnya rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi layak, maka risiko kesehatan dapat ditekan, kualitas hidup meningkat, dan beban biaya kesehatan masyarakat dapat berkurang.

Penduduk Mengakses Internet

Internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern, bukan hanya untuk komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, ekonomi digital, dan pelayanan publik. Akses internet yang tinggi menunjukkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi era transformasi digital. Sebaliknya, rendahnya penetrasi internet akan menimbulkan kesenjangan digital yang menghambat pemerataan informasi, pendidikan jarak jauh, serta peluang ekonomi berbasis teknologi.

Tabel 2-27 Persentase Penduduk Mengakses Internet/Telekomunikasi di Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler untuk Keperluan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir	72,60	77,04	80,40	84,32	82,68
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp) dalam 3 Bulan Terakhir	36,80	45,39	57,78	67,75	74,23

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2025

Indeks Infrastruktur yang dihitung dari kelima indikator di atas memberikan gambaran menyeluruh tentang ketersediaan layanan dasar fisik dan digital. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat sudah relatif terlayani, meskipun mungkin masih ada kesenjangan antar sektor. Misalnya, kondisi jalan dan elektrifikasi bisa sangat baik, tetapi akses sanitasi dan internet masih tertinggal. Analisis per indikator ini membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan agar peningkatan infrastruktur lebih merata dan berkeadilan.

Adapun Indeks Infrastruktur Kabupaten Katingan adalah berikut:

Tabel 2-28 Indeks Infrastruktur Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jalan Mantap (%)	Listrik (%)	Air Minum Layak (%)	Sanitasi Layak (%)	Internet (%)	Indeks Infrastruktur
2020	30,56	69,63	80,15	72,94	36,80	58,02
2021	35,70	69,99	83,35	73,65	45,39	61,62
2022	36,60	71,82	87,26	84,58	57,78	67,61
2023	37,50	75,24	85,58	72,97	67,75	67,81
2024	37,88	78,55	85,60*	73,00*	74,23	69,85

*perkiraan

Sumber: Bappedalitbang Kab. Katingan, 2025

2.1.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Katingan dari sektor perumahan.

Rumah Layak Huni

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk memastikan tersedianya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Perumahan diartikan sebagai sekumpulan rumah dalam suatu permukiman, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah juga mencerminkan status sosial pemiliknya. Kualitas atau kondisi rumah sering kali mencerminkan status sosial seseorang. Faktor–faktor seperti jenis atap, dinding, dan lantai, serta fasilitas tambahan seperti luas lantai, sumber air minum, sanitasi, dan penerangan, merupakan indikator kesejahteraan rumah tangga. Kualitas perumahan yang baik dan fasilitas yang memadai akan memberikan tingkat kenyamanan yang lebih baik bagi penghuninya. Cakupan persentase ketersediaan rumah layak huni mengalami tren penurunan dari tahun 2019 sebesar 85,38% dan menurun pada 2023 sebesar 59,12%. Penurunan ini harus mendapat perhatian pemerintah daerah dalam memfasilitasi rumah layak huni bagi Masyarakat.

Tabel 2-29 Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah seluruh rumah layak huni (unit)	33.702	34.135	25.731	30.546	24.819
Jumlah rumah di suatu wilayah (unit)	39.471	39.471	46.068	52.903	41.981
Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	85,38	86,48	61,96	73,15	59,12

Sumber: Dinas Perkimtan Kabupaten Katingan, 2024

2.1.3.6.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Penggunaan air bersih merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat serta tingkat pembangunan suatu daerah. Ketersediaan air bersih yang memadai tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar, tetapi juga berdampak positif terhadap produktivitas dan perekonomian daerah. Dalam lima tahun terakhir tren persentase ketercapaian air minum bersih Kabupaten Katingan fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2024 dengan nilai 64,72% sehingga perlu upaya pembangunan akses air minum bersih.

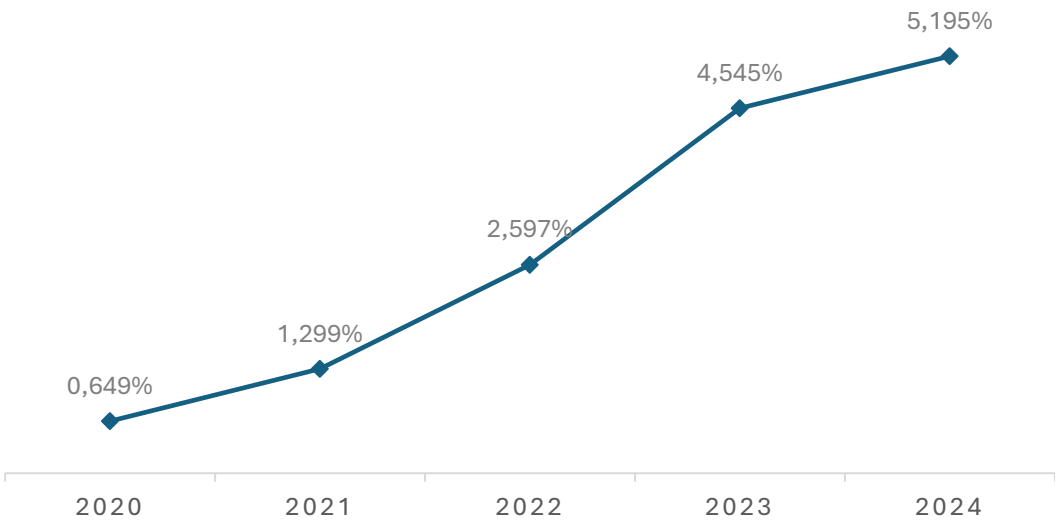
Tabel 2-30 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sumber air utama untuk minum (air kemasan, air isi ulang & ledeng)	41,04	52,76	40,29	43,92	46,81
Air minum bersih	80,55	78,07	62,20	65,48	64,72

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan

2.1.3.6.4 Persentase Desa Mandiri

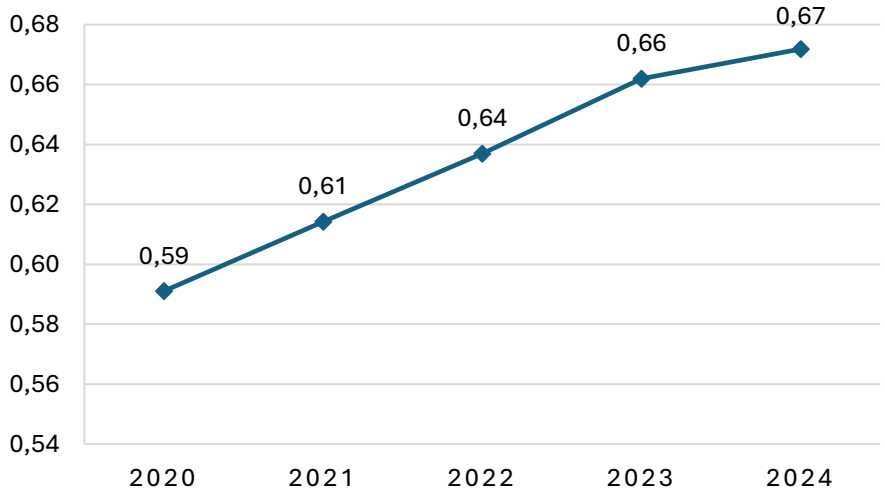
Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengklasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa dalam konteks pembangunan daerah kabupaten. IDM dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memetakan capaian pembangunan desa berdasarkan tiga dimensi utama: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Dengan demikian, IDM menjadi instrumen evaluasi yang komprehensif bagi pemerintah daerah kabupaten dalam merumuskan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan mengintervensi program pembangunan yang tepat sasaran, guna mendorong percepatan status desa dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.



Grafik 2-37 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan grafik, persentase desa mandiri di Kabupaten Katingan mengalami peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan selama periode 2020 hingga 2024. Pada

tahun 2020, persentase desa mandiri masih berada di angka 0,649%. Angka ini kemudian meningkat hampir dua kali lipat menjadi 1,299% pada tahun 2021, lalu naik drastis ke 2,597% pada tahun 2022, dan terus menunjukkan progres positif dengan mencapai 4,545% di tahun 2023. Peningkatan ini terus terjadi hingga tahun 2024 dengan persentase desa mandiri sebesar 5,195%. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan di Kabupaten Katingan, menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang berhasil mencapai kemandirian dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.



Grafik 2-38 Rata-rata Nilai IDM Kabupaten Katingan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah

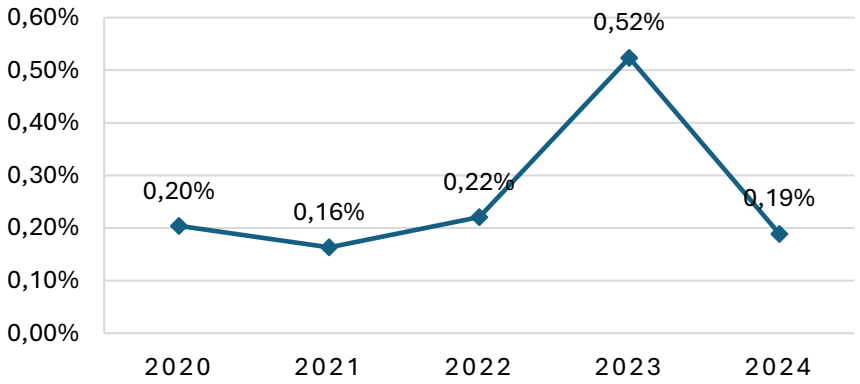
Berdasarkan grafik, rata-rata nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Katingan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rata-rata nilai IDM berada di angka 0,59, yang kemudian meningkat menjadi 0,61 di tahun 2021. Peningkatan ini terus berlanjut dengan mencapai 0,64 pada tahun 2022 dan 0,66 pada tahun 2023. Peningkatan tertinggi tercatat di tahun 2024, di mana rata-rata nilai IDM mencapai 0,67. Kenaikan nilai IDM ini secara bertahap mengindikasikan bahwa desa-desa di Kabupaten Katingan secara kolektif mengalami kemajuan dalam status pembangunan, dengan semakin banyaknya desa yang berstatus berkembang atau maju, seiring dengan peningkatan pada dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah indikator fiskal yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD)

melalui instrumen pajak, dibandingkan dengan total output ekonomi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Dalam konteks daya saing dan iklim investasi, rasio ini menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan perpajakan daerah dan kapasitas fiskal yang dimiliki untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Rasio yang stabil atau meningkat dapat mengindikasikan struktur perpajakan yang efisien dan basis ekonomi yang kuat, yang pada gilirannya dapat menarik investor karena memberikan sinyal positif mengenai stabilitas keuangan dan kemampuan daerah untuk menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan investasi.



Grafik 2-39 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024
Sumber: Katingan Dalam Angka 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan grafik yang disajikan, rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Katingan menunjukkan pola fluktuatif yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio ini berada di angka 0,20%, yang kemudian sedikit menurun menjadi 0,16% pada tahun 2021, sebelum akhirnya naik kembali menjadi 0,22% pada tahun 2022. Kenaikan drastis terjadi pada tahun 2023, di mana rasio ini melonjak tajam hingga mencapai puncaknya di 0,52%. Namun, tren ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2024 rasio tersebut kembali turun secara drastis ke angka 0,19%, bahkan lebih rendah dari posisi awal tahun 2020. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pendapatan pajak daerah dibandingkan dengan output ekonomi yang dihasilkan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan fiskal, kondisi ekonomi makro, atau perubahan struktur perekonomian di Kabupaten Katingan.

2.1.3.7.2 Laju Inflasi

Inflasi di suatu daerah merupakan indikator penting untuk analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum akibat interaksi permintaan dan penawaran. Inflasi, atau Indeks Harga Konsumen (IHK), di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Di Kota

Palangka Raya, inflasi mengalami fluktuasi antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dimulai dari 0,71 persen pada tahun 2020, naik menjadi 2,58 persen pada tahun 2021, lalu naik lagi pada tahun 2022 menjadi 6,51 persen, kemudian turun lagi pada tahun 2023 menjadi 2,69 persen dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi 2,64 persen.

Di Kota Sampit, inflasi juga menunjukkan perubahan selama periode yang sama, mulai dari 1,62 persen pada tahun 2020, naik menjadi 4,62 persen pada tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 5,99 persen pada tahun 2022, kemudian pada 2023 inflasi turun Kembali menjadi 2,56 persen dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi 2,53 persen. Secara keseluruhan, pada tahun 2024, inflasi di kedua kota ini mengalami penurunan, dengan Kota Palangka Raya sebesar 2,64 persen dan Kota Sampit sebesar 2,53 persen.

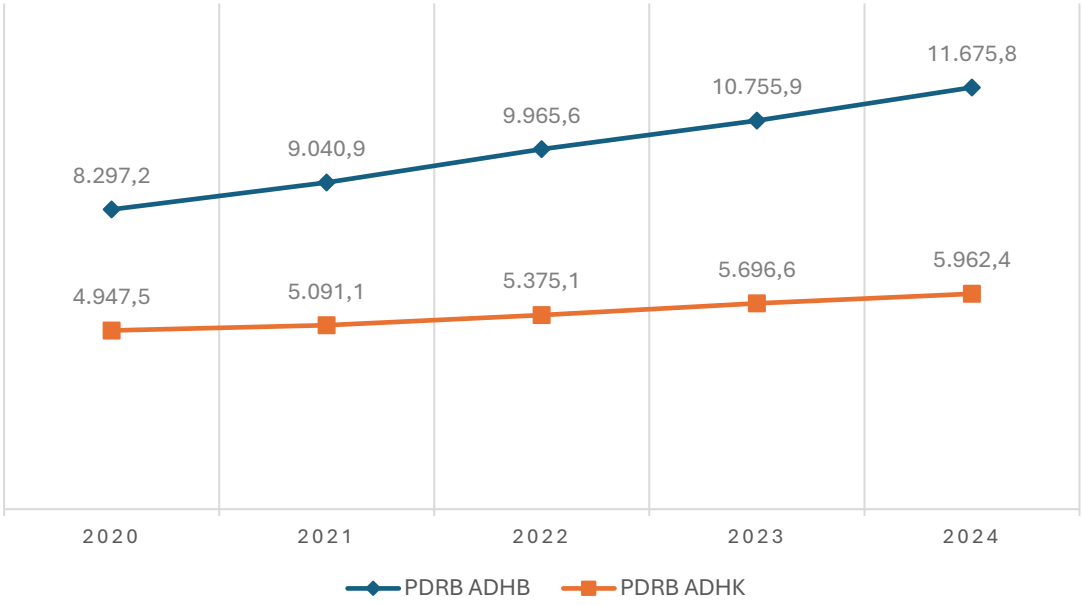
Tabel 2-31 Inflasi Kota Palangkaraya dan Kota Sampit Tahun 2020 – 2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Palangkaraya	0,71	2,58	6,51	2,68	2,64
Kota Sampit	1,62	4,62	5,99	2,56	2,53

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2025

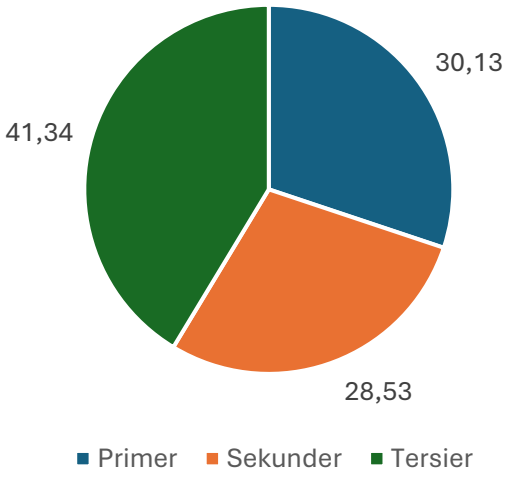
2.1.3.7.3 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi utama yang menggambarkan total nilai tambah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Ada dua jenis PDRB yang umum digunakan: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menunjukkan nilai total barang dan jasa berdasarkan harga yang berlaku pada periode tersebut, mencerminkan kapasitas ekonomi daerah secara nominal termasuk dampak inflasi. Sebaliknya, PDRB ADHK menghitung nilai barang dan jasa berdasarkan harga tetap pada tahun dasar tertentu, memungkinkan analisis pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi. Dengan menggunakan kedua jenis PDRB ini, kita dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kinerja ekonomi suatu daerah, baik dari sisi nominal maupun riil. Berikut adalah perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Katingan selama lima tahun terakhir.



Grafik 2-40 PDRB ADHB dan PDRB ADHK (miliar rupiah) Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024
Sumber: RDTR, 2026

Dari data tersebut dapat dilihat PDRB ADHB Kabupaten Katingan memiliki tren yang positif di mana angkanya selalu naik. Angka tertinggi PDRB ADHB tahun 2024 mencapai 11.675,8 miliar rupiah. PDRB ADHK Kabupaten Katingan juga memiliki tren yang positif di mana pada tahun 2020 angkanya sebesar 4.947,5 miliar rupiah meningkat menjadi 5.962,4 miliar rupiah pada tahun 2024. Berikut merupakan struktur ekonomi Kabupaten Katingan tahun 2024.



Gambar 2-5 Struktur Ekonomi Kabupaten Katingan Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2025 (diolah)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Katingan didominasi oleh sektor tersier 41,34 persen. Sektor tersier berfokus pada penyediaan jasa daripada produksi barang. Hal ini melibatkan layanan yang mendukung perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam sektor tersier meliputi sektor perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan, serta jasa. Kemudian disusul oleh sektor primer 30,13 persen. Sektor primer mencakup kegiatan ekonomi yang langsung berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Di dalam sektor primer meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Kemudian tidak selisih jauh dengan sektor primer, sektor sekunder berkontribusi sebesar 28,53 persen. Sektor sekunder meliputi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ini mencakup berbagai jenis manufaktur dan konstruksi.

Berikut merupakan detail dari kontribusi masing–masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Katingan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2-32 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,71	27,54	26,32	26,68	26,68
Pertambangan dan Penggalian	5,21	3,99	4,20	3,46	3,45
Industri Pengolahan	15,58	16,67	17,02	16,21	15,67
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Konstruksi	11,52	12,06	12,52	12,71	12,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,90	7,33	7,62	7,92	7,91
Transportasi dan Pergudangan	7,87	8,16	8,33	8,71	8,86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,31	2,26	2,21	2,27	2,33
Informasi dan Komunikasi	0,86	0,92	0,96	0,98	0,97
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,26	1,33	1,31	1,34	1,34
Real Estate	2,92	2,45	2,61	2,55	2,60
Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,75	6,22	6,11	6,14	6,18
Jasa Pendidikan	5,72	5,68	5,60	5,69	5,91

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,05	3,21	3,14	3,23	3,27
Jasa lainnya	2,24	2,08	1,97	2,02	1,96
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2025

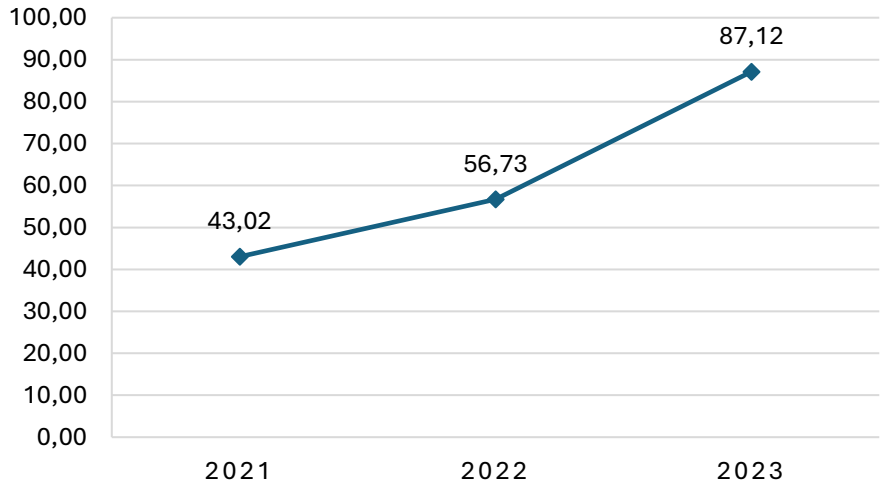
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Pelayanan umum yang baik dapat ditinjau dari regulasi dan tata kelolanya. Untuk menghasilkan pelayanan umum yang baik, maka regulasi dan tata kelolanya harus berintegritas dan adaptif. Adapun indikator yang menunjukkan berintegritasnya dan adaptifnya regulasi dan tata kelola pelayanan umum terdiri dari Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Indeks Pelayanan Publik.

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah indeks yang mengukur sejauh mana reformasi hukum telah dicapai. Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola hukum yang lebih efisien. Pada tahun 2023, Kabupaten Katingan telah mencapai skor 87,12 pada indeks reformasi hukum dan untuk tahun 2024 masih "belum tersedia".



Grafik 2-41 Indeks Reformasi Hukum Tahun 2021-2023
Sumber: Setda Kabupaten Katingan

2.1.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga dapat menggambarkan kondisi regulasi dan tata kelola pelayanan umum. Indeks SPBE mengukur penerapan sistem elektronik pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Katingan telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

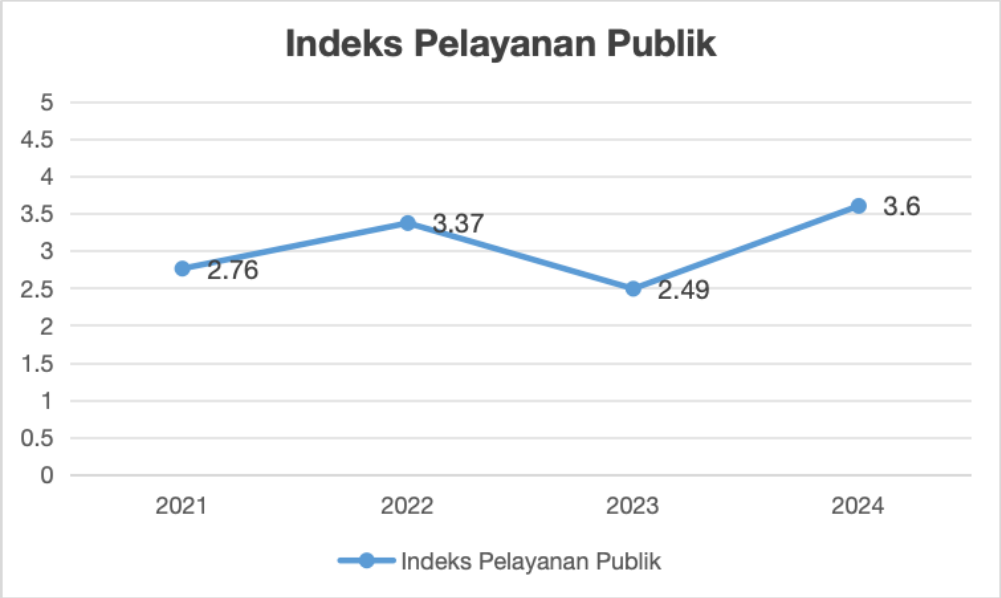
lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan. Upaya tersebut telah membawa hasil yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan angka 68,75 atau kategori B, tahun 2022 dengan angka 53,44 dengan kategori CC dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 48,88 dengan kategori C dan pada tahun 2024, Kabupaten Katingan meraih skor 3,25 pada Indeks SPBE.

Salah satu yang menjadi tantangan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Katingan yaitu terkait dengan koordinasi antar perangkat daerah. Koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi dan langkah yang harus ditempuh bersama untuk mewujudkan reformasi birokrasi sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, reformasi birokrasi tematik yang baru digalakkan oleh Pusat perlu direspon dengan tepat oleh Pemerintah Kabupaten Katingan agar lebih memberikan dampak bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Berkaitan dengan pengukuran ke depan, patut diketahui bahwa Indeks SPBE akan digantikan oleh Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) mulai dari pelaksanaan RPJMD periode tahun 2025–2029.

2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik menggambarkan kondisi regulasi dan tata kelola pelayanan umum. Indeks pelayanan publik mengukur kinerja pelayanan publik yang terdiri dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, dan sistem informasi serta pengaduan. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Katingan mengalami tren kenaikan. Pada 2021, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Katingan berada pada skor 2,76. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Katingan tersebut naik hingga 3,6 pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan publik di Kabupaten Katingan.



Grafik 2-42 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Katingan Tahun 2021-2024
Sumber: Setda Kabupaten Katingan

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hasil dari pelayanan umum yang baik akan dirasakan dalam bidang hukum, keamanan, dan pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, tujuan dari pelayanan umum adalah menghasilkan hukum yang berkeadilan, keamanan yang tangguh, dan demokrasi yang berjalan dengan baik, baik di tingkat substansial maupun prosedural. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketiga hal tersebut antara lain adalah tidak adanya konflik sosial, persentase penegakan Perda, persentase capaian aksi pemangku kepentingan yang dikoordinasikan melalui penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan, dan persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina dan diawasi.

Salah satu indikator keamanan yang tangguh adalah tidak adanya konflik sosial. **Cakupan penyelesaian konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM** di Katingan pada 2024 berada pada angka 100 persen. Hal ini menunjukkan sudah terbentuknya keamanan sosial di Kabupaten Katingan. Capaian tersebut diperkuat dengan angka penyelesaian gangguan Trantibum di Kabupaten Katingan. Pada 2024, Kabupaten Katingan dapat menyelesaikan 100 persen gangguan Trantibum yang terjadi, menunjukkan keamanan umum yang baik di Kabupaten Katingan.



Grafik 2-43 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024
Sumber: Setda Kabupaten Katingan

Adapun indikator **Persentase Penegakan Perda** mengukur efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah. Pada 2020-2024, capaian persentase Kabupaten Katingan dalam penegakan peraturan daerah rata-rata telah mencapai 100 persen. Akan tetapi, capaian tersebut turun drastis menjadi 77% pada 2022 dan naik kembali menjadi 87,5% pada 2023. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

Selanjutnya adalah persentase capaian aksi pemangku kepentingan yang dikoordinasikan melalui penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Indikator ini mengukur sejauh mana upaya dalam memperkuat pemahaman dan penerapan Pancasila serta nilai–nilai kebangsaan di kalangan pemangku kepentingan. Pada tahun 2024, Kabupaten Katingan meraih skor 100 persen pada indikator ini. Capaian serupa juga didapat oleh indikator berupa cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan. Indikator ini mengukur persentase partai politik yang telah mengikuti sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait, lalu dibandingkan dengan total jumlah partai politik yang ada. Tidak lupa, indikator persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina dan diawasi yang mengevaluasi keberhasilan program pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) mencapai nilai 100 persen pada tahun 2024.

Keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah prioritas utama untuk memastikan stabilitas pemerintahan daerah. Pemerintah harus mampu memberikan rasa aman, menjaga ketertiban masyarakat, dan mengurangi kriminalitas untuk mendukung kelancaran pemerintahan. Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat memengaruhi

daya saing investasi, dengan meningkatnya risiko bagi kelangsungan investasi. Meskipun angka kriminalitas di Kabupaten Katingan menunjukkan penurunan, upaya untuk meningkatkan kondusivitas daerah perlu terus ditingkatkan.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah jumlah tindak kriminal yang diurus oleh aparat hukum per tahun per 10.000 penduduk. Berdasarkan data, angka kriminalitas di Kabupaten Katingan paling tinggi pada tahun 2019 dengan 9,57 dan terus menurun menjadi 6,67 pada tahun 2023, namun kemudian mengalami kenaikan kasus di tahun 2024.

Tabel 2-33 Angka Kriminalitas Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

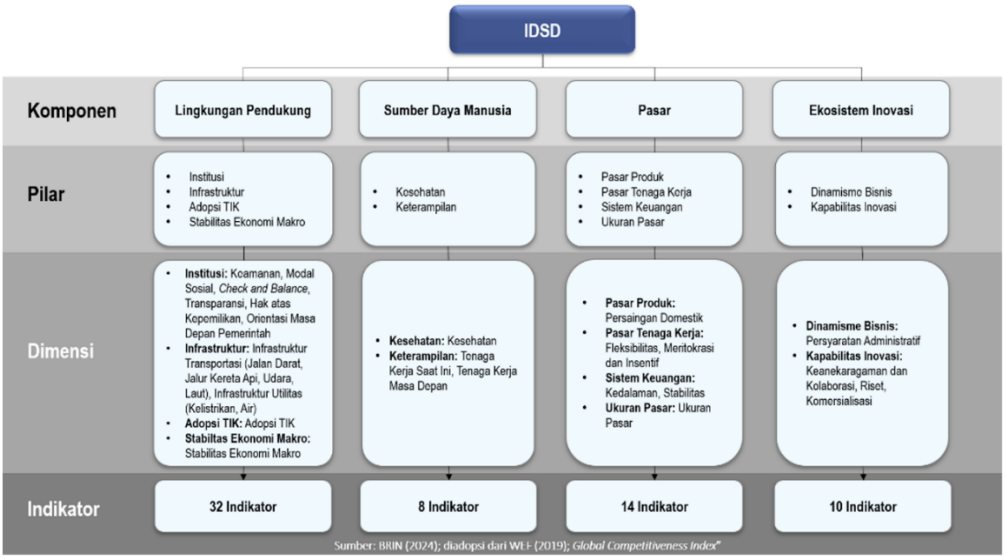
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah tindak kriminal yang ditangani (jiwa)	101	94	113	113	177
Jumlah penduduk (	162,24	163,10	163,99	169,36	171,86
Angka kriminalitas	6,23	5,76	6,89	6,67	10,30

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020–2025 (diolah)

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Ketahanan Berdaya Gentar Kawasan

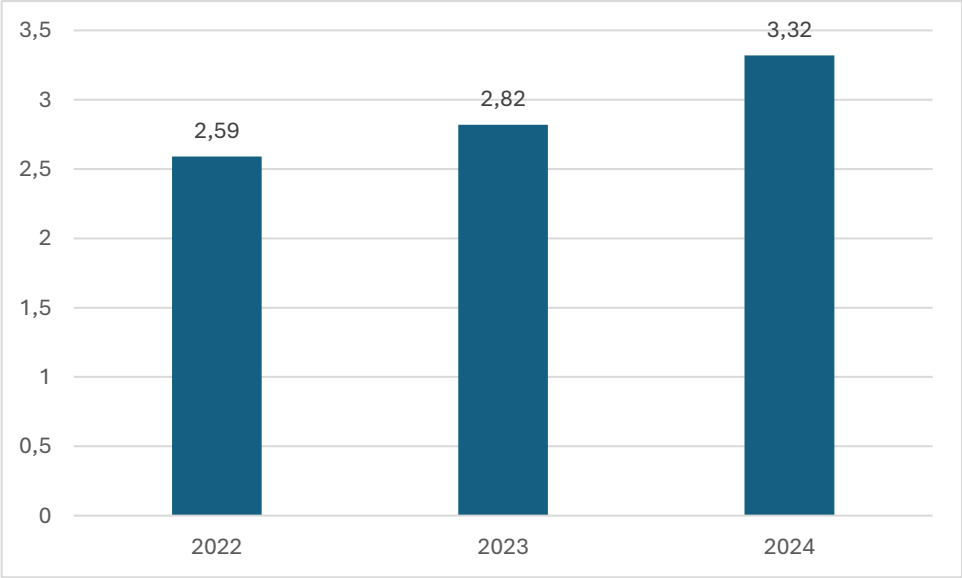
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah dan merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro–makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and sophistication factors*). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam empat komponen awal pembentuk daya saing yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Pengukuran IDSD dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan menggunakan data sekunder untuk menjaga obyektivitas yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Kerangka IDSD yang terdiri atas empat komponen tersebut dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing dengan 51 indikator untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2-6 Kerangka Indeks Daya Saing Daerah

IDSD Kabupaten Katingan terus mengalami peningkatan dari tahun 2022–2024 dari 2,59 di tahun 2022 meningkat menjadi 3,32 di tahun 2024. Kondisi daya saing daerah Kabupaten Katingan berdasarkan IDSD Tahun 2024 memiliki skor 3,32 dengan posisi masih di bawah skor IDSD Provinsi Kalimantan Tengah yakni 3,46 dan nasional yakni 3,43. Namun demikian, terdapat beberapa pilar IDSD Kabupaten Katingan yang berada di atas skor IDSD Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional, berikut hasil pengukuran IDSD 2022–2024 serta skor pilar IDSD Kabupaten Katingan Tahun 2024.



Grafik 2-44 Pengukuran IDSD Kabupaten Katingan Tahun 2022–2024

Tabel 2-34 Indeks Daya Saing Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Nama Kab/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar			Ekosistem Inovasi			Skor IDSD
		Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Rata-rata Nasional		4.18	2.97	3.47	3.99	3.76	3.91	2.57	3.03	2.76	4.35	3.06	3.13	3.43
Prov. Kalimantan Tengah		4.36	2.82	3.58	4.41	3.78	4.14	2.05	3.31	3.47	4.35	2.92	2.31	3.46
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	4.71	3.01	4.26	3.71	3.86	3.81	3.26	3.82	3.83	4.30	4.63	2.08	3.77
2	Kabupaten Kotawaringin Timur	4.67	2.96	4.34	3.12	3.79	3.58	3.84	3.60	3.16	4.41	4.32	1.58	3.61
3	Kabupaten Kapuas	4.22	3.58	3.65	4.13	3.69	3.93	3.19	3.55	1.90	4.21	4.68	0.65	3.45
4	Kabupaten Barito Selatan	4.69	2.96	4.03	3.72	3.57	4.01	4.30	3.91	2.15	3.77	3.77	1.15	3.50
5	Kabupaten Barito Utara	4.71	3.01	3.84	3.92	3.89	4.01	2.82	3.34	2.99	4.01	3.99	0.78	3.44
6	Kabupaten Sukamara	4.76	2.93	4.31	3.67	3.92	4.00	2.96	3.02	2.33	3.62	4.12	1.01	3.39
7	Kabupaten Lamandau	4.54	2.64	3.76	3.34	3.74	4.08	2.65	3.51	3.48	3.73	4.00	0.85	3.36
8	Kabupaten Seruyan	4.45	3.45	3.61	3.71	3.72	3.74	1.87	3.39	2.50	3.92	4.71	1.30	3.36
9	Kabupaten Katingan	4.45	3.64	3.59	3.78	3.46	3.80	3.53	3.39	2.82	3.85	3.90	0.94	3.43
10	Kabupaten Pulang Pisau	4.56	3.02	3.69	4.42	3.64	4.24	3.34	2.83	2.78	3.69	4.84	0.81	3.49
11	Kabupaten Gunung Mas	4.34	2.29	3.94	3.67	3.83	4.10	3.28	2.90	2.78	3.72	3.71	0.64	3.27
12	Kabupaten Barito Timur	4.40	2.91	4.40	3.69	3.66	4.19	2.44	3.93	2.47	3.87	3.44	1.52	3.41
13	Kabupaten Murung Raya	4.64	2.12	2.80	3.70	3.75	3.94	2.59	3.27	3.36	3.93	4.58	0.74	3.28
14	Kota Palangka Raya	4.59	3.07	4.52	3.55	4.06	4.32	5.00	4.83	4.31	4.20	4.27	2.92	4.14

Sumber: Buku IDSD Tahun 2024, BRIN

Keterangan:		
Pilar 1: Institusi Pilar 2: Infrastruktur Pilar 3: Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro	Pilar 5: Kesehatan Pilar 6: Keterampilan Pilar 7: Pasar produk Pilar 8: Pasar tenaga kerja	Pilar 9: Sistem keuangan Pilar 10: Ukuran pasar Pilar 11: Dinamisme bisnis Pilar 12: Kapabilitas inovasi

Pilar-pilar IDSD Kabupaten Katingan yang memiliki skor di atas provinsi dan nasional adalah pilar 1 berupa institusi, keberadaan institusi yang kuat tidak hanya memfasilitasi transaksi ekonomi secara efisien, tetapi juga berperan dalam mencegah potensi sengketa, sehingga dapat mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif. Pilar 2, yaitu infrastruktur, berperan untuk menilai ketersediaan serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan infrastruktur yang handal mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya akan memperkuat daya saing daerah. Pilar 3 merupakan adopsi TIK untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan TIK telah tersebar dan diimplementasikan di suatu daerah. TIK berkontribusi dalam menurunkan biaya transaksi, mempercepat arus informasi, serta mendorong efisiensi dan inovasi. Daerah dengan masyarakat yang mengoptimalkan pemanfaatan TIK berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi.

Selanjutnya ialah Pilar 7 yang merupakan pasar produk, mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil. Praktik monopoli, oligopoli, dan hambatan masuk pasar menyebabkan distorsi pasar yang berujung pada inefisiensi ekonomi. Keterbukaan pasar tercermin dari daya saing usaha kecil dan menengah terhadap usaha skala lebih besar. Keterbukaan pasar produk mendorong efisiensi dan meningkatkan daya saing bisnis di suatu wilayah. Pilar 8 ialah pasar tenaga kerja, efisiensi pasar tenaga kerja dan kebijakan yang responsif berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja serta daya saing ekonomi. Adapun berikut merupakan gambaran IDSD Kabupaten Katingan dari tahun ke tahun sebagaimana disajikan dalam tabel.

Tabel 2-35 Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022–2024

Tahun	Komponen												Skor IDSD
	Lingkungan Pendukung				Sumber Daya Manusia		Pasar				Ekosistem Inovasi		
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	
2022	4.04	2.25	1.99	2.60	3.54	2.97	2.63	2.70	2.60	0.33	5.00	0.39	2.59
2023	4.13	2.04	3.18	3.61	3.55	3.31	2.71	3.91	0.49	3.83	2.35	0.78	2.82
2024	4.45	3.64	3.59	3.78	3.46	3.80	3.53	3.39	2.82	3.85	2.62	0.94	3.32

Dalam rangka penyelarasan 45 indikator utama RPJPD dengan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024, salah satunya adalah indikator ke–17 yaitu indikator Tingkat Penguasaan Iptek yang masuk dalam misi ke–2 (Transformasi Ekonomi) dan arah Pembangunan (IE04) IPTEK, Inovasi dan Pertumbuhan

Ekonomi. Maka pada pilar ke–12 dalam IDSD, yaitu Indeks Kapabilitas Inovasi**,** digunakan sebagai indikator Tingkat Penguasaan IPTEK.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja pemerintah daerah diukur melalui capaian Indikator Kinerja Kunci *Outcome* tingkat kabupaten/kota yang termandatkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai pedoman umum yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.7/10582/OTDA. Berikut merupakan capaian berdasarkan urusan selama lima tahun, sejak 2020 hingga 2024.

Tabel 2-36 Capaian Indikator Kinerja Kunci *Outcome* Tahun 2020 – 2024

Kodefikasi			INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
n	x	n			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pendidikan									
1	a	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persentase	58.01	72.95	73.23	73.74	66.83
1	a	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase	96.39	99.07	98.66	98.84	98.54
1	a	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persentase	90.53				95.66
1	a	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase	-	11.88	15.43	25.73	36.33
1	a	5	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	8.67	8.68	8.78	8.85	8.95
1	a	6	Harapan lama sekolah	Tahun	12.67	12.81	12.97	12.98	12.99
	a	1	Skor Kemampuan Literasi SD		-	42,96	48,60	51,30	52,17
	a	1	Skor Kemampuan Literasi SMP		-	55,15	57,79	63,28	63,58
	a	2	Skor Kemampuan Numerasi SD		-	31,41	36,94	39,85	46,52
	a	2	Skor Kemampuan Numerasi SMP		-	51,35	51,55	57,77	58,02
	b	10	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)		-	72.95	73.23	73,74	66,83
	b	13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun		-	99,07	98,66	98,84	97,62
	b	15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan		-	11,88	15,43	25,73	36,33
	b	8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B		-	58.20	54.25	55,35	52,11
	c	1	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4		-	59.09	63.43	73,74	73,75
	d	10	Iklim Inklusivitas SD		-	65,55	73,55	54,51	56,89
	d	10	Iklim Inklusivitas SMP		-	67,01	77,88	58,73	58,37
	d	4	Iklim Keamanan SD		-	66,45	79,17	71,81	73,27
	d	4	Iklim Keamanan SMP		-	75,67	78,96	72,85	71,35
	d	8	Iklim Kebinekaan SD		-	60,11	85,88	71,70	69,37

Kodefikasi			INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
n	x	n			2020	2021	2022	2023	2024
	d	8	Iklim Kebinekaan SMP		-	63,59	78,39	75,29	71,90
Urusan Kesehatan									
1	b	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	109 TT	109 TT	131 TT	131 TT	117 TT
1	b	2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persentase	100	100	100	100	100
1	b	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase	79,18	87,41	83,72	85,72	81,1
1	b	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase	52,11	52,21	61,32	84,48	65,4
1	b	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase	83,26	85	78,54	83,46	78,6
1	b	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase	83,31	53,48	62,9	75,12	87
1	b	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	44,89	52,24	90,47	91,4	96,6
1	b	8	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	52,18	50,03	83,5	63,7	80,1
1	b	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	90,57	28,16	57,98	85	94,7
1	b	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	53,13	70,7	83.22	84,2	92,6
1	b	11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	47,27	78,95	92,02	101,5	99,6
1	b	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase	84,88	81,3	90,6	116,7	100
1	b	13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase	50	76,31	80,72	81,2	88,8
1	b	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase	67,52	57,39	83,12	83,6	87,1
Urusan Pekerjaan Umum									

Kodefikasi			INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
n	x	n			2020	2021	2022	2023	2024
1	c	1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	0	0	0	23.538	9,22
1	c	2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase	59.225	59.225	59.225	63.87	63.87
1	c	3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persentase	37,8	84,12	60,44	61,18	61,62
1	c	4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase	25,47	38,62	32,3	35,4	76,66
1	c	5	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persentase	100	100	100	100	99,89
1	c	6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persentase	30.56	35.75	36.6	37.54	37.88
1	c	7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	–	–	–	–	15.63
1	c	8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase	100	100	100	100	100
Urusan Perumahan Rakyat									
1	d	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase	30,4	34,67	40,3	10,73	34,65
1	d	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persentase	0	0	0	0	0
1	d	3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persentase	–	–	–	–	78,98
1	d	4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase	24,6	27,2	29,8	32,4	35
Urusan Ketentreraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1	e	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100

Kodefikasi			INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
n	x	n			2020	2021	2022	2023	2024
1	e	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase	100	100	77	87,5	100
1	e	3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase	55,6	0,44	100	100	100
1	e	4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	76,03	31,23	100	100	100
1	e	5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	100	100	100	62,14	0,59
1	e	6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100
1	e	7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu	15	15	9,72	12,14	11,54
Urusan Sosial									
1	f	1	Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase	80. 18 %	85,17%	89,50%	91,60%	97,43%
1	f	2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persentase	79,99%	80,00%	81,00%	84,00%	96,00%
1	f	3	Persentase cakupan pemutakhiran/pemenuhan data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	50%	52%	54%	56%	68%
1	f	4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Persentase	70%	72%	74%	76%	78%
Urusan Tenaga Kerja									
2	a	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persentase	100	100	100	68,75	82,35
2	a	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase	0	0,083	0,02	0,03	1,13
2	a	3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	10,72	9,95	6,11	14,13	102,36

Kodefikasi			INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
n	x	n			2020	2021	2022	2023	2024
2	a	4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase	85,36	82,92	93,02	66,66	71,05
2	a	5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persentase	0	0	25,31	3,18	79,36
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2	g	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase	–	5,7	5,88	5,27	5,65
2	g	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	100	100	100
2	g	3	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Persentase	100	100	100	100	100
Urusan Pangan									
2	h	1	Persentase Cadangan Pangan	Persentase	–	–	–	–	20,41
Urusan Pertanahan									
2	i	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persentase	100	0	17.47	95.156	100
2	i	2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase	100	100	100	100	100
2	i	3	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	Persentase	100	0	17.47	100	98.8
2	i	4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase	100	100	100	100	50.6
2	i	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persentase	0	0	0	0	0
2	i	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persentase	100	100	100	100	100

Kodefikasi			INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
n	x	n			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Lingkungan Hidup									
2	j	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	74.67	73.45	74.66	73.88	76.81
2	j	2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase	–	–	–	–	70,21
2	j	6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase	–	–	–	–	29,79
2	j	7	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	–	–	–	–	95.20
2	j	8	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	–	–	–	–	50.74
2	j	9	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	–	–	–	–	87.54
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2	k	1.1	Perekaman KTP Elektronik	Persentase	99,64	99,4	98,87	99,56	99,03
2	k	1.2	Persentase anak usia 0–17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persentase	33,07	38,47	47,96	83,49	86,39
2	k	1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Persentase	100	100	100	96,76	99,2
2	k	1.4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persentase	4,17	12,5	12,5	12,5	12,5
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	l	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase	10.71	13.78	16.66	19.35	21.86
2	l	2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persentase	2.27	3.37	4.44	5.49	6.52
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
2	m	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka Kelahiran Total	2,48	–	–	2,41	2,26
2	m	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase	79,05	94,08	87,4	67,68	70,9
2	m	3	Persentase kebutuhan ber–KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase	9,48	9,45	35,01	7,87	7

Kodefikasi			INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
n	x	n			2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Perhubungan									
2	n	1	Rasio konektivitas	Indeks	–	–	–	–	0,44
2	n	2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota (Angkutan Darat)	Rasio	–	–	–	–	7/0
2	n	3	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)	Rasio	–	–	–	–	24/19
Urusan Komunikasi dan Informatika									
2	o	1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase	100	100	100	100	100
2	o	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	–	60	72	72,72	80
2	o	3	Persentase desa/kelurahan terlayani akses internet yang baik	Persentase	16,77	24,22	37,89	47,2	78,88
2	o	4	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	Persentase	72,7	100	100	95,6	96,2
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
2	p	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase	–	–	–	–	11
2	p	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persentase	–	–	–	–	54
2	p	3	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persentase	–	–	–	–	4,322
Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota									
2	q	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persentase	–	–	–	–	0,46
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota									
2	r	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persentase	8,89	9,16	9,17	9,18	8,87
2	r	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persentase	13,7	13,72	13,74	13,76	13,77
2	r	3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	2	8	9	10	10
Urusan Statistik Kabupaten/Kota									
2	s	1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100

Kodefikasi			INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
n	x	n			2020	2021	2022	2023	2024
2	s	2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100
Urusan Persandian									
2	t		Indeks Keamanan Informasi	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	347
Urusan Kebudayaan									
2	u		Terlestarikanya Cagar Budaya	Persentase	–	–	100	100	100
Urusan Perpustakaan									
2	v	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	0	0	34	59,48	65,69
2	v	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	–	28,21	62,27	62,17	0
Urusan Kearsipan									
2	w	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Persentase	–	1%	1%	110	277,025
2	w	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase	–	0	0	0	0
Urusan Kelautan dan Perikanan									
3	a		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap) Kabupaten/Kota	Ton	–	–	–	6.781,90	6981,9
3	a		Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) Kabupaten/Kota	Ton	–	–	–	6.288,07	6300,25
Urusan Pariwisata									
3	b	1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	Persentase	–80,77	–60	4.150,00	8,24	–3,26
3	b	2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisata Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	Persentase	–69,21	106,07	93,8	–3,1	5,85
3	b	3	Tingkat Hunian Akomodasi	Persentase	–	–	5,53	19,7	20,39
3	b	4	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	Persentase	2,33	2,3	2,26	2,21	2,27

Kodefikasi			INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
n	x	n			2020	2021	2022	2023	2024
3	b	5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Persentase	–	–	3,13	2,4	3,26
Urusan Pertanian									
3	c	1	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Ton per Hektar per Tahun	–	–	–	–	4,13
3	c	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persentase	–	–	–	–	29
Urusan Perindustrian									
3	g	1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	Persentase	–	–	–	5,56	–77,39
3	g	2	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIK	Persentase	–	–	–	0	0
3	g	3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persentase	–	–	–	100	40
3	g	4	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persentase	–	–	–	0	0
3	g	5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	–	–	–	65	65
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)									
4	a	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persentase	18.33	23.13	14.53	12.07	11.16
4	a	2	Rasio PAD	Persentase	72.95	7.03	8.94	6.88	4.31
4	a	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Indeks	2,8	2,545	2,979	2,975	2,94
4	a	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indeks	3	3	3	3	3

Kodefikasi			INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
n	x	n			2020	2021	2022	2023	2024
4	a	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Persentase	26.07	33.52	85.59	77.59	59.6
4	a	6	Opini Laporan Keuangan	Indeks	10	10	10	10	10
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)									
4	b	2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persentase	59,69	83,03	26,71	27,13	18,07
4	b	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persentase	26,82	26,42	48,26	51,39	60,74
4	b	4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persentase	–	50,1	75,27	35,17	8,35
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)									
4	c	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	–	48.35	33.70	22.04	78.21
4	c	2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	–	21.68	23.71	24.19	25.02
4	c	3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persentase	–	8.23	29.65	40.32	15.48
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)									
4	d	1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persentase	33.8	24.77	7.05	4.91	12.13
4	d	2	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persentase	3.19	16.23	56.98	28.79	42.11
4	d	3	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persentase	4	4	4	2	4
4	d	4	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persentase	18.67	34.38	6.35	4.02	11.71
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)									

Kodefikasi			INDIKATOR	SATUAN	Capaian Kinerja				
n	x	n			2020	2021	2022	2023	2024
4	e	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)	Persentase	–	–	–	100	100
4	e	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information*)	Persentase	–	–	–	100	100

2.2 Gambaran Kondisi Keuangan Kabupaten Katingan

Kondisi keuangan suatu daerah mencerminkan kemampuan dan efisiensi Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini akan dibahas secara komprehensif mengenai kondisi keuangan Kabupaten Katingan selama lima tahun terakhir (2020 hingga 2024), mencakup berbagai aspek penting seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan daerah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Neraca Daerah Kabupaten Katingan juga dibahas dalam bagian ini. Selanjutnya juga akan dibahas secara komprehensif juga mengenai proyeksi keuangan Kabupaten Katingan dalam 5 tahun (2025–2029) yang mencakup berbagai aspek penting seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah serta pembahasan terkait isu Undang-Undang yang baru akan dilaksanakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan isu efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia.

2.2.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) 2020–2024

Realisasi APBD Kabupaten Katingan dari sisi Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan mengalami fluktuasi. Penurunan terjadi pada tahun 2020 meskipun tidak terlalu signifikan, di mana realisasinya masih di angka 99,58%. Penurunan tersebut diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, 2021, dan 2022 realisasinya melebihi 100%, 98,78% pada tahun 2023, dan 94,91% untuk tahun 2024. Tingkat realisasi di bawah 100% dapat mengindikasikan kinerja yang kurang optimal dalam mencapai pendapatan yang ditargetkan atau penetapan anggaran Pendapatan Daerah yang terlalu tinggi. Walaupun demikian, kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan selama 2020–2024 masih berada dalam toleransi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Tabel 2-37 Gambaran Kondisi Realisasi APBD Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024

URAIAN	Realisasi APBD Tahun (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	1.145.921,00	1.224.871,78	1.273.714,07	1.406.156,78	1.585.130,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.601,70	67.037,29	76.233,32	97.945,34	68.100,04
PENDAPATAN TRANSFER	902.975,36	1.123.156,84	1.195.407,96	1.307.710,18	1.508.968,93
LAIN–LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.343,94	34.677,66	2.072,79	501,26	8.061.130,48

URAIAN	Realisasi APBD Tahun (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA	1.100.845,54	1.208.390,80	1.331.475,98	1.446.092,12	1.587.300,67
BELANJA OPERASI	701.852,13	749.814,35	815.310,58	891.213,74	984.283,08
BELANJA MODAL	138.308,81	218.416,76	302.454,35	332.915,15	374.250,53
BELANJA TAK TERDUGA	33.044,41	13.499,05	8.214,80	1.062,26	1.605,41
BELANJA TRANSFER	227.640,19	226.660,64	205.496,25	220.900,97	227.161,66
PEMBIAYAAN	137.180,95	167.381,10	169.156,43	96.531,34	56.621,43
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.395,95	182.259,10	184.034,43	111.410,34	56.621,43
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.215,00	14.878,00	14.878,00	14.879,00	0

Sumber: LRA Kabupaten Katingan 2020 – 2024 (diolah)

Tabel 2-38 Gambaran Kondisi Anggaran APBD Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024

URAIAN	APBD Tahun (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	1.150.601,29	1.174.509,18	1.258.379,66	1.423.522,64	1.670.124,08
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54.292,04	80.000,00	112.200,49	137.542,32	117.959.50
PENDAPATAN TRANSFER	922.379,74	1.060.781,22	1.146.179,17	1.285.670,31	1.552.114,58
LAIN–LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	173.929,50	33.727,96	–	310,00	50,00
BELANJA	1.287.535,22	1.341.886,60	1.427.362,74	1.520.038,15	1.726.720,07
BELANJA OPERASI	743.017,04	846.653,28	900.483,97	942.149,70	1.103.509,57
BELANJA MODAL	176.373,90	249.289,17	312.506,95	351.963,11	387.781,37
BELANJA TAK TERDUGA	138.504,86	19.009,93	8.700,00	5.000,00	8.232,73
BELANJA TRANSFER	229.639,42	226.934,22	205.671,83	220.925,35	227.196,54
PEMBIAYAAN	136.933,85	167.377,41	168.983,08	96.515,52	56.595,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.333,85	182.256,41	183.862,08	111.394,52	56.595,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.400,00	14.879,00	14.879,00	14.879,00	0,00

Sumber: LRA Kabupaten Katingan 2020 – 2024 (diolah)

Tabel 2-39 Gambaran Capaian Realisasi APBD Terhadap Target APBD Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024

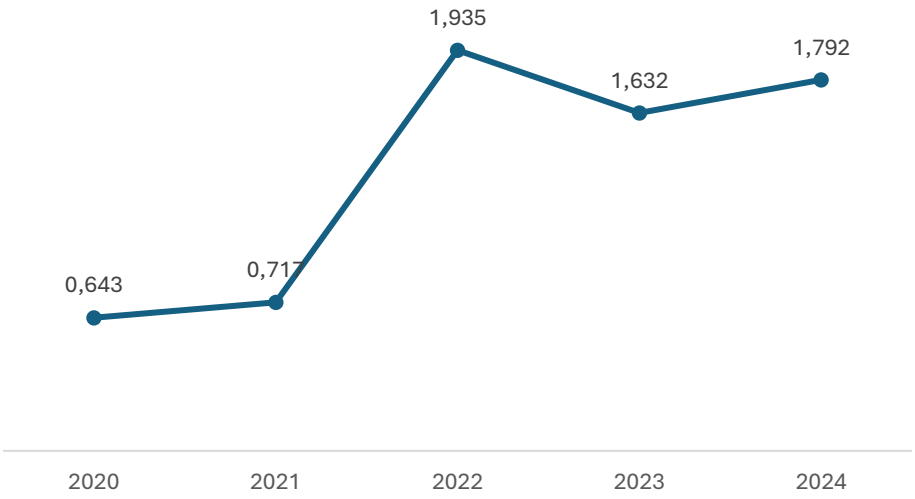
URAIAN	Capaian Realisasi APBD Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	99,59	104,29	101,22	98,78	94,91
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	111,62	83,80	67,94	71,21	57,73
PENDAPATAN TRANSFER	97,90	105,88	104,30	101,71	97,22
LAIN–LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104,84	102,82	–	161,70	16.123,86

URAIAN	Capaian Realisasi APBD Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA	85,50	90,05	93,28	95,14	91,93
BELANJA OPERASI	94,46	88,56	90,54	94,59	89,20
BELANJA MODAL	78,42	87,62	96,78	94,59	96,51
BELANJA TAK TERDUGA	23,86	71,01	94,42	21,25	19,50
BELANJA TRANSFER	99,13	99,88	99,91	99,99	99,98
PEMBIAYAAN	100,18	100,00	100,10	100,02	100,04
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100,04	100,00	100,09	100,01	100,04
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	97,50	99,99	99,99	100,00	0,00

Sumber: LRA Kabupaten Katingan 2020 – 2024 (diolah)

Terkait realisasi Belanja Daerah, berdasarkan tabel di atas, capaian realisasi menunjukkan adanya peningkatan mendekati 100%. Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah hanya sebesar 85,50% yang kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 95,14% pada tahun 2023 lalu kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 yaitu 91,93%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah semakin efektif dalam merencanakan dan mengimplementasikan anggaran. Persentase realisasi yang tinggi menandakan bahwa belanja aktual semakin mendekati anggaran yang direncanakan, mencerminkan perencanaan yang akurat dan pengelolaan yang efisien. Selain itu, peningkatan ini juga mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program dan kegiatan sesuai rencana, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian untuk realisasi APBD Pembiayaan Kabupaten Katingan selalu berada di angka positif bahkan mencapai target selama tahun 2020 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pembiayaan neto yang positif di Kabupaten Katingan.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Daerah, memperkenalkan pendekatan baru untuk menilai kondisi ruang fiskal suatu daerah yang disebut Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). KFD diartikan sebagai kemampuan finansial suatu daerah yang diukur melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan tertentu, dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. KFD ini kemudian dijabarkan dalam bentuk rasio tertentu, yang dikenal sebagai rasio KFD, di mana masing–masing nilai akan dikelompokkan ke dalam kategori KFD.



Grafik 2-45 Perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020–2024
Sumber: Kementerian Keuangan, 2020 – 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat tren KFD Kabupaten Katingan selama lima tahun terakhir di mana tren KFD tersebut cenderung positif. Sejak tahun 2022, terdapat perubahan metode perhitungan Kapasitas Fiskal oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan indikator Rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Katingan 2020 hingga 2021 masuk ke dalam kategori "*rendah*". Kemudian untuk capaian RKFD Kabupaten Katingan tahun 2022 dan 2024 masuk dalam kategori "*sangat tinggi*".

Tabel 2-40 Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun	Nilai	Kategori
Indeks KFD	2020	0,643	Rendah
	2021	0,717	Rendah
Rasio KFD	2022	1,935	Sangat Tinggi
	2023	1,632	Sangat Tinggi
	2024	1,792	Sangat Tinggi

Sumber: Kementerian Keuangan 2019 – 2024 (diolah)

2.2.2 Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjabarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan menetapkan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan yang setidak–tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Aturan tersebut kemudian

diimplementasikan melalui Permendagri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Aktual. Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan menyertakan neraca daerahnya.

Selain untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, neraca daerah juga memiliki peran penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang terarah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Berikut ini adalah neraca daerah Kabupaten Katingan untuk periode tahun anggaran 2020 hingga 2024, serta analisis kinerja neraca daerah Kabupaten Katingan.

Tabel 2-41 Neraca Daerah Kabupaten Katingan (Dalam Juta Rupiah) Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	218.177,29	220.728,81	145.602,98	89.281,01	85.154,96
	B. Investasi Jangka Panjang	56.635,84	67.059,92	81.937,92	98.600,46	98.600,46
	C. Aset Tetap	2.698.177,06	2.480.832,44	2.647.836,14	2.864.128,79	3.102.775,80
	D. Aset Lainnya	190.825,46	192.670,65	213.724,30	216.806,43	281.290,40
	JUMLAH ASET	3.139.298,40	2.896.210,74	3.014.859,09	3.333.645,90	3.567.821,61
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	9.313,68	5.562,17	4.512,54	8.705,96	8.705,96
	B. Kewajiban Jangka Panjang					
	JUMLAH KEWAJIBAN	9.313,68	5.562,17	4.512,54	8.705,96	8.705,96
3	EKUITAS					
	Ekuitas	3.129.984,72	2.890.648,57	3.010.346,55	3.324.939,94	3.154.609,95
	JUMLAH EKUITAS					3.154.609,95
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.139.298,40	2.896.210,74	3.014.859,09	3.333.645,90	3.163.315,90

Sumber: Neraca Kabupaten Katingan 2019 – 2023 (diolah)

Neraca Daerah Kabupaten Katingan menunjukkan pertumbuhan aset yang fluktuatif. Pada tahun 2022 dan 2023, aset lainnya meningkat pesat akibat adanya alokasi dana transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* sejak ditetapkannya PMK Nomor 19 tahun 2023. Kontribusi dari meningkatnya investasi jangka panjang permanen juga menjadi kontributor peningkatan aset. Di sisi lain, kewajiban Kabupaten Katingan selama tahun 2020 hingga 2022 mengalami penurunan. Namun, pada 2023 angka kewajiban meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kewajiban tersebut hanya dihasilkan oleh kewajiban jangka pendek. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Katingan tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

Tabel 2-42 Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar	23,43	39,68	32,27	10,26	9,78
Rasio Quick	21,58	36,65	28,71	8,17	5,76
Rasio Solvabilitas					
Debt–to–Asset Ratio	0,297	0,192	0,150	0,261	0,244
Debt–to–Equity Ratio	0,298	0,192	0,150	0,262	0,276

Sumber: Neraca Kabupaten Katingan 2020 – 2024 (diolah)

Selanjutnya, dari laporan neraca daerah yang diperoleh, dilakukan analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan aset lancar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Katingan untuk melunasi utang jangka pendek. Beberapa rasio likuiditas yang dipaparkan ialah rasio lancar dan rasio cepat. Sementara itu, rasio solvabilitas memberikan informasi terkait kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa rasio solvabilitas yang dihitung ialah rasio utang terhadap total aset (*debt to asset ratio*) dan rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*).

Tabel 2-43 Definisi dalam Analisis Rasio Keuangan

Rasio Keuangan	Definisi
Rasio Lancar	Mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar
Rasio Cepat	Mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar dan likuid, seperti kas dan setara kas, piutang, dsb.
Rasio Utang Terhadap Total Aset	Mengukur penggunaan utang untuk membiayai pembelian aset
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	Mengukur ketergantungan pemerintah daerah pada utang

Rasio likuiditas ialah rasio yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajibannya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2020 ialah 23,43, sementara rasio lancar pada tahun 2024 sebesar 9,48. Adanya tren penurunan rasio lancar ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kemampuan aset lancar dalam menutup kewajiban lancar Kabupaten Katingan. Nilai rasio lancar tahun 2024 sebesar 9,48 dapat diinterpretasikan bahwa keseluruhan aset total yang ada dapat menutup atau setara dengan 9,48 kali kewajiban lancar Kabupaten Katingan.

Sementara itu, rasio cepat mengukur kemampuan aset lancar, selain persediaan dalam menutup kewajiban lancar. Pada rentang tahun 2020–2024, rasio cepat mengalami penurunan signifikan dari 21,58 menjadi 5,76. Ini menunjukkan besarnya proporsi persediaan dalam komponen aset tetap Kabupaten Katingan.

Kemudian, rasio solvabilitas ialah rasio yang mengukur kemampuan suatu institusi dalam melunasi seluruh kewajiban yang dimilikinya (kewajiban jangka pendek dan jangka panjang). Rasio total utang terhadap total aset menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pada rentang tahun 2020–2024. Adanya penurunan rasio menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan lebih mengandalkan ekuitas dalam membiayai pembelian asetnya sehingga berdampak pada risiko keuangan yang lebih rendah.

Sementara itu, rasio utang terhadap modal menunjukkan bahwa rasio mengalami tren penurunan menjadi 15% pada 2022. Besaran rasio utang terhadap modal menunjukkan proporsi utang yang relatif besar terhadap total ekuitas. Adapun, rasio utang terhadap ekuitas dipengaruhi oleh (i) perubahan utang/kewajiban, (ii) perubahan modal atau (iii) utang meningkat lebih tinggi daripada modal, atau sebaliknya.

2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan (2025–2030)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Dalam melaksanakan proyeksi, perlu dilakukan secara hati–hati dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan serta perubahan perundang-undangan di masa yang akan datang. Salah satu perubahan yang terjadi ialah Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur aspek hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sejak diberlakukan pada tahun 2022, Perda mengenai pajak dan retribusi yang berdasarkan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya berlaku maksimal dua tahun sejak UU ini disahkan (hingga 2025). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan tetap berlaku hingga tiga tahun (sampai 2026). Pemberlakuan UU ini akan menyebabkan perubahan dalam penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Katingan. Lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup:

a) pemberian sumber Penerimaan Daerah melalui Pajak dan Retribusi;
b) pengelolaan Transfer Keuangan Daerah (TKD);
c) pengelolaan Belanja Daerah;
d) pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
e) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Terdapat perubahan jenis, dasar pengenaan, dan besaran pajak pada aspek penerimaan daerah, menjadi:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB–P2);
b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
d) Pajak Reklame;
e) Pajak Air Tanah (PAT);
f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
g) Pajak Sarang Burung Walet;
h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sendiri merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: (a) makanan dan/atau minuman; (b) tenaga listrik; (c) jasa perhotelan; (d) jasa parkir; dan (e) jasa kesenian dan hiburan.

Pada retribusi, meskipun tetap akan terdiri dari tiga jenis dengan klasifikasi yang sama seperti pada UU Nomor 28 Tahun 2009, komponen dari masing–masing jenis retribusi akan diubah sebagaimana pada daftar di bawah. Besaran dari masing–masing jenis retribusi tersebut disesuaikan lebih lanjut dalam peraturan tingkat daerah.

a) Retribusi Jasa Umum
    a. Pelayanan kesehatan
    b. Pelayanan kebersihan
    c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum
    d. Pelayanan pasar
    e. Pengendalian lalu lintas
b) Retribusi Jasa Usaha
    a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
    b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
    c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
    e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
    f. pelayanan jasa ke pelabuhan;
    g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
    h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
    i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
    j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
c) Pelayanan Pemberian izin
    a. Persetujuan bangunan gedung;
    b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan

c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Selain berdasarkan penerimaan daerah, aspek pengelolaan TKD atau pendapatan transfer juga memiliki perubahan. UU Nomor 1 Tahun 2022 melakukan beberapa perubahan terkait persentase dana bagi hasil (DBH) yang diterima oleh provinsi maupun kabupaten/kota. Tidak hanya DBH, pertimbangan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) juga berubah dengan mempertimbangkan lebih banyak aspek seperti: (a) kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; (b) kemampuan Keuangan Negara; (c) pagu TKD secara keseluruhan; dan (d) target pembangunan nasional. Perubahan substansial ini disinyalir mempengaruhi nominal DAU yang akan diterima oleh Kabupaten Katingan. Dapat dilihat bahwa aturan batas minimum 26% dari APBN yang wajib dialokasikan untuk DAU pada UU Nomor 3 tahun 2004 juga tidak diwajibkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, perubahan perhitungan KFD menjadi merujuk pada PMK Nomor 84 tahun 2023 ditambah dasar penetapannya sudah tidak mempertimbangkan alokasi dasar tentu memengaruhi besaran DAU saat peraturan tersebut mulai diterapkan. Terakhir, dasar kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berubah dan menjadi lebih memperhatikan kemampuan APBN.

Pada sisi belanja daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022 juga memandatkan perubahan substansial pada postur belanja daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam hal ini, penyusunan program pembangunan daerah ditekankan untuk berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan serta sinkron dan harmonis dengan program pemerintah pusat. Lebih lanjut, struktur belanja daerah mewajibkan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja daerah dan harus disesuaikan paling lama 5 tahun sejak UU ini diundangkan, atau 2027. Selain itu, alokasi untuk belanja infrastruktur pelayanan publik diatur dalam Pasal 147 Ayat (1) dengan persentase paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja transfer.

Terakhir, UU Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur terkait optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk belanja daerah. Dalam hal ini, ketika SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi maka dapat digunakan untuk membentuk Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi. Akan tetapi, ketika SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang

berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. Dalam hal ini, penilaian kinerja layanan menggunakan hasil penilaian kinerja untuk penghitungan DAU.

Efisiensi Anggaran

Efisiensi Anggaran yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilakukan sebagai langkah tegas untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan daerah di tengah tantangan ekonomi global serta kebutuhan fiskal yang meningkat. Inpres ini berisi panduan pelaksanaan penghematan belanja pemerintah pusat dan daerah dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, peraturan tersebut menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

Lebih lanjut, Efisiensi Anggaran ini didetailkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 29/2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah. Menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas:

1. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil;

2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus Fisik;
4. Dana Otonomi Khusus;
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
6. Dana Desa.

Kebijakan efisiensi anggaran ini berdampak kompleks pada keuangan daerah. Di satu sisi, penghematan belanja tidak prioritas dan penguatan pengawasan dapat meningkatkan efektivitas APBD dengan mengalihkan dana ke program strategis serta mengurangi kebocoran. Namun di sisi lain, daerah dengan PAD rendah dan ketergantungan tinggi pada transfer pusat berisiko mengalami keterlambatan pembangunan jika pemotongan anggaran tidak disertai pendampingan memadai. Dampak positif berupa transparansi dan penajaman prioritas hanya akan terwujud jika diimbangi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, pelatihan manajemen keuangan, serta insentif selektif dari pemerintah pusat. Sementara, kegagalan adaptasi bisa memperlebar kesenjangan fiskal antardaerah.

Proyeksi APBD Kabupaten Katingan Tahun 2026–2030

Hasil proyeksi APBD Kabupaten Katingan tahun 2026 hingga 2030 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hasil analisis kinerja keuangan masa lalu. Selain itu, juga didasari oleh disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022, kebijakan Efisiensi Anggaran dan kondisi serta arah pembangunan Kabupaten Katingan 5 tahun ke depan. Tabel 2-44 merupakan gambaran ringkas proyeksi APBD Kabupaten Katingan tahun 2025–2030.

Pada Tabel 2-44, Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan diproyeksi senilai Rp1,537 triliun pada tahun 2026, meningkat menjadi Rp. 1,597 triliun di tahun 2027 hingga menjadi Rp. 1,802 triliun pada tahun 2030. Terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah, hingga pada nilai Rp. 94 miliar di akhir tahun periode. Adanya perubahan tarif pajak dan retribusi serta proyeksi terjadinya pertumbuhan ekonomi positif di Kabupaten Katingan menyebabkan adanya tren positif dari Pendapatan Asli Daerah.

Apabila dibandingkan pada realisasi tahun 2024, besaran Pendapatan Asli Daerah meningkat cukup pesat. Walaupun demikian, proyeksi keuangan Kabupaten Katingan tahun 2026–2030 tetap dilakukan dengan berkaca pada kemampuan yang dimiliki oleh Kabupaten Katingan. Pendapatan transfer, yang mengalami efisiensi anggaran secara cukup signifikan, turun cukup besar hingga Rp73 miliar pada tahun 2026 dibandingkan dengan realisasi 2024. Sementara, Lain–Lain Pendapatan yang Sah diproyeksi berada pada nilai Rp7 miliar pada tahun 2026 sampai dengan pada tahun 2030. Sebagai upaya untuk

meningkatkan capaian Lain–Lain Pendapatan yang Sah, optimalisasi penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta pemanfaatan dan pendayagunaan kekayaan daerah menjadi langkah yang tidak terpisahkan.

Kemudian, sumber pendapatan lain berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun 2026 diproyeksi turun dibandingkan dengan tahun 2024 yang tidak terlepas dari adanya kebijakan efisiensi. Walaupun Pendapatan Transfer turun pada tahun 2026, pendapatan transfer pada periode berikutnya yaitu 2027–2030 diproyeksi kembali meningkat. Namun, hal tersebut perlu dilakukan secara bertahap mengingat bahwa pada periode 2025–2029 arah pembangunan Kabupaten Katingan ialah penguatan fondasi pembangunan. Untuk menunjang hal tersebut, semua komponen dan sub–komponen Pendapatan Daerah diproyeksi meningkat selama periode 2026–2030. Pada tahun 2030, proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp1,79 triliun.

Selanjutnya ialah Belanja Daerah yang dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Pada periode 2026–2030, besaran Belanja Daerah diproyeksi akan lebih besar daripada Pendapatan Daerah, dengan kata lain ialah defisit anggaran. Walaupun demikian, proyeksi Belanja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan fokus pembangunan dari Kabupaten Katingan. Pada fungsi–fungsi yang menjadi prioritas arah pembangunan, diberikan ruang lebih besar untuk melakukan belanja.

Spesifik pada komponen Belanja Modal diproyeksi menurun pada tahun 2026 dibandingkan dengan realisasi anggaran 2024 yang tak lepas dari efisiensi anggaran yang dilakukan. Namun setelah itu diproyeksi meningkat secara perlahan, hal ini tak lepas dari aktivitas belanja daerah untuk mencapai target RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029. Selain itu, penitikberatan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa diutamakan pada fungsi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, dan perumahan dan fasilitas umum.

Kemudian, komponen Pembiayaan Daerah meliputi transaksi yang dapat menutup defisit atau memanfaatkan surplus keuangan, yang terbagi menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan selama periode 2026–2030 akan berasal dari SiLPA, sementara Pengeluaran Pembiayaan akan dialihkan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Oleh karena keuangan Kabupaten Katingan diproyeksi mengalami defisit sepanjang 2026–2030, ini berdampak pada

Pembiayaan Daerah yang positif, atau Penerimaan Pembiayaan yang lebih besar daripada Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 2-44 Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2030

Kode Rekening	Uraian	APBD TA. 2024	APBD TA. 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029	Proyeksi 2030
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.505.381.075.534**	**1.474.579.284.490**	**1.537.903.241.000**	**1.597.716.579.700**	**1.661.297.072.260**	**1.730.057.077.274**	**1.802.673.637.551**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**117.959.495.534**	**133.197.130.490**	**133.197.130.490**	**136.394.446.015**	**139.623.647.735**	**144.019.884.212**	**147.710.083.055**
4.1.01	Pajak Daerah	49.876.586.982	85.958.514.224	85.958.514.224	88.683.443.586	91.435.535.282	92.349.890.635	94.023.389.541
4.1.02	Retribusi Daerah	6.556.973.058	7.547.880.558	7.547.880.558	7.623.359.364	7.699.592.957	9.276.588.887	10.119.354.776
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.192.215.980	3.500.000.000	3.500.000.000	3.535.000.000	3.570.350.000	5.106.053.500	5.907.114.035
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.333.719.514	36.190.735.708	36.190.735.708	36.552.643.065	36.918.169.496	37.287.351.191	37.660.224.703
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.387.371.580.000**	**1.334.332.154.000**	**1.397.656.110.510**	**1.454.272.133.686**	**1.514.623.424.525**	**1.578.987.193.062**	**1.647.913.554.496**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.324.167.580.000**	**1.290.765.554.000**	**1.347.039.510.510**	**1.403.655.533.686**	**1.464.006.824.525**	**1.528.370.593.062**	**1.597.296.954.496**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.195.446.905.000	1.154.847.729.000	1.211.121.685.510	1.267.737.708.686	1.328.088.999.525	1.392.452.768.062	1.461.379.129.496
4.2.01.01.01	- Dana Transfer Umum - DBH	177.726.226.000	180.893.301.000	180.893.301.000	198.982.631.100	218.880.894.210	240.768.983.631	265.095.881.994
4.2.01.01.02	- Dana Transfer Umum - DAU	696.838.932.000	714.259.905.000	770.533.861.510	809.060.554.586	849.513.582.315	891.989.261.431	936.588.724.502
4.2.01.01.03	- Dana Transfer Khusus - DAK F	187.726.478.000	107.984.909.000	107.984.909.000	107.984.909.000	107.984.909.000	107.984.909.000	107.984.909.000
4.2.01.01.04	- Dana Transfer Khusus - DAK NF	133.155.269.000	151.709.614.000	151.709.614.000	151.709.614.000	151.709.614.000	151.709.614.000	151.709.614.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0
4.2.01.05	Dana Desa	128.720.675.000	135.917.825.000	135.917.825.000	135.917.825.000	135.917.825.000	135.917.825.000	135.917.825.000
4.2.02	**Transfer Antar Daerah**	**63.204.000.000**	**43.566.600.000**	**50.616.600.000**	**50.616.600.000**	**50.616.600.000**	**50.616.600.000**	**50.616.600.000**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	63.204.000.000	42.150.000.000	49.200.000.000	49.200.000.000	49.200.000.000	49.200.000.000	49.200.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan.	0	1.416.600.000	1.416.600.000	1.416.600.000	1.416.600.000	1.416.600.000	1.416.600.000
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**50.000.000**	**7.050.000.000**	**7.050.000.000**	**7.050.000.000**	**7.050.000.000**	**7.050.000.000**	**7.050.000.000**
4.3.01	Hibah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
5	**BELANJA DAERAH**	**1.592.124.885.638**	**1.631.703.634.490**	**1.591.662.510.000**	**1.640.466.455.000**	**1.702.230.133.000**	**1.766.478.146.000**	**1.837.348.314.000**
5.1	**Belanja Operasi**	**993.847.263.922**	**1.041.518.520.483**	**1.035.733.208.049**	**1.054.221.419.013**	**1.073.638.299.962**	**1.097.829.564.701**	**1.120.999.157.884**
5.1.01	Belanja Pegawai	492.384.917.556	562.297.778.093	631.514.707.423	647.302.575.109	661.485.139.486	678.022.267.974	694.972.824.673
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.605.509.720	391.899.649.420	378.495.970.626	380.918.843.904	385.823.438.123	393.807.296.727	400.026.333.211

Kode Rekening	Uraian	APBD TA. 2024	APBD TA. 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029	Proyeksi 2030
5.1.04	Belanja Subsidi	2.080.150.000	1.850.000.000	1.900.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	102.780.826.310	81.376.652.970	19.228.530.000	19.000.000.000	19.329.722.352	19.000.000.000	19.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.995.860.336	4.094.440.000	4.594.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
5.2	**Belanja Modal**	**369.624.738.192**	**302.561.368.407**	**294.943.095.620**	**322.748.967.594**	**362.560.803.960**	**400.057.241.930**	**445.171.903.353**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**10.000.000.000**	**40.260.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**
5.4	**Belanja Transfer**	**218.652.883.524**	**247.363.745.600**	**250.986.206.331**	**253.496.068.394**	**256.031.029.078**	**258.591.339.369**	**261.177.252.763**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.230.692.724	7.500.000.000	8.500.000.000	8.585.000.000	8.670.850.000	8.757.558.500	8.845.134.085
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.422.190.800	239.863.745.600	242.486.206.331	244.911.068.394	247.360.179.078	249.833.780.869	252.332.118.678
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	**(86.743.810.104)**	**(157.124.350.000)**	**(53.759.269.000)**	**(42.749.875.300)**	**(40.933.060.740)**	**(36.421.068.726)**	**(34.674.676.449)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**							
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**86.743.810.104**	**157.124.350.000**	**58.759.269.000**	**47.749.875.300**	**45.933.060.740**	**41.421.068.726**	**39.674.676.449**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.743.810.104	157.124.350.000	58.759.269.000	47.749.875.300	45.933.060.740	41.421.068.726	39.674.676.449
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0**	**0**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	**86.743.810.104**	**157.124.350.000**	**53.759.269.000**	**42.749.875.300**	**40.933.060.740**	**36.421.068.726**	**34.674.676.449**
6,3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah merupakan analisis mendalam terhadap tantangan, hambatan, dan kesenjangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, baik dari aspek tata kelola, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Identifikasi permasalahan ini berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan solusi strategis yang terarah dan efektif dalam RPJMD. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, pemetaan permasalahan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta tantangan eksternal seperti perkembangan teknologi dan perubahan iklim. Data permasalahan dikumpulkan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah, media massa dan melalui evaluasi dari OPD. Analisis ini tidak hanya mengurai akar masalah, tetapi juga memperkuat keselarasan antara misi, tujuan, dan program prioritas, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan inklusif. Berikut ini adalah permasalahan kunci pembangunan daerah yang menjadi fokus penyelesaian dalam periode perencanaan ini.

2.3.1.1 Permasalahan Transformasi Sosial untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing

Permasalahan transformasi sosial untuk pembangunan SDM yang berdaya saing mencakup tantangan dalam menyesuaikan struktur sosial dan nilai–nilai masyarakat dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Kesenjangan akses pendidikan, perubahan kebutuhan industri, dan adaptasi terhadap teknologi baru menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi antara pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi yang relevan, dan kebijakan sosial yang mendukung. Dengan pendekatan yang tepat, transformasi sosial dapat menciptakan SDM yang lebih kompetitif, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global.

A. Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kunci, termasuk usia harapan hidup yang perlu ditingkatkan. Akar permasalahan utama meliputi belum meratanya pemenuhan gizi seimbang, tingginya angka kematian bayi, belum efektifnya pelayanan kesehatan berkualitas yang merata, serta belum optimalnya pelaksanaan pola hidup sehat dalam keluarga. Kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi, pelayanan kesehatan, dan

kesadaran akan pola hidup sehat di tingkat keluarga menjadi tantangan besar yang harus di atasi untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Usia harapan hidup perlu ditingkatkan	Belum meratanya pemenuhan gizi seimbang	Kesehatan
	Angka kematian bayi masih tinggi	
	Belum efektifnya pelayanan kesehatan berkualitas yang merata	
	Belum optimalnya pelaksanaan pola hidup sehat dalam keluarga	

B. Angka Kematian Ibu Belum Teratasi secara Efisien

Angka kematian ibu masih menjadi masalah yang belum teratasi secara efisien. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan terhadap kondisi ibu saat dan pasca melahirkan. Akar permasalahan utamanya adalah masih adanya perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, distribusi sarana dan prasarana kesehatan yang kurang merata, serta akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang masih kurang. Ketidakseimbangan dalam distribusi dan akses ini mengakibatkan pelayanan kesehatan yang tidak merata, sehingga upaya untuk menurunkan angka kematian ibu belum mencapai hasil yang diharapkan.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum optimalnya pelayanan terhadap kondisi ibu saat dan pasca melahirkan	Masih adanya perempuan yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	Kesehatan; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Distribusi sarana dan prasarana kesehatan yang kurang merata	
	Akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang masih kurang	

C. Prevalensi *Stunting* yang Masih Tinggi

Prevalensi *stunting* yang masih tinggi merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian lebih. Penanganan *stunting* perlu lebih holistik dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ini. Akar masalahnya meliputi fluktuasi tinggi angka ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), kurangnya pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), serta belum optimalnya koordinasi antarsektor dalam penanganan *stunting*. Dalam rentang waktu setahun, terjadi peningkatan drastis persentase balita dengan gizi buruk dari 0,14% menjadi 0,74% pada 2021. Selain itu, prevelensi *stunting* juga meningkat dari 16% pada 2020 menjadi 21,22% pada 2021. Upaya yang terkoordinasi dan terpadu dari berbagai sektor sangat diperlukan untuk memastikan pemenuhan gizi yang memadai dan menurunkan angka *stunting* secara signifikan.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Penanganan *stunting* perlu lebih holistik dan terintegrasi	Fluktuasi tinggi angka ibu hamil dengan KEK	Kesehatan; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Sosial
	Kurangnya pemenuhan gizi pada 1000 HPK	
	Belum optimalnya koordinasi antarsektor dalam penanganan *stunting*	

D. Penanganan Tuberkulosis yang Belum Optimal

Penanganan tuberkulosis di Indonesia masih belum optimal, yang mengakibatkan tingginya prevalensi penyakit ini. Masalah ini disebabkan oleh cakupan penanganan tuberkulosis yang masih rendah dan adanya kasus TBC dengan pengobatan yang belum optimal. Pada 2020, persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar hanya mencapai 50% dan meningkat menjadi 88,8% pada 2024. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terfokus dalam memperluas cakupan penanganan dan memastikan pengobatan yang efektif bagi penderita tuberkulosis. Keterbatasan dalam cakupan dan efektivitas pengobatan menjadi tantangan utama yang harus segera ditangani untuk meningkatkan penanganan tuberkulosis di Kabupaten Katingan.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Penanganan tuberkulosis yang belum optimal	Cakupan penanganan tuberkulosis yang masih rendah	Kesehatan
	Terdapat kasus TBC dengan pengobatan yang belum optimal	

E. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang Belum optimal

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih belum optimal, yang mengakibatkan banyak masyarakat belum terlindungi oleh program jaminan kesehatan ini. Masalah ini disebabkan oleh belum semua masyarakat menjadi peserta JKN. Meskipun kepesertaan JKN pada Maret 2023 sudah mencapai 99,02%, namun untuk keaktifan peserta baru mencapai 68,82 persen. Akar masalahnya meliputi belum semua masyarakat memiliki akses yang optimal terhadap informasi tentang JKN, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadi peserta JKN, dan keterbatasan ekonomi masyarakat. Upaya yang lebih intensif dalam penyebaran informasi, peningkatan kesadaran, serta dukungan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu sangat diperlukan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN secara menyeluruh.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum semua masyarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	Belum semua masyarakat memiliki akses yang optimal terhadap informasi JKN	Kesehatan; Sosial
	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjadi peserta JKN	
	Keterbatasan ekonomi masyarakat	

F. Kualitas Literasi dan Numerasi Masyarakat yang Masih Kurang

Kualitas literasi dan numerasi masyarakat yang masih kurang merupakan tantangan besar dalam upaya meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Masalah ini disebabkan oleh masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat serta sarana dan prasarana literasi yang kurang mendukung. Pada 2024, kemampuan literasi dan numerasi SD masing–masing 58,43 dan 48,36. Sementara pada tingkat SMP, kemampuan literasi tercatat 59,84 dan kemampuan numerasi mencapai 63,78.

Akar masalahnya meliputi kemampuan literasi masyarakat yang masih kurang, minat baca masyarakat yang masih rendah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang kurang tepat, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung budaya membaca. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah–langkah strategis dalam memperkuat kemampuan literasi, meningkatkan minat baca, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dan pengembangan sarana literasi yang memadai.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat	Kemampuan literasi masyarakat yang masih kurang	Pendidikan; Perpustakaan; Kearsipan; Komunikasi dan Informatika
	Minat baca masyarakat yang masih rendah	
Sarana dan prasarana literasi yang kurang mendukung	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang kurang tepat	
	Sarana dan prasarana yang kurang mendukung budaya membaca	

G. Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat masih belum optimal, dipengaruhi oleh berbagai masalah yang kompleks. Permasalahan ini muncul berdasarkan gambaran umum yang berkaitan dengan pendidikan dan berita dari media lokal (Media Dayak, 2019; Inspirasi Kalteng 2025; Pena Kalteng, 2025). Rendahnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan menjadi penyebab utama.

Menurunnya angka partisipasi sekolah usia 5–6 tahun, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pendidikan tinggi, dan lingkungan yang kurang mendukung untuk melanjutkan pendidikan juga turut berkontribusi. Akar masalahnya meliputi rendahnya

motivasi untuk melanjutkan pendidikan, keterbatasan ekonomi masyarakat, serta kurangnya akses dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain itu, kualitas pendidikan usia dini yang belum optimal, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini, dan budaya yang cenderung mengutamakan mencari pekerjaan setelah lulus sekolah juga menjadi hambatan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan upaya terpadu yang mencakup peningkatan motivasi, dukungan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan pada setiap jenjang.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Rendahnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan	Rendahnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan	Pendidikan
	Keterbatasan ekonomi masyarakat	
Kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal	Akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang	
	Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal	
Terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang	
	Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar dan mengajar	
	Keterbatasan ekonomi masyarakat	
Menurunnya angka partisipasi sekolah usia 5–6 tahun	Akses terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang	
	Kualitas pendidikan usia dini yang belum optimal	
	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini	
Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pendidikan tinggi	Pengetahuan terhadap pentingnya melanjutkan ke pendidikan tinggi yang masih kurang	
Lingkungan yang kurang mendukung untuk melanjutkan pendidikan	Budaya masyarakat yang cenderung mengutamakan mencari pekerjaan setelah lulus sekolah	
	Keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi	

H. Upaya Pengentasan Kemiskinan yang Belum Efektif dan Efisien

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang efektif dan efisien, tercermin dari angka kemiskinan yang masih relatif tinggi. Selama empat tahun, persentase penduduk Kabupaten Katingan naik dari 4,79 (2020) menjadi 5,26 (2024). Masalah ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pekerjaan, keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana penunjang dasar, jumlah desa tertinggal yang relatif

banyak, serta industri lokal yang kurang bersaing. Akar permasalahan ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi keterbatasan akses dan meningkatkan daya saing industri lokal, sehingga pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Angka kemiskinan yang relatif tinggi	Keterbatasan akses terhadap pekerjaan	Sosial; Tenaga kerja; Pemberdayaan masyarakat dan desa;
	Keterbatasan akses terhadap sarana dan prasarana penunjang dasar	
	Jumlah desa tertinggal yang relatif banyak	
	Industri lokal yang kurang bersaing	

I. Perlindungan Sosial terhadap Tenaga Kerja yang Masih Kurang

Perlindungan sosial terhadap tenaga kerja di Indonesia masih kurang memadai, ditandai dengan kurang meratanya cakupan penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Masalah ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan yang masih minim. Akar permasalahan ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga cakupan perlindungan sosial bagi tenaga kerja dapat diperluas dan diperkuat.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Kurang meratanya cakupan penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Pemahaman masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan yang masih minim	Sosial; Tenaga kerja

J. Kurang Meratanya Kesempatan Kerja bagi Kelompok Rentan

Kesempatan kerja bagi kelompok rentan di Indonesia masih kurang merata, terutama disebabkan oleh kurangnya inklusivitas terhadap pekerja penyandang disabilitas. Masalah ini berakar pada keterbatasan lapangan pekerjaan dengan prasarana ramah disabilitas dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya langkah–langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan pemberdayaan yang lebih efektif bagi kelompok rentan, sehingga kesempatan kerja dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Kurangnya inklusivitas terhadap pekerja penyandang disabilitas	Keterbatasan lapangan pekerjaan dengan prasarana ramah disabilitas	Sosial; Tenaga kerja; Pemberdayaan masyarakat dan desa
	Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat yang inklusif	

2.3.1.2 Permasalahan Transformasi Ekonomi yang Inklusif

Transformasi ekonomi yang inklusif di Kabupaten Katingan tidak dapat terwujud apabila berbagai tantangan dasar dalam pembangunan yang berkelanjutan dan merata belum teratasi. Ketidakoptimalan dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi dan kapasitas sumber daya manusia mengakibatkan rendahnya daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Belum adanya peta jalan operasional dalam mengarahkan pengembangan sektoral dan fungsional kawasan menjadi sebab beberapa masalah pada aspek ekonomi tidak segera terselesaikan. Hal ini diperparah oleh ketimpangan akses terhadap internet dan infrastruktur dasar lain yang menyebabkan pembentukan fondasi ekonomi yang kokoh di tingkat desa pun menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terarah untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

A. Belum Optimalnya Pengembangan Sektor Industri dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola

Sektor industri pengolahan hingga saat ini konsisten sebagai kontributor ekonomi Kabupaten Katingan terbesar setelah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Akan tetapi, hal ini perlu menjadi perhatian ketika terjadi stagnasi pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kurangnya stimulasi ekonomi membatasi inovasi dan kreasi pada aspek diversifikasi produk olahan. Salah satu di antaranya yaitu belum adanya kawasan khusus yang dikembangkan menjadi kawasan industri berbasis lingkungan yang dapat diarahkan untuk mendorong nilai ekonomi sektor industri pengolahan, sekaligus daya tarik serapan tenaga kerja. Adapun lebih dalam mengenai tenaga kerja, terdapat keterbatasan kuantitas tenaga kerja terampil (*skilled labor*) dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi. Pasar kerja yang belum kredibel dan terpromosikan dengan baik ditambah dengan belum efisiennya konektivitas antarwilayah menjadikan ekosistem perekonomian daerah tidak berkembang dengan progresif.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Stagnasi pertumbuhan sektor industri pengolahan	Kurangnya daya tarik investasi/pemicu ekonomi	Perindustrian
	Belum berkembangnya kawasan industri hijau terintegrasi	
	Keterbatasan diversifikasi pengolahan pasca panen sebagai bagian dari hilirisasi	
Keterbatasan prasarana dan kuantitas sumber daya manusia	Minimnya adopsi teknologi dan kajian inovasi	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Kapasitas SDM terbatas	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Kurang optimalnya proporsi penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor industri	

Masalah	Akar Masalah	Urusan
terampil (*skilled labor*)	Kualitas dan akses terhadap infrastruktur penunjang belum baik dan merata	
	Konektivitas antarwilayah ke/dari pasar dan bahan mentah (*raw material*) belum efisien	

B. Pengembangan Sektor Pariwisata Belum Terarah

Belum terarahnya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Katingan salah satunya dilihat dari keterbatasan diversifikasi akomodasi makan dan minum serta pengembangan elemen pariwisata lainnya yang menyebabkan kurangnya daya tarik bagi investasi dan pengunjung. Dampak ini diperparah oleh perlambatan aktivitas ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada terbatasnya pengembangan potensi pariwisata pasca tahap eksplorasi. Ketidakoptimalan dalam pengembangan aksesibilitas, akomodasi, amenitas, aktivitas, dan atraksi (5A) pariwisata mengakibatkan rendahnya kemampuan bersaing sektor pariwisata dan konservasi serta minat wisatawan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa tanpa adanya strategi yang terarah dan dukungan investasi, maka sektor pariwisata di Kabupaten Katingan akan terus menghadapi tantangan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di dalamnya.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Terbatasnya dorongan diversifikasi jenis akomodasi makan dan minum	Kurangnya daya tarik investasi/pemicu variasi akomodasi dan makan minum	Penanaman modal Perdagangan
	Perlambatan aktivitas ekonomi pasca Pandemi Covid-19	
Belum optimalnya pengembangan 5A dalam mendorong pariwisata	Terbatasnya opsi akomodasi	Pariwisata dan kebudayaan; Lingkungan hidup; Pekerjaan umum
	Terbatasnya aksesibilitas dari/ke objek kunjungan	
	Sedikitnya pilihan aktivitas dan atraksi yang dapat dilakukan pelancong	
	Belum adanya peta jalan operasional pengembangan pusat konservasi skala internasional	

C. Ketidakmatangan Sistem Pasar, Inovasi Daerah, dan Dukungan untuk Ekonomi Daerah yang Mandiri

Ketidakmatangan sistem pasar, inovasi daerah, dan dukungan untuk ekonomi daerah yang mandiri mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak wilayah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan kompetitif. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor di dalamnya seperti infrastruktur, pemasaran, kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan lain sebagainya. Untuk mencapai ekonomi yang mandiri tentu diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperbaiki infrastruktur, regulasi, akses informasi, dan investasi. Dukungan yang kuat dan berkelanjutan ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Komponen lingkungan dan prasarana yang belum kondusif	Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung ekonomi yang ramah lingkungan	Komunikasi dan informatika; Pekerjaan umum
	Keterbatasan infrastruktur TIK untuk menunjang kemajuan industri 4.0	
Belum adanya sistem jaringan pasar yang terpetakan	Pemasaran produk yang belum optimal	Perindustrian dan perdagangan; Urusan pemerintahan
	Penyerapan tenaga kerja yang kurang maksimal	
Keterbatasan pengembangan ekosistem inovasi yang progresif	Kualitas hidup SDM perlu ditingkatkan	Ketenagakerjaan; Pendidikan; Komunikasi dan informatika; Urusan pemerintahan
	Kapasitas SDM terbatas	
	Terbatasnya jumlah riset yang merepresentasikan inovasi	
	Aplikasi merek dagang masih sangat terbatas	
	Keterbatasan kajian pada bidang *fintech*	
Belum optimalnya ekosistem pengembangan UKM	Keterbatasan SDM	Koperasi dan UKM; Ketenagakerjaan; Perindustrian dan perdagangan; Urusan pemerintahan
	Belum optimalnya aliran modal dan inovasi serta adopsi teknologi	
	Keterbatasan akses terhadap pasar dan mitra, baik di tingkat lokal hingga nasional	
	Rendahnya kontribusi dan jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil	
Kurangnya dukungan dan akses bagi pengembangan kewirausahaan daerah	Kurangnya inkubator bisnis sebagai ruang kolaborasi untuk peningkatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan daerah	
	Belum efisiennya akses pendanaan dan minimnya opsi pendanaan kreatif	
	Terbatasnya akses kemitraan, baik tingkat lokal maupun nasional	
	Rendahnya wirausaha yang berorientasi untuk tumbuh	
Tidak optimalnya ROA BUMD akibat inovasi rendah dan ketergantungan modal	Ketergantungan terhadap penyertaan modal daerah	Perindustrian dan perdagangan; Urusan perekonomian; Inspektorat
	Pemilihan unit bisnis yang kurang bersaing	
	Kurangnya inovasi BUMD di luar unit bisnis *mandatory*	
	Risiko jajaran direksi BUMD yang tidak konsisten karena alasan politis	

D. Keterbatasan Akses Tenaga Kerja dan Ketidaksesuaian Keahlian

Keterbatasan akses tenaga kerja dan ketidaksesuaian keahlian merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Terbatasnya akses tenaga kerja menyebabkan produktivitas akan semakin menurun. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh keterbatasan lapangan kerja dan informasi pasar kerja. Selain itu, ketidaksesuaian keahlian juga menyebabkan produktivitas tenaga kerja akan semakin menurun sehingga menyebabkan produk yang dihasilkan tidak memiliki kualitas yang optimal. Ketidaksesuaian keahlian tersebut tentu akan mempengaruhi pada efisiensi dan efektivitas produksi barang.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Keterbatasan akses terhadap pasar kerja dan ketidaksesuaian keahlian	Terbatasnya lapangan pekerjaan	Ketenagakerjaan; Pendidikan; Komunikasi dan informatika; Urusan pemerintahan
	Kapasitas SDM terbatas	
	Ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) di pasar kerja	
	Keterbatasan portal informasi pasar kerja yang kredibel	
Belum maksimalnya penyiapan SDM perempuan sebagai basis dalam partisipasi kegiatan ekonomi yang efektif	Terbatasnya lapangan pekerjaan	
	Terbatasnya peluang pengembangan kapasitas perempuan	
	Keterbatasan portal informasi pasar kerja yang kredibel	

E. Belum Adanya Sistem Pemasaran yang Efektif

Belum adanya sistem pemasaran yang efektif menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan. Pemasaran merupakan salah satu kunci dalam proses kegiatan ekonomi sehingga produk dapat terjual dengan optimal. Jaringan pasar dan kemitraan merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam proses pemasaran. Pemasaran dengan sistem yang efektif dan kreatif tentu akan menarik konsumen untuk membeli suatu produk.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum maksimalnya penyiapan SDM perempuan sebagai basis dalam partisipasi kegiatan ekonomi yang efektif	Keterbatasan kajian terhadap jaringan pasar dan kemitraan	Ketenagakerjaan; Perindustrian dan perdagangan; Komunikasi dan informatika; Urusan pemerintahan
	Pemetaan dan akses terhadap pasar yang masih terbatas	
	Keterbatasan kajian pada bidang *fintech*	

F. Belum Cermatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sektor Potensial

Belum cermatnya pengelolaan dan pengembangan sektor potensial mencerminkan masalah dalam memanfaatkan sumber daya dan peluang yang ada di berbagai sektor ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kurang siapnya perencanaan mengenai konsep yang digunakan dan infrastruktur penunjangnya. Selain itu, terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk juga akan menghambat pengelolaan dan pengembangan sektor yang sekiranya akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian. Proses adopsi teknologi, dalam hal ini juga penting untuk dilakukan sehingga adanya integrasi untuk menuju pertanian pintar.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Stagnasi kontribusi sektoral	Terbatasnya infrastruktur penunjang	Perindustrian dan perdagangan
	Terbatasnya inovasi pada pengembangan produk	
Urgensi optimasi sektor pertanian, kehutanan, perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya sesuai dengan penunjukan fungsinya	Pertanian; Perkebunan; Kelautan dan perikanan; Perindustrian dan perdagangan; Ketahanan pangan
	Belum terdapat konsep pertanian hijau terintegrasi hulu–hilir	

Masalah	Akar Masalah	Urusan
	Keterbatasan proses adopsi teknologi menuju pertanian pintar terintegrasi	

G. Ketimpangan Infrastruktur Digital

Infrastruktur digital merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan saat ini. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memaksa kesiapan penyediaan infrastruktur yang lebih merata. Ketimpangan akses dan kualitas terhadap infrastruktur digital tentu akan memberikan dampak buruk pada pembangunan suatu daerah sehingga dapat menyebabkan ketertinggalan bahkan kemunduran suatu daerah.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Ketimpangan akses dan kualitas infrastruktur digital	Kesiapan infrastruktur internet belum merata	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Komunikasi dan informatika
	Belum optimalnya prioritas pemerintah terhadap pemenuhan akses internet dasar	

H. Pengelolaan Ekonomi Daerah yang Belum Efektif dan Suportif terhadap Kemampuan Wilayah

Pengelolaan ekonomi daerah yang belum efektif dan suportif terhadap kemampuan wilayah dapat dipengaruhi oleh belum efektifnya pengelolaan ekonomi daerah. Terdapat banyak faktor penyebab di dalamnya, salah satunya adalah belum adanya zonasi wilayah pengembangan yang menyebabkan kurangnya efektivitas dan efisiensi pembangunan suatu daerah. Dalam hal perekonomian, adanya zona yang di dalamnya terdapat klaster sektor tentu akan memberikan keuntungan yang besar karena proses produksi suatu barang akan lebih efisien dan efektif sehingga dapat menekan biaya produksi. Untuk mencapai hal tersebut, tentu memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan prasarana yang merata.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum efektifnya pengelolaan ekonomi daerah	Diperlukan komitmen berkelanjutan untuk menunjang nilai ekonomi sektoral berupa peta jalan operasional	Urusan perekonomian; Urusan pemerintahan; Perindustrian dan perdagangan; Pertanian dan perkebunan
	Belum optimalnya pengembangan sektoral dengan belum adanya zonasi wilayah pengembangan sesuai potensi dan peruntukan	
	Belum efisiennya penambahan dan pengurangan barang modal	
	Terbatasnya sumber daya dan produksi lokal	
	Rendahnya daya saing ekspor domestik	
	Sistem pemasaran yang tidak merata dan optimal	

I. Keterbatasan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Pembangunan Desa

Keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan desa merupakan tantangan signifikan yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan di daerah pedesaan. Banyak desa yang masih mengalami kondisi kemiskinan yang tinggi, belum meratanya infrastruktur dasar, masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, dan kualitas sumber daya manusianya yang belum baik. Untuk mengatasi permasalahan, permasalahan tersebut tentu memerlukan upaya untuk memperkuat infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas pemerintah lokal, serta memberdayakan masyarakat desa melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum optimalnya pemenuhan air minum bersih dan sanitasi layak	Kemiskinan yang belum teratasi dengan baik	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	Perencanaan tata ruang yang belum disiplin dan berpihak pada tata kota yang inklusif dan *liveable*	
	Keterbatasan infrastruktur dasar	
Belum terarahnya pengembangan desa beserta keterbatasan sumber daya	Belum adanya pemetaan zonasi pengembangan desa potensial	Pemberdayaan masyarakat desa; Koperasi dan UKM; Ketenagakerjaan; Urusan perekonomian; Urusan pemerintahan; Pekerjaan umum dan penataan ruang
	Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan potensi desa	
	Pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang belum merata	
Sistem kelembagaan desa yang belum beroperasi dengan baik	Kapasitas aparatur desa yang terbatas dan perbedaan kepentingan	
	Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pendanaan, dan pembinaan	
	Kapasitas SDM perangkat desa yang masih perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai standar pelayanan minimal desa (SPM Desa)	
	Keterbatasan modal dan pengetahuan untuk mengembangkan BUMDes	

2.3.1.3 Permasalahan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif

Permasalahan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptif berfokus pada tantangan dalam mengubah sistem administrasi dan kebijakan publik agar lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika global. Tantangan utama meliputi birokrasi yang kaku, kurangnya transparansi, dan ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan cepat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi yang menyeluruh, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik, serta penerapan teknologi informasi untuk mempermudah proses dan komunikasi. Dengan tata kelola yang baik dan adaptif, pemerintah dapat lebih efektif dalam merespons kebutuhan masyarakat, memperbaiki kualitas layanan publik, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

A. Indeks Reformasi Hukum Perlu Ditingkatkan

Peningkatan profesionalisme aparatur negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah dapat dilihat dari penilaian indeks reformasi hukum (IRH). Reformasi yang bersih dan akuntabel merupakan salah satu peta jalan reformasi birokrasi yang tercantum dalam PAN RB Nomor 25 Tahun 2020. Indeks reformasi hukum di Kabupaten Katingan masih memerlukan upaya untuk ditingkatkan karena kapasitas dan efektivitas penegakan regulasi yang belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kapasitas SDM di bidang regulasi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan, persentase penegakan perda masih belum optimal, serta terdapat tuntutan responsivitas yang cepat terhadap perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Kapasitas dan efektivitas penegakan regulasi yang belum maksimal	Kapasitas SDM di bidang regulasi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan	Pemerintahan, Sekretariat DPRD
	Belum optimalnya persentase penegakan perda	
	Adanya tuntutan responsivitas perubahan yang cepat terhadap pelayanan kepada masyarakat	

B. Perlunya Komitmen dalam Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Disrupsi teknologi telah memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan, yang kini dituntut untuk merespons lebih cepat dan memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, tata kelola pemerintahan perlu mengadopsi dan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tahun 2024, capaian Indeks SPBE Kabupaten Katingan secara umum telah berada pada kategori Baik dengan skor 3,25. Namun demikian, masih terdapat beberapa subdomain yang menunjukkan performa kurang optimal, khususnya Subdomain Perencanaan Strategis SPBE dengan skor 2,5 dan Subdomain Penyelenggara SPBE dengan skor 2,0, keduanya berada pada Kategori Cukup dalam domain Tata Kelola SPBE. Selain itu Subdomain Penerapan Manajemen SPBE dalam domain Manajemen SPBE masih berada pada Kategori Kurang dengan skor 1,50. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya dukungan sumber daya TIK, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas SDM, maupun kelembagaan pendukung.

Ke depan, penguatan implementasi SPBE menjadi semakin krusial, terutama mengingat adanya perubahan instrumen evaluasi nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, instrumen evaluasi SPBE akan diperbarui menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) mulai 2026. Indeks ini mencakup domain baru, yaitu Kapabilitas dan Budaya Digital, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi, serta Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah. Target Indeks Pemdi

Nasional tahun 2028 ditetapkan sebesar 2,00 yang menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam menyusun proyeksi capaian Indeks Pemdi Daerah, dengan estimasi awal pada 2026 sebesar 1,80.

Peningkatan SPBE merupakan pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan dalam memperkuat SPBE sejalan dengan visi pengembangan *Smart City* yang menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. *Smart City* bukan hanya tentang pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi juga mencakup seluruh daerah, termasuk desa–desa. Oleh karena itu, transformasi digital di tingkat desa menjadi strategi kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh.

Digitalisasi pelayanan desa, pembangunan infrastruktur jaringan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur dan masyarakat desa termasuk generasi muda di bidang TIK merupakan bagian integral dari penguatan SPBE di tingkat lokal. Upaya ini bertujuan menciptakan pemerintahan digital yang inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh lapisan wilayah. Melalui pengembangan desa digital, penerapan SPBE dapat menjangkau hingga unit pemerintahan paling dasar, sehingga terbentuk ekosistem digital yang merata dan berkelanjutan. Ini sekaligus mempercepat terwujudnya *Smart City* yang inklusif, yang setiap warganya memiliki akses yang mudah, adil, dan merata terhadap layanan publik digital.

Peningkatan SPBE, pembangunan *Smart City*, transformasi digital di tingkat desa, serta penguatan literasi digital generasi muda bukanlah langkah yang berdiri sendiri. Seluruh upaya tersebut saling terhubung dan saling menguatkan, menjadi fondasi penting dalam menciptakan pelayanan publik yang modern, adaptif, dan berdaya saing tinggi di era digital. Selanjutnya rincian masalah dan akar masalah dari belum optimalnya capaian SPBE dijabarkan sebagai berikut.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum optimalnya pengelolaan dan dukungan sumber daya untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Belum optimalnya tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunikasi dan Informatika
	Masih kurangnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	
	Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi mumpuni di bidang TIK	
	Belum memadainya kemampuan digital masyarakat dalam mengakses layanan publik	
	Belum adanya keterpaduan seluruh rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah, dan belum dapat dikendalikan oleh PD yang menjalankan fungsi sebagai pengelola TIK, perencanaan dan penganggaran	
	Keterbatasan pelaksanaan diklat/bimtek keamanan SPBE dan CSIRT	
	Terbatasnya dana untuk penyelenggaraan SPBE	

C. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif. Transformasi digital menjadi tantangan utama dalam pelayanan publik saat ini. Hal tersebut terjadi karena adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi baru dan mengelola perubahan sistem yang semakin cepat. Sementara itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas SDM, sering kali menghambat pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sedang berkembang. Secara umum, pelayanan publik di Kabupaten Katingan masih perlu banyak perbaikan mendasar seperti sarana prasarana, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terukur, sampai dengan instruksi kerja serta sumber daya manusia yang mumpuni. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat terlibat dan memberikan kritik, saran serta masukan apabila saat menerima pelayanan publik.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Masih rendahnya kualitas dan sistem pelayanan publik	Sarana dan prasarana pelayanan publik banyak yang belum memadai	Pemerintah wajib dan pilihan
	Kurangnya pembekalan kepada SDM dalam hal pelayanan prima (*service excellent*)	
	Terbatasnya dana untuk penyelenggaraan pelayanan publik	
Layanan Publik Belum dikelola dengan Optimal	Belum optimalnya penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada setiap perangkat daerah	
	Belum optimalnya penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada setiap perangkat daerah	
	Minimnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik melalui SKM dan FKP	
	Belum dimasukkannya SKM dan FKP dalam IKU dan PK Kepala Daerah dan Kepala Dinas/Badan	
	Hasil rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) banyak yang belum ditindaklanjuti	
	Selama ini pelayanan publik dianggap hanya diselenggarakan oleh perangkat daerah tertentu	

2.3.1.4 Permasalahan Kondusivitas dan Stabilitas Daerah serta Kepemimpinan Daerah

Permasalahan kondusivitas dan stabilitas daerah serta kepemimpinan daerah mencakup tantangan dalam menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan efektif untuk mendukung pembangunan. Kondusivitas daerah berhubungan dengan keamanan, ketertiban, dan keteraturan sosial, sementara stabilitas daerah melibatkan konsistensi dalam kebijakan dan manajemen yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kepemimpinan daerah memainkan peran kunci dalam mengatasi isu–isu ini dengan menetapkan visi yang jelas, mengelola konflik, dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Tantangan utamanya termasuk konflik lokal, korupsi, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kepemimpinan yang

transparan, partisipatif, dan responsif, serta upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pembangunan.

A. Belum Optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, sistem pengendalian ini merupakan kunci untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, evaluasi dari audit maupun monitoring dan evaluasi harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk perbaikan di masa depan. Berdasarkan hasil temuan oleh BPK, persentase tindak lanjut temuan BPK mengalami penurunan sebesar 42,8% pada tahun 2020 dari 83,3% pada tahun 2019. Selain itu, masih adanya laporan hasil pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Kemampuan Penyelenggaraan SPIP dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan belum optimal	Masih rendahnya persentase tindak lanjut temuan BPK	Inspektorat
	Masih adanya laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang tidak dapat ditindaklanjuti	

B. Kualitas Demokrasi Daerah Belum Optimal

Peningkatan kualitas demokrasi daerah penting untuk memastikan partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung pemerintahan yang responsif serta pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas demokrasi daerah Kabupaten Katingan belum optimal karena pelaksanaan pendidikan politik saat ini belum optimal, sehingga pemahaman masyarakat mengenai prinsip–prinsip demokrasi masih kurang. Hal ini mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu juga rendah. Kurangnya pendidikan politik menghambat masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang prinsip–prinsip demokrasi mengurangi keterlibatan aktif dalam proses politik. Akibatnya, partisipasi dalam pemilu tidak mencapai tingkat yang diharapkan, yang dapat mengurangi kualitas demokrasi dan representasi dalam pemerintahan.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Perlunya peningkatan kualitas demokrasi daerah	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik	ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
	Masih kurangnya pemahaman dalam prinsip–prinsip demokrasi	
	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemilu	

C. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mencapai *good governance* terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek–aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Permasalahan terkait reformasi birokrasi di Kabupaten Katingan adalah kurangnya sinergi dan kapabilitas internal dalam upaya Reformasi Birokrasi di kalangan perangkat daerah. Hal tersebut terjadi karena, kurangnya koordinasi, terbatasnya kapasitas ASN, maupun belum optimalnya komitmen dan pemahaman baik pimpinan dan seluruh jajaran perangkat daerah. Secara lebih rinci masalah dan akar masalah terkait dengan belum optimalnya reformasi birokrasi dijabarkan sebagai berikut.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Kurangnya sinergi dan kapabilitas internal dalam upaya Reformasi Birokrasi di kalangan perangkat daerah	Kurangnya koordinasi internal perangkat daerah yang menjadi pengampu RB general dan tematik	Pemerintahan wajib dan pilihan
	Terbatasnya kapasitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan	
	Belum optimalnya komitmen dan pemahaman baik pimpinan dan seluruh jajaran perangkat daerah atas konsep Reformasi Birokrasi	
Kurang efektifnya kolaborasi reformasi birokrasi	Reformasi Birokrasi yang belum menyeluruh pada semua tingkat pemerintahan	
	Belum menggambarkan kolaborasi yang luas dalam upaya menyelesaikan masalah–masalah strategis masyarakat	

D. Sistem Akuntabilitas Kinerja yang Kurang Efektif dan Efisien

Sistem akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan transparansi, meningkatkan efisiensi, dan, memperkuat kepercayaan publik. Sistem akuntabilitas kinerja di Kabupaten Katingan saat ini dihadapkan pada permasalahan kurangnya komitmen dan kapasitas ASN dalam menerapkan akuntabilitas kinerja secara efektif. Hal ini diperparah oleh rendahnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas kinerja, serta tidak adanya sanksi tegas bagi perangkat daerah yang tidak menerapkan prinsip–prinsip akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja menghambat efektivitas pelaksanaan sistem tersebut. Ego sektoral yang tinggi di antara *leading* sektor pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menjadi hambatan signifikan, karena menghalangi kolaborasi dan sinergi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas secara keseluruhan. Semua faktor ini menekankan perlunya perbaikan yang mendalam dalam manajemen kinerja dan reformasi birokrasi untuk mencapai pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Kurangnya komitmen dan kapasitas untuk menerapkan akuntabilitas kinerja secara efektif	Kurangnya implementasi manajemen kinerja dan reformasi birokrasi	Inspektorat, perencanaan
	Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja dan belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi perangkat daerah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja	
	Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja	
	Masih tingginya ego sektoral *leading* sektor pelaksanaan SAKIP	

2.3.1.5 Permasalahan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan yang mampu memastikan kualitas masyarakat dalam jangka panjang. Di era globalisasi yang semakin pesat ini, ketahanan tersebut menghadapi berbagai tantangan mendesak yang harus segera di atasi. Disintegrasi sosial akibat peningkatan individualisme, hilangnya nilai–nilai budaya lokal, serta tekanan pada lingkungan alam dari aktivitas manusia merupakan beberapa permasalahan utama. Urgensi untuk memperkuat ketahanan ini terletak pada perlunya menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan ekologi.

A. Optimalisasi Ketahanan Sosial Budaya dan Keluarga

Dalam dua tahun terakhir, terjadi penurunan signifikan dalam perawatan cagar budaya dari 100% menjadi 47% (RKPD Kabupaten Katingan 2025), yang mengancam keberlanjutan warisan budaya. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya anggaran, perhatian pemerintah yang berkurang, atau prioritas lain yang lebih mendesak. Sementara itu, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kerukunan umat beragama telah menunjukkan hasil yang positif, namun perlu dipertahankan dan diperkuat agar stabilitas sosial tetap terjaga. Permasalahan ini menuntut pendekatan yang holistik, menggabungkan pelestarian cagar budaya dengan upaya berkelanjutan dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Indeks Pembangunan Keluarga (i–bangga) yang belum optimal mencerminkan tantangan serius dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Katingan. Rendahnya pendapatan keluarga berdampak langsung pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, rendahnya lama sekolah mempersempit peluang bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga. Tingginya angka perceraian juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi Pembangunan keluarga karena mengakibatkan ketidakstabilan emosional dan finansial, terutama bagi anak–anak yang terdampak. Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan

mengindikasikan tantangan besar dalam upaya penurunan ketimpangan gender. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah mencerminkan adanya hambatan struktural dan kultural yang membatasi partisipasi perempuan di dunia kerja, termasuk beban ganda peran domestik dan profesional, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan. Faktor lain seperti diskriminasi gender di tempat kerja dan kurangnya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender juga berkontribusi pada penurunan TPAK di Kabupaten Katingan.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Dimensi budaya mengalami tren penurunan	Perawatan cagar budaya dalam dua tahun terakhir menurun signifikan dari 100% ke 47%	Kebudayaan
Perlunya mencegah politik identitas	Perlunya upaya mempertahankan dan meningkatkan kerukunan umat beragama yang telah dicapai	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
Indeks Pembangunan Keluarga (i–bangga) belum optimal	Pendapatan rumah tangga di bawah UMR	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Rendahnya rata-rata angka lama sekolah	Pendidikan
	Tingginya angka perceraian	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Perlunya penurunan angka ketimpangan gender	Menurunnya persentase TPAK perempuan	

B. Peningkatan Permukiman Layak Huni Berkelanjutan

Belum optimalnya sarana prasarana fasilitas permukiman layak berkelanjutan di Kabupaten Katingan merupakan permasalahan yang kompleks dan mendesak. Akar masalahnya meliputi belum tercapainya target sanitasi layak, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, rendahnya pengelolaan air minum aman dan layak meningkatkan risiko penyakit dan mengurangi kualitas hidup. Meningkatnya timbulan sampah setiap tahun tanpa diimbangi dengan sistem pengelolaan yang efektif memperburuk kondisi lingkungan. Belum meratanya akses listrik ke seluruh desa juga menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di daerah terpencil.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum optimalnya sarana prasarana permukiman layak berkelanjutan	Belum tercapainya target capaian sanitasi layak	Pekerjaan umum dan penataan ruang
	Masih rendahnya pengelolaan air minum aman dan layak	
	Meningkatnya timbulan sampah setiap tahun	Lingkungan hidup
	Belum meratanya akses listrik ke Seluruh desa	Energi dan sumber daya mineral

2.3.1.6 Permasalahan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Permasalahan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan berfokus pada tantangan dalam memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil di seluruh

wilayah. Ketidakmerataan sering terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antarwilayah dengan sumber daya yang berbeda. Masalah utama mencakup ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan lokal, serta kebijakan yang mendorong investasi di daerah kurang berkembang. Pendekatan yang adil dan terencana akan membantu mengurangi kesenjangan regional dan memastikan bahwa semua wilayah mendapatkan peluang yang setara untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Produk Unggulan

Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk produk unggulan di Kabupaten Katingan merupakan permasalahan dalam upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam yang belum dioptimalkan. Belum semua potensi sumber daya alam daerah ini dimanfaatkan secara maksimal, yang mengakibatkan rendahnya kontribusi terhadap perekonomian lokal. Kondisi ini diperparah oleh akses masyarakat miskin yang masih terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan inovatif dan produktif.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum semua potensi sumber daya alam dioptimalkan untuk memberikan nilai tambah ekonomi	Belum semua potensi sumber daya alam dioptimalkan untuk memberikan nilai tambah ekonomi.	Penanaman Modal dan Koperasi dan UMKM
	Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih belum optimal.	

2.3.1.7 Permasalahan Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana yang Berkualitas

Permasalahan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang berkualitas berfokus pada tantangan dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Masalah utama termasuk kekurangan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta ketidakcukupan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan daerah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi yang signifikan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta perencanaan yang baik untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan. Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data akan membantu dalam menciptakan sarana dan prasarana yang efektif, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

A. Optimalisasi Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Irigasi

Peningkatan kualitas dan kuantitas kondisi irigasi merupakan permasalahan yang sangat krusial bagi sektor pertanian di Kabupaten Katingan. Ketergantungan sektor pertanian pada ketersediaan air yang memadai menjadikannya sangat rentan terhadap perubahan iklim dan peningkatan populasi. Perlunya perbaikan infrastruktur irigasi, efisiensi penggunaan air, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan permasalahan tersebut.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Perlunya peningkatan persentase kondisi irigasi dalam kondisi baik	Tren kondisi irigasi dalam kondisi baik selama lima tahun menurun	DPUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

B. Percepatan Pemerataan Akses Jaringan Telekomunikasi

Percepatan pemerataan akses jaringan telekomunikasi di Kabupaten Katingan merupakan permasalahan krusial terutama karena masih terdapat delapan desa yang masuk dalam kategori *blank spot*. Akses yang terbatas atau tidak ada sama sekali terhadap jaringan telekomunikasi di desa–desa ini menghambat perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial, serta mengisolasi masyarakat dari informasi dan layanan penting. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperparah kesenjangan digital. Diperlukan upaya yang substansial dalam infrastruktur telekomunikasi, termasuk pembangunan menara telekomunikasi dan jaringan serat optik.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Pemerataan akses telepon dan internet	Terdapat 8 desa kategori *blank spot*	DPUPR, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.3.1.8 Permasalahan Keberlanjutan Pembangunan Daerah

Kurangnya sinergi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan menjadi masalah yang harus diperhatikan. Penurunan persentase kajian atau penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah menunjukkan adanya kelemahan dalam integrasi hasil penelitian ke dalam proses perencanaan. Selain itu, Sistem ketatalaksanaan yang belum optimal juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam pembangunannya. Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang belum optimal antara berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor mengakibatkan ketidakefisienan dan tumpang tindih program, terlebih pada saat pergantian kepala daerah yang baru.

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum optimalnya tata kelola organisasi untuk mendukung pembangunan	Menurunnya persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	Perencanaan
	Sistem ketatalaksanaan belum optimal	
	Penerapan organisasi berbasis kinerja masih memerlukan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada arah kebijakan daerah berubah seiring dengan terpilihnya kepala daerah baru	
	Belum optimalnya pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan dan penataan organisasi	

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis memegang peran krusial dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, termasuk Kabupaten Katingan. Hal ini diperlukan agar pembangunan yang dirancang selaras dengan konteks dan tantangan yang dihadapi, baik dalam skala global, nasional, maupun daerah. Dengan memperhatikan isu–isu strategis, perencanaan dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan dan situasi nyata, sehingga mampu menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Pada 2014, Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) mengenalkan suatu kerangka agenda pembangunan global baru, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*, sebagai penyempurnaan atas Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals (MDGs)*. SDGs merupakan pengembangan dari MDGs yang telah disesuaikan dengan kemajuan teknologi kontemporer. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara global, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan, memajukan pembangunan berkelanjutan melalui 17 indikator yang saling berkesinambungan. Adapun tujuan dan indikator SDGs untuk periode 2016 hingga 2030 meliputi berbagai dimensi pembangunan, meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan kesejahteraan bagi semua usia;

4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan akses dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses terhadap energi modern yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara;
11. Membuat kota–kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi disertifikasi, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan melindungi keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2-7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs)
Sumber: *Sustainable Development Goals*

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dua dokumen perencanaan yang saling terkait dan berfungsi untuk mengarahkan pembangunan nasional dan daerah selama lima tahun. RPJMN bertindak sebagai peta jalan yang menetapkan arah, prioritas, dan kebijakan pembangunan nasional untuk periode lima tahun, sementara RPJMD merupakan adaptasi dan pelaksanaan RPJMN di tingkat daerah, disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik setiap daerah.

RPJMN 2025–2029 merupakan periode pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Pada periode ini, fokus utama adalah penguatan fondasi transformasi untuk membangun dasar yang kokoh sesuai dengan kondisi masing–masing daerah. Tema penguatan fondasi transformasi dalam RPJMN 2025–2029 merupakan langkah awal yang penting untuk menuju transformasi yang lebih luas dan mendalam di berbagai aspek pembangunan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membangun fondasi yang solid dalam menghadapi perubahan struktural yang diperlukan untuk mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. Untuk mencapainya, tujuh penguatan transformasi ditetapkan, yaitu 1) Transformasi Sosial, 2) Transformasi Ekonomi, 3) Transformasi Tata Kelola, 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, 5) Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi, 6) Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, dan 7) Kesinambungan Pembangunan. Kebijakan dalam setiap transformasi telah ditentukan untuk memastikan fondasi pembangunan yang kuat dan terukur pada awal periode pembangunan jangka panjang, seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 2-45 Transformasi dan Arah Kebijakan RPJMN 2025–2029

Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	• Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Transformasi	Arah Kebijakan
	• Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif
Transformasi Ekonomi	• Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan • Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja • Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama • Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia • Pembangunan perkotaan dan pusat–pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa
Transformasi Tata Kelola	• Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi • Penyempurnaan fondasi penataan regulasi • Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi • Peningkatan kualitas ASN berbasis merit • Kebijakan pembangunan berbasis bukti • Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan • Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi • Penguatan kapasitas masyarakat sipil
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	• Pembaharuan substansi hukum • Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila • Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional • Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai • Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif. • Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan • Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah–langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi • Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri

Transformasi	Arah Kebijakan
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	• Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat • Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana • Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup • Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan • Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK
Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	• Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi • Pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera–Jawa) • Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital • Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN) • Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*)
Kesinambungan Pembangunan	• Reformasi tata kelola fiskal • Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah

Sumber: RPJMN 2025–2029

Fokus arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029 dirancang sebagai strategi besar tahapan pertama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini bertujuan menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadilan, sekaligus memastikan tercapainya pembangunan inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini ditujukan untuk

menjawab isu strategis nasional. Isu–isu strategis yang menjadi fokus setiap pilar transformasi tersebut akan dijelaskan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2-46 Isu Strategis Nasional

Prioritas Nasional	Isu
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Lunturnya etika dan nasionalisme serta mengancam keberagaman • Implementasi Pancasila masih belum optimal di berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan • Media konvensional melemah akibat disrupsi digital • Banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi • Tingginya *judicial review* dan pelanggaran etik pemilu • Penegakan HAM di Indonesia masih lemah
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Lemahnya fondasi keamanan nasional menjadi tantangan strategis bagi ketahanan Indonesia • Ketahanan pangan nasional menghadapi tantangan serius akibat menurunnya produktivitas • Ketahanan energi nasional melemah akibat ketergantungan terhadap energi fosil • Pengelolaan air dan sanitasi nasional masih lemah, akibat menurunnya kualitas sumber air • Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia belum optimal • Transformasi digital Indonesia masih tertinggal • Pemanfaatan potensi maritim belum optimal • Meningkatnya krisis lingkungan global dan ekonomi eksploitatif • Pengelolaan sampah nasional masih belum optimal • Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan belum optimal

Prioritas Nasional	Isu
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Sistem transportasi nasional belum efisien dan terpadu • Transformasi digital nasional masih tertinggal akibat rendahnya cakupan dan kecepatan internet • Layanan ketenagalistrikan masih rendah • Sektor keuangan masih dangkal dan terpusat, serta belum optimalnya intermediasi dan penetrasi lembaga nonbank • Pengembangan koperasi, wirausaha, dan UMKM masih terbatas. • Pengembangan pariwisata masih menghadapi tantangan keberlanjutan lingkungan, keterbatasan infrastruktur dan layanan. • Ekosistem ekonomi kreatif belum optimal.
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	• Ketimpangan akses pendidikan • Kualitas pendidikan yang rendah • Keterbatasan guru • Partisipasi dan kualitas pendidikan tinggi rendah
	• Masalah kesehatan masyarakat seperti angka kematian ibu, *stunting*, obesitas, dan kasus penyakit menular yang tinggi • Keterbatasan fasilitas kesehatan
	• Isu sosial dan perlindungan anak, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan fisik pada anak, dan pernikahan dini • Ketimpangan gender
	• Rendahnya kontribusi iptek dan inovasi dalam ekonomi • Masalah ketenagakerjaan dan produktivitas
	• Prestasi internasional minim • Budaya olahraga yang rendah
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Penurunan daya saing industri pengolahan • Produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah • Tantangan dekarbonisasi dan inovasi • Potensi hilirisasi yang belum optimal
	• Turunnya tren daya saing industri pengolahan • Potensi hilirisasi yang belum tergarap optimal

Prioritas Nasional	Isu
	• Kuatnya tantangan eksternal, seperti tekanan dekarbonisasi global dan persaingan dengan Vietnam
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Program pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial belum tepat sasaran dan belum terintegrasi • Minimnya akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan infrastruktur dasar
	• Belum optimalnya intervensi dan integrasi perumahan • Keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan MBR • Belum optimalnya keterhunian dan pengelolaan rumah
	• Tingginya angka kemiskinan perdesaan • Kualitas layanan dasar perdesaan masih timpang dibandingkan layanan perkotaan • Nilai ekonomi dan daya saing lemah • Pendapatan asli desa (PADes) terhadap ABPDesa masih sangat rendah • Kualitas belanja desa perlu ditingkatkan • Belum optimalnya konsolidasi berbagai pendanaan K/L/D • Desa berketahanan iklim masih rendah
	• Kontribusi ekonomi yang tergolong rendah • Pemanfaatan dan pengendalian ruang dan lahan perkotaan belum efektif • Ketersediaan dan akses layanan perkotaan belum inklusif dan belum memadai • Pembangunan dan penyediaan infrastruktur khusus di wilayah metropolitan belum merata dan tidak terintegrasi secara kewilayahan • Rendahnya kesempatan kerja • Degradasi lingkungan yang semakin tinggi • Tata kelola pemerintah yang kurang dinamis • Tingginya konsentrasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan	• Lemahnya penegakan hukum korupsi • Regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih • Sistem politik dan tata kelola partai politik yang tidak optimal

Prioritas Nasional	Isu
Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Manajemen ASN dan pelayanan Publik yang belum optimal
	• Kesenjangan dan belum optimalnya hubungan pemerintah pusat dan daerah • Prevalensi penyalahgunaan narkoba • Maraknya *New Psychoactive Substances (NPS)* dan motif baru peredaran gelap narkoba
	• Daya saing BUMN yang rendah • Kesehatan keuangan dan kemandirian BUMN
	• Kompleksnya tantangan kebijakan fiskal di Indonesia dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan
	• Fluktuasi inflasi domestik
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Nilai–nilai agama dan pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan • Kurangnya perhatian terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan dan adat • Kebudayaan belum sepenuhnya dipertimbangkan untuk pembangunan • Khazanah kearsipan nusantara belum optimal dikembangkan
	• Meningkatnya potensi kerentanan, dampak, dan risiko bencana • Terbatasnya kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana • Aspek penanggulangan bencana belum terintegrasi secara penuh dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang • Rendahnya persentase cakupan peringatan dini bencana

Sumber: RPJMN 2025–2029

2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi, potensi wilayah yang dimiliki, serta dinamika perkembangan global, telah dirumuskan sejumlah isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Isu strategis provinsi ini juga melihat dari isu strategis RPJPD Provinsi Kalimantan tengah 2025–2045. Isu–isu strategis ini menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2025–2029 sebagai berikut.

A. Tata Kelola Pemerintah Daerah Belum Optimal

Tata kelola pemerintah daerah yang belum optimal dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti inefisiensi anggaran, korupsi, dan kurangnya akuntabilitas. Hal ini dapat menghambat pembangunan daerah dan merugikan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

B. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM

Rendahnya kualitas dan daya saing SDM dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti akses pendidikan yang tidak merata, kualitas pendidikan yang rendah, dan kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM merupakan investasi penting untuk masa depan bangsa. Pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan mutu pendidikan, dan menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

C. Rendahnya Kapasitas dan Kualitas Konektivitas serta Infrastruktur

Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur dapat menghambat mobilitas orang dan barang, meningkatkan biaya logistik, dan menghambat akses ke pasar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan kunci untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, serta memastikan pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan.

D. Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti pencemaran air dan udara, kerusakan hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, dan ketahanan pangan. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, dan mempromosikan praktik–praktik pembangunan yang berkelanjutan.

E. Ketahanan Air, Energi, dan Pangan yang Rentan

Ketahanan air, energi, dan pangan yang rentan dapat mengancam ketahanan daerah dan stabilitas sosial. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan iklim, eksploitasi berlebihan sumber daya alam, dan infrastruktur yang tidak memadai. Meningkatkan ketahanan air, energi, dan pangan merupakan hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan sumber–sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi, dan meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan.

F. Belum Optimalnya Pembangunan Daerah Pedalaman dan Tertinggal serta Ketimpangan Pembangunan Antarzona Pembangunan

Pembangunan yang tidak merata antardaerah dapat menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan. Hal ini dapat menyebabkan konflik sosial dan menghambat pembangunan nasional. Membangun daerah yang tertinggal dan mempersempit ketimpangan antar daerah merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Pemerintah perlu meningkatkan investasi di daerah–daerah tertinggal, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

G. Minimnya Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Turunan Sumber Daya Alam

Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sumber daya alam dapat menyebabkan nilai tambah yang rendah dan ketergantungan pada ekspor bahan baku. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Meningkatkan hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sumber daya alam merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi. Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor industri hilir, meningkatkan riset dan pengembangan teknologi, dan meningkatkan akses ke pasar internasional.

H. Belum Optimalnya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi untuk Menunjang Pembangunan

Inovasi dan teknologi merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi dapat menghambat pembangunan di berbagai sektor. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi merupakan hal yang penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan, meningkatkan akses ke internet dan teknologi digital, dan mendorong kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan teknologi.

I. Komitmen Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas, Inklusif, dan Terjangkau

Komitmen pelaksanaan pembangunan sektor kesehatan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Penyediaan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dengan harga terjangkau menjadi faktor penentu dalam peningkatan status kesehatan masyarakat. Optimalisasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta melalui kemitraan strategis dalam penyediaan layanan kesehatan terpadu dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual.

Untuk mendukung pemenuhan gizi anak, pemerintah pusat membuat Program Makanan Bergizi Gratis ke sekolah di berbagai daerah. Program ini memerlukan pengawasan ketat terhadap keseimbangan gizi makanan yang disediakan, kualitas bahan pangan yang digunakan, serta pembatasan penyediaan makanan ultra–proses bagi anak–anak. Penguatan mekanisme kontrol kualitas dan sistem distribusi diperlukan untuk memastikan efektivitas program dalam mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.

J. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah sebesar 7–8% pada 2029, diperlukan penguatan sektor–sektor produktif yang berkelanjutan, dengan fokus utama pada pengembangan agroindustri dan industri pengolahan pangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kontribusi sektor agrikultur terhadap perekonomian daerah, tetapi juga dapat mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur yang selama ini mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya.

K. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penguatan Budaya Lokal

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial memerlukan penyelesaian masalah kemiskinan di wilayah perdesaan melalui implementasi kebijakan afirmatif berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan pendekatan yang mempertimbangkan nilai–nilai kearifan lokal untuk menciptakan kemandirian finansial berkelanjutan. Strategi ini perlu diperkaya dengan berbagai bentuk insentif non–tunai seperti program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan keterampilan khusus, yang harus diikuti dengan sinergi strategis antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap lulusan pelatihan, sehingga membentuk ekosistem pemberdayaan yang komprehensif dari hulu ke hilir.

2.3.2.4 Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Katingan

Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan, dan analisis data terhadap kondisi umum daerah, capaian TPB yang relevan, dan pembagian peran antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait lainnya dalam mencapai TPB. Hasil dari pengkajian pembangunan berkelanjutan berupa gambaran pencapaian TPB di daerah. Pengkajian pembangunan berkelanjutan merupakan hasil dari pengkajian 4 (empat) isu utama, yaitu kemampuan sumber daya alam untuk menampung aktivitas pembangunan, tingkat konsumsi SDA oleh manusia, hasil analisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan hasil analisis kemampuan daerah dalam menyelesaikan ketiga isu sebelumnya. Penyusunan Laporan KLHS RPJMD juga didukung dengan data–data terkait isu strategis lainnya di daerah berupa Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Katingan Periode 2025–2045, RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024–2026, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, Rencana Pengelolaan DAS Katingan Tahun 2023–2053, DIKPLHD Kabupaten Katingan Tahun 2022, 2023, dan 2024. Selain itu, Isu Utama tersebut ditambahkan sesuai hasil masukan dari para pihak pada saat Konsultasi Publik.

Dari analisis isu–isu tersebut didapatkan isu pembangunan strategis sebagai berikut.

A. Perbaikan Kesehatan dan Kualitas Hidup

Kabupaten Katingan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Degradasi kualitas udara akibat kebakaran hutan dan emisi kendaraan, serta pencemaran air akibat sanitasi yang buruk, telah meningkatkan kasus penyakit pernapasan, diare, dan gangguan kulit. Selain itu, buruknya pengelolaan sampah dan minimnya kesadaran daur ulang memperparah pencemaran tanah dan air, yang pada gilirannya mengurangi daya dukung lingkungan bagi kehidupan sehat. Jika tidak ditangani, hal ini akan memperburuk ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan yang kerap melanda wilayah ini.

Di sisi lain, upaya perbaikan melalui konservasi sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan akses air bersih dapat menjadi solusi strategis. Reforestasi dan pengendalian kebakaran hutan tidak hanya meningkatkan kualitas udara, tetapi juga memperkuat ketahanan ekosistem. Sementara itu, pengelolaan sampah yang lebih baik dan pembangunan infrastruktur sanitasi berkelanjutan dapat mengurangi beban

penyakit lingkungan. Dengan pendekatan terintegrasi, Kabupaten Katingan berpeluang meningkatkan daya dukung lingkungan sekaligus kualitas hidup masyarakat, mendorong ketahanan pangan, dan melestarikan keanekaragaman hayati sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan.

B. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Lingkungan

Peningkatan kualitas pendidikan dan literasi lingkungan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Upaya ini dapat dilakukan melalui integrasi materi pendidikan lingkungan dalam kurikulum formal maupun nonformal, serta pengembangan program edukatif yang menyasar berbagai kelompok usia. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas tenaga pendidik dan menyediakan sarana pendukung seperti perpustakaan berbasis lingkungan dan kegiatan pembelajaran lapangan.

Literasi lingkungan juga memegang peranan penting dalam membentuk masyarakat yang mampu mengambil keputusan secara bijak dalam pengelolaan sumber daya alam. Kampanye publik, pelatihan, dan kegiatan partisipatif seperti sekolah lapang dan komunitas hijau diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistemnya. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan dan literasi lingkungan menjadi landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Katingan.

C. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Budaya Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan memperkuat identitas budaya lokal, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, serta memastikan inklusi sosial bagi semua kelompok. Penguatan nilai–nilai budaya lokal dapat diwujudkan melalui pelestarian adat, kesenian, dan tradisi yang selama ini menjadi identitas masyarakat Katingan. Di sisi lain, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum yang layak turut berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Program-program pembangunan sosial juga harus memperhatikan keberagaman dan potensi konflik, serta mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pemberdayaan komunitas lokal dengan mendorong inisiatif kolektif dan pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara sosial dan berbudaya. Langkah ini penting untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat kohesi sosial.

D. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Pengentasan Kemiskinan Struktural

Pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak–anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, merupakan strategi penting dalam pengentasan kemiskinan struktural. Program yang berbasis komunitas dan mendorong kemandirian ekonomi dapat meningkatkan kemampuan kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pendekatan inklusif dan berbasis hak asasi manusia sangat diperlukan agar pembangunan tidak meninggalkan siapa pun.

Di samping itu, pemerintah daerah perlu menyediakan akses yang adil terhadap sumber daya, pendidikan, pelatihan kerja, dan modal usaha. Intervensi kebijakan yang terarah seperti subsidi, perlindungan sosial, dan program padat karya juga bisa menjadi instrumen efektif untuk menanggulangi kemiskinan yang diwariskan secara turun–temurun. Pelibatan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan akan memperkuat rasa kepemilikan dan efektivitas program.

E. Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem

Restorasi dan rehabilitasi ekosistem menjadi krusial mengingat tingginya tekanan terhadap kawasan hutan, lahan gambut, dan sungai di Kabupaten Katingan. Kerusakan ekosistem akibat deforestasi, kebakaran hutan, serta konversi lahan untuk perkebunan dan pertambangan harus segera di atasi melalui upaya pemulihan berbasis ilmiah dan partisipatif. Penanaman kembali vegetasi asli, perlindungan kawasan lindung, dan revitalisasi badan air menjadi langkah prioritas.

Selain aspek ekologis, restorasi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja hijau serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana. Melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi tidak hanya mempercepat proses pemulihan, tetapi juga memastikan keberlanjutan hasilnya. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan restorasi ekosistem jangka panjang.

F. Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam diarahkan pada keberlanjutan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini penting untuk menjaga fungsi ekologi sekaligus menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Implementasi zonasi kawasan konservasi, pengawasan pemanfaatan hutan, dan pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan menjadi bagian dari strategi konservasi

Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak, transparan, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan sistem pengawasan terhadap praktik eksploitasi yang merusak lingkungan. Edukasi publik dan insentif bagi praktik ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan ekowisata, juga berperan dalam memperluas dampak konservasi.

G. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Adil dan Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan menuntut kejelasan hak atas lahan dan akses, terutama bagi masyarakat adat dan lokal. Reformasi agraria, pengakuan wilayah adat, serta pemberian hak kelola kepada komunitas menjadi langkah strategis untuk menciptakan keadilan ekologis. Dalam konteks ini, mekanisme berbasis keadilan sosial dan ekonomi harus diterapkan dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya.

Berkelanjutan berarti bahwa pengambilan manfaat dari sumber daya alam tidak mengorbankan kemampuan regeneratifnya. Oleh karena itu, perlu ada integrasi antara perencanaan spasial, pengelolaan risiko bencana, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemerintah juga dapat mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular dan insentif bagi investasi hijau yang berpihak pada keberlanjutan.

H. Penguatan Kewirausahaan

Penguatan kewirausahaan bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta memperluas kesempatan kerja, khususnya di sektor–sektor potensial seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata berbasis alam. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pendampingan bisnis sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuhnya pelaku usaha lokal yang tangguh.

Di samping itu, ekosistem kewirausahaan perlu didukung melalui kemitraan antara pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan. Fasilitasi pemasaran produk, inovasi berbasis teknologi, serta perlindungan hukum terhadap usaha kecil menjadi bagian dari kebijakan yang mendorong ekonomi lokal yang inklusif. Penguatan UMKM dan koperasi berbasis komunitas juga memainkan peran penting dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah.

2.3.2.5 Potensi Daerah Kabupaten Katingan

Kabupaten Katingan merupakan salah satu daerah penghasil beras terbesar di Kalimantan Tengah, dengan lahan padi terkonsentrasi di Kecamatan Katingan Kuala yang

mencakup padi sawah dan ladang. Letak geografisnya yang berbatasan dengan laut memungkinkan sistem pengairan sawah berkelanjutan, mendukung produktivitas pertanian yang stabil. Selain beras, sektor perkebunan didominasi oleh kelapa sawit sebagai komoditas unggulan, dengan Kecamatan Katingan Hilir sebagai produsen utama dan pemilik lahan perkebunan terluas.

Di bidang peternakan, Kabupaten Katingan memiliki populasi ternak yang signifikan, dengan 10.982 ekor sapi potong dan 10.894 ekor babi pada 2024. Potensi ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penguatan rantai pasok dan industri pengolahan hasil ternak. Selain itu, Kabupaten Katingan juga memiliki sumber daya alam melimpah, seperti batu bara yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendapatan ekonomi daerah, serta rotan di Hampangen yang menjadikannya salah satu sentra produksi rotan terbesar di Kalimantan Tengah.

Dari sisi lapangan pekerjaan, mayoritas masyarakat bergerak di sektor jasa (32.312 orang), diikuti oleh pertanian (25.786 orang) dan industri (23.586 orang). Namun, potensi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan masih sangat besar yang berpotensi untuk dapat dikembangkan sebagai perluasan pertanian, perkebunan, atau agroindustri.

2.3.2.6 Isu Strategis Kabupaten Katingan

Kabupaten Katingan, sebagai salah satu wilayah strategis di jantung Kalimantan Tengah, menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan dinamis, baik akibat pengaruh global, nasional, maupun regional. Berdasarkan evaluasi mendalam terhadap capaian pembangunan sebelumnya, serta analisis dari kondisi eksternal seperti kondisi global, nasional, regional, dan KLHS, sejumlah isu strategis Kabupaten Katingan telah teridentifikasi. Di sisi lain, potensi besar yang dimiliki Katingan, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, kekayaan biodiversitas, hingga kearifan lokal masyarakat adat, menuntut pengelolaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Penetapan isu–isu strategis ini didasarkan pada permasalahan–permasalahan prioritas yang selaras dengan arahan pembangunan Tema 1 RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045. Identifikasi isu strategis tidak hanya berfungsi sebagai dasar perencanaan program, tetapi juga sebagai panduan untuk memastikan pembangunan Kabupaten Katingan berjalan secara selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah keterkaitan atas isu–isu kunci dari permasalahan, KLHS, global, nasional, regional, dan potensi Kabupaten Katingan terhadap isu strategis Kabupaten Katingan.

Tabel 2-47 Analisis Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Permasalahan transformasi sosial untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing	Perbaikan kesehatan dan kualitas hidup	Memastikan hidup sehat dan kesejahteraan bagi semua usia	Ketimpangan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi serta prestasi olahraga	Rendahnya kualitas dan daya saing SDM	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas hidup
		Peningkatan kualitas pendidikan dan literasi lingkungan	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua			
		Peningkatan kesejahteraan sosial budaya masyarakat	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Isu sosial, perlindungan anak, dan ketimpangan gender		
		Pemberdayaan masyarakat dan kelompok rentan dalam pengentasan kemiskinan struktural		Penurunan daya saing industri dan kualitas tenaga kerja		
1) Penghasil beras terbesar di Kalimantan Tengah Laut sebagai pengairan sawah **2) Komoditas utama kelapa sawit** **3) Peternakan didominasi sapi dan babi** **4) Lahan cukup luas Produksi rotan tertinggi di Kalimantan Tengah**	Permasalahan transformasi ekonomi yang inklusif	Penguatan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal yang inklusif dan kreatif terhadap ketahanan ekonomi dan eksistensi peran seluruh kelompok lapisan masyarakat	Mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh, produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua	Belum optimalnya pemerataan akses layanan dan pertumbuhan ekonomi	Minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sumber daya alam	Pengembangan kemandirian ekonomi daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
5) Batubara **6) Hutan konservasi** **7) Hasil perikanan**						
			Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya	Lemahnya pengembangan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	
		Peningkatan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan akibat perubahan iklim dan ketahanan sosial melalui mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi terutama banjir serta kebakaran hutan dan lahan	Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan	Lemahnya keamanan nasional, ketahanan pangan, dan ketahanan energi	Ketahanan air, energi, dan pangan yang rentan	
			Menjamin akses terhadap energi modern yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan			Peningkatan sistem pemasaran dan pengelolaan sektor potensial
			Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	Belum optimalnya pemerataan akses layanan dan pertumbuhan ekonomi		
	Permasalahan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptif	Peningkatan partisipasi masyarakat dan inklusi sosial dalam tata kelola pemerintahan	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk	Tata kelola pemerintahan kurang dinamis	Tata kelola pemerintah daerah yang belum optimal	Penguatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kondusivitas wilayah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Permasalahan kondusivitas dan stabilitas daerah serta kepemimpinan daerah	Integrasi prinsip good governance tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berdampak positif	pembangunan berkelanjutan	Tidak efisiennya sistem politik, tata kelola partai politik, dan birokrasi		
		Penegakkan hukum dan perbaikan regulasi		Penanggulangan bencana belum terintegrasi		
	Permasalahan ketahanan sosial budaya dan ekologi			Meningkatnya potensi kerentanan, dampak, dan risiko bencana		
				Penyalahgunaan narkoba	Peningkatan kesejahteraan sosial dan penguatan budaya lokal	
				Lemahnya nasionalisme, implementasi Pancasila, dan penegakan HAM dan hukum korupsi		Optimalisasi ketahanan sosial budaya dan ketahanan keluarga
	Permasalahan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan	Pengelolaan air, sampah, dan limbah terutama dalam pengembangan kota cerdas	Memastikan akses dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan	Sistem infrastruktur yang belum terintegrasi dan optimal	Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur	Peningkatan permukiman layak huni berkelanjutan
			Membuat kota–kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan			Percepatan pemerataan aksesibilitas dan jaringan
	Permasalahan infrastruktur, sarana,		Mempromosikan masyarakat yang damai		Belum optimalnya pembangunan daerah	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	dan prasarana yang berkualitas		dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan		pedalaman dan tertinggal serta ketimpangan pembangunan antarzona pembangunan	
		Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur fisik yang tangguh, ramah lingkungan dengan teknologi tepat guna yang inovatif	Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi		Belum optimalnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembangunan	
		implementasi hilirisasi industri hijau dan transisi energi	Menjamin akses terhadap energi modern yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan			
		Perdagangan dan konektivitas global	Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan			
			Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara			
	Permasalahan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Restorasi dan rehabilitasi ekosistem	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	Degradasi lingkungan	Degradasi lingkungan	Penguatan ketahanan lingkungan hidup dan ekosistem berkelanjutan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam	Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi disertifikasi, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan melindungi keanekaragaman hayati			
		Pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan	Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan			

Adapun isu–isu strategis di Kabupaten Katingan dari hasil telaah tersebut sebagai berikut.

A. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kualitas Hidup

Peningkatan daya saing SDM di Kabupaten Katingan menjadi isu strategis yang sangat penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Katingan menghadapi isu strategis yang erat terkait dengan tantangan global, nasional, dan regional, memerlukan pendekatan terintegrasi untuk pembangunan berkelanjutan. Di tingkat global, isu seperti hidup sehat, pendidikan inklusif, dan kesetaraan gender mendorong Katingan untuk memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan, khususnya di daerah terpencil, serta memberdayakan perempuan dalam ekonomi lokal. Secara nasional, ketimpangan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing tenaga kerja menjadi tantangan utama, yang membutuhkan pemerataan infrastruktur, pelatihan vokasional, dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Sementara itu, isu regional seperti rendahnya daya saing SDM menuntut kolaborasi dengan pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan keterampilan kerja yang relevan dengan potensi lokal, seperti ekowisata dan agroindustri. Tidak hanya itu, isu lingkungan di semua tingkatan menjadi isu yang berkaitan dengan kualitas hidup di Kabupaten Katingan.

Isu peningkatan kualitas SDM dan kualitas hidup ini penting untuk dilakukan melihat meningkatnya angka kematian ibu menjadi 174,9 orang per 100.000 orang pada 2023 dari 9,25 orang per 100.000 pada 2020. Angka Kematian Bayi juga meningkat secara fluktuatif dari 6,2 orang per 1000 orang pada 2020 menjadi 10,6 pada 2024. Di bidang pendidikan, skor literasi dan numerasi Sekolah Dasar masih rendah masing-masing 52,17 dan 46,2.

Dengan memadukan agenda global (SDGs), kebijakan nasional, dan kebutuhan lokal, RPJMD Katingan 2025–2029 dapat menjawab tantangan ini melalui pendekatan inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Langkah ini mencakup upaya perbaikan mutu pendidikan, pelatihan peningkatan keterampilan, serta perluasan akses terhadap teknologi informasi. Penekanan pada penguatan kompetensi bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing dan tangguh dalam menghadapi dinamika global. Pembangunan di sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta program peningkatan kapasitas keahlian akan memperkuat perekonomian daerah melalui terciptanya SDM yang unggul dan berdaya saing. Sementara kondisi saat ini, tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah yaitu 67,68% dan tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi sebesar 4,88%. Dengan demikian, penguatan

kompetensi SDM di Kabupaten Katingan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Katingan melalui penanggulangan kemiskinan dan penguatan sistem perlindungan sosial menempati posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif ini diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kapasitas keterampilan dan perluasan kesempatan kerja, disertai perluasan akses layanan kesehatan dan pendidikan bermutu. Prioritas utama juga diberikan pada penyelenggaraan program jaminan sosial dan pendampingan khusus bagi kelompok marjinal termasuk lansia, anak–anak, dan penyandang disabilitas guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan menyeluruh. Pembenahan infrastruktur dasar meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, serta hunian yang layak turut menjadi komponen kunci dalam strategi ini. Melalui sinergi pengurangan kesenjangan ekonomi dan penguatan jaring pengaman sosial, Pemerintah Kabupaten Katingan bertekad mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat.

B. Pengembangan Kemandirian Ekonomi Daerah serta Peningkatan Sistem Pemasaran dan Pengelolaan Sektor Potensial

Kabupaten Katingan memiliki potensi unggulan seperti produksi beras terbesar di Kalimantan Tengah, komoditas kelapa sawit, peternakan sapi dan babi, lahan luas, produksi rotan tertinggi, batubara, hutan konservasi, dan hasil perikanan, namun dihadapkan pada transformasi ekonomi yang belum inklusif. Isu strategisnya meliputi pemerataan akses layanan dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal di tingkat global, minimnya hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sumber daya alam di tingkat nasional, serta ketahanan air, energi, dan pangan yang rentan di tingkat regional. Tantangan ini diperparah oleh lemahnya pengembangan ekonomi, ketahanan pangan, dan keamanan nasional, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja layak, dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam lokal untuk menjawab isu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan kemandirian ekonomi daerah.

Pembangunan kemandirian ekonomi daerah telah menjadi isu strategis utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional. Konsep ini menekankan pada kemampuan daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara mandiri guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Potensi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Katingan yang tinggi harus mampu

dikelola dengan baik untuk menciptakan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Katingan. Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memiliki tren peningkatan akan mampu mendorong peningkatan pengembangan produk–produk lokal yang berkualitas dan berdaya saing.

Pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan memerlukan kebijakan tepat guna untuk memastikan pemanfaatan yang efisien sekaligus ramah lingkungan. Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri menjadi faktor kunci dalam menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan inovatif. Akan tetapi, pada 2020 dan 2022, Kabupaten Katingan memperoleh predikat Kurang Inovatif. Dengan demikian, dukungan infrastruktur yang memadai, mencakup fisik maupun digital, turut berperan vital dalam meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi daerah. Tidak kalah pentingnya, penciptaan iklim investasi yang menarik melalui regulasi yang transparan dan insentif yang kompetitif dapat mendorong partisipasi aktif pelaku usaha lokal maupun investor asing. Melalui pendekatan terpadu ini, kemandirian ekonomi daerah dapat diwujudkan, sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. Di sisi lain, dalam waktu empat tahun angka kriminalitas meningkat dari 6,23 menjadi 10,3 pada 2024 yang dapat berpengaruh pada kondusivitas daerah dan investasi.

Selain itu, Kabupaten Katingan juga menghadapi tantangan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan sistem produksi berkelanjutan, meski memiliki potensi pertanian dan sumber daya alam yang melimpah. Isu global seperti pengentasan kelaparan dan pertanian berkelanjutan berhadapan dengan lemahnya ketahanan pangan dan energi di tingkat nasional serta kerentanan regional terhadap ketersediaan air, energi, dan pangan. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Kabupaten Katingan menunjukkan tren penurunan. Penurunan IKP ini merupakan tanda adanya masalah mendesak dalam ketahanan pangan yang perlu segera di atasi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan, jika tren penurunan IKP tidak segera di atasi, Kabupaten Katingan dapat menghadapi krisis pangan yang serius di masa depan. Krisis iklim yang terjadi, kondisi Katingan yang didominasi Lahan Gambut, dan data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Katingan merupakan wilayah dengan Indeks Risiko Bencana tertinggi dan tergolong dalam kategori risiko tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah juga turut andil dalam ancaman perkembangan ketahanan pangan, energi, dan sistem produksi berkelanjutan di Kabupaten Katingan.

Sementara itu, belum optimalnya pemerataan akses layanan dan pertumbuhan ekonomi semakin memperrumit pencapaian pola konsumsi–produksi berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan ini, Katingan perlu fokus pada penguatan sistem pemasaran dan pengelolaan sektor potensial, sekaligus mendorong akses energi modern yang terjangkau guna mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Penguatan sistem pemasaran dan pengelolaan sektor potensial menjadi isu strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Sistem pemasaran berperan sebagai penghubung antara potensi produksi lokal dan keberlanjutan konsumsi masyarakat. Tanpa sistem pemasaran yang inklusif, efisien, dan adaptif, ketahanan pangan, energi, dan sistem produksi berkelanjutan akan terus berada dalam tekanan, dan Kabupaten Katingan berisiko menghadapi krisis multidimensi di masa depan. Isu ini juga berkaitan dan dengan isu strategi pengembangan kemandirian ekonomi daerah yang mayoritas berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai kontributor utama PDRB.

Akan tetapi, komoditas tersebut mengalami tren stagnan bahkan menurun dengan persentase 27,54% (2022) menjadi 26,88 (2024) sehingga diperlukan optimalisasi melalui inovasi dan penguatan rantai nilai. Proyek strategis seperti penguatan pasar rakyat, pengembangan *hub* pemasaran hasil tani skala nasional, serta diversifikasi produk olahan pertanian dan perikanan menjadi kunci dalam membuka akses pasar yang lebih luas. Sistem pemasaran tidak lagi hanya difokuskan secara konvensional, namun pelaku usaha juga didorong untuk memasarkannya melalui integrasi teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar.

C. Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital

Kabupaten Katingan menghadapi tantangan strategis dalam transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptif meskipun memiliki potensi sumber daya yang memadai. Isu global tentang revitalisasi kemitraan pembangunan berkelanjutan berhadapan dengan tata kelola nasional yang kurang dinamis, inefisiensi sistem politik, dan penanggulangan bencana yang belum terintegrasi, sementara di tingkat regional terdapat masalah tata kelola pemerintah daerah yang buruk. Untuk mengatasi hal ini, Katingan perlu fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif.

Akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah memegang peran kunci dalam memastikan pencapaian target pembangunan secara efektif. Di era digital ini, transformasi pemerintahan berbasis teknologi menjadi faktor penting dalam menjawab tantangan

modern. Pada 2019-2021, nilai SAKIP Kabupaten Katingan hanya pada CC, yang menunjukkan rendahnya kinerja pelayanan publik sehingga perlu ditingkatkan. Di samping itu, nilai LPPD juga turun dari 3,15 (2021) menjadi 2,50 (2022). Berdasarkan evaluasi kinerja Pemkab Katingan tersebut, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu ditangani, antara lain peningkatan nilai SAKIP untuk memperkuat reformasi birokrasi dan manajemen kinerja, pengembangan *e–government* dan kapasitas SDM aparatur guna meningkatkan kualitas layanan publik, serta penciptaan lingkungan yang kondusif melalui penguatan stabilitas sosial, pengembangan infrastruktur konektivitas, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Langkah–langkah strategis ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong pembangunan daerah secara optimal.

D. Optimalisasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ketahanan Keluarga

Kabupaten Katingan menghadapi tantangan strategis dalam membangun ketahanan sosial–budaya dan ekologi di tengah lemahnya implementasi nilai–nilai Pancasila, penegakan HAM, serta penanganan korupsi di tingkat nasional. Pada tingkat regional, masalah rendahnya kualitas dan daya saing SDM semakin memperrumit upaya penguatan ketahanan masyarakat. Untuk merespons tantangan ini, Katingan perlu memfokuskan pada optimalisasi ketahanan sosial budaya dan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kapasitas SDM lokal yang berlandaskan nilai–nilai kebangsaan dan kearifan lokal.

Penguatan ketahanan sosial budaya dan keluarga memainkan peran strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan, yang tercermin melalui empat aspek utama, yaitu pelestarian budaya lokal, kerukunan antarumat beragama, kesetaraan gender, dan peningkatan indeks pembangunan keluarga. Upaya pelestarian nilai–nilai budaya lokal tidak hanya berfungsi menjaga identitas daerah tetapi juga berpotensi menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara itu, pemeliharaan kerukunan beragama menjadi pilar penting dalam menciptakan harmoni sosial dan mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas pembangunan.

Di sisi lain, upaya mengurangi kesenjangan gender melalui peningkatan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan akan berkontribusi signifikan terhadap penguatan struktur sosial ekonomi masyarakat. Akan tetapi, indeks ketimpangan gender pada 2023 sempat naik tajam hingga 0,593 dari 0,570 (2022). Aspek terpenting adalah peningkatan kualitas keluarga yang tercermin dalam indeks pembangunan keluarga, di mana kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga menjadi fondasi utama dalam

membentuk masyarakat yang tangguh dan produktif. Pada akhirnya, terwujudnya ketahanan sosial dan keluarga akan menciptakan kehidupan masyarakat yang kondusif dikarenakan kebutuhan sosial, ekonomi, dan keamanan daerah telah tercapai.

E. Percepatan Pemerataan Aksesibilitas dan Jaringan

Kabupaten Katingan menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, di mana sistem infrastruktur nasional yang belum terintegrasi berhadapan dengan ketimpangan pembangunan regional antara daerah pedalaman dan pusat pertumbuhan. Isu global tentang masyarakat inklusif dan akses keadilan bagi semua semakin relevan dalam konteks lokal Kabupaten Katingan yang membutuhkan percepatan pemerataan aksesibilitas dan jaringan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Katingan merupakan isu strategis yang krusial dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah. Isu strategis ini mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna menjamin konektivitas antarwilayah, mobilitas masyarakat, serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Akan tetapi, proporsi panjang jalan mantap di Kabupaten Katingan pada 2024 hanya 37,88%. Pembangunan jalan baru, seperti koridor Trans–Kalimantan di wilayah utara, serta pengembangan terminal *hub* dan utama, menjadi langkah strategis untuk memperkuat integrasi wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan di lingkungan permukiman juga diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk memastikan ketahanan infrastruktur terhadap potensi bencana di masa depan.

Selain itu, percepatan pemerataan akses jaringan telekomunikasi di Kabupaten Katingan juga merupakan upaya strategis yang berdampak luas bagi pembangunan daerah. Pada 2022, layanan telekomunikasi hanya mencakup 73,42% dari luas wilayah Kabupaten Katingan dan terdapat 8 desa yang masih *blank spot*. Dengan demikian, dengan memperluas jaringan ke desa–desa terpencil, wilayah ini dapat terintegrasi secara lebih baik dengan pusat–pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial. Akses telekomunikasi yang merata tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan digital seperti *e–learning* dan *telemedicine*, tetapi juga memperkuat ketahanan terhadap bencana dengan menyediakan sistem komunikasi yang andal. Pembangunan infrastruktur ini sekaligus mendukung terwujudnya *smart village* yang mampu meningkatkan efisiensi layanan publik. Dari sisi ekonomi, konektivitas digital membuka peluang baru bagi UMKM

untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan produktivitas usaha, dan pada akhirnya mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dengan demikian, pemerataan aksesibilitas infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berperan sebagai katalisator pembangunan yang inklusif dan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Katingan

G. Peningkatan Permukiman Layak Huni Berkelanjutan

Kabupaten Katingan menghadapi tantangan pembangunan wilayah yang belum merata dan berkeadilan, terutama dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi berkelanjutan di tingkat global. Di tingkat nasional, kapasitas dan kualitas konektivitas infrastruktur yang masih rendah menjadi kendala utama, sementara di tingkat regional muncul kebutuhan mendesak untuk pengembangan permukiman layak huni yang berkelanjutan. Di Kabupaten Katingan cakupan ketersediaan rumah layak huni cenderung terus menurun dari 85,38% (2019) menjadi 59,12% (2023). Untuk mengatasi isu strategis ini, Katingan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang merata, peningkatan akses air bersih, dan pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan guna mewujudkan pemerataan pembangunan yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

Namun di sisi lain, Kabupaten Katingan menghadapi tantangan signifikan dalam pengembangan permukiman karena ketersediaan Area Penggunaan Lain (APL) yang terbatas, hanya 12,8% dari total wilayah. Sebagian besar wilayah merupakan kawasan konservasi, hutan lindung, atau lahan gambut yang rentan, sehingga pembangunan di area tersebut dilarang atau berisiko tinggi. Meskipun kepadatan penduduk saat ini rendah, potensi pertumbuhan penduduk di masa depan menuntut adanya strategi tata ruang yang cermat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, arah pembangunan permukiman di Kabupaten Katingan harus berfokus pada optimalisasi pemanfaatan APL yang terbatas dengan pendekatan pembangunan yang terpusat dan efisien.

Untuk mengatasi tantangan tersebut secara holistik, diperlukan sinergi dari berbagai strategi. Pertama, pembangunan permukiman terkonsentrasi harus menjadi prioritas utama, di mana pembangunan diarahkan ke pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ditetapkan. Kedua, implementasi pengendalian pembangunan yang ketat melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang eksplisit dan proses perizinan yang terpusat sangat krusial untuk memastikan semua pembangunan hanya terjadi di area APL yang telah ditentukan. Ketiga, pendekatan "*Eco-Settlement*" atau permukiman ramah lingkungan dapat diintegrasikan dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan dan kearifan lokal. Keempat, promosi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga

lingkungan, serta pengembangan sektor ekonomi alternatif yang tidak merusak lingkungan, akan melengkapi upaya ini untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis dengan kondisi alam.

Lebih lanjut, lingkungan hidup yang sehat dan nyaman merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kehidupan yang baik ini akan menjadi pendorong utama bagi kemajuan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan hal tersebut, beberapa aspek kunci perlu diperhatikan, yaitu pertama, penyediaan sarana sanitasi yang memadai dan sistem pengolahan limbah yang efektif sangat penting untuk mencegah penularan penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kedua, penerapan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui pendekatan 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)* akan menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meminimalkan dampak negatif sampah terhadap kesehatan. Ketiga, penyediaan air minum perpipaan yang memenuhi standar kualitas menjadi kebutuhan dasar untuk menjamin akses air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat, yang merupakan fondasi penting bagi kehidupan yang sehat. Keempat, pembangunan perumahan yang layak huni dengan memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan ketahanan terhadap bencana akan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup sekaligus mengurangi kerentanan terhadap kerugian ekonomi akibat bencana alam. Dengan terpenuhinya berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan permukiman yang berkualitas, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

H. Penguatan Ketahanan Lingkungan Hidup dan Ekosistem Berkelanjutan

Penguatan ketahanan lingkungan hidup di Kabupaten Katingan menjadi isu strategis yang krusial dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kabupaten Katingan memiliki peran ekologis penting sebagai bagian dari *Heart of Borneo* dan lahan gambut di Kalimantan Tengah, tetapi menghadapi tekanan lingkungan yang terus meningkat. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan tambang, serta kebakaran hutan dan lahan mampu menyebabkan menurunnya kualitas ekosistem. Kondisi ini semakin memperbesar tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana ekologis, seperti banjir.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Katingan menurun pada 2021 (73,45) dan 2023 (73,88) setelah sempat membaik. Meskipun demikian, nilai IKLH Kabupaten Katingan harus menjadi perhatian karena berada di bawah provinsi, padahal

Kabupaten Katingan merupakan satu dari beberapa daerah yang dimandatkan tugas sebagai wilayah konservasi skala internasional. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menunjukkan bahwa 18,9% dari total wilayah Kabupaten Katingan telah melampaui batas kemampuan ekosistemnya, dengan tingkat tekanan tertinggi terjadi di beberapa kecamatan seperti Katingan Tengah, Katingan Hilir, dan Kamipang. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan kapasitas lingkungan berpotensi memperburuk kerusakan sumber daya alam dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, buruknya pengelolaan sampah, sanitasi, dan limbah industri semakin memperburuk kondisi lingkungan, khususnya di wilayah permukiman yang berkembang pesat.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Katingan merupakan dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Katingan dan anak-anak sungainya. Terjadinya proses sedimentasi hingga peralihan aliran sungai merupakan proses alami yang terjadi pada perkembangan sungai. Akan tetapi, hal tersebut dapat menjadi masalah dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Katingan tinggal di sepanjang sungai atau tidak jauh dari sungai. Ruang hidup masyarakat dapat terancam untuk tergerus oleh aliran sungai. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi terhadap perubahan aliran sungai terutama di wilayah padat penduduk.

Pengendapan dan peralihan aliran sungai pada beberapa kejadian kemudian menyebabkan terputusnya lekukan sungai (meander) dari aliran sungai menyebabkan terjadinya danau tapal kuda (*oxbow lake*). Danau tapal kuda di Kabupaten Katingan terkonsentrasi di bagian tengah. Danau-danau tersebut terputus dari aliran utama kemudian hanya mendapatkan sumber air dari air hujan. Air yang menggenang tersebut dapat menjadi tempat berkembang biak hewan vektor penyakit, seperti nyamuk. Walaupun dapat membawa masalah kesehatan, danau tapal kuda merupakan habitat hewan-hewan air dari sungai yang terputus yang kemudian menjadi salah satu sumber perikanan darat. Selain menjadi sumber perikanan juga menjadi obyek pariwisata, salah satunya dalah Danau Mare di Kecamatan Katingan Tengah.

Di sisi lain, Kabupaten Katingan juga memiliki peluang besar untuk melakukan perbaikan lingkungan melalui berbagai inisiatif seperti restorasi ekosistem, perlindungan kawasan lindung, penguatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta pengembangan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Kabupaten Katingan bahkan diproyeksikan menjadi kabupaten dengan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni dari 1.385.533,25 ton CO_2 eq. pada 2026 hingga 2.230.193,02 ton CO_2 eq. pada 2030 seperti pada Tabel di bawah ini. Urgensi

pencapaian target ini sangat tinggi karena keberhasilan penurunan GRK tidak hanya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global, tetapi juga menjaga fungsi ekologis wilayah, melindungi keanekaragaman hayati, dan memperkuat ketahanan sosial–ekonomi masyarakat. Peran aktif masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi kunci untuk mencegah degradasi lebih lanjut dan menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan sumber daya alam.

Tabel 2-48 Penurunan GRK Kumulatif

Tahun	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO_2 eq.)
2026	1.385.533,25
2027	1.557.888,30
2028	1.765.119,81
2029	2.001.976,16
2030	2.230.193,02

Sumber: Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 005/465/IV/Bapperida tanggal 22 April 2025 Hal: Angka Proyeksi GRK Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Oleh karena itu, isu strategis lingkungan hidup di Kabupaten Katingan tidak hanya menyangkut pelestarian ekosistem, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, daya tahan sosial–ekonomi terhadap perubahan iklim, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Integrasi antara kebijakan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat menjadi arah penting dalam perencanaan pembangunan daerah.



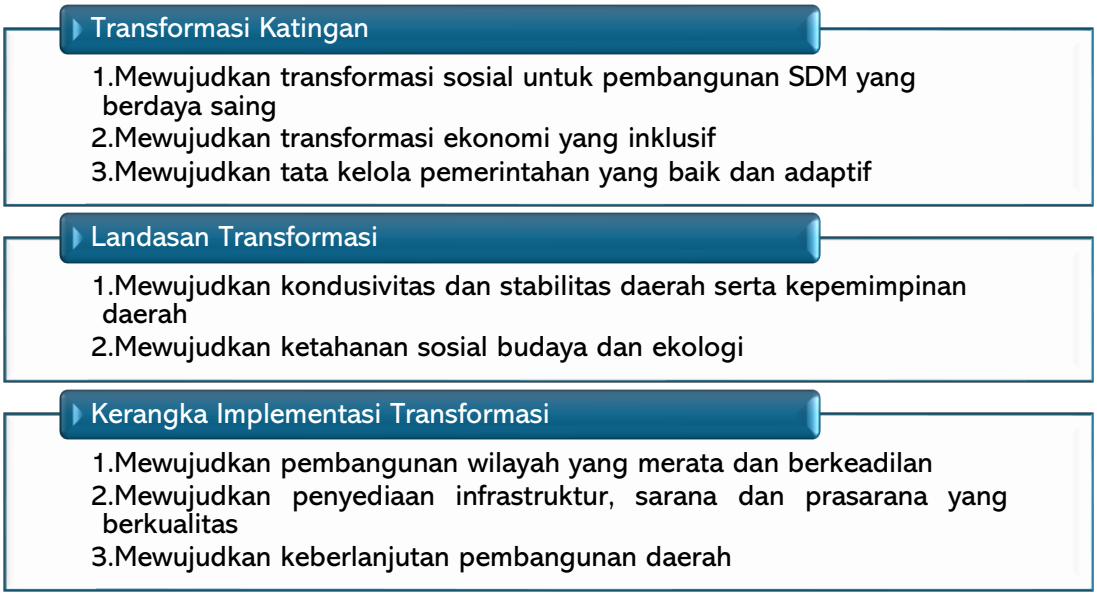
BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan turunan dari perencanaan pembangunan lainnya, yaitu perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Perencanaan pembangunan secara periodisasinya terbagi menjadi tiga, yaitu pembangunan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun), dan tahunan. Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Katingan periode tahun 2025–2045 mengacu pada RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045. Dokumen–dokumen perencanaan tersebut kemudian juga menjadi acuan bagi dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Perencanaan pembangunan jangka menengah yang diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 merupakan upaya penurunan dan penerjemahan rencana pembangunan dengan hierarki yang lebih tinggi, yaitu RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 merupakan perencanaan pelaksanaan tahap pertama RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 berisi upaya–upaya yang ditujukan untuk mencapai kondisi tahap I yang telah ditetapkan pada RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045.

Kabupaten Katingan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045, menetapkan visi pembangunannya yaitu “Kabupaten Katingan yang Maju, Berdaya Saing, Terbuka, dan Berkelanjutan”. Visi Kabupaten Katingan tersebut dirumuskan sebagai langkah percepatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Upaya tersebut diwujudkan melalui perumusan strategi berupa 8 (delapan) misi agenda pembangunan yang berfokus pada pembangunan SDM, ekonomi inklusif, stabilitas dan ketahanan wilayah, serta keberlanjutan pembangunan.



Gambar 3-1 Misi Pembangunan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 mengamanatkan bahwa tahap pertama RPJPD Kabupaten Katingan bisa diimplementasikan melalui RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029. Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 disusun selaras dan memiliki keterkaitan dengan visi RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Katingan 2025–2029 memuat berbagai upaya transformatif yang sejalan dengan arah kebijakan pada tahap pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Katingan 2025–2045.

Pembangunan Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 merupakan perwujudan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tersebut. Visi dan misi tersebut akan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang selanjutnya diimplementasikan melalui program prioritas pembangunan. RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan arah kebijakan jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 dengan visi, misi, dan program prioritas pembangunan, sehingga tercipta sinkronisasi antara visi kepemimpinan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1 Visi

Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan pada periode pertama RPJPN 2025–2045 serta mendukung arah kebijakan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan visi pembangunan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029. Visi merupakan rumusan umum mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah selama lima tahun. Visi menggambarkan masa depan yang diharapkan oleh masyarakat dan daerah, serta menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan proses perencanaan pembangunan daerah. Visi memberikan arah yang jelas terhadap tujuan yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan saat ini, serta memperlihatkan adanya kesenjangan antara keadaan sekarang dan masa depan yang diinginkan. Dengan demikian, visi bukan sekadar harapan atau angan–angan, melainkan merupakan bentuk komitmen bersama untuk merancang dan mengelola perubahan secara terarah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Visi pembangunan disusun berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar angan–angan, dengan tetap berorientasi pada masa depan. Pernyataan visi yang jelas dan terarah akan membantu menetapkan langkah–langkah strategis untuk mencapai tujuan yang diharapkan serta menjawab tantangan yang ada. Visi tersebut menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh daerah dalam lima tahun mendatang. Dalam dokumen RPJMD, visi daerah dirumuskan, dibahas, dan disepakati secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati Katingan periode 2025–2029. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Katingan, maka visi pembangunan daerah yang ingin diwujudkan pada 2029 adalah:



Gambar 3-2 Visi Jangka Menengah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

Visi Kabupaten Katingan tersebut didasarkan pada gagasan bahwa pembangunan wilayah di Kabupaten Katingan diharapkan mampu menjadikannya sebagai wilayah yang maju, dengan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, serta tetap menjunjung tinggi karakter yang mulia. Pada pemaknaannya, pembangunan yang diusung harus mempertimbangkan nilai–nilai sosial budaya yang kuat, harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, serta tujuan akhir berupa kesejahteraan yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. Melalui visi ini, Kabupaten Katingan diharapkan mampu menjadi wilayah yang rukun, menjunjung tinggi budaya lokal, serta menciptakan kehidupan yang damai. Seluruh proses pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi dan sosial, adil dalam akses serta distribusi hasil pembangunan, dan makmur melalui penguatan kapasitas sumber daya lokal. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Katingan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan karakter masyarakat yang berbudaya dan hidup berdampingan secara harmonis.

Kabupaten Katingan yang Maju mengacu pada upaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mencapai kemajuan di berbagai sektor, dan berdaya saing tinggi. Pada 2029, Kabupaten Katingan diharapkan menjadi wilayah yang unggul di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, dan tata kelola pemerintahan, dengan masyarakat yang terus berinovasi dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kabupaten Katingan akan menjadi daerah yang modern, dengan perekonomian yang berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan global, serta memberikan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.

Kabupaten Katingan yang Sejahtera dan Berkeadilan mencerminkan kondisi di mana seluruh masyarakat dapat hidup layak, terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan menikmati hasil pembangunan secara merata tanpa diskriminasi. Pada 2029,

kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai melalui pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta layanan publik lainnya. Prinsip keadilan diwujudkan melalui distribusi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Kabupaten Katingan yang Berakhlak Mulia menggambarkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai–nilai moral, etika, dan budaya lokal dalam kehidupan sosial maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pada 2029, Kabupaten Katingan ditargetkan menjadi daerah yang berkarakter kuat, dengan masyarakat yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, dan kepedulian sosial. Nilai–nilai ini menjadi landasan dalam menjaga harmoni sosial serta membangun masyarakat yang bermartabat di tengah dinamika perubahan zaman.

3.1.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya atau langkah–langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi memberikan arah tindakan yang lebih konkret dan terukur bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan, serta menjadi pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, misi disusun untuk menggambarkan langkah–langkah strategis selama lima tahun ke depan secara terarah dan realistis, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan pembangunan, serta kebutuhan nyata masyarakat.

Penyusunan misi juga mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah periode pertama, termasuk tantangan global dan regional yang perlu diantisipasi secara responsif. Oleh karena itu, misi dalam RPJMD ini tidak hanya menjadi penjabaran dari visi jangka menengah, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam menjaga fokus pembangunan daerah agar tetap adaptif, berdampak nyata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Secara substansial, misi definitif RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 merupakan wadah yang mengakomodasi (1) mandat nasional dan regional provinsi, (2) mandat pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan, (3) misi kepala daerah terpilih Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, dan (4) rekomendasi Perangkat Daerah dan elemen masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik. Oleh sebab itu, tersusunlah rangkaian misi

definitif dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dengan detail penyelarasan sebagai berikut:

Tabel 3-1 Penyusunan Misi Definitif Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

No.	Kode	Misi Kepala Daerah Terpilih	Kode	Misi Definitif RPJMD	Keterkaitan Misi Kepala Daerah Terpilih	Dasar Penyesuaian
1	BP1	Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Rukun, Aman, Damai dan Sejahtera	M1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing	BP1, BP3	M1 memuat mandat kepala daerah yang berfokus pada penciptaan masyarakat yang sejahtera dan damai melalui pemenuhan kebutuhan aspek dasar berupa pendidikan yang berkualitas dan aksesibel. Adapun upaya ini berkontribusi pada pembangunan modal manusia yang berdaya saing dan handal serta penyiapannya sebagai tenaga kerja yang kompetitif.
2	BP2	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Harmoni	M2	Mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang baik dan memenuhi standar	BP1, BP3, BP4	M2 melengkapi penciptaan kondisi masyarakat yang sejahtera dan damai melalui pemerataan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan dapat dijangkau oleh semua masyarakat, terlepas dari kondisi geografis. Misi ini hendak mewujudkan modal manusia yang sehat dan tangguh.
3	BP3	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing	M3	Mewujudkan kenyamanan dalam berusaha dan berinvestasi melalui transformasi ekonomi yang inklusif	BP7	M3 mewakili misi aspek ekonomi, namun dengan cakupan yang lebih luas dan inklusif, tidak hanya pada investasi dan kewirausahaan namun juga dorongan terhadap ekonomi hijau, penyerapan tenaga kerja, hingga kemandirian desa yang berdaya.
4	BP4	Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar	M4	Mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan dan membahagiakan	BP5	M4 memuat mandat yang berfokus pada pelayanan publik, tidak hanya pada aspek pelayanan publik namun juga birokrasi daerah secara menyeluruh, termasuk tata kelola internal pemerintah daerah yang transparan, adaptif, dan akuntabel.

No.	Kode	Misi Kepala Daerah Terpilih	Kode	Misi Definitif RPJMD	Keterkaitan Misi Kepala Daerah Terpilih	Dasar Penyesuaian
5	BP5	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Memuaskan dan Membahagiakan	M5	Mewujudkan suasana kehidupan yang rukun, aman, damai, dan sejahtera	BP1, BP2, BP5, BP7	M5 memuat mandat kepala daerah mengenai penciptaan kehidupan masyarakat yang aman secara holistik ditinjau dari aspek politik, kehidupan bermasyarakat, stabilitas ekonomi makro daerah, dan birokrasi yang efisien dan akuntabel.
6	BP6	Mewujudkan Infrastruktur yang Baik dan Mantap	M6	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius dan harmoni	BP1, BP2	M6 menjabarkan misi mengenai pewujudan kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai guna mencapai kehidupan yang berharmoni dan sejahtera. Mengakomodasi saran pada forum komunikasi publik mengenai penambahan unsur budaya dan lingkungan yang sejalan dengan misi 5 RPJPD Katingan Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, misi ini merupakan pengejawantahan dari aspek religiusitas, penguatan nilai–nilai budaya lokal, dan keluarga tangguh. Selain itu, misi ini juga menggarisbawahi mengenai konservasi lingkungan yang merupakan mandat dari nasional dan provinsi kepada Kabupaten Katingan sebagai bagian dari *Heart of Borneo*.
7	BP7	Mewujudkan kenyamanan dalam berusaha dan berinvestasi	M7	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang baik dan mantap	BP6	M7 memuat mandat kepala daerah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dalam aspek konektivitas antarwilayah, salah satunya berimplikasi pada pengembangan potensi daerah berbasis kewilayahan. Misi ini juga menggarisbawahi mengenai pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kehidupan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera sebagai manifestasi dari pembangunan yang berkeadilan. Aspek infrastruktur lain yang menjadi fokus ialah pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat, meliputi hunian layak dan berkelanjutan, air bersih, sanitasi layak dan aman, pengelolaan sampah, serta telekomunikasi.



Gambar 3-3 Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing merupakan perwujudan dari pokok visi Kabupaten Katingan yang Sejahtera, Adil, dan Makmur serta Berbudaya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang mampu bersaing secara global, sekaligus menjunjung tinggi nilai–nilai budaya lokal. Transformasi sosial dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, penguatan kesehatan masyarakat, serta pemberdayaan sosial yang inklusif. Dengan SDM yang tangguh, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan zaman, Kabupaten Katingan akan mampu membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Misi 2: Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar merupakan perwujudan dari pokok visi Kabupaten Katingan yang Sejahtera, Adil, dan

Makmur. Pemenuhan tingkat kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak dan pelayanan kesehatan secara umum dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pewujudan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui perbaikan pelayanan pada fasilitas kesehatan, kualitas tenaga kesehatan, dan kepesertaan masyarakat pada jaminan kesehatan. Melalui pelayanan kesehatan dan penciptaan budaya hidup sehat dicapai masyarakat sehat yang kemudian akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Misi 3: Mewujudkan Kenyamanan dalam Berusaha dan Berinvestasi Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif merupakan perwujudan dari pokok visi Kabupaten Katingan yang Sejahtera dan Makmur. Transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan merata, dengan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan meningkatkan daya saing sektor unggulan daerah. Misi ini mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan UMKM, kemudahan investasi, serta inovasi ekonomi digital, untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Misi 4: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Memuaskan dan Membahagiakan merupakan perwujudan dari pokok visi Kabupaten Katingan yang Adil dan Makmur serta Damai Bersama. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap perubahan menjadi fondasi penting dalam mendorong pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan. Melalui tata kelola yang baik, pemerintah daerah dapat menciptakan kepercayaan masyarakat, memperkuat partisipasi publik, dan menjamin distribusi pembangunan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Misi 5: Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Rukun, Aman, Damai, dan Sejahtera merupakan perwujudan dari pokok visi Kabupaten Katingan yang Damai Bersama dan Hidup Rukun. Stabilitas sosial, politik, dan keamanan menjadi syarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Misi ini menekankan pentingnya sinergi antar–*stakeholder* dalam menjaga ketertiban dan kedamaian, serta memperkuat peran kepemimpinan yang inklusif, visioner, dan berintegritas. Dengan situasi yang kondusif, masyarakat akan merasa aman dan termotivasi untuk turut aktif dalam proses pembangunan.

Misi 6: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Harmoni merupakan perwujudan dari pokok visi Kabupaten Katingan yang Berbudaya, Damai Bersama, dan Sejahtera. Ketahanan sosial dan budaya dibangun melalui pelestarian nilai–nilai lokal, penguatan kearifan tradisional, serta pemberdayaan komunitas adat. Misi ini memastikan bahwa pembangunan tetap menjunjung tinggi nilai–nilai sosial masyarakat.

Misi 7: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Baik dan Mantap merupakan perwujudan dari pokok visi Kabupaten Katingan yang Sejahtera dan Makmur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi penopang utama bagi kemajuan daerah. Misi ini mendorong pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan teknologi informasi secara terpadu dan berkelanjutan. Infrastruktur yang berkualitas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Untuk memastikan bahwa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 selaras dengan pokok–pokok visi, berikut tabel keterkaitan antara misi dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Katingan.

Tabel 3-2 Misi dan Pokok–Pokok Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

Misi	Pokok–Pokok Visi
Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing	Kabupaten Katingan yang Sejahtera, Adil, dan Makmur serta Berbudaya
Misi 2: Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar	Kabupaten Katingan yang Sejahtera, Adil, dan Makmur
Misi 3: Mewujudkan Kenyamanan dalam Berusaha dan Berinvestasi Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif	Kabupaten Katingan yang Sejahtera dan Makmur
Misi 4: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Memuaskan dan Membahagiakan	Kabupaten Katingan yang Adil dan Makmur serta Damai Bersama
Misi 5: Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Rukun, Aman, Damai, dan Sejahtera	Kabupaten Katingan yang Damai Bersama dan Hidup Rukun
Misi 6: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Harmoni	Kabupaten Katingan yang Berbudaya, Damai Bersama, dan Sejahtera
Misi 7: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Yang Baik dan Mantap	Kabupaten Katingan yang Sejahtera dan Makmur

Adapun dilihat dari keselarasannya dengan visi dan misi nasional serta Provinsi Kalimantan Tengah, visi dan misi Kabupaten Katingan telah mengakomodasi mandat level

di atasnya tanpa meninggalkan nilai khas daerah serta penguatan aspek lokalitas yang mengakar. Berikut merupakan komparasi visi dan misi antara ketiganya:

Tabel 3-3 Komparasi Visi dan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, dan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2039		RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029	
Visi					
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045		Mengangkat Harkat dan Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Masyarakat Kalimantan Tengah Umumnya (Manggatang Utus), dengan Kearifan Lokal dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045		Terwujudnya Kabupaten Katingan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berakhlak Mulia	
Misi					
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	**1**	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal	**1**	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	**2**	Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat	**2**	Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	**3**	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan	**3**	Mewujudkan Kenyamanan dalam Berusaha dan Berinvestasi Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2039		RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029	
4	Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	**4**	Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial	**4**	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Memuaskan dan Membahagiakan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	**5**	Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045	**5**	Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Rukun, Aman, Damai, dan Sejahtera
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan			**6**	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Harmoni
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan			**7**	Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Baik dan Mantap
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan merupakan bagian penting dari tahapan strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang mencerminkan tingkat prioritas tertinggi, sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, perumusan tujuan menjadi hal yang krusial dalam tahapan perencanaan kebijakan

karena tujuan mencerminkan apa yang perlu dicapai untuk mewujudkan visi, menjalankan misi, serta menjawab isu–isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan ini menggambarkan dampak dari keberhasilan pembangunan yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas.

Sejalan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Katingan juga berorientasi pada pencapaian target kinerja, baik dari sisi dampak, hasil *(outcome),* maupun keluaran *(output)* dari setiap kegiatan, program, dan sasaran yang dirancang. Sasaran dirumuskan sebagai hasil terukur yang ingin dicapai dari setiap tujuan, yang bersifat spesifik, realistis, dapat dicapai, dan dirancang untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran yang diturunkan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2025–2029 akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan tujuan dan sasaran pada rencana strategis seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan selama periode tersebut.

Tujuan pembangunan Kabupaten Katingan tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3-4 Visi, Slogan, Tujuan, dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

Misi	Slogan	Tujuan	Indikator Tujuan
Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing	Kabupaten Katingan yang Sejahtera, Adil, dan Makmur serta Berbudaya	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia
Misi 2: Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar	Kabupaten Katingan yang Sejahtera, Adil, dan Makmur		
Misi 3: Mewujudkan Kenyamanan dalam Berusaha dan Berinvestasi Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif	Kabupaten Katingan yang Sejahtera dan Makmur	Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi daerah yang produktif dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Misi 4: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Memuaskan dan Membahagiakan	Kabupaten Katingan yang Adil dan Makmur serta Damai Bersama	Menyediakan pelayanan publik yang berintegritas, berdampak, responsif dan aksesibel	Indeks Reformasi Birokrasi
Misi 5: Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Rukun, Aman, Damai, dan Sejahtera	Kabupaten Katingan yang Damai Bersama dan Hidup Rukun	Menjaga kondusivitas dalam kehidupan masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia

Misi	Slogan	Tujuan	Indikator Tujuan
Misi 6: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Harmoni	Kabupaten Katingan yang Berbudaya, Damai Bersama, dan Sejahtera		
		Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Misi 7: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Baik dan Mantap	Kabupaten Katingan yang Adil, Makmur, dan Sejahtera	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang merata, berkualitas dan terintegrasi	Indeks Infrastruktur Daerah (IID)

Pewujudan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Katingan secara lebih spesifik dituangkan melalui tujuan dan sasaran pembangunan yang secara rinci adalah sebagai berikut.

Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing, pencapaian misi pembangunan daerah tersebut didukung oleh satu (1) tujuan dan satu (1) sasaran, yaitu:

Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Sasaran:

1) Terwujudnya pendidikan berkualitas pada semua jenjang dasar (S.1)

Misi 2: Mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang baik dan memenuhi standar, pencapaian misi pembangunan daerah tersebut didukung oleh satu (1) tujuan dan satu (1) sasaran, yaitu:

Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

1) Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas (S.2)

Misi 3: Mewujudkan Kenyamanan dalam Berusaha dan Berinvestasi Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif yang pencapaiannya didukung oleh satu (1) tujuan dan tujuh (7) sasaran, yaitu:

Tujuan 2: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi daerah yang produktif dan berkelanjutan

Sasaran:

1) Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (S.3)
2) Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (S.4)

3) Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (S.5)
4) Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar terhadap PDRB (S.6)
5) Terwujudnya peningkatan sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) (S.7)
6) Terbangunnya tenaga kerja yang berkompetensi dan kompetitif (S.8)
7) Terwujudnya peningkatan nilai investasi (S.9)

Misi 4: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Memuaskan dan Membahagiakan terdiri dari satu (1) tujuan dan empat (4) sasaran, yaitu:

Tujuan 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang berintegritas, berdampak, responsif dan aksesibel

Sasaran:

1) Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik (S.10)
2) Terjaminnya kualitas kebijakan dan reformasi hukum (S.11)
3) Terciptanya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian internal pemerintah (S.12)
4) Tercapainya optimalisasi aksesibilitas layanan publik berbasis digital (S.13)

Misi 5: Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Rukun, Aman, Damai, dan Sejahtera pencapaian misi pembangunan daerah tersebut didukung oleh satu (1) tujuan dan empat (4) sasaran, yaitu:

Tujuan 4: Menjaga kondusivitas dalam kehidupan masyarakat

Sasaran:

1) Terjaganya ketentraman daerah (S.14)

Misi 6: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Harmoni yang terdiri dari dua (2) tujuan dan empat (4) sasaran, yaitu:

Tujuan 5: Menjaga kondusivitas dalam kehidupan masyarakat

Sasaran:

1) Terimplementasikannya nilai–nilai religius yang moderat dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat (S.15)
2) Terpeliharanya tradisi dan budaya lokal sebagai identitas bersama dan penguat kohesi sosial (S.16)
3) Terwujudnya ketahanan keluarga dan kesetaraan manfaat pembangunan (S.17)

Tujuan 6: Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana

Sasaran:

1) Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan (S.18)
2) Terwujudnya ketahanan terhadap bencana (S.19)

Misi 7: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Baik dan Mantap pencapaian misi pembangunan daerah tersebut didukung oleh satu (1) tujuan dan satu (2) sasaran, yaitu:

Tujuan 7: Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan terintegrasi

Sasaran:

1) Terbangunnya konektivitas wilayah yang efisien dan berkelanjutan (S.20)
2) Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan (S.21)

Tabel 3-5 Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
Terwujudnya Kabupaten Katingan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berakhlak Mulia 1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing 2. Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar 3. Mewujudkan Kenyamanan Dalam Berusaha dan Berinvestasi Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	74,9	75,41	75,93	76,44	76,95	77,46	
		Terwujudnya Pendidikan Berkualitas pada Semua Jenjang Dasar	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,28	13,35	13,43	13,5	13,57	13,64	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,06	10,18	10,31	10,43	10,55	10,67	
		Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas	Umur Harapan Hidup (Tahun)	70,11	71,19	72,27	73,34	74,42	75,5	
	Mendorong Pertumbuhan Sektor Ekonomi Daerah yang Produktif dan Berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5	5,5	5,7	5,8	5,9	6	
		Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	26,7	26,78	26,85	26,93	27	27,08	

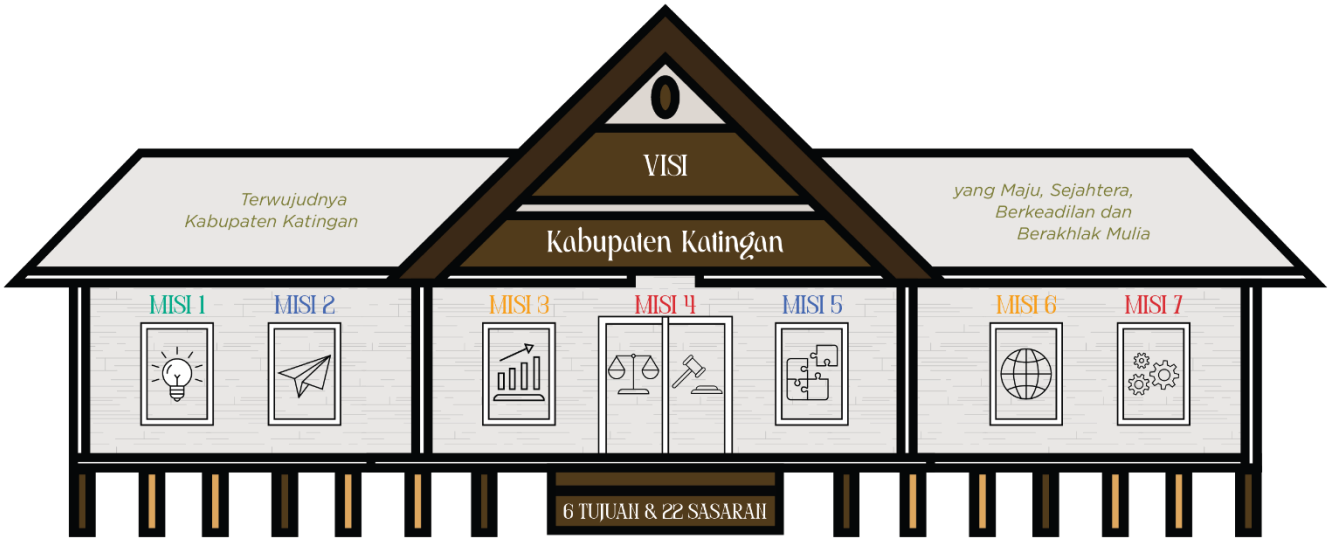
VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
4. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Memuaskan dan Membahagiakan 5. Mewujudkan Dalam Suasana Kehidupan yang Rukun, Aman, Damai dan Sejahtera 6. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Harmoni 7. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Baik dan Mantap		Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	15,68	15,76	15,84	15,92	16	16,08	
		Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	2,97	3,04	3,1	3,17	3,23	3,3	
		Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	7,95	8,12	8,25	8,37	8,5	8,63	
		Terwujudnya Peningkatan Sektor Usaha Mikro Kecil (UMK)	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5,49	5,77	6,06	6,34	6,62	6,9	
		Terbangunnya Tenaga Kerja yang Berkompetensi dan Kompetitif	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,80	4,75	4,70	4,65	4,60	4,55	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,7	67,9	68,1	68,3	68,5	68,7	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
		Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan untuk Pelayanan Publik yang Berintergitas, Berdampak, Responsif dan Aksesibel		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	75	76	77	78	79	81	
		Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,61	3,62	3,63	3,64	3,65	3,66	
		Terjaminnya Kualitas Kebijakan dan Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	70	71,25	72,5	73,75	75	76,25	
		Terciptanya Peningkatan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pengendalian Internal Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Predikat)	62	63	65	66	67	71	
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,16	3,23	3,29	3,36	3,42	3,49	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
		Tercapainya Optimalisasi Aksesibilitas Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,26	0	0	0	0	0	
			Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) (Indeks)	0	1	1,1	1,2	1,3	1,4	
	Menjaga Kondisifitas dalam Kehidupan Masyarakat		Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	6,62	6,78	6,8	6,82	6,84	6,88	
		Terjaganya Ketentraman Daerah	Indeks Kewaspadaan Nasional (Nilai)	0	60	63	65	68	70	
			Angka Kriminalitas (Rasio)	10	9,5	9	8,5	7	7,5	
		Terimplementasikannya Nilai-nilai Religius yang Moderat dan Toleran dalam Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	80,4	80,88	81,36	81,83	82,31	82,79	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
		Terpeliharanya Tradisi dan Budaya Lokal sebagai Identitas Bersama dan Penguat Kohesi Sosial	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	58,53	59,34	60,15	60,95	61,76	62,57	
		Terwujudnya Ketahanan Keluarga dan Kesetaraan Manfaat Pembangunan	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	70	71.31	72.63	73.94	75.25	76.56	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,58	0,558	0,535	0,513	0,49	0,468	
	Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana		Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase)	5	10	15	20	25	30	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	76,87	77,08	77,29	77,5	77,72	77,93	
		Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	76,87	77,08	77,29	77,5	77,72	77,93	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
		Terwujudnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	139,86	138,98	138,1	137,22	136,34	135,46	
	Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Terintegrasi		Indeks Infrastruktur (Angka)	69	69	70	70	71	71	
		Terbangunnya Konektivitas Wilayah yang Efisien dan Berkelanjutan	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota (Rasio)	0.60	0.61	0.61	0.62	0.62	0.63	
		Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas, Berkelanjutan, dan Ramah Lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	59,87	60,26	61,43	62,82	63,76	64,89	



Gambar 3-4 Huma Betang Katingan sebagai Simbol Rumah Besar Asa Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rangkaian aspirasi pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan yang kemudian dituangkan menjadi visi, misi, tujuan, hingga sasaran dikemas dalam struktur rumah adat Suku Dayak, **Huma Betang**. Simbolisme ini didasari oleh makna dari Huma Betang sendiri yang meliputi: (1) kekeluargaan, solidaritas, dan gotong royong oleh satu komunitas demi menjaga keharmonisan; (2) persatuan komunitas dalam keberagaman yang mengedepankan musyawarah untuk memperkuat kohesi sosial; (3) harmoni dengan alam dan sesama; (4) identitas budaya yang menjaga kelangsungan tradisi; dan (5) struktur rumah yang kuat dalam menghadapi kondisi alam Borneo menunjukkan kekokohan dan ketahanan. Berangkat dari filosofi tersebut, maka Huma Betang Katingan dibangun di atas enam tujuan pembangunan yang kokoh untuk menunjang tujuh misi yang merupakan badan rumah, hingga akhirnya rumah menjadi utuh melalui tercapainya visi yang merupakan atap Huma Betang. Sebagaimana bagian rumah yang saling berkaitan guna menopang berdirinya Huma Betang, maka seluruh rangkaian pembangunan juga memiliki implikasi satu sama lain agar visi dapat tercapai di 2029. Harapannya, Huma Betang Katingan dapat menjadi rumah bersama yang menaungi asa dan langkah pembangunan yang disepakati bersama oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Katingan.

3.1.4 Keselarasan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045

Keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan aspek penting yang harus diperhatikan guna

memastikan integrasi dan konsistensi arah pembangunan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan, mengacu pada RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 sebagai dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Penetapan tujuan dan sasaran dalam RPJMD disusun dengan merujuk dan menyesuaikan pada sasaran pokok yang tercantum dalam RPJPD. Dari total 17 sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045, telah diturunkan dan diselaraskan menjadi 30 sasaran dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029. Keterkaitan antara sasaran pokok RPJPD dan sasaran dalam RPJMD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3-6 Keselarasan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 dengan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029	RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045	
	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
Sasaran 2: Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas baik	KM 1: Kesehatan untuk Semua	Sasaran Pokok 1: Terwujudnya Kesehatan Untuk Semua
Sasaran 1: Terwujudnya pendidikan berkualitas pada semua jenjang dasar	KM 2: Pendidikan Berkualitas yang Merata	Sasaran Pokok 2: Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata
Sasaran 2: Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas baik	KM 3: Perlindungan Sosial yang Adaptif	Sasaran Pokok 3: Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif
Sasaran 18: Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesetaraan manfaat pembangunan		
Sasaran 7: Terwujudnya peningkatan sektor Usaha Mikro Kecil	KM 4: IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Sasaran Pokok 4: Terwujudnya IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
Sasaran 4: Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB		
Sasaran 5: Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		
Sasaran 6: Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor Perdagangan Besar terhadap PDRB		
Sasaran 3: Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	KM 5: Penerapan Ekonomi Hijau	Sasaran Pokok 5: Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau

Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029	RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045	
	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
Sasaran 13: Tercapainya optimalisasi aksesibilitas layanan publik berbasis digital	KM 6: Transformasi Digital	Sasaran Pokok 6: Terwujudnya Transformasi Digital
Sasaran 9: Terwujudnya peningkatan nilai investasi	KM 7: Integrasi Ekonomi Daerah	Sasaran Pokok 7: Terwujudnya Integrasi Ekonomi Daerah
Sasaran 22: Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan	KM 8: Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran Pokok 8: Terwujudnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan
Sasaran 10: Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	KM 9: Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	Sasaran Pokok 9: Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif
Sasaran 11: Terjaminnya kualitas kebijakan dan reformasi hukum		
Sasaran 14: Terjaganya ketentraman daerah	KM 10: Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan Daerah	Sasaran Pokok 10: Terwujudnya Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan Daerah
Sasaran 8: Terbangunnya tenaga kerja yang berkompetensi dan kompetitif	KM 11: Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Sasaran Pokok 11: Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
Sasaran 12: Terciptanya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian internal pemerintah	KM 12: Kepemimpinan dalam Birokrasi Ideal	Sasaran Pokok 12: Terwujudnya Kepemimpinan dalam Birokrasi Ideal
Sasaran 15: Terimplementasikannya nilai-nilai religius yang moderat dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat	KM 13: Masyarakat yang Beragama Maslahat dan Berbudaya	Sasaran Pokok 13: Terwujudnya Masyarakat yang Beragama Maslahat dan Berbudaya
Sasaran 16: Terpeliharanya tradisi dan budaya lokal sebagai identitas bersama dan penguat kohesi sosial		
Sasaran 17: Terwujudnya ketahanan keluarga dan kesetaraan manfaat pembangunan	KM 14: Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	Sasaran Pokok 14: Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender
Sasaran 18: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	KM 15: Kelestarian Lingkungan Hidup	Sasaran Pokok 15: Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Hidup
Sasaran 20: Terbangunnya konektivitas wilayah yang efisien dan berkelanjutan		

Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029	RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045	
	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
Sasaran 21: Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan	KM 16: Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Sasaran Pokok 16: Terwujudnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan
Sasaran 19: Terwujudnya ketahanan terhadap bencana	KM 17: Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Sasaran Pokok 17: Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

3.1.5 Keselarasan Target Pembangunan Kabupaten Katingan dengan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 juga tidak terlepas dari pelaksanaan RPJMD pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, target pada kedua dokumen tersebut menjadi acuan pada pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kabupaten Katingan dengan penyesuaian pada kondisi daerah. Perbandingan target sasaran makro pada RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJMD Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut.

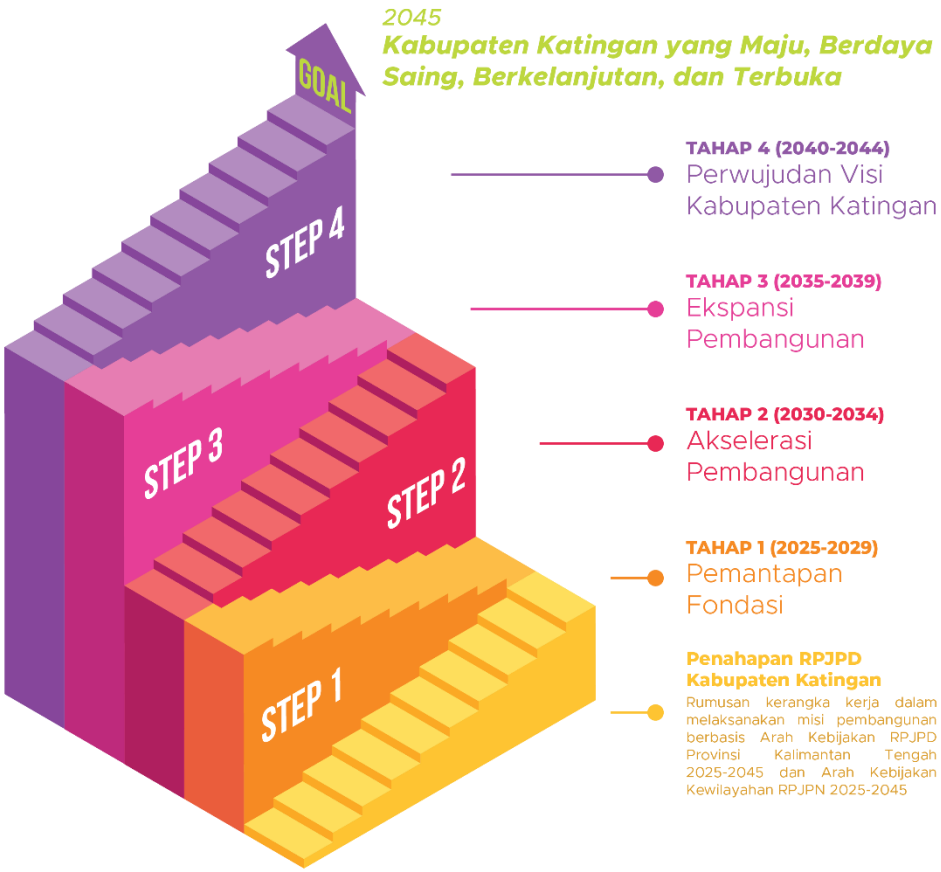
Tabel 3-7 Perbandingan Target Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dengan Target Sasaran Ekonomi Makro RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029

No.	Indikator	Target RPJMN Tahun 2029	Target RPJMD Provinsi Tahun 2029	Target RPJMD Tahun 2029
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	8	7,3	5,9
2.	PDRB per kapita (Rp Juta)	-	124,0	91,856
3.	Kontribusi PDB manufaktur (%)	21,9	-	-
	Pertumbuhan PDRB industri pengolahan (%)	-	18,57	16
4.	Tingkat kemiskinan (%)	4,50-5,00	2,43-3,43	4,90
5.	Rasio Gini (nilai)	0,372-0,375	0,246	0,23
6.	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,59	0,59	-
	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	-	-	76,95
7.	Persentase penurunan emisi GRK (%)	45,17	90,18	25
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	77,2	77,01	77,72

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi Penahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025–2029

RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 menjadi bagian pertama dari serangkaian perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045. Periode ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode–periode selanjutnya. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 terbagi ke dalam empat tahapan periode pembangunan yang mencerminkan strategi bertahap dalam mencapai visi pembangunan daerah seperti dalam skema berikut:



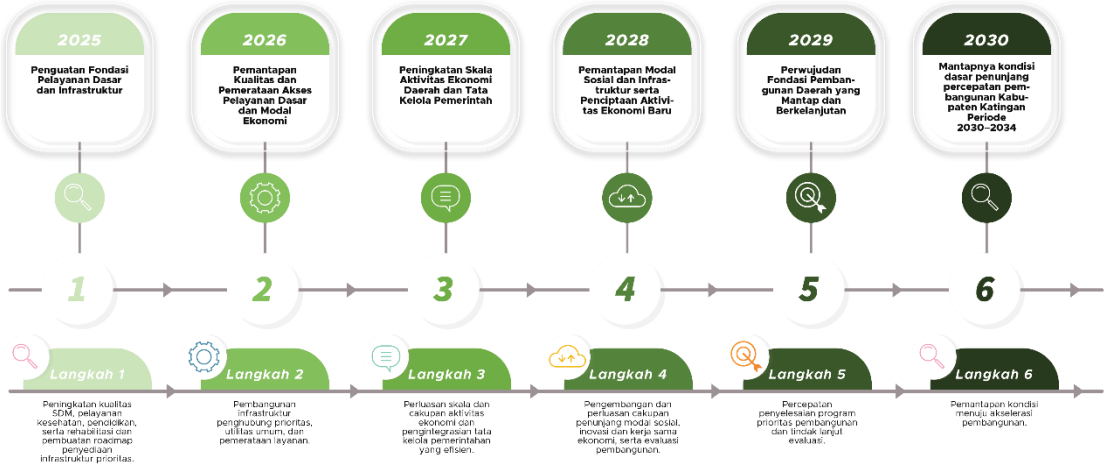
Gambar 3-5 Penahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Katingan

Tahap pertama yang diimplementasikan melalui RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 dirancang secara bertahap dan sistematis untuk mewujudkan visi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. RPJMD ini mengedepankan pendekatan progresif, di mana setiap tahapan menjadi fondasi bagi tahapan berikutnya, dengan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.

Tahapan pembangunan disusun dengan memperhatikan **konteks lokal** Katingan sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur dan SDM. Melalui penahapan ini, program dan kebijakan diarahkan untuk:

1. **Memperkuat pelayanan dasar** (kesehatan, pendidikan, infrastruktur) sebagai fondasi awal.
2. **Mendorong pemerataan akses dan peningkatan ekonomi** berbasis potensi unggulan daerah.
3. **Memantapkan tata kelola pemerintahan** yang transparan dan partisipatif.
4. **Mengakselerasi pembangunan berkelanjutan** melalui inovasi dan kolaborasi multi–pihak.

Tahun 2030 menjadi fase transisi menuju pelaksanaan RPJMD berikutnya dengan fokus pada konsolidasi capaian dan penyiapan langkah akselerasi pembangunan jangka panjang. RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 ini tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan untuk membangun daerah yang mantap, sejahtera, dan harmonis, sesuai dengan aspirasi masyarakat.



Gambar 3-6 Penahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, dirancang suatu tahapan pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan melalui pendekatan lima tahunan yang bersifat bertahap, berkesinambungan, dan saling memperkuat antarperiode. Tahapan ini disusun berdasarkan prinsip pembangunan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, tata kelola, stabilitas wilayah, ketahanan budaya dan ekologi, kewilayahan, serta infrastruktur.

Setiap tahapan diarahkan untuk membangun fondasi yang kuat pada awal periode (Tahap I), dilanjutkan dengan pengembangan dan perluasan program serta kualitas layanan pada fase pertumbuhan (Tahap II dan III), penguatan inovasi dan kemitraan lintas sektor pada fase pemantapan (Tahap IV), serta memastikan keberlanjutan program dan pencapaian target pembangunan secara merata pada fase akhir (Tahap V). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Katingan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menciptakan transformasi yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat dan daerah.

Tabel 3-8 Penahapan Pembangunan Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

Misi	Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing	**Penguatan Fondasi Pelayanan Dasar**	**Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Akses**	**Pemantapan dan Evaluasi Pelayanan**	**Pengembangan Program**	**Keberlanjutan dan Sinergi Masyarakat yang Rukun, Berbudaya, dan Damai Bersama dalam Masyarakat yang Sejahtera, Adil, dan Makmur**
	1. Menguatkan infrastruktur pendidikan serta kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	1. Mendorong pemanfaatan ruang teknologi kreatif dalam pendidikan	1. Mengevaluasi relevansi kurikulum pendidikan dan keselarasan dengan nilai–nilai lokal	1. Menguatkan kerja sama antara dunia pendidikan dan dunia usaha	1. Memastikan keberlanjutan program peningkatan kualitas pendidikan
	2. Memeratakan bantuan pendidikan dan rehabilitasi bangunan sekolah	2. Finalisasi skema bantuan akses pendidikan tinggi dan vokasi (beasiswa)	2. Mendorong pengembangan pendidikan karakter dan budi pekerti luhur	2. Memantapkan sistem monitoring dan evaluasi pendidikan yang berkesinambungan	2. Memastikan keberlanjutan program peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan
2) Mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang baik dan memenuhi standar	**Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan**	**Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan**	**Pemantapan dan Evaluasi Pelayanan**	**Pengembangan Program Berbasis Teknologi dan Komunitas**	**Pelayanan Kesehatan yang Memadai dan Masyarakat yang Sehat**
	1. Menguatkan infrastruktur dan tenaga kesehatan di puskesmas dan	1. Operasionalisasi Dokter Keliling	1. Mengevaluasi efektivitas program kesehatan dan Dokter Keliling	1. Memperluas cakupan Dokter Keliling disertai pemanfaatan teknologi informasi	1. Memastikan keberlanjutan program kesehatan yang telah berjalan

Misi	Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	penyiapan sarana Dokter Keliling				
	2. Meningkatkan akses layanan kesehatan ibu dan anak serta pencegahan penyakit menular	2. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan spesialis dan ketersediaan peralatan medis di rumah sakit	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan preventif	2. Mengembangkan program kesehatan berbasis komunitas	2. Memperkuat kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi non–pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan
3) Mewujudkan Kenyamanan dalam berusaha dan berinvestasi melalui transformasi ekonomi yang inklusif	**Pemetaan Sektor Unggulan dan Potensi Lokal**	**Pengembangan Destinasi dan Daya Saing Ekonomi**	**Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Ekonomi**	**Diversifikasi Ekonomi dan Pemetaan Jaringan**	**Pemantapan Fondasi Ekonomi Mandiri Penunjang Kesejahteraan**
	1. Memetakan kebutuhan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor unggulan daerah (pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata)	1. Memperluas kerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk penyediaan magang dan penyerapan tenaga kerja lokal	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja regional	1. Memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka penyaluran tenaga kerja	1. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kondusif
	2. Mengidentifikasi dan membuat peta jalan potensi daya tarik wisata konservasi	2. Membangun dan menyiapkan kawasan strategis ekowisata berbasis biodiversitas	2. Finalisasi operasionalisasi dan promosi kawasan strategis ekowisata berbasis biodiversitas	2. Mendorong promosi kawasan strategis ekowisata berbasis biodiversitas	2. Memantapkan *branding* ekowisata berbasis biodiversitas di Kabupaten Katingan
	3. Memetakan kebutuhan aplikasi teknologi dan inovasi	3. Mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang pertanian,	3. Mendorong praktik pertanian, kehutanan, dan perikanan berbasis	3. Memperkuat rantai pasok dan jaringan pemasaran produk	3. Memantapkan fondasi kemandirian pangan dan

Misi	Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	yang berkelanjutan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penunjang produktivitas dan nilai tambah	kehutanan, dan perikanan	teknologi tepat guna yang berkelanjutan	pertanian, kehutanan, dan perikanan	meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha kehutanan.
	4. Menyederhanakan perizinan dan memberikan insentif bagi investasi di sektor–sektor prioritas	4. Meningkatkan promosi investasi dan memfasilitasi pertemuan antara investor dan pelaku usaha lokal	4. Mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan investasi untuk menarik investasi yang berkualitas dan berkelanjutan	4. Memfasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM dan *start–up*	4. Menciptakan iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi lokal
	5. Mengembangkan infrastruktur dasar perdesaan (jalan, listrik, air bersih) guna mendukung aktivitas ekonomi desa	5. Mendorong revitalisasi BUMDes dan meningkatkan kapasitas kelembagaannya sebagai penggerak ekonomi lokal	5. Mendukung pemetaan produk unggulan desa, pemetaan jaringan pasar dan kemitraan, dan pembuatan peta jalan *Village Carbon Partnership*	5. Memperkuat kerja sama desa dan kemitraan karbon desa	5. Meningkatkan kemandirian desa melalui skema kemitraan dan pelatihan
4) Mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan dan membahagiakan	**Pembenahan Kelembagaan dan Sistem Pelayanan**	**Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pencegahan KKN**	**Pemantapan Sistem dan Akuntabilitas**	**Inovasi Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat**	**Keberlanjutan Tata Kelola yang Baik dalam Masyarakat yang Rukun, Berbudaya, dan Damai**
	1. Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas OPD dan menyusun rencana	1. Melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN dan	1. Melakukan evaluasi efektivitas program peningkatan kapasitas ASN dan kinerja OPD,	1. Mengembangkan sistem merit dalam promosi dan	1. Memastikan keberlanjutan program peningkatan kapasitas

Misi	Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pengembangan kompetensi ASN	mengevaluasi kinerja OPD	melakukan penataan organisasi jika diperlukan	pengembangan karier ASN	ASN dan tata kelola pemerintahan yang baik
	2. Mengidentifikasi SPM dan mengevaluasi pelayanan publik eksisting	2. Mengimplementasikan sistem informasi pelayanan publik secara bertahap dan mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat	2. Mengevaluasi survei kepuasan masyarakat sebagai dasar perbaikan	2. Mengembangkan pelayanan publik yang partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan evaluasi pelayanan	2. Memastikan keberlanjutan ruang inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan
	3. Memperkuat kontrol internal dan pengawasan terhadap praktik KKN di tingkat ASN dan masyarakat	3. Mengoptimalkan peran APIP dan menegaskan pemberantasan KKN	3. Menerapkan sistem pengaduan yang efektif dan menguatkan implementasi kode etik ASN	3. Memperkuat peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan dan pencegahan KKN	3. Memperkuat budaya anti–korupsi di seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat
	4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah dan menguatkan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan hasil efisiensi	4. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui publikasi rutin informasi anggaran dan laporan keuangan	4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui audit kinerja dan kepatuhan	4. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat	4. Memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan
	5. Melakukan inventarisasi infrastruktur TI dan	5. Mengembangkan dan memantapkan aplikasi eksisting untuk	5. Mengintegrasikan berbagai sistem informasi pemerintahan	5. Memanfaatkan data dan informasi terintegrasi untuk	5. Memastikan keberlanjutan dan pengembangan sistem

Misi	Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	menyusun rencana strategis pengembangan TI pemerintahan	pelayanan publik satu pintu	ke dalam aplikasi pelayanan satu pintu untuk efisiensi dan efektivitas	pengambilan keputusan yang transparan (*e–government*)	TI pemerintahan yang terintegrasi dan aman
5) Mewujudkan suasana kehidupan yang rukun, aman, damai, dan sejahtera	**Penguatan Forum Komunikasi dan Koordinasi**	**Peningkatan Sinergi dan Kewaspadaan Dini**	**Pemantapan Stabilitas dan Pengendalian Harga**	**Penguatan Kapasitas Kepemimpinan dan Resolusi Konflik**	**Kondusivitas dan Stabilitas Ekonomi Masyarakat Katingan yang Rukun, Berbudaya, dan Damai**
	1. Memperkuat forum–forum komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah	1. Meningkatkan sinergi antar aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan mengatasi potensi konflik sosial serta mengembangkan sistem kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban	1. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas forum komunikasi dan koordinasi, memperkuat peran serta masyarakat sipil dalam menjaga keamanan lingkungan	1. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan daerah dalam memfasilitasi dialog dan resolusi konflik sosial secara konstruktif	1. Memastikan keberlanjutan sinergi antar pihak dalam menjaga kondusivitas daerah, memperkuat program-program pencegahan potensi konflik berbasis masyarakat
	2. Membentuk tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang efektif, melakukan pemetaan potensi inflasi dan menyusun rencana aksi	2. Melaksanakan operasi pasar secara berkala untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat kerja sama	2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan inflasi daerah, menyusun rekomendasi kebijakan	2. Mendorong diversifikasi sumber pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu, memperkuat sistem	2. Memastikan keberlanjutan upaya pengendalian inflasi melalui kebijakan yang konsisten dan kerja sama antar sektor

Misi	Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pengendalian harga kebutuhan pokok	dengan distributor dan produsen lokal.	untuk pengendalian harga	logistik dan distribusi pangan	
6) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius dan harmoni	**Inventarisasi dan Penguatan Fondasi Ketahanan**	**Implementasi Program Prioritas dan Peningkatan Kesadaran**	**Pemantapan Sistem dan Pengembangan Kapasitas**	**Inovasi dan Penguatan Sinergi**	**Keberlanjutan Ketahanan dan Keseimbangan Ekosistem**
	1. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi kekayaan budaya, nilai, dan tradisi masyarakat lokal, memperkuat peran lembaga adat dan tokoh budaya	1. Melaksanakan program pelestarian dan pengembangan budaya lokal melalui festival budaya, dukungan sanggar seni, dan revitalisasi situs budaya. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai–nilai budaya	1. Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang memasukkan unsur budaya daerah dan meningkatkan kapasitas pelaku seni dan budaya	1. Mendorong kerja sama antar daerah dalam pengembangan budaya dan mendorong inovasi dalam pelestarian dan promosi budaya melalui pemanfaatan teknologi	1. Memastikan keberlanjutan program pelestarian dan pengembangan budaya sebagai identitas daerah dan daya tarik wisata
	2. Melakukan pemetaan data dan analisis kebutuhan pembangunan anak, keluarga, dan isu kesetaraan gender, memperkuat kapasitas lembaga layanan terkait	2. Melaksanakan program peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak dan keluarga, mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan	2. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam penanganan isu anak, keluarga, dan kesetaraan gender, meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dan fasilitator	2. Mendorong inovasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat, memperkuat sinergi dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha	2. Memastikan keberlanjutan program peningkatan kualitas hidup anak, keluarga, dan pencapaian kesetaraan gender
	3. Memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum	3. Melaksanakan program rehabilitasi lahan kritis dan	3. Memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan dan	3. Mendorong implementasi ekonomi sirkular dan praktik	3. Mewujudkan tata kelola perlindungan lingkungan hidup yang

Misi	Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lingkungan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan	pengendalian pencemaran, mendorong praktik pengelolaan sampah yang baik di tingkat rumah tangga	mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam perlindungan lingkungan	bisnis hijau serta mengembangkan skema insentif bagi pelestarian lingkungan	efektif dan partisipatif untuk keberlanjutan ekosistem
	4. Melakukan inventarisasi kondisi dan potensi sumber daya air, menyusun rencana pengelolaan sumber daya air terpadu	4. Memperbaiki dan memelihara infrastruktur sumber daya air yang ada dan mengembangkan sistem informasi sumber daya air	4. Mengembangkan sistem pengelolaan air baku dan irigasi yang efisien serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	4. Memperkuat kelembagaan pengelolaan sumber daya air	4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor dan menjaga keseimbangan ekosistem
	5. Memperluas cakupan program bantuan sosial tetap sasaran	5. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat penerima bantuan sosial dalam rangka kemandirian ekonomi	5. Mengevaluasi dampak program perlindungan sosial terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	5. Menguatkan peran organisasi masyarakat adat dan sipil	5. Memastikan keberlanjutan program perlindungan sosial dan memperkuat koordinasi antarsektor
	6. Memperbaiki sistem pendataan terpadu penerima manfaat	6. Menguatkan sinergi antarprogram perlindungan sosial	6. Mengembangkan rencana aksi daerah untuk penurunan emisi gas rumah kaca (RAD–GRK) dan rencana	6. Menguatkan kolaborasi dan dialog lintas agama dalam memantapkan kohesi sosial	6. Mewujudkan pembangunan rendah karbon dan meningkatkan ketahanan daerah

Misi	Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7. Melakukan kajian potensi emisi karbon dan kerentanan terhadap perubahan iklim di wilayah kabupaten	7. Memulai program mitigasi non–struktural dan adaptasi perubahan iklim skala kecil, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan pengelolaan air berkelanjutan di tingkat masyarakat	adaptasi perubahan iklim (RAD–API)	7. Mendorong investasi pada energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan serta mengintegrasikan aspek ketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan sektoral	terhadap dampak perubahan iklim
7) Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang baik dan mantap	**Pemetaan Kebutuhan dan Prioritas Infrastruktur**	**Pembangunan Infrastruktur Prioritas dan Pengembangan Konsep Pengolahan Sampah**	**Perluasan Jaringan Infrastruktur dan Implementasi Pengolahan Sampah**	**Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Infrastruktur serta Pengurangan Sampah**	**Keberlanjutan Infrastruktur dan Permukiman yang Layak Huni**
	1. Melakukan studi kelayakan dan inventarisasi jaringan jalan dan jembatan, serta melakukan kajian kebutuhan infrastruktur jalan, air bersih, dan sanitasi di kawasan strategis	1. Memulai pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, serta memulai pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah	1. Melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur konektivitas pada wilayah yang belum terjangkau, serta melanjutkan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar di kawasan prioritas	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas yang sudah dibangun, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan infrastruktur dasar dan permukiman.	1. Memastikan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur konektivitas melalui skema pembiayaan yang berkelanjutan, serta memastikan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur permukiman dengan pendekatan komunitas

Misi	Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Mengidentifikasi ruas jalan dan jembatan yang perlu ditingkatkan dan dibangun, serta melakukan analisis sistem pengelolaan sampah eksisting dan kebutuhan pengembangannya	2. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, serta menyusun rencana strategis perubahan paradigma pengelolaan sampah berbasis 3R	2. Mengembangkan sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi antarmoda, serta mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah terpadu di kawasan permukiman	2. Memperluas jangkauan konektivitas ke wilayah terpencil dan kawasan strategis lainnya, serta mengoptimalkan operasional fasilitas pengolahan sampah yang telah dibangun	2. Mengevaluasi dampak peningkatan konektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, serta mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
	3. Menyusun rencana induk pengembangan konektivitas antarwilayah dan kawasan prioritas, serta melakukan pemetaan kebutuhan perumahan yang layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	3. Melakukan pengawasan kualitas pembangunan serta pengendalian terhadap waktu dan biaya, serta memfasilitasi pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar dan lingkungan sehat	3. Memulai kajian potensi pembangunan terminal dan pelabuhan pengumpul, serta mendorong pembangunan rumah dengan konsep bangunan hijau dan hemat energi	3. Memanfaatkan teknologi informasi pemerintahan dalam pengelolaan infrastruktur konektivitas, serta mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kawasan permukiman berbasis TIK	3. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur konektivitas untuk mendukung pelayanan publik dan distribusi logistik, serta mewujudkan permukiman yang layak huni, aman, dan tangguh terhadap bencana

3.2.2 Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029

3.2.2.1 Arah Kebijakan Umum dalam RPJPD Kabupaten Katingan 2025–2045

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari misi pembangunan daerah yang berfungsi sebagai panduan strategis dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan. Arah kebijakan disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, setiap misi dijabarkan ke dalam arah kebijakan yang lebih operasional dan terukur, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah. Berikut ini disajikan keterkaitan antara misi pembangunan daerah dengan arah kebijakan yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas.

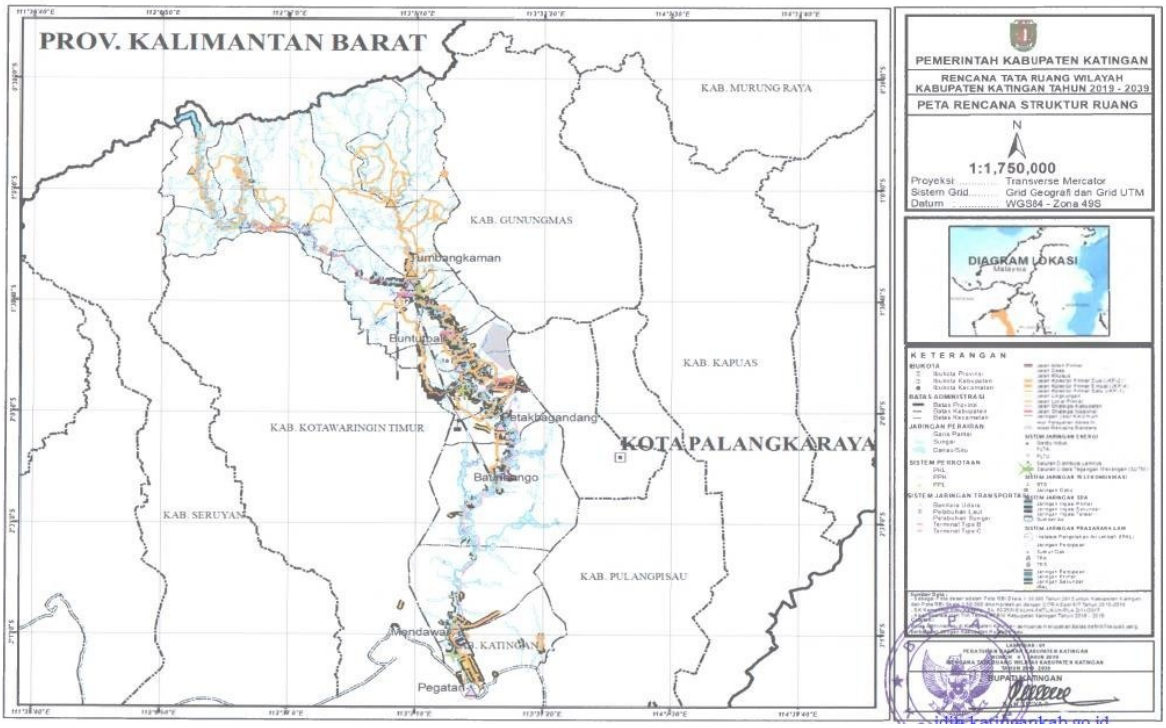
Tabel 3-9 Misi dan Arah Kebijakan RPJPD Tahap 1 Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

No.	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing	1. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan	
2.	Mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang baik dan memenuhi standar	2. Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan	
3.	Mewujudkan kenyamanan dalam berusaha dan berinvestasi melalui transformasi ekonomi yang inklusif	1. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja	
		2. Pengembangan kawasan strategis pariwisata	
		3. Optimalisasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pariwisata	
		4. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha	
		5. Peningkatan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa	
4.	Mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan dan membahagiakan	1. Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi dan peningkatan kolaborasi	
5.	Mewujudkan suasana kehidupan yang rukun, aman, damai, dan sejahtera	1. Peningkatan kolaborasi dalam mendukung kondusivitas daerah	
		2. Pengendalian inflasi	
6.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius dan harmoni	1. Perlindungan budaya, nilai dan tradisi budaya Masyarakat	
		2. Peningkatan pelayanan akses dasar pembangunan anak, keluarga dan kesetaraan gender	

No.	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Penyiapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	
		4. Peningkatan tata kelola perlindungan lingkungan hidup	
		5. Peningkatan infrastruktur sumber daya air	
		6. Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat terhadap perlindungan sosial	
7.	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang baik dan mantap	1. Peningkatan konektivitas inter- dan intrakabupaten	
		2. Pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi berupa infrastruktur jalan, transportasi, air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya yang menunjang keunggulan wilayah.	
		3. Perubahan paradigma pengolahan sampah	
		4. Pembangunan perumahan dan permukiman yang terjangkau	

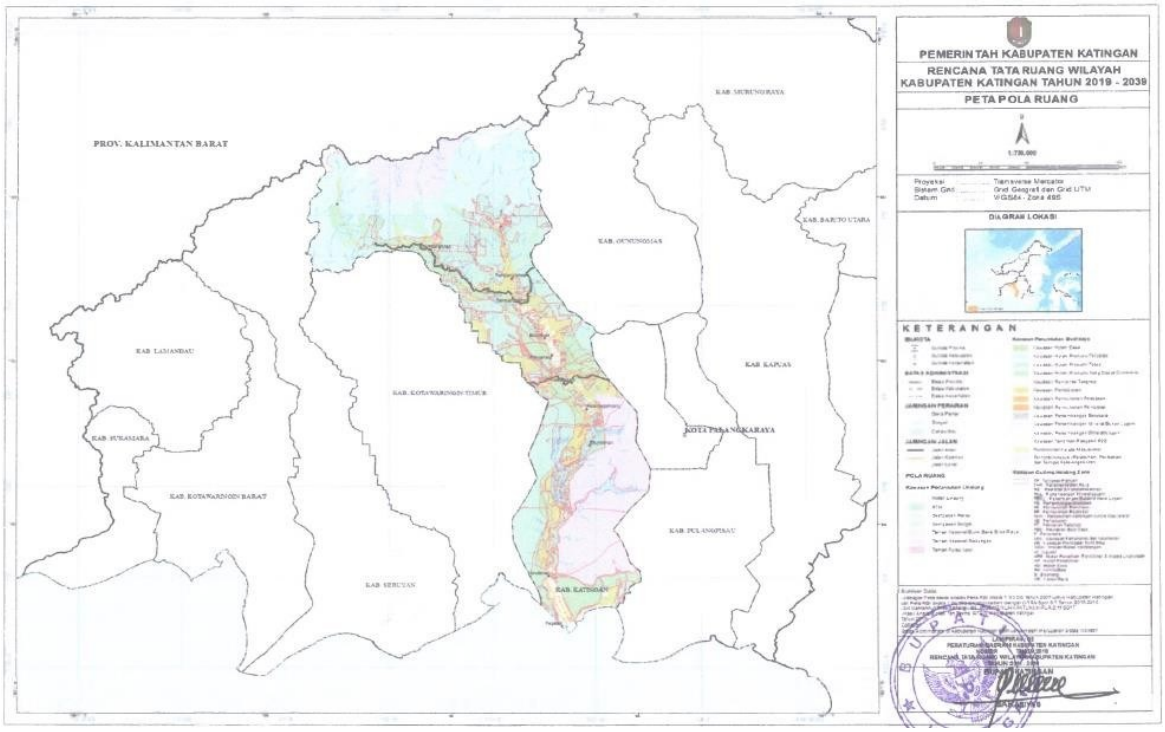
3.2.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMD Tahun 2025–2029

Ruang wilayah Kabupaten Katingan yang meliputi darat, laut dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktivitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan ruang wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.



Gambar 3-7 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Katingan Tahun 2019–2039

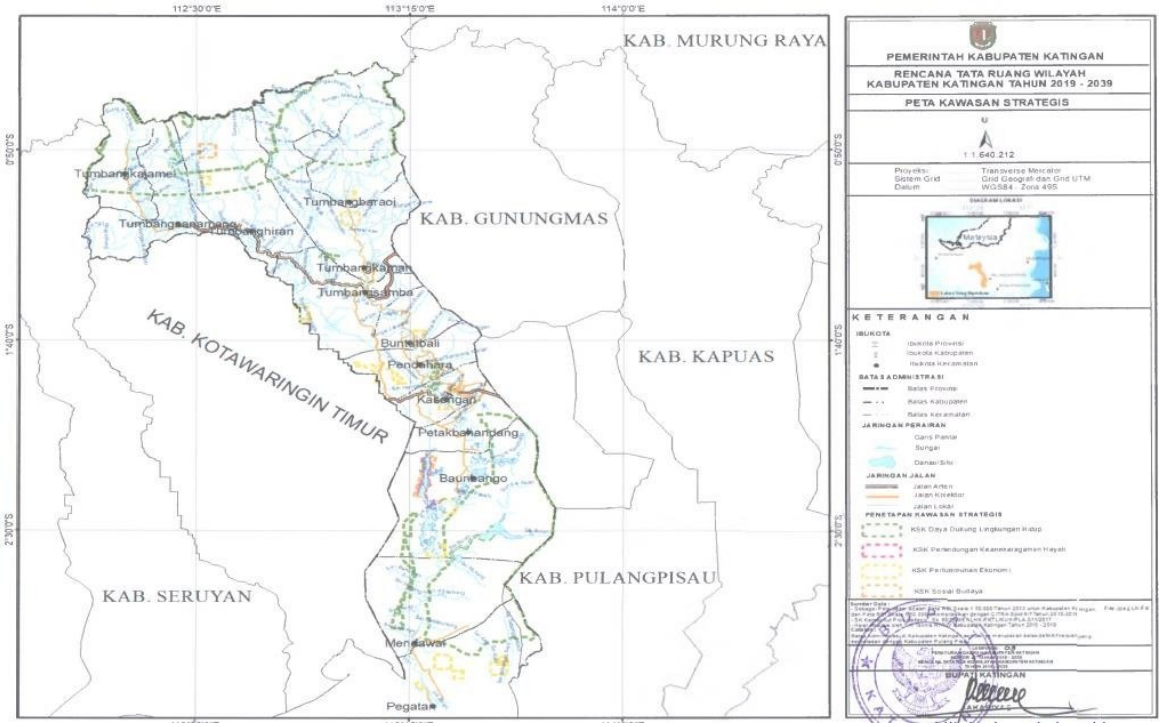
Berdasarkan RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019–2039, sistem perkotaan meliputi: Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kota Kasongan; Pusat Pelayanan Kawasan (PKL) di Kota Tumbang Samba, Kota Pegatan, Kota Tumbang Senamang, Kota Tumbang Hiran, Kota Baun Bango, Kota Pendahara, dan Kota Petak Bahandang; dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) di Kota Mendawai, Kota Buntut Bali, Kota Tumbang Kaman, Kota Tumbang Baraoi, dan Kota Tumbang Kajamei.



Gambar 3-8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Katingan Tahun 2019–2039

Kawasan strategis di Kabupaten Katingan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan nasional, meliputi: a. kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan keanekaragaman hayati Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka dan Taman Nasional Sebangau; dan b. kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*). 2. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan provinsi, meliputi: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri dari kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet), kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Katingan Kuala, kawasan minapolitan, dan kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia; b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan Kalaru; c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri dari Kawasan Strategis DAS Terpadu, Taman Nasional Bukit Baka Buku Raya, Taman Nasional Sebangau, dan Tahura; dan d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi terdiri dari kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi kabupaten dan kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut kabupaten. 3. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan kabupaten, meliputi: a. kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi; b. kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya; c. kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek

lingkungan; dan d. kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.



Gambar 3-9 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Katingan Tahun 2019–2039

Berdasarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045, Kabupaten Katingan masuk dalam Klaster Palangka Raya (Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas). Pada klaster ini, kondisi demografi diproyeksikan seperti pada tabel di bawah.

Tabel 3-10 Proyeksi Demografi Klaster Palangka Raya Tahun 2025–2045

Proyeksi Klaster Palangka Raya	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki (ribu jiwa)	303,98	325,41	344,94	361,83	377,94	**393,95**
Perempuan (ribu jiwa)	285,03	311,53	336,98	360,54	383,89	**407,06**
Total (ribu jiwa)	589,01	636,94	681,92	722,37	761,83	**801,01**
Sex Ratio (%)	106,65	104,46	102,36	100,36	98,45	**96,78**
Komposisi Penduduk (%)						
0 - 14	26,71	25,59	25,01	24,51	24,23	**23,94**
15 - 64	69,02	69,22	68,50	67,57	66,44	**65,47**
65+	4,27	5,19	6,49	7,92	9,32	**10,59**
Dependency Ratio (%)	**44,89**	**44,46**	**45,98**	**48,00**	**50,50**	**52,75**

Sumber: RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2045

Tabel 3-11 Arah Kebijakan Kewilayahan Klaster Palangka Raya Tahun 2025–2045

Aspek	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat 2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor 3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya (termasuk tenaga kesehatan spesialis) serta afirmasi di daerah 3T. 4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi. 5. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 6. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi. 7. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global. 8. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif. 9. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment. 10. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau seluruh wilayah. 11. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.

Aspek	Arah Kebijakan
	12. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. 13. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 14. Menjaga aspek kuantitas penduduk dengan menjaga tingkat pertumbuhan penduduk pada taraf Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) 15. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 16. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. 17. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 18. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 19. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.
Transformasi Ekonomi	1. Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Tengah sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai super hub ekonomi

Aspek	Arah Kebijakan
	yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. 2. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan. 3. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi. 4. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani. 5. Pengembangan destinasi wisata potensial berkelanjutan dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti pengembangan ecotourism berbasis aset alam di Taman Nasional Sebangau. 6. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional. 7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling serta transisi school-to-work. 8. Pengembangan kawasan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan khususnya di PKN Palangkaraya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. 9. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 10. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. 11. Peningkatan produktivitas BUMD.

Aspek	Arah Kebijakan
	12. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. 13. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. 14. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 15. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 16. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke

Aspek	Arah Kebijakan
	seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.
Reformasi Tata Kelola	1. Penguatan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 4. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 8. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Aspek	Arah Kebijakan
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkotika/psikotropika dan pencurian. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 5. Penguatan integritas partai politik.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembagalembaga adat dan hak ulayat masyarakat. 3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi. 4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda. 5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya. 6. Pengembangan diversifikasi pangan. 7. Pengembangan pemanfaatan komoditas biofarmaka dan tanaman tropis. 8. Rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan bekas tambang serta penghambatan laju deforestasi. 9. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan

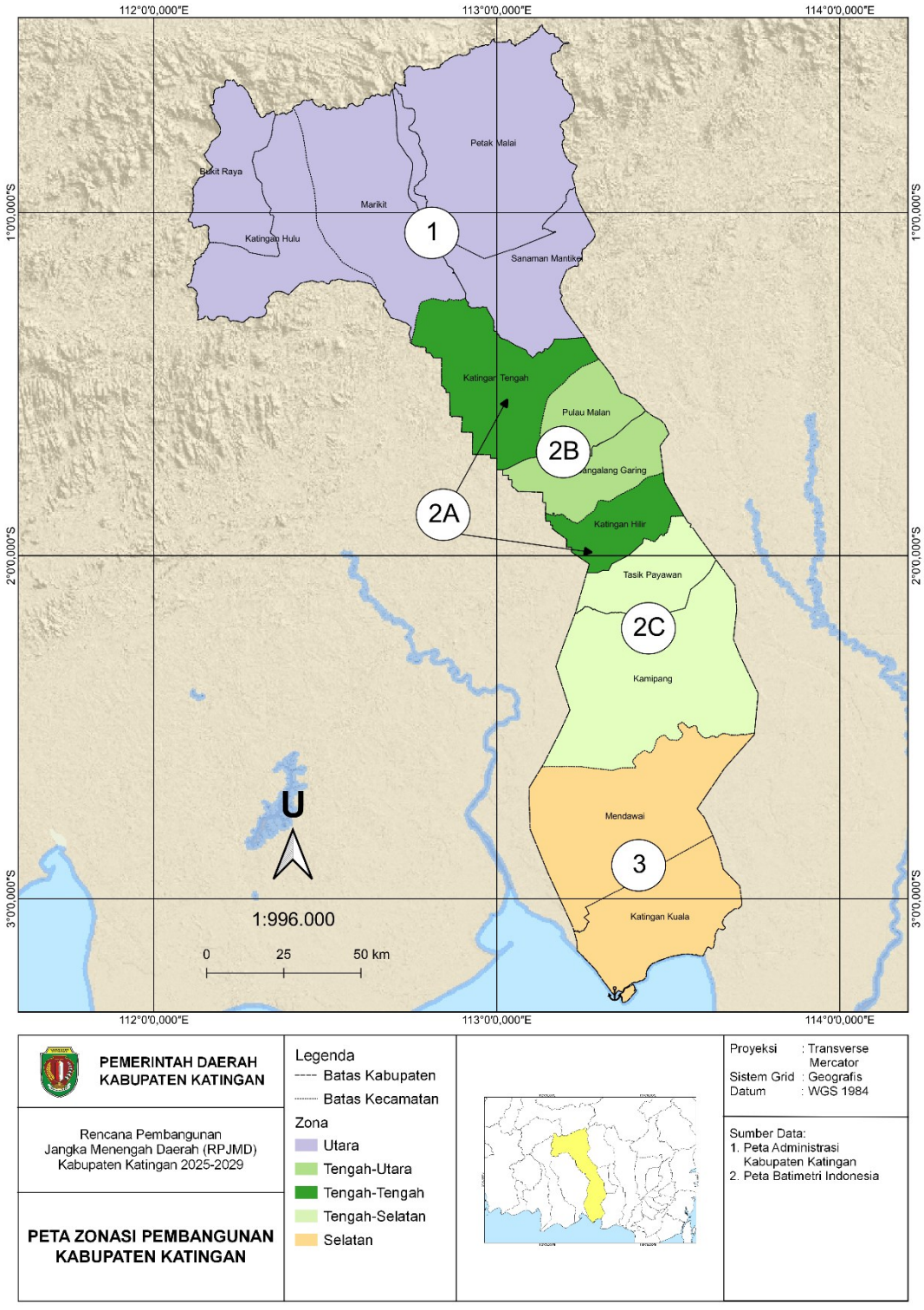
Aspek	Arah Kebijakan
	keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal. 10. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan, dll. 11. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana. 12. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim. 13. Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan. 14. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana. 15. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 16. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 17. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 18. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 19. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya. 20. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.

Aspek	Arah Kebijakan
	21. Pengembangan check dam sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan. 22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
Implementasi Transformasi	1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan. 2. Penuntasan RDTR kab/kota dan kawasan strategis. 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 6. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan sungai secara terpadu untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah. 7. Pengembangan bandara secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah. 8. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. 9. Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi. 10. Pengembangan transportasi umum perkotaan. 11. Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.

Aspek	Arah Kebijakan
	12. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 13. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. 14. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 15. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. 16. Penyediaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air. 17. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana. 18. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). 19. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman. 20. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik. 21. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Aspek	Arah Kebijakan
	22. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. 23. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi. 24. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 25. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota. 26. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. 27. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko. 28. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. 29. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

Guna mengoptimalkan potensi daerah sembari mengefisienkan alokasi anggaran pembangunan, maka diperlukan pengembangan yang tepat sasaran sehingga dibagi zona wilayah pembangunan di Kabupaten Katingan sebagai berikut:



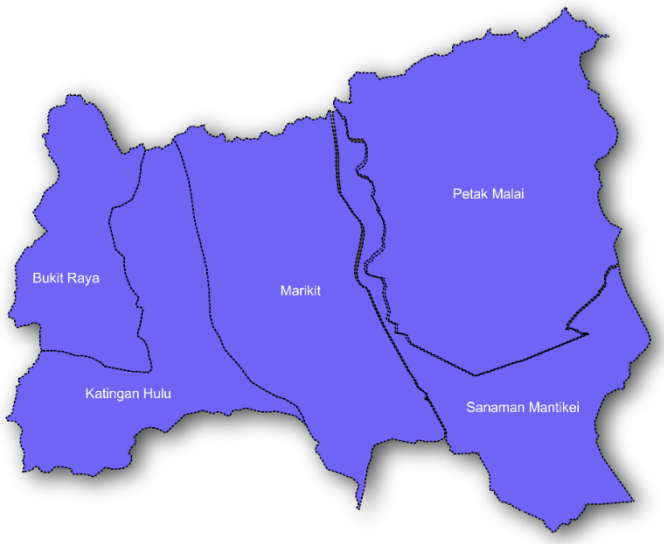
Gambar 3-10 Zonasi Pembangunan Kabupaten Katingan

Berdasarkan pembagian zona pada peta di atas, terdapat tiga zona utama di Kabupaten Katingan sebagai berikut:

1. **Zona Utara:** konservasi hutan dan hulu sungai yang fokus pada pelestarian lingkungan sebagai kawasan konservasi ekologis utama.

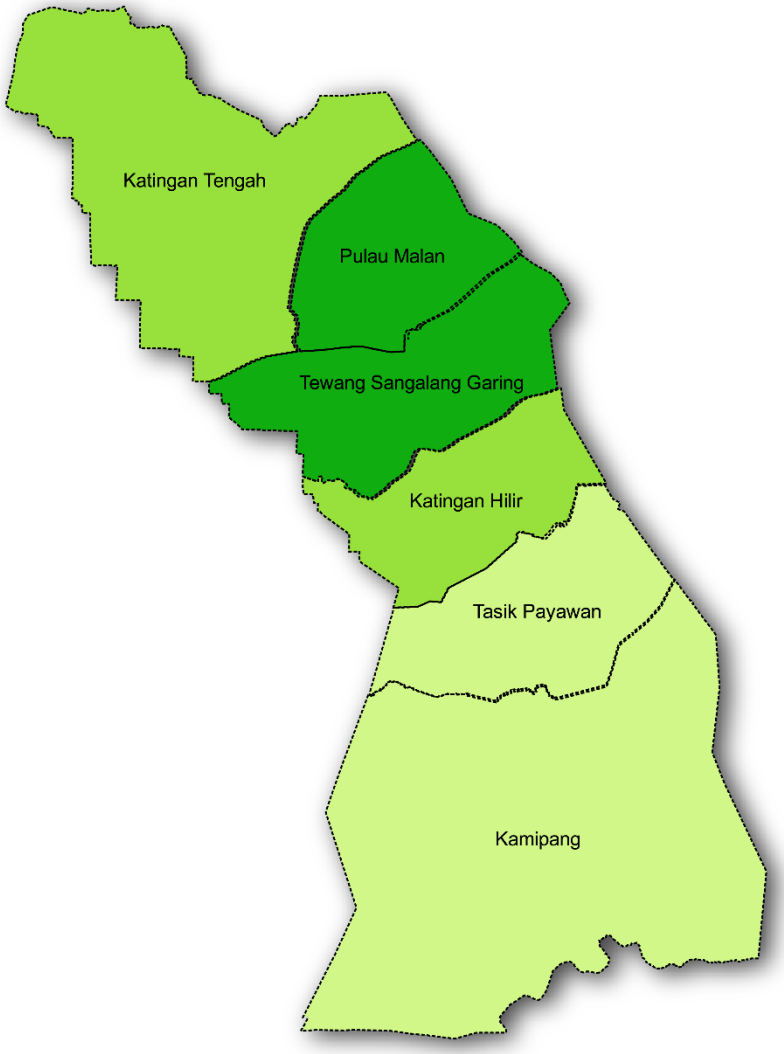
2. **Zona Tengah:** pusat ekonomi dan produksi berkelanjutan yang terbagi ke dalam 3 (tiga) sub–zona
    a. **Tengah–Utara:** perkebunan sawit dan durian berbasis keberlanjutan.
    b. **Tengah–Tengah (Kasongan):** pusat ekonomi utama, revitalisasi dermaga Kasongan sebagai sentra perikanan sekaligus *outlet* zona tengah, tambang di sisi barat dengan pengawasan ketat.
    c. **Tengah–Selatan:** pertanian dan perkebunan berwawasan budaya di sepanjang Sungai Katingan.
3. **Zona Selatan:** konservasi dan jasa lingkungan yang mencakup Taman Nasional Sebangau untuk fungsi konservasi, jasa lingkungan, disertai dengan pengembangan pertanian dan perkebunan yang lebih potensial dibanding zona utara serta pengembangan Pelabuhan Mendawai sebagai *outlet* regional dan sentra perikanan utama.

Adapun pendalaman setiap zona beserta strategi pembangunannya dielaborasikan sebagai berikut:



Gambar 3-11 Zona Utara Pembangunan Kabupaten Katingan

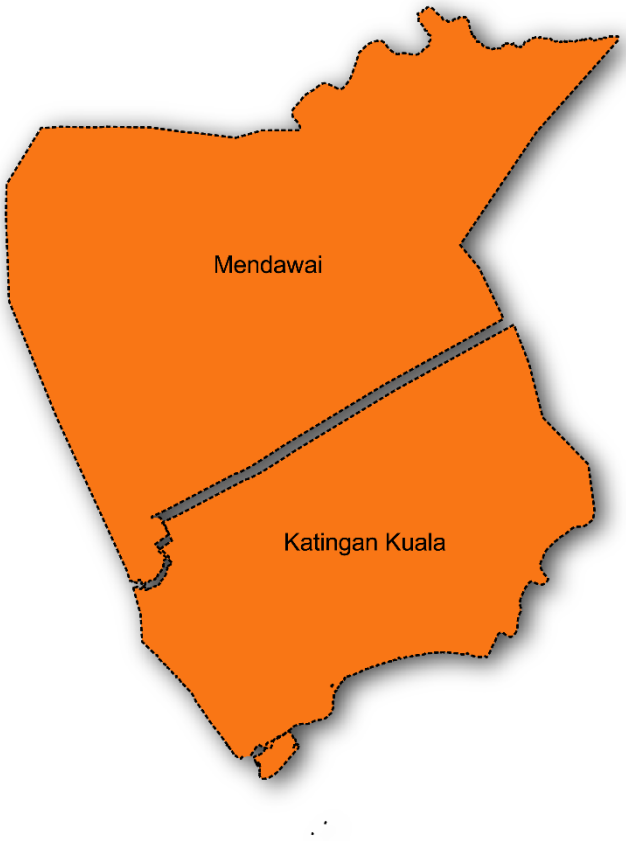
Zona Utara diarahkan pada pembangunan dengan mengakomodasi dua strategi kepala daerah, yakni Katingan Lestari dan Katingan Mandiri: Terkoneksi dan Terintegrasi. Pada strategi Katingan Lestari, dilaksanakan (1) Pembangunan kawasan *ecotourism* berbasis biodiversitas (Jalur geowisata Puncak Borneo – TIC Puncak Borneo), (2) *Borneo Carbon Hub*, dan (3) Konservasi wilayah hutan dan hulu sungai Katingan. Di sisi lain, strategi akan berfokus pada pembangunan koridor jalur Trans–Kalimantan dan terminal di wilayah utara Katingan.



Gambar 3-12 Zona Tengah Pembangunan Kabupaten Katingan

Zona Tengah–Utara mengadopsi strategi Katingan Bertani yang fokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dengan prinsip berkelanjutan sebagai salah satu penggerak ekonomi. Komoditas yang diprioritaskan di zona ini adalah sawit dan durian. Strategi kedua yang digunakan ialah Katingan Terbuka, Katingan Maju Bersama melalui pembangunan kawasan wisata *ecotourism* di ekosistem danau yang tersebar di Kecamatan Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing. Di sisi lain, **Zona Tengah–Tengah** juga menggunakan strategi serupa, namun diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan dorongan terhadap perekonomian lokal dengan mengembangkan lokasi wisata Kebun Raya Katingan dan Bukit Batu yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM lokal serta revitalisasi dermaga di Kasongan yang diperuntukkan untuk sentra perikanan. Tidak hanya itu, Katingan Lestari diterapkan melalui pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup, terutama di wilayah tambang yang berada di sisi barat zona tengah–Tengah.



Gambar 3-13 Zona Selatan Pembangunan Kabupaten Katingan

Zona Selatan fokus pada penerapan tiga strategi pembangunan. Pertama, Katingan Lestari akan diarahkan untuk (1) Pengembangan kawasan *ecotourism* di wilayah Taman Nasional Sebangau dan (2) Pelestarian wilayah koridor Sungai Katingan serta pemanfaatannya sebagai wilayah wisata yang dapat membantu perkembangan ekonomi di desa-desa sepanjang tepi sungai. Kedua, Katingan Mandiri: Terkoneksi dan Terintegrasi ditujukan pada (1) Pengembangan *rest area* dan dermaga wisata di desa-desa sepanjang tepi sungai dan (2) Pengembangan jalur alternatif ke kawasan Mendawai dan Katingan Kuala. Pembangunan jalur alternatif direncanakan melalui pembuatan ruas jalan yang menghubungkan bagian tengah zona selatan dengan bagian selatan zona selatan Kabupaten Katingan. Jalur ini akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendukung distribusi barang, serta mempermudah mobilitas masyarakat. Pemicu utamanya adalah rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pelabuhan di Pagatan dan Mendawai, yang memerlukan akses darat yang memadai agar operasional pelabuhan dapat optimal. Cakupan layanan pelabuhan ini tidak berada dalam jarak yang terlalu dekat dengan

pelabuhan berskala nasional lainnya, sehingga menjadikan Katingan sebagai lokasi yang ideal untuk mengembangkan pelabuhan nasional baru dan menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya di zona tengah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembangunan pelabuhan di wilayah selatan Katingan merupakan langkah strategis dan efektif untuk memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus dipersiapkan untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi yang semakin besar dan masif kedepannya. Pelabuhan akan menjadi simpul logistik yang mempercepat arus barang dan jasa, mendorong investasi, serta memperluas pasar bagi hasil pertanian, perikanan, dan komoditas lokal dengan jangkauan layan mencakup zona tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Integrasi antara pelabuhan dan jalur jalan darat akan memungkinkan zona selatan Kabupaten Katingan berkembang menjadi pusat ekonomi baru yang mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Katingan serta menunjang kapasitas ekonomi zona tengah provinsi.

Ditinjau dari peruntukan dan posisi strategisnya, pengembangan Pelabuhan Pegatan Mendawai diharapkan dapat menjadi pelabuhan yang memiliki pelayanan hingga lintas provinsi di skala nasional. Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sangat esensial, tidak hanya pada pelabuhan, tetapi juga konektivitas jalur darat yang menghubungkan bagian selatan zona selatan dengan bagian tengah zona selatan Kabupaten Katingan. Diharapkan melalui skema tersebut, bentang alam yang cukup menantang dan membutuhkan infrastruktur pembangunan yang lengkap dapat terpenuhi, mewujudkan keterhubungan antarwilayah di Kalimantan yang juga merupakan cita-cita nasional.

Selanjutnya, Katingan Bertani diwujudkan melalui pengembangan potensi pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah Mendawai dan Katingan Kuala. Adapun strategi tersebut akan diintegrasikan dengan Katingan Terbuka, Katingan Maju Bersama untuk mewujudkan sektor perikanan yang tangguh di skala regional. Selaras dengan terbangunnya infrastruktur penghubung antarzona untuk memfasilitasi Pelabuhan Pegatan Mendawai sebagai *outlet* skala regional, maka diharapkan olahan tangkapan ikan dari Zona Selatan dapat terdistribusi ke daerah lain dengan efektif, mendukung diversifikasi ekonomi lokal.

Berdasarkan rencana pengembangan regional Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan memiliki arah pengembangan koridor infrastruktur yang disiapkan untuk transformasi ekonomi:

- Pengembangan infrastruktur konektivitas di Kalimantan Tengah.

- Peningkatan kapasitas pelabuhan sebagai daerah *outlet*: Pelabuhan Kasongan dan Pelabuhan Pegatan Mendawai.
- Mempermudah arus pergerakan logistik dan manusia.

Ketiga poin di atas diwujudkan melalui pengembangan Pelabuhan Mendawai sebagai pelabuhan regional. Selain itu, pengembangan pelabuhan–pelabuhan lain sebagai *hub* untuk menunjang konektivitas dan akselerasi perekonomian di Kabupaten Katingan. Pelabuhan–pelabuhan *hub* tersebut, yaitu:

- Pelabuhan Tumbang Samba. Menghubungkan dan sebagai pintu masuk kawasan hulu kawasan Katingan utara,
- Pelabuhan Kereng Pakahi. Pelabuhan ini menghubungkan dan sebagai pintu masuk kawasan tengah kawasan Katingan Tengah-Selatan, yang memiliki potensi untuk mendukung distribusi hasil pertanian, perikanan, dan logistik lainnya.

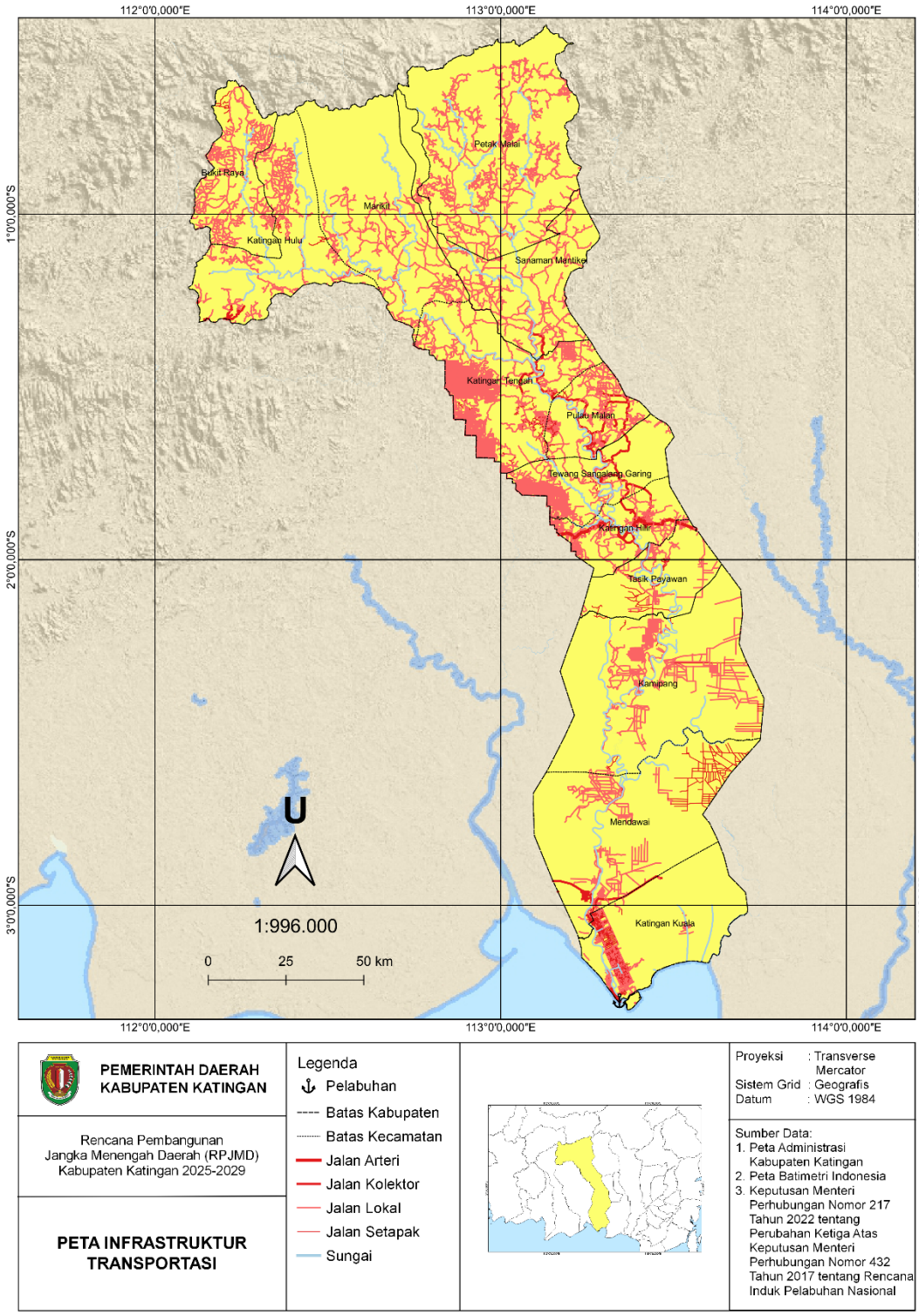


Gambar 3-14 Arah Pengembangan Koridor Infrastruktur Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 217 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Ditinjau dari prioritas regional Kabupaten Katingan, arah pengembangan koridor infrastruktur mempertimbangkan konektivitas yang mana konektivitas wilayah selatan ke

tengah memiliki hambatan berupa tidak tersambungnya akses jalan di beberapa lokasi. Ditambah dengan adanya kebutuhan peningkatan konektivitas wilayah selatan ke tengah yang diharapkan dapat mendukung transportasi barang dari Pelabuhan Pegatan Mendawai serta transfer *skilled labors* dari selatan ke berbagai titik lain di Kabupaten Katingan. Tidak hanya itu, di bagian utara dicanangkan pembangunan jalur Trans–Kalimantan untuk membuka akses wilayah potensial.



Gambar 3-15 Peta Konektivitas Transportasi Kabupaten Katingan

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Tahun 2025–2029

Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Katingan memuat pengejawantahan dari aspek strategi penahapan pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas–prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan serta mengakomodasi

arah kebijakan jangka panjang dan arah kebijakan kewilayahan dalam RTRW maupun zonasi tematik. Kesinambungan antara strategi dan arah kebijakan kemudian memungkinkan adanya perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan menjadi sarana dalam melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan, baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengelolaan administrasi, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan yang dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 selaras dengan arahan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045 sekaligus sejalan dengan strategi prioritas kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan. Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan tercantum dalam tabel di bawah.

Tabel 3-12 Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No.	Misi	Tujuan		Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Andalan Kepala Daerah
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing	T1	Mewujudkan manusia yang berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan	Katingan Cerdas
					Pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik tidak mampu	
					Penerapan pengajaran mengenai budaya dan bahasa lokal dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah	
					Penerapan pembelajaran teknologi informasi di sekolah	
					Penerapan pendidikan yang inklusif	
				Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik	
					Pemerataan tenaga pendidik	
2	Mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang baik dan memenuhi standar	T1	Mewujudkan manusia yang berkualitas	Peningkatan pelayanan kesehatan	Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan	Katingan Sigap Medika
					Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	
					Peningkatan jangkauan pemeriksaan dan penanganan penyakit epidemi	
					Peningkatan pencegahan dan pelayanan pengobatan penyakit tidak menular	
					Peningkatan pelayanan kesehatan mental	
					Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	
				Peningkatan kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan	Pemerataan sebaran tenaga kesehatan	
					Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	
3	Mewujudkan kenyamanan dalam berusaha dan berinvestasi melalui	T3	Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi daerah yang	Peningkatan Iklim Investasi dan Daya Saing Ekonomi Lokal	Penyederhanaan dan Digitalisasi Perizinan Usaha	– Katingan Terbuka, Katingan Maju Bersama – UMKM Maju,
					Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	
					Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Lokal	
					Fasilitasi Akses Permodalan dan Pemasaran	

No.	Misi		Tujuan	Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Andalan Kepala Daerah
	transformasi ekonomi yang inklusif		produktif dan berkelanjutan		Pengembangan Sektor Unggulan Berkelanjutan	Katingan Berdikari – Katingan Lestari – Katingan Bertani – Bersama Katingan, Desa Berdaya
				Peningkatan Diversifikasi Ekonomi dan Pengembangan Ekosistem Inovasi	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas dan Kearifan Lokal	
					Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas	
					Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Ekowisata	
					Penguatan Rantai Pasok dan Klaster Industri Lokal	
4	Mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan dan membahagiakan	T4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang berintergitas, berdampak, responsif dan aksesibel	Peningkatan kualitas layanan publik	Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Berbagai Layanan Publik	Katingan Melayani Masyarakat
					Peningkatan Program Jemput Bola dalam Pelayanan Publik	
					Penguatan Pengawasan Kawasan Zona Integritas dan Anti–Gratifikasi	
				Pengoptimalisasian Akses Informasi untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengintegrasian Teknologi Digital dalam Pelaporan Transparansi Pengelolaan Pemerintah	
					Penguatan Akses Informasi Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	
					Penguatan Pengawasan Anggaran Pengelolaan Pemerintah	

No.	Misi		Tujuan	Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Andalan Kepala Daerah
				Peningkatan Kualitas Regulasi dan Hukum	Pengoptimalisasian Peran Masyarakat dalam Proses Perumusan Regulasi	
					Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Mensosialisasikan Kebijakan dan Regulasi	
					Penguatan Pengawasan Penerapan Kebijakan dan Regulasi	
					Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat	
5	Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Rukun, Aman, Damai, dan Sejahtera	T5	Menjaga kondusivitas dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif	Peningkatan kepercayaan publik: dialog politik berbasis forum konsultasi publik rutin antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat	Katingan Melayani Masyarakat
					Peningkatan partisipasi publik: keterlibatan perempuan, pemuda, dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan politik	
					Pemanfaatan platform digital satu pintu penampung aspirasi masyarakat	
				Penguatan sistem keamanan berbasis komunitas dan penegakan hukum yang berkeadilan	Pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan pendekatan budaya (*customary approach*) dalam sengketa adat	
					Promosi kampanye penegakan demokrasi, anti–kekerasan, dan anti–narkoba melalui kolaborasi dengan sekolah, pesantren, dan organisasi pemuda	
					Penguatan siskamling berbasis kearifan lokal dan pengintegrasian komunikasi posko pengaduan dengan Pol PP dan Satpol PP	

No.	Misi	Tujuan		Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Andalan Kepala Daerah
				Pembangunan kohesi sosial melalui pendekatan multikultural	Pengadaan festival dan *community gathering* rutin lintas–agama tingkat kecamatan	
6	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius dan harmoni	T5	Menjaga kondusivitas dalam kehidupan masyarakat	Penguatan nilai–nilai religius moderat dan toleran	Peningkatan kolaborasi lembaga keagamaan untuk promosi nilai moderasi melalui dakwah, dialog antaragama, dan kegiatan kerukunan lintas agama	Katinga Madani
					Pengintegrasian pendidikan karakter religius berbasis kearifan lokal dalam kurikulum sekolah dan komunitas	
					Pembangunan *branding* yang berkelanjutan pada *platform* digital untuk kampanye toleransi dan pencegahan radikalisme	
				Pelestarian tradisi dan budaya lokal	Pendokumentasian dan promosi budaya Dayak Katingan melalui festival, seni pertunjukan, dan media kreatif secara konsisten	
					Pemberdayaan lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam resolusi konflik dan penguatan kohesi sosial	
				Penguatan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender	Peningkatkan akses layanan konseling keluarga dan parenting berbasis komunitas	
					Penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan melalui pelatihan kepemimpinan dan ekonomi kreatif	

No.	Misi	Tujuan		Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Andalan Kepala Daerah
					Perluasan kampanye penghapusan kekerasan domestik dan diskriminasi gender melalui kerja sama dengan organisasi perempuan dan pemuda (fokus pendekatan pada gen millenial dan gen z)	
		T6	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana	Pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis *Heart of Borneo*	Penguatan patroli dan pemantauan partisipatif untuk pencegahan deforestasi dan perdagangan satwa liar.	– Katingan Lestari – Bersama Katingan Desa Berdaya
					Pengembangan konomi hijau (ekowisata, agroforestri, dan sebagainya) yang melibatkan masyarakat adat dan desa.	
					Restorasi ekosistem gambut dan daerah aliran sungai (DAS) melalui perencanaan peta jalan akselerasi restorasi.	
				Peningkatan ketangguhan bencana	Pelatihan relawan siaga bencana di setiap desa dengan pendekatan budaya lokal.	
					Pemetaan zona rawan bencana dan menyusun rencana kontinjensi berbasis partisipasi masyarakat.	
				Pemerataan edukasi lingkungan dan adaptasi iklim	Pengintegrasian pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah dan kegiatan pemuda.	
					Kampanye pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan pengelolaan limbah mandiri di tingkat desa.	
					Perumusan rencana pertanian *climate–smart agriculture*.	
7	Mewujudkan penyediaan	T7	Mewujudkan penyediaan		Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten dan desa	

No.	Misi		Tujuan	Strategi Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Andalan Kepala Daerah
	infrastruktur yang baik dan mantap		infrastruktur yang merata, berkualitas dan terintegrasi	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarpusat pertumbuhan	Pengembangan jalur baru Trans–Kalimantan di koridor utara	Katingan Mandiri: Terkoneksi dan Terintegrasi
					Pembangunan terminal utama dan simpul transportasi antarwilayah	
					Peningkatan kualitas jalan	
					Peningkatan kepatuhan dan keselamatan lalu lintas	
				Penguatan sistem infrastruktur permukiman dan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas)	Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan permukiman	
					Penyediaan dan peningkatan kualitas PSU	
					Percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh	
					Penataan bangunan dan lingkungan secara terpadu	
					Penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau	
				Pemerataan akses terhadap infrastruktur layanan dasar	Perluasan cakupan layanan air minum perpipaan	
					Peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang aman	
					Perluasan layanan telekomunikasi	
				Penguatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi	Peningkatan fasilitas pengumpulan dan pengolahan sampah	
					Pengurangan timbulan sampah	
					Perluasan cakupan layanan pengelolaan sampah rumah tangga	

3.2.3 Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025–2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, diperlukan penjabaran program-program prioritas yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Program prioritas daerah disusun sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menjawab permasalahan yang ada, tetapi juga mendorong kemajuan pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Program-program tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan partisipatif yang mempertimbangkan potensi unggulan daerah, kondisi geografis dan sosial budaya, serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dengan demikian, setiap program prioritas dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029.

Tabel 3-13 Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
2025-2029 - Terwujudnya Kabupaten Katingan yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berakhlak Mulia - Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing - Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar - Mewujudkan Kenyamanan Dalam Berusaha dan Berinvestasi Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif - Mewujudkan Pelayanan Publik yang Memuaskan dan Membahagiakan - Mewujudkan Dalam Suasana Kehidupan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		
		Terwujudnya Pendidikan Berkualitas pada Semua Jenjang Dasar		Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
yang Rukun, Aman, Damai dan Sejahtera - Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Harmoni - Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Baik dan Mantap				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Skor Kemampuan Literasi SMP (Poin)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Skor Kemampuan Numerasi SMP (Poin)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Skor Kemampuan Numerasi SD (Poin)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Skor Kemampuan Literasi SD (Poin)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas		Umur Harapan Hidup (Tahun)		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Penemuan Kasus TBC (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Mendorong Pertumbuhan Sektor Ekonomi Daerah yang Produktif dan Berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
		Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB		Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Terhadap Pertanian (Persentase)	BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Sektor Industri		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Pengolahan terhadap PDRB				
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		Kontribusi PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Persentase Pertumbuhan jumlah wisatauan mancaanegara per kebangsaan (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Target PAD (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
		Terwujudnya Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar terhadap PDRB		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
		Terwujudnya Peningkatan Sektor Usaha Mikro Kecil (UMK)		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					USAHA MIKRO (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		Terbangunnya Tenaga Kerja yang Berkompetensi dan Kompetitif		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kompetensi tenaga kontruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya perlidungan hak-hak pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
		Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan untuk Pelayanan			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
	Publik yang Berintergitas, Berdampak, Responsif dan Aksesibel					
		Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Kepemilikan akta kelahiran (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Perekaman KTP elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Terjaminnya Kualitas Kebijakan dan Reformasi Hukum		Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			pemerintahan dan otonomi daerah		KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terciptanya Peningkatan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pengendalian Internal Pemerintah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Predikat)		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, SDA , dan infrastruktur	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			pembangunan daerah		PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Tercapainya Optimalisasi Aksesibilitas Layanan Publik Berbasis Digital		Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) (Indeks)		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			pemerintah daerah		PENGAMANAN INFORMASI	
				Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Tercapanya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)			
				Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
	Menjaga Kondisivitas dalam Kehidupan Masyarakat			Indeks Harmoni Indonesia(Indeks)		
		Terjaganya Ketentraman Daerah		Indeks Kewaspadaan Nasional (Nilai)		
				Angka Kriminalitas (Rasio)		
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase ganggungan trantibum yang dapat diselesaikan (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Terimplementasikannya Nilai-nilai Religius yang Moderat dan Toleran dalam Kehidupan Bermasyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)		
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
		Terpeliharanya Tradisi dan Budaya Lokal sebagai Identitas Bersama dan Penguat Kohesi Sosial		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))		
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
				Terlestarikannya cagar budaya (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		Terwujudnya Ketahanan Keluarga dan		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Kesetaraan Manfaat Pembangunan				
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial (Persentase)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Resiliensi terhadap Bencana			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)(poin)		
				Persentase Penurunan Emisi GRK(Persentase)		
		Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			pengelolaan lingkungan hidup			
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Terwujudnya Ketahanan terhadap Bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
	Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Merata, Berkualitas dan Terintegrasi			Indeks Infrastruktur(Angka)		
		Terbangunnya Konektivitas Wilayah yang Efisien dan Berkelanjutan		Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota (Rasio)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya aksesibilitas jalan yang nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai	Konektivitas Laut (Unit)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
		Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas, Berkelanjutan, dan Ramah Lingkungan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			penyediaan air minum	melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota (Persentase)	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			penyelenggaraan penataan ruang	Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%)		
			Meningkatnya kualitas perumahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh	(Persentase) berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Persentase)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

Tabel 3-14 Program Nomenklatur Kabupaten Katingan

Tujuan		Sasaran		Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
T1	Mewujudkan manusia yang berkualitas	S1.1	Terwujudnya pendidikan berkualitas pada semua jenjang dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Perluasan pemberian bantuan pendidikan, mencakup sekolah dan pesantren	Pendidikan
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Perluasan tenaga pendidik tingkat dasar ke seluruh wilayah 2. Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga pendidik	Pendidikan

Tujuan		Sasaran		Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
		S1.2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas baik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Katingan Sigap Medika: Dokter Keliling	Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Katingan Sigap Medika: Dokter Keliling	Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Kesehatan
T2	Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi daerah yang produktif dan berkelanjutan	S2.1	Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		Perindustrian
				Program Pengembangan Ekspor	Pelatihan dan pendampingan pelaku UMKM produk lokal unggulan daerah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan sarana prasarana pertanian modern dan pendampingan petani	Pertanian
		S2.2	Terwujudnya peningkatan sektor UMK	Program Implementasi IPTEK bagi wirausaha	Pelatihan dan Pendampingan implementasi IPTEK bagi wirausaha agar dapat menjangkau ekonomi digital	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
			Penguatan kapasitas BUMDes dan pengembangan model bisnis kreatif	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan UMKM		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Optimalisasi dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Optimalisasi aset dan badan usaha milik daerah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing daerah	
		Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah		Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM)	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro(UMKM) Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan Koperasi

Tujuan	Sasaran		Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
					dan Usaha Mikro menengah
	S2.3	Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan dan pengadaan serta pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Hub Pemasaran	Perindustrian
	S2.4	Terwujudnya peningkatan sektor pariwisata terhadap PDRB	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pembangunan kawasan wisata *ecotourism* yang berbasis biodiversitas	Pariwisata
	S2.5	Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor Perdagangan Besar terhadap PDBR	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pasar Rakyat	Perdagangan
				Penguatan produksi dan diversifikasi produk UMKM pengolahan hasil pertanian dan perikanan	
	S2.6	Terbangunnya tenaga kerja yang berkompetensi dan kompetitif	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pelatihan Bersertifikat bagi pemuda/angkatan kerja	Tenaga Kerja

Tujuan		Sasaran	Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
			Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan pelatihan bersertifikat bagi perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
			Program Peningkatan Akses Internet	Pemetaan kebutuhan/perencanaan pembangunan BTS untuk akses internet	Komunikasi dan Informatika
	S2.7	Terwujudnya peningkatan nilai investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penanaman Modal
				Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa melalui kemitraan publik–swasta	
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penanaman Modal

Tujuan		Sasaran		Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
					1. Penetapan kesepakatan kemitraan dengan swasta mengenai *Carbon Trade* 2. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Perizinan Di Bidang Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*) yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penanaman Modal; Lingkungan Hidup
				Program Promosi Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan Pengenalan dan Promosi Perdagangan Karbon 2. Penginisasian dan penguatan karbon desa	Penanaman Modal; Lingkungan Hidup
T3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik yang berintergitas, berdampak, responsif dan aksesibel	S3.1	Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Penyelenggaraan pelayanan publik secara proaktif dan berkala melalui kegiatan turun langsung ke lapangan; 2. Pelibatan komunitas masyarakat dan relawan dalam pelayanan publik	Sekretariat Daerah; Kepegawaian

Tujuan		Sasaran		Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
		S3.2	Terjaminnya kualitas kebijakan dan reformasi hukum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		S3.3	Terciptanya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian internal pemerintah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Kepegawaian; Pengawasan
		S3.4	Tercapainya optimalisasi aksesibilitas layanan publik berbasis digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Komunikasi dan Informatika
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Kepegawaian
T4	Menjaga kondusivitas dalam kehidupan masyarakat	S4.1	Terimplementasikannya nilai–nilai religius yang moderat dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.Pengembangan Pusat Kegiatan Komunitas di Rumah Ibadah; 2. Fasilitasi Pengembangan Program Kegiatan Keagamaan yang Inklusif	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		S4.2	Terpeliharanya tradisi dan budaya lokal sebagai identitas bersama dan penguat kohesi sosial	Program Pengembangan Kebudayaan		Kebudayaan
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar		Kebudayaan

Tujuan		Sasaran		Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
		S4.3	Terbangunnya ketahanan keluarga melalui peningkatan kualitas hidup dan penguatan peran keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Sosial
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Kepemudaan dan Olahraga
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Perempuan		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
T5	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana	S5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		*Borneo Carbon Hub*	Lingkungan Hidup
					Pemeliharaan Kawasan Pariwisata *Ecotourism*	Lingkungan Hidup
		S5.2	Meningkatnya kualitas ketahanan bencana	Program Penanggulangan Bencana		Lingkungan Hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup

Tujuan		Sasaran		Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup
T6	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang merata, berkualitas dan terintegrasi	S6.1	Terbangunnya konektivitas wilayah yang efisien dan berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Program Pengembangan Jalur Transportasi Koridor Utara Trans–Kalimantan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan
					Program Pemetaan dan Perencanaan Pembangunan serta Rehabilitasi Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan
					Program Pengembangan Peta Jalan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Utara–Selatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Pengembangan Prasarana Terminal Utama	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan
		S6.2	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas, berkelanjutan, dan ramah lingkungan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Program Nomenklatur	Program Prioritas	Urusan
		Program Pengembangan Permukiman		Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.2.4 Implementasi Strategi Pembangunan Prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029

Pencapaian misi dalam RPJMD Kabupaten Katingan 2025–2029 seyogyanya juga mewujudkan janji kepala daerah terpilih. Oleh sebab itu, penyusunan program prioritas didasarkan oleh tujuan yang ingin dicapai oleh bupati dan wakil bupati terpilih. Program-program prioritas yang telah disusun mewadahi strategi kepala daerah terpilih dalam membangun Kabupaten Katingan.

Strategi kepala daerah Kabupaten Katingan dalam RPJMD Kabupaten Katingan 2025–2029 mencakup strategi–strategi pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kehidupan bermasyarakat, pelayanan publik, ekonomi dan investasi, pertanian, lingkungan, infrastruktur, konektivitas, UMKM serta pembangunan desa. Terdapat sepuluh (10) strategi kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Katingan yang kemudian diturunkan menjadi program prioritas strategis dan disertai oleh lokus dan kegiatannya. Kesepuluh strategi tersebut adalah Katingan Cerdas, Katingan Sigap Medika, Katingan Madani, Katingan Melayani Masyarakat, Katingan Terbuka Katingan Maju Bersama, Katingan Bertani, Katingan Lestari, Katingan Mandiri: Terkoneksi dan Terintegrasi, UMKM Maju Katingan Berdikari serta Bersama Katingan Desa Berdaya.

Katingan Cerdas dan **Katingan Sigap Medika** merupakan strategi yang menyasar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Katingan dengan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, Katingan Cerdas juga merupakan implementasi dari program prioritas **Huma Betang** Gubernur Kalimantan Tengah, khususnya program bertajuk **"Betang Cerdas"**. Kesinambungan ini menunjukkan adanya keselarasan prioritas pembangunan dalam aspek pendidikan, baik terkait dengan kualitas dan aksesibilitas pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pendidik, hingga pada harmoni pendidikan terhadap religiusitas masyarakat yang berbudaya. Hal ini kemudian selaras dengan adanya strategi **Katingan Madani** yang merupakan upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis sesuai dengan nilai–nilai dan norma yang terdapat di masyarakat.

Di sisi lain, **Katingan Melayani Masyarakat** adalah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun **Katingan Terbuka Katingan Maju Bersama** ditujukan untuk meningkatkan keterbukaan terhadap investasi guna meningkatkan perekonomian. Di dalam praktiknya, peningkatan ekonomi masyarakat juga ditunjang oleh strategi **Katingan Bertani** yang merupakan langkah peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan pengolahan hasilnya. Sementara, **UMKM Maju Katingan Berdikari** adalah strategi untuk

pengembangan UMKM. **Bersama Katingan Desa Berdaya** merupakan strategi dalam pembangunan desa yang berfokus untuk mendorong kemandirian desa.

Lebih dalam mengenai penjagaan kualitas ekologi dan pemenuhan infrastruktur, terdapat beberapa strategi yang diforumulasikan. **Katingan Lestari** adalah strategi pembangunan pada pemanfaatan sekaligus pelestarian lingkungan, terutama dalam upaya pengurangan emisi karbon. Kemudian, **Katingan Mandiri: Terkoneksi dan Terintegrasi** merupakan strategi dalam penyediaan infrastruktur dasar serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.

Secara lebih rinci, Tabel 3-15 di bawah memuat komparasi dan keselarasan antara program prioritas yang ada di Kabupaten Katingan dengan program prioritas yang ada di level regional provinsi dan nasional, sesuai pada mandat RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMN Tahun 2025–2029. Perincian strategi tajuk kepala daerah ke dalam program strategis daerah dengan detail lokus dan kegiatan selanjutnya dijabarkan melalui Tabel 3-16.

Tabel 3-15 Komparasi Program Prioritas RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, dan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029		RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029	
1	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1	**Kalteng Bermartabat:** • Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan • Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat	1	**Katingan Cerdas:** • Perluasan pemberian bantuan pendidikan, mencakup sekolah dan pesantren • Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga pendidik • Perluasan tenaga pendidik tingkat dasar ke seluruh wilayah
2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara				
3	Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	2	**Betang Maju:** • Pembangunan 1.000 km jalan desa • Revitalisasi infrastruktur lintas kabupaten dan kota • Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif • Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa • Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar • Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman	2	**Katingan Sigap Medika:** • Katingan Sigap Medika: Dokter Keliling
4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				
5	Pemberantasan Kemiskinan	3	**Betang Makmur:** • Rp2 juta per Kartu Keluarga Bantuan Pangan • Operasi Pasar Murah • 250 Miliarder Muda Baru • Milenial Job Center • Inkubasi UMKM • Asuransi Petani dan Nelayan	3	**Katingan Madani:** • Pengembangan pusat kegiatan komunitas di rumah ibadah • Fasilitasi pengembangan program kegiatan keagamaan yang inklusif
6	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba				

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029		RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029	
			• Bantuan Perahu dan Alat Tangkap		
7	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	4	**Betang Cerdas:** • Sekolah/Kuliah Gratis • Satu Keluarga Harus Ada Sarjana • 1.000 Rumah Guru • Insentif Guru Agama • Kalteng Mengaji	4	**Katingan Melayani Masyarakat:** • Penyelenggaraan pelayanan publik secara proaktif dan berkala melalui kegiatan turun langsung ke lapangan • Pelibatan komunitas masyarakat dan relawan dalam pelayanan publik
8	Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi				
9	Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	5	**Betang Sehat:** • Berobat Gratis Berbasis KTP • Insentif Tenaga Kesehatan Desa • Revitalisasi Puskesmas Desa • Pendampingan Ibu Hamil dan Pascahamil • 1 Desa 1 Ambulans	5	**Katingan Terbuka, Katingan Maju Bersama:** • Pembangunan kawasan pariwisata *ecotourism* berbasis biodiversitas • Optimalisasi aset dan badan usaha milik daerah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing daerah • Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
10	Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas				
11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	6	**Betang Harmoni:** • Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata) • Rp150 Miliar Bantuan Provinsi untuk Kabupaten Kota • Rp250 Juta Stimulus Desa	6	**Katingan Bertani:** • Pasar Rakyat • Penguatan produksi dan diversifikasi produk UMKM pengolahan hasil pertanian dan perikanan
12	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani				

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029		RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029	
13	Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan		• Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se-Provinsi Kalimantan Tengah • Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga	**7**	**Katingan Lestari:** • Borneo Carbon Hub • Pemeliharaan kawasan pariwisata ecotourism (wisata berbasis biodiversitas)
14	Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya			**8**	**Katingan Mandiri: Terkoneksi dan Terintegrasi:** • Pengembangan jalur baru Trans-Kalimantan di koridor utara melalui pembangunan jalan dan terminal hub • Pembangunan terminal utama • Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan di lingkungan permukiman
15	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumberdaya Alam (SDA), termasuk Sumberdaya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi			**9**	**UMKM Maju, Katingan Berdikari:** • Pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM produk lokal unggulan daerah • Pelatihan dan pendampingan implementasi IPTEK bagi wirausaha agar dapat menjangkau ekonomi digital • Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda, pemula, dan pemuda kader daerah

RPJMN Tahun 2025-2029		RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029		RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029	
16	Memastikan Kerukuran Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah			**10**	**Bersama Katingan Desa Berdaya:** • Penguatan kapasitas BumDes dan pengembangan model bisnis kreatif • Penginisiasian dan penguatan kemitraan karbon desa (*Village Carbon Partnership*) • Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa melalui kemitraan publik-swasta
17	Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga				

Ketarangan keselarasan						
RPJMN	Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tata Kelola	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Implementasi Transformasi
RPJMD KALTENG	Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tata Kelola	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Implementasi Transformasi
RPJMD KATINGAN	Transformasi Sosial	Transformasi Ekonomi	Transformasi Tata Kelola	Kondusivitas dan Stabilitas Daerah serta Kepemimpinan Daerah	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Implementasi Transformasi

Tabel 3-16 Strategi Pembangunan Kepala Daerah

No.	Strategi (Tajuk Kepala Daerah)	Penjabaran	Program Strategis	L/K	Lokus/Detail Kegiatan
1	**Katingan Cerdas**	Strategi ini ditujukan untuk **memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan** yang berkualitas yang berfokus pada kualitas pendidik dan kemudahan akses pendidikan oleh siswa.	Perluasan pemberian bantuan pendidikan, mencakup sekolah dan pesantren	K	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Plus (buku, alat praktik, internet) untuk sekolah dan pesantren di wilayah Kecamatan Tasik Payawan dan Marikit
					Beasiswa Prestasi berbasis akademik/non–akademik untuk keluarga petani dan nelayan (Zona Utara dan Zona Selatan)
					Pembangunan perpustakaan pesantren
			Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga pendidik	K	Pelatihan kepemimpinan pendidikan dan kurikulum integratif berbasis kearifan lokal
					Pertukaran guru antardaerah lokal (pusat kecamatan dan daerah terisolasi)
			Perluasan tenaga pendidik tingkat dasar ke seluruh wilayah	L	Semua kecamatan
2	**Katingan Sigap Medika**	Strategi ini ditujukan untuk sektor kesehatan agar masyarakat Kabupaten Katingan dapat mengakses **layanan kesehatan yang berkualitas** dengan lebih mudah **terlepas dari kondisi geografis.**	Katingan Sigap Medika: Dokter Keliling	L	Semua kecamatan
3	**Katingan Madani**	Strategi ini ditujukan untuk menciptakan **lingkungan yang harmonis,** baik dengan sesama maupun lingkungan, melalui pembentukan karakter masyarakat religius dan berbudaya yang	Pengembangan pusat kegiatan komunitas di rumah ibadah	K	Revitalisasi fisik rumah ibadah dengan kustomisasi ruang sosial multifungsi tambahan (perpustakaan, posyandu, atau pelatihan)
					Sekolah Toleransi (dialog lintas agama dan workshop kerukunan) difasilitasi oleh rumah

No.	Strategi (Tajuk Kepala Daerah)	Penjabaran	Program Strategis	L/K	Lokus/Detail Kegiatan
		menjunjung tinggi **norma, toleransi, dan keadilan sosial.**			ibadah (e.g pengelolaan sampah didampingi DLH)
			Fasilitasi pengembangan program kegiatan keagamaan yang inklusif	K	Pelatihan moderasi beragama bagi tokoh masyarakat pengampu Sekolah Toleransi (*workshop* keahlian dan pemahaman hak kelompok marjinal)
					Layanan keagamaan bagi penyandang disabilitas: kitab braille dan aksesibilitas fisik rumah ibadah
					Youth Camp perkemahan pemuda lintas–agama: pembangunan kapasitas, diskusi isu sosial, dan bakti sosial
4	**Katingan Melayani Masyarakat**	Strategi ini menekankan pada pentingnya **pelayanan publik yang berintegritas, responsif, dan aksesibel** untuk mewujudkan kepuasan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya.	Penyelenggaraan pelayanan publik secara proaktif dan berkala melalui kegiatan turun langsung ke lapangan	L	– Kecamatan Bukit Raya – Kecamatan Petak Malai – Kecamatan Marikit – Kecamatan Katingan Hulu – Kecamatan Mendawai – Kecamatan Katingan Kuala
			Pelibatan komunitas masyarakat dan relawan dalam pelayanan publik	K	Relawan Pelayanan Publik (RPP): rekrutmen dan pelatihan warga lokal sebagai pendamping layanan di kantor desa/kecamatan berbasis sistem poin yang bisa ditukar dengan insentif

No.	Strategi (Tajuk Kepala Daerah)	Penjabaran	Program Strategis	L/K	Lokus/Detail Kegiatan
					Sekolah Layanan Publik: pelatihan kapasitas bagi kader PKK, Karang Taruna, dan tokoh adat terkait prosedur layanan birokrasi esensial dengan dilengkapi instrumen monev rutin (prioritas 10 desa dengan akses layanan terburuk berdasarkan IKM)
					Revitalisasi/pengadaan platform aduan satu pintu (dengan platform birokrasi lainnya) dilengkapi dengan narahubung via aplikasi sosial
					Forum evaluasi layanan publik inklusif antar *stakeholders* pentahelix
5	**Katingan Terbuka, Katingan Maju Bersama**	Strategi ini berfokus pada peningkatan **keterbukaan daerah terhadap investasi, penguatan potensi lokal, dan percepatan transformasi ekonomi inklusif** di Kabupaten Katingan dengan turut mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan, ekonomi hijau, dan kemandirian desa.	Pembangunan kawasan pariwisata *ecotourism* berbasis biodiversitas	L	Kawasan Wisata Cagar Budaya Petak Malai–Sanaman Mantikei–Katingan Tengah dan Sekitarnya
			Optimalisasi aset dan badan usaha milik daerah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing daerah	K	Audit per kuartal dan revitalisasi kinerja BUMD
					Pengembangan aset produktif melalui lahan tidur tidak produktif pemda dan kerja sama pihak swasta untuk kawasan industri kecil
					Pelatihan SDM pengelola BUMD
			Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	K	Penyusunan kebijakan insentif pajak di sektor strategis
					Penyederhanaan perizinan terpadu untuk UMKM
					Promosi investasi untuk menarik investor
6	**Katingan Bertani**	Strategi ini berfokus pada peningkatan **produktivitas pertanian dan perikanan,**	Pasar Rakyat	L	– Kecamatan Mendawai – Kecamatan Kamipang – Kecamatan Tasik Payawan

No.	Strategi (Tajuk Kepala Daerah)	Penjabaran	Program Strategis	L/K	Lokus/Detail Kegiatan
		pengolahan hasilnya oleh UMKM serta pemasaran hasil pertanian dan perikanan maupun hasil olahannya.	Penguatan produksi dan diversifikasi produk UMKM pengolahan hasil pertanian dan perikanan	L	– Kecamatan Katingan Kuala – Kecamatan Kamipang
7	**Katingan Lestari**	Strategi ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan pembangunan wilayah yang tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan, selaras dengan mandat nasional dan provinsi atas Kabupaten Katingan sebagai bagian dari ***Heart of Borneo*.** Adapun pada strategi ini fokus terletak pada peregulasian perdagangan karbon dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata berbasis biodiversitas.	*Borneo Carbon Hub*	K	Kajian pemetaan potensi dan perumusan skema UPT
					Kajian payung hukum operasionalisasi pengurangan emisi karbon tingkat daerah
					Penginisasian pengurangan emisi karbon dengan skema kerja sama pembiayaan
			Pemeliharaan kawasan pariwisata *ecotourism* (wisata berbasis *biodiversitas)*	L	Kawasan Ekowisata Punggualas Sebangau dan Sekitarnya
8	**Katingan Mandiri: Terkoneksi dan Terintegrasi**	Strategi ini menekankan pada pentingnya **pembangunan infrastruktur dasar** yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung kualitas hidup masyarakat serta **meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah** sehingga dapat mencapai pembangunan wilayah yang adil, merata, dan berkelanjutan.	Pengembangan jalur baru Trans–Kalimantan di koridor utara melalui pembangunan jalan dan terminal hub	L	– Kecamatan Katingan Tengah – Kecamatan Sanaman Mantikei
			Pembangunan terminal utama	L	– Kecamatan Kasongan – Kecamatan Tewang Sangalang Garing
			Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan di lingkungan permukiman	L	– Kecamatan Marikit – Kecamatan Katingan Kuala

No.	Strategi (Tajuk Kepala Daerah)	Penjabaran	Program Strategis	L/K	Lokus/Detail Kegiatan
9	**UMKM Maju, Katingan Berdikari**	Strategi ini berfokus pada peningkatan **kapasitas, daya saing, dan kemandirian UMKM** yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga mampu bersaing di pasar regional dan nasional.	Pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM produk lokal unggulan daerah	K	Pemetaan potensi UMKM unggulan
					Pelatihan dan pengembangan produk dan branding yang berbasis kearifan lokal
					Pembentukan pusat kolektif UMKM untuk pemasaran
			Pelatihan dan pendampingan implementasi IPTEK bagi wirausaha agar dapat menjangkau ekonomi digital	K	Pelatihan *digital marketing* dan *e–commerce*
					Pengembangan sistem logistik digital dengan menjalin kemitraan dengan penyedia jasa logistik untuk UMKM
					Pembuatan *website* atau katalog digital untuk pemasaran produk unggulan Katingan
			Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda, pemula, dan pemuda kader daerah	K	Pelatihan kelas kecil kewirausahaan berbasis digital dengan kurikulum lokal berbasis konsentrasi peminatan
					Pendampingan teknis manajemen bisnis oleh relawan profesional ke desa–desa
					Penempatan pemuda magang di UMKM berpengalaman antardaerah
10	**Bersama Katingan Desa Berdaya**	Strategi ini bertujuan untuk **mendorong kemandirian desa** melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa, pemberdayaan ekonomi lokal,	Penguatan kapasitas BUMDes dan pengembangan model bisnis kreatif	K	Revitalisasi BUMDes dan penyusunan *blueprint* optimalisasi BUMDes berbasis potensi alam dan jasa
					Penyusunan peta jalan integrasi BUMDes dengan pasar regional berbasis komoditas

No.	Strategi (Tajuk Kepala Daerah)	Penjabaran	Program Strategis	L/K	Lokus/Detail Kegiatan
		serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendorong desa sebagai pusat inovasi.	Penginisiasian dan penguatan kemitraan karbon desa (*Village Carbon Partnership*)	L	– Kecamatan Mendawai – Kecamatan Kamipang – Kecamatan Katingan Kuala – Kecamatan Tasik Payawan – Kecamatan Bukit Raya – Kecamatan Petak Malai
			Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa melalui kemitraan publik–swasta	K	Pelatihan teknis manajemen digital keuangan desa
					Peningkatan koneksi kemitraan BUMDes dengan perusahaan lokal untuk pengembangan usaha/infrastruktur

Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing

Misi ke–1 RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, yaitu **Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing** mencakup pembangunan sumber daya manusia dari sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan misi tersebut adalah **Katingan Cerdas** dan **Katingan Terbuka, Katingan Maju Bersama**. Strategi Katingan Cerdas merupakan strategi yang ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Sementara, Katingan Terbuka, Katingan Maju Bersama merupakan strategi yang digunakan untuk mengembangkan kemitraan strategis lintas sektor untuk berusaha dan berinvestasi, dalam hal ini termasuk sektor tenaga kerja.

Pelaksanaan strategi Katingan Cerdas didukung oleh program prioritas yang mencakup pengelolaan pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan yang kemudian diturunkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah serta pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah Kabupaten Katingan. Pembangunan manusia dari sisi pendidikan berfokus pada murid dan guru. Oleh karena itu, proyek strategis yang direncanakan berupa perluasan pemberian bantuan pendidikan yang mencakup sekolah dan pesantren, perluasan tenaga pendidik tingkat dasar ke seluruh wilayah serta peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga pendidik. Melalui proyek strategis tersebut, diharapkan semakin banyak penduduk usia sekolah terutama yang berasal dari keluarga miskin dapat bersekolah. Selain itu, diharapkan pendidik dan kependidikan yang mahir dan tersedia dengan jumlah yang cukup di seluruh wilayah untuk menjalankan kegiatan belajar dan mengajar. Sementara, strategi Katingan Terbuka, Katingan Maju Bersama didukung oleh program prioritas berupa program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan calon pekerja di Kabupaten Katingan.

Misi 2: Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar

Misi ke–2 RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, yaitu **Mewujudkan Tingkat Kesehatan Masyarakat yang Baik dan Memenuhi Standar** didukung oleh strategi Katingan Sigap Medika. Strategi yang digunakan pada sektor kesehatan agar masyarakat Kabupaten Katingan dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dengan lebih mudah. Strategi tersebut kemudian diturunkan menjadi program prioritas dan proyek prioritas untuk mewujudkan misi.

Program prioritas yang mendukung strategi Katingan Sigap Medika meliputi pemenuhan upaya kesehatan individu dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan. Program-program tersebut dijabarkan menjadi kegiatan seperti penyediaan fasilitas kesehatan kewenangan daerah dan pelayanan rujukan daerah serta pelaksanaan upaya promotif preventif kesehatan. Selain itu, strategi ini juga menitikberatkan layanan pada kesehatan ibu dan anak serta pengelolaan jaminan kesehatan. Proyek strategis yang direncanakan pada strategi adalah pengadaan dokter keliling. Pelaksanaan strategi ini diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Katingan menjadi lebih mudah diakses sehingga mampu mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

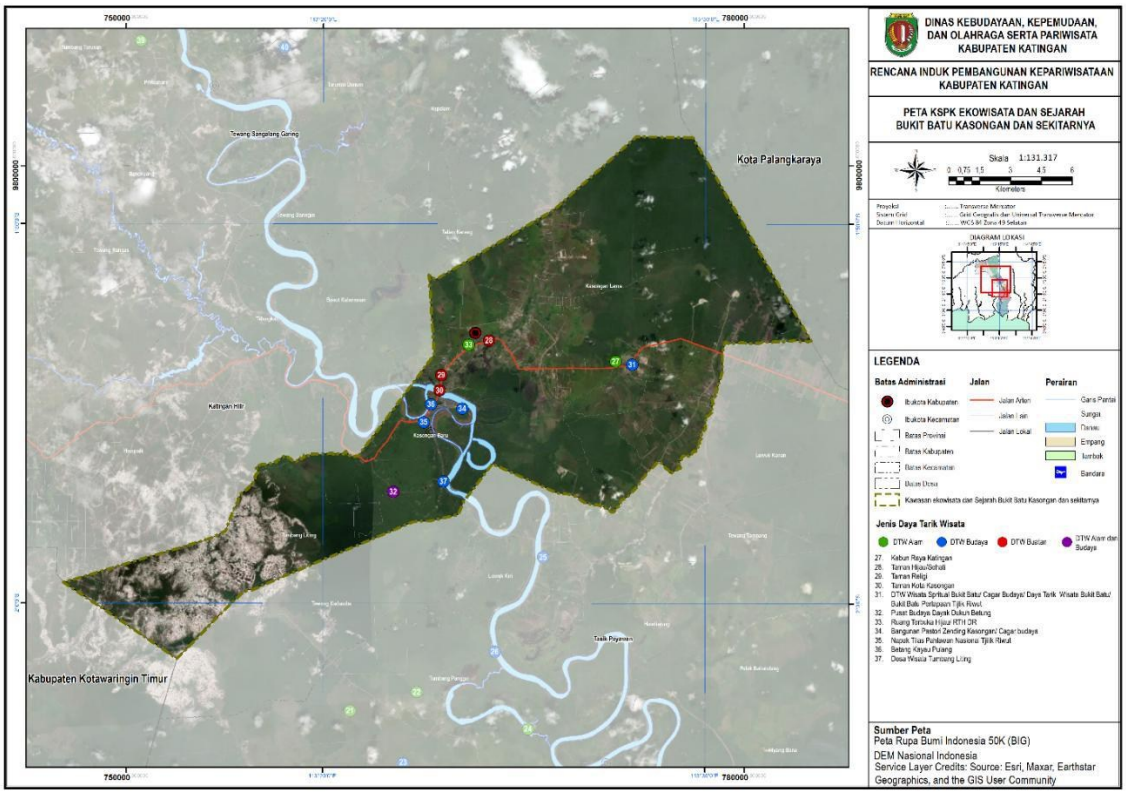
Misi 3: Mewujudkan Kenyamanan dalam Berusaha dan Berinvestasi Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif

Dalam mencapai misi ke–3 RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, yaitu **Mewujudkan Kenyamanan Dalam Berusaha dan Berinvestasi Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif**, disusun strategi–strategi yang progresif agar misi dapat terwujud dalam 5 tahun ke depan. Strategi–strategi tersebut adalah **Katingan Terbuka, Katingan Maju Bersama; UMKM Maju, Katingan Berdikari; Katingan Bertani; Katingan Lestari; dan Bersama Katingan Desa Berdaya.** Strategi **Katingan Terbuka, Katingan Maju Bersama** merupakan strategi berfokus pada peningkatan keterbukaan daerah terhadap investasi, penguatan potensi lokal, dan percepatan transformasi ekonomi inklusif di Kabupaten Katingan. Strategi ini didasarkan pada prinsip kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan daerah, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.

Misi daerah untuk mewujudkan kenyamanan berusaha dan berinvestasi melalui transformasi ekonomi yang inklusif sangat bergantung pada salah satu pilar utama yaitu peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi. Investasi menjadi kunci untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, memperkenalkan dan meningkatkan pengembangan teknologi, serta mendiversifikasi produk dari sekadar komoditas mentah menjadi barang olahan bernilai tinggi yang mampu berdaya saing di pasar. Investasi pada fasilitas produksi modern atau pengembangan jasa bernilai tinggi akan langsung meningkatkan produktivitas, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Katingan secara keseluruhan.

Peningkatan PMTB juga akan berimplikasi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif dan berkelanjutan. Ketika investasi masuk meningkat, infrastruktur pendukung, seperti jalan, sistem logistik, dan fasilitas penunjang bisnis akan terbangun atau diperbaiki, yang mana hal ini melancarkan distribusi dan menekan biaya operasional. Kualitas produk dan layanan Kabupaten Katingan pun akan meningkat, menjadikan daerah ini lebih kompetitif di pasar regional maupun nasional. Lebih jauh, dampak berganda dari investasi ini akan merambat ke berbagai sektor pendukung lainnya, seperti transportasi, pergudangan, hingga jasa keuangan, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis dan tangguh.

Implikasi positif dari peningkatan investasi ini juga akan terasa pada pendapatan daerah. Semakin pesatnya aktivitas ekonomi, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berbagai jenis retribusi daerah, dan bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) akan meningkat signifikan. Selain itu, potensi peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat seiring dengan geliat ekonomi di Kabupaten Katingan. Peningkatan PMTB bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah pondasi kokoh yang akan mendorong kemandirian fiskal dan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan berkelanjutan demi masa depan Katingan yang lebih sejahtera. Demi mewujudkan peningkatan investasi, disusun program prioritas yang mencakup Pembangunan Kawasan Pariwisata *Ecotourism* berbasis biodiversitas, optimalisasi aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penetapan fasilitas dan insentif di bidang penanaman modal, dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang merupakan pilar terpenting dari “Katingan Terbuka” yang bertujuan mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi.



Gambar 3-16 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Ekowisata dan Sejarah Bukit Batu Kasongan dan Sekitarnya

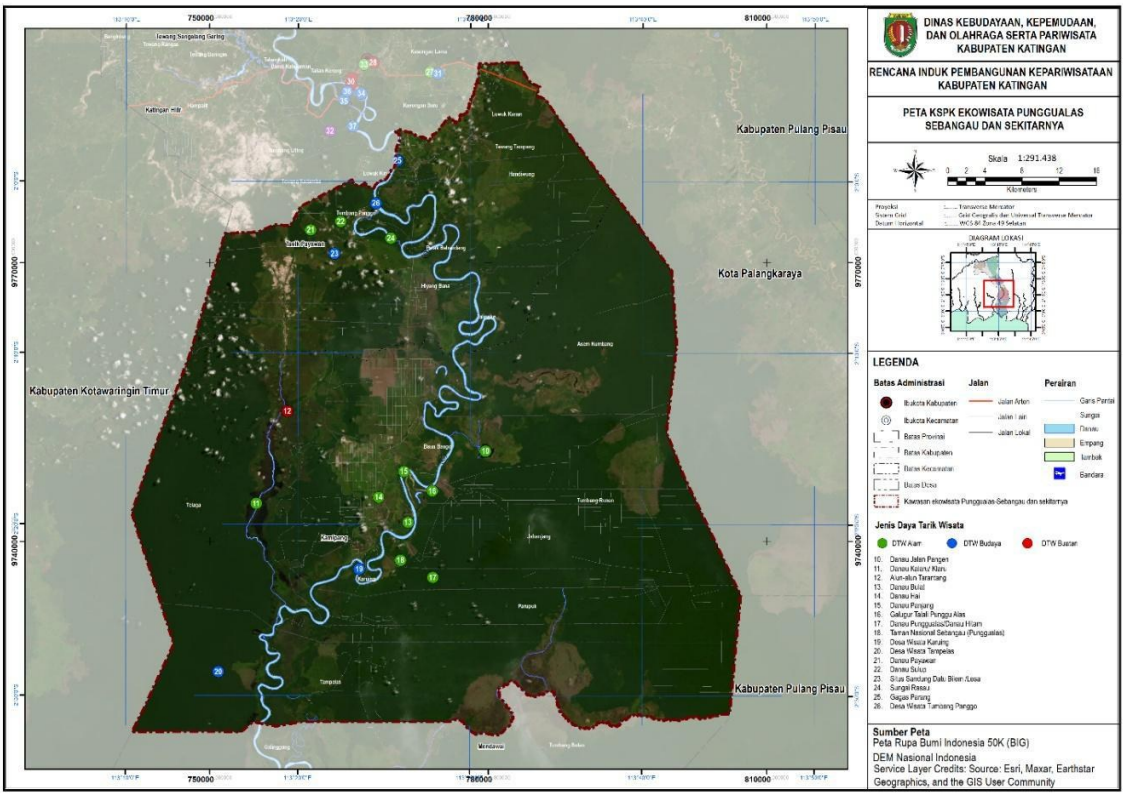
Sumber: Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Katingan

Sebagai langkah nyata dari strategi ini, pengembangan pariwisata di Kabupaten Katingan diarahkan pada beberapa objek wisata unggulan yang telah ditetapkan sebagai objek strategis dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) Katingan 2025–2045. Salah satunya adalah Wisata Bukit Batu Pertapaan Tjilik Riwut yang saat ini berfungsi sebagai destinasi wisata spiritual dan telah dilengkapi fasilitas dasar seperti area bermain, parkir, dan kios makanan. Strategi pengembangannya difokuskan pada wisata budaya dan sejarah, sejalan dengan kedekatannya dengan Kebun Raya Katingan, sehingga memungkinkan integrasi promosi dan pengelolaan. Kebun Raya ini sendiri diarahkan menjadi pusat konservasi buah tropis lokal dan wisata pendidikan berbasis lingkungan, dengan aksesibilitas tinggi karena berada di jalur Trans Kalimantan yang menghubungkan ke Palangkaraya (Ripparkab Katingan 2025–2045).



Gambar 3-17 Lokasi Objek Wisata Danau Mare
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Katingan

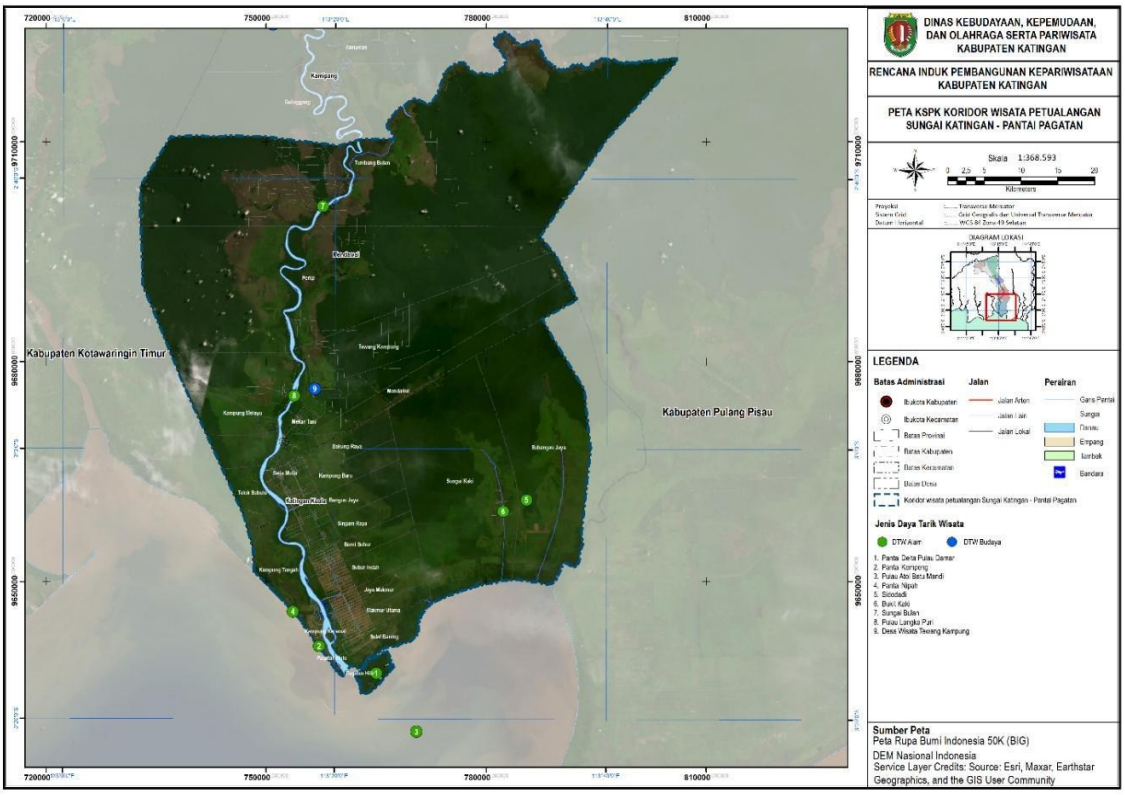
Selanjutnya, Danau Mare yang sebelumnya hanya dijangkau melalui perahu kecil dan memiliki fasilitas yang tidak terawat, ditetapkan sebagai prioritas pengembangan resor berbasis konservasi. Menurut hasil penelitian oleh Iskandarsyah, Senas, dan Surawijaya (2022), kawasan ini berada dalam kuadran *rapid growth* dalam analisis SWOT dan masyarakat sekitar menunjukkan keterbukaan serta dukungan terhadap pengembangan wisata. Hal ini memberikan peluang besar untuk menciptakan pariwisata berbasis komunitas yang berwawasan lingkungan dan budaya.



Gambar 3-18 Peta Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Ekowisata Punggualas Sebangau dan Sekitarnya

Sumber: Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Katingan

Taman Nasional Sebangau juga menjadi objek strategis yang dikembangkan dengan pendekatan ekowisata. Akses yang mudah, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta keberadaan jalur pengamatan satwa dan stasiun riset menjadi modal utama dalam pengembangan ini. Berdasarkan analisis SWOT oleh Wigreny, Yunikewaty, dan Kristiana (2020), taman nasional ini memiliki banyak potensi meski juga menghadapi tantangan, sehingga strategi diversifikasi melalui pembangunan fasilitas ramah lingkungan, pelestarian habitat orangutan, dan konservasi lahan gambut menjadi prioritas utama.



Gambar 3-19 Peta Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Koridor Wisata Petualangan
Sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Katingan

Terakhir, pengembangan Koridor Wisata Petualangan Sungai Katingan – Pantai Pegatan diarahkan pada wisata susur sungai dan pengembangan desa wisata di sepanjang aliran sungai. Walaupun masih terdapat kendala dalam sarana angkutan dan keselamatan, kawasan ini menyimpan potensi besar karena terhubung langsung dengan banyak desa. Berdasarkan Ripparkab Katingan 2025–2045, pengembangan koridor ini diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang luas dan mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

Melalui strategi tersebut, Katingan berkomitmen menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana investasi yang masuk tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga memberdayakan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan mendorong inovasi berbasis lokal. Dengan semangat "Maju Bersama", pembangunan di Katingan diharapkan mampu mengurangi kesenjangan dan menjadikan daerah ini sebagai contoh transformasi ekonomi berkelanjutan di tingkat regional maupun nasional.

Langkah penting selanjutnya untuk mencapai Misi ke–3 ini adalah strategi **UMKM Maju, Katingan Berdikari.** Strategi ini berfokus pada peningkatan kapasitas, daya saing, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Katingan. Strategi ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan

memberdayakan pelaku usaha lokal, mengoptimalkan sumber daya daerah, dan menciptakan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar regional maupun nasional. Melalui strategi ini, Katingan berkomitmen untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan, di mana UMKM menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan strategi ini, disusun program prioritas yang mencakup Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM, Memantapkan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Penyadaran, Pemberdayaan, serta Pengembangan Pemuda Pelopor & Wirausaha Muda. Program-program strategis ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM Katingan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan produk unggulan berbasis lokal, dan pengembangan wirausaha muda untuk menciptakan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan inklusif. Melalui strategi ini, UMKM di Katingan diharapkan tidak hanya tumbuh secara kuantitas tetapi juga kualitas. Peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan produk unggulan, dan keterlibatan pemuda akan menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Dengan semangat "Berdikari", Katingan menegaskan komitmennya untuk membangun perekonomian dari akar rumput, di mana UMKM menjadi penggerak utama kemajuan daerah.

Selanjutnya, strategi **Katingan Bertani** berfokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama ekonomi Kabupaten Katingan. Strategi ini dirancang untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis teknologi.

Untuk mendukung pelaksanaan strategi ini, disusun program prioritas yang mencakup pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat, hub pemasaran hasil tani, penguatan produksi dan diversifikasi produk UMKM pertanian dan perikanan. Program-program strategis ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian secara menyeluruh, meningkatkan akses pasar yang lebih baik bagi petani, memperluas jaringan distribusi hingga tingkat nasional, meningkatkan harga jual komoditas, menciptakan diversifikasi produk bernilai tinggi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan petani.

Strategi **Katingan Lestari** dalam konteks penanaman modal adalah pembukaan peluang dan regulasi untuk perdagangan karbon yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Katingan. Peluang ini muncul dari kebutuhan Kabupaten Katingan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Demi memudahkan pencapaian target tersebut,

pemerintah perlu menambah pendanaan eksternal, salah satunya melalui skema perdagangan karbon. Secara operasional, upaya pengurangan emisi GRK di Kabupaten Katingan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui UPT yang dimiliki. Pada badan tersebut, pelaksanaan penarikan dana eksternal dilaksanakan dengan penerimaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan swasta maupun melalui skema REDD+. Program yang dapat diselenggarakan seperti penanaman pohon, peremajaan hutan, dan pelestarian gambut. Pelaksana lapangan pada upaya pengurangan emisi GRK, selain dilakukan oleh UPT Dinas Lingkungan Hidup, sebagian besarnya akan dilaksanakan oleh perusahaan pemberi CSR atau masyarakat desa secara langsung. Tutupan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk skema perdagangan karbon di Kabupaten Katingan berupa Hutan Produksi Tetap (HPT), Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), hutan lindung, mangrove, dan lahan gambut di kawan lindung maupun non–lindung serta kawasan hutan konservasi.

Strategi **Bersama Katingan Desa Berdaya** merupakan kerangka pembangunan berbasis desa yang dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi inklusif melalui pemberdayaan institusi dan potensi lokal. Fokus utamanya adalah penguatan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa melalui pengembangan model bisnis kreatif yang memanfaatkan sumber daya unggulan masing–masing desa, seperti agroindustri atau ekowisata. Strategi ini dirancang agar pembangunan dimulai dari institusi pemerintah yang terdekat dan terdepan dengan masyarakat secara langsung. Dengan semangat membangun dari desa, secara luas strategi ini diharapkan mampu memberdayakan seluruh unsur masyarakat desa menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Untuk pembangunan pelaksanaan strategi ini, disusun program prioritas yang mencakup Penguatan BUMDes dengan pengembangan model bisnis kreatif berbasis potensi lokal, pengembangan kemitraan karbon desa untuk menciptakan nilai ekonomi dari pelestarian lingkungan, serta optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset desa melalui kemitraan publik–swasta. Dengan pendampingan teknis dan akses permodalan, strategi ini menargetkan peningkatan pendapatan asli desa, penciptaan usaha baru di setiap kecamatan, serta tata kelola desa yang transparan dan berkelanjutan, sekaligus mendorong transformasi ekonomi inklusif berbasis partisipasi masyarakat desa.

Misi 4: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Memuaskan dan Membahagiakan

Dalam mencapai misi ke–4 RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, yaitu **Mewujudkan Pelayanan Publik yang Memuaskan dan Membahagiakan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif**, strategi **Katingan Melayani Masyarakat** dan

Katingan Mandiri: Terkoneksi dan Terintegrasi merupakan langkah strategis untuk mencapai misi tersebut. Strategi ini menekankan pentingnya sarana prasarana penunjang, suprastruktur digital yang terintegrasi untuk pelayanan publik yang berintegritas, responsif, dan aksesibel melalui pendekatan digital serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan, khususnya bagi wilayah terpencil, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dua strategi ini setidaknya mencakup digitalisasi pelayanan, penyelenggaraan pelayanan publik secara proaktif ke lapangan, dan pelibatan komunitas masyarakat dan relawan dalam pelayanan publik.

Strategi **Katingan Melayani Masyarakat** akan diimplementasikan melalui kegiatan turun langsung ke lapangan secara berkala, pelibatan relawan, dan penguatan kapasitas aparatur. Dengan pendekatan kolaboratif, pembangunan di Katingan diharapkan mampu menjawab tantangan akuntabilitas dan aksesibilitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Strategi ini dikembangkan untuk menjangkau kantong–kantong terisolasi di Kabupaten Katingan. Proyek ini bertujuan memastikan akses layanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan bantuan sosial dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Strategi **Katingan Mandiri: Terkoneksi dan Terintegrasi** bertujuan menciptakan ekosistem pelayanan publik yang terjangkau, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di seluruh wilayah Kabupaten Katingan. Digitalisasi pelayanan menjadi langkah kunci yang berfokus pada penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, serta penciptaan tata kelola yang transparan dan partisipatif. Strategi ini didasarkan pada prinsip kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi untuk memastikan pelayanan yang responsif, aksesibel, dan berdampak luas, khususnya bagi wilayah terpencil di Kabupaten Katingan.

Misi 5: Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Rukun, Aman, Damai, dan Sejahtera

Dalam mencapai misi ke–4 RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, yaitu **Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Rukun, Aman, Damai, dan Sejahtera**, strategi **Katingan Terbuka, Maju Bersama** menjadi fondasi utama untuk menciptakan iklim investasi yang dinamis dan kemudahan berusaha. Strategi ini berfokus pada pengembangan kemitraan strategis lintas sektor, optimalisasi aset daerah, dan penyediaan insentif penanaman modal. Pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat stabilitas

ekonomi makro melalui pembangunan berbasis potensi lokal, seperti kawasan pariwisata *eco–tourism* berbasis biodiversitas, serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang efisien.

Misi ini juga akan dicapai melalui strategi **Katingan Madani** untuk mewujudkan masyarakat yang beradab dan berperadaban melalui penguatan sistem ketahanan politik, hukum, dan keamanan daerah. Madani dalam konteks ini mencerminkan nilai–nilai kolektif yang menjunjung tinggi norma, toleransi, dan keadilan sosial untuk menjalani dan memaknai kehidupan. Implementasinya mencakup pengembangan pusat kegiatan komunitas di rumah ibadah dan fasilitasi program keagamaan inklusif, yang bertujuan memperkuat kohesi sosial dan mencegah potensi konflik. Pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana stabilitas politik dan hukum menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan.

Misi 6: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Harmoni

Strategi Katingan Madani, Katingan Melayani Masyarakat, dan **Katingan Lestari** digunakan untuk mewujudkan misi ke–5 RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, yaitu **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Harmoni**. Strategi ini dimaksudkan untuk menangani pembangunan yang terkait dengan kelompok rentan, kehidupan bermasyarakat, tradisi dan budaya, ketahanan keluarga serta ketahanan ekologi. Untuk mendukung strategi tersebut, disusun program-program prioritas, kegiatan, dan proyek yang lebih spesifik.

Katingan Madani merupakan strategi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bermasyarakat yang harmonis. Program prioritas pada strategi ini mencakup pengembangan kebudayaan, pelestarian benda/situs budaya, peningkatan kualitas keluarga, pengembangan kepemudaan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan. Proyek strategis yang dikembangkan pada strategi Katingan Madani adalah pengembangan pusat kegiatan komunitas di rumah ibadah dan fasilitasi pengembangan program kegiatan keagamaan yang inklusif. Proyek tersebut ditujukan untuk meningkatkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat terutama kerukunan antarumat beragama.

Strategi Katingan Melayani Masyarakat pada misi ini difokuskan untuk melayani masyarakat terutama pelayanan perlindungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kelompok rentan, yaitu penduduk miskin dan disabilitas, dan pekerja di Kabupaten Katingan menerima perlindungan sosial. Program prioritas yang mendukung

strategi ini adalah perlindungan dan jaminan sosial serta hubungan industrial yang terkait dengan pemberian jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan tenaga kerja.

Katingan Lestari berupaya untuk menciptakan keselarasan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan alam, dan kesejahteraan sosial. Program prioritas yang disusun mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penguatan kapasitas masyarakat terhadap perubahan lingkungan, penanggulangan bencana, serta pengelolaan lingkungan hidup yang terencana. Program Penanggulangan Bencana menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana yang dapat merusak kehidupan sosial dan ekonomi. Di sisi lain, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Katingan dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) akan memperkuat upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi dampak kerusakan alam. Proyek strategis dari strategi Katingan Lestari adalah Borneo Carbon Hub dan pemeliharaan kawasan pariwisata *ecotourism (animalium research center)*. Adanya Borneo Carbon Hub yang akan dilaksanakan pada tingkat desa diharapkan dapat meningkatkan pemasukan bagi desa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus sebagai cara agar masyarakat terus melestarikan lingkungannya. Pada proyek strategis pemeliharaan pariwisata *ecotourism*, diharapkan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dengan memanfaatkan ekosistem di Kabupaten Katingan.

Misi 7: Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Baik dan Mantap

Strategi **Katingan Mandiri: Terkoneksi dan Terintegrasi** menjadi kunci dalam mendukung misi ke–7 RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029, yaitu **Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Baik dan Mantap**. Strategi ini bertujuan mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan melalui penyediaan infrastruktur dasar yang layak, aman, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menitikberatkan pada peningkatan keterhubungan antarwilayah serta penguatan kualitas infrastruktur permukiman sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan kawasan, memperluas akses layanan dasar, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan tertata. Melalui strategi ini, pemerintah daerah berupaya mengatasi keterisolasian wilayah serta memperkuat daya dukung kawasan terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Implementasi strategi ini dilakukan melalui pengembangan jaringan transportasi darat yang terintegrasi, pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, drainase, dan perumahan. Fokus utamanya adalah menciptakan konektivitas yang efisien antarwilayah maupun

antarpermukiman, sekaligus memastikan ketersediaan prasarana dan sarana dasar yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, strategi ini mengintegrasikan perencanaan tata ruang, keselamatan lalu lintas, serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari sistem pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk konkret dari strategi ini, disusunlah beberapa program prioritas, antara lain: Program Pengembangan Peta Jalan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Utara–Selatan, yang berperan penting dalam memetakan dan menetapkan arah pengembangan infrastruktur secara sistematis dan berbasis potensi kewilayahan. Program Pengembangan Jalur Transportasi Koridor Utara Trans–Kalimantan difokuskan untuk membuka keterisolasian wilayah utara Katingan dengan membangun konektivitas utama menuju pusat–pusat pertumbuhan baru. Selanjutnya, Program Pemetaan dan Perencanaan Pembangunan serta Rehabilitasi Jalan menjadi kerangka kerja dalam memastikan perbaikan dan perawatan jalan dilakukan secara tepat sasaran dan berbasis data teknis yang akurat.

Di sisi lain, Program Pengembangan Prasarana Terminal Utama dirancang sebagai upaya membangun simpul transportasi yang mampu mengintegrasikan moda transportasi darat dan sungai, serta mendukung efisiensi distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Sementara itu, Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman berfungsi mendukung kualitas hidup masyarakat secara langsung, dengan memperbaiki aksesibilitas dan lingkungan permukiman yang sehat, aman, nyaman, serta tertata.

Dengan pendekatan yang menyeluruh tersebut, strategi ini diarahkan untuk mewujudkan wilayah yang mandiri, terkoneksi, dan terintegrasi secara menyeluruh, tetapi juga secara sosial dan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Katingan berharap strategi ini dapat memperkuat ketahanan wilayah terhadap tantangan perubahan iklim dan bencana, sekaligus menjadikan infrastruktur sebagai pengungkit utama transformasi wilayah menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

3.2.5 Dukungan Kegiatan Prioritas Utama RPJMN

Kegiatan prioritas utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya. Berikut Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 yang didukung melalui Program dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025-2029.

Tabel 3-17 Kegiatan Prioritas Utama

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Nomenklatur Program Daerah	Bidang Urusan
PN1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertangung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika
PN2	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertanian
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan pangan akuatik (blue food)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perikanan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan
	Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan
	Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan
	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian
	Peningkatan penyediaan energi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
	Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
	Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
	Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengembangan SPAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Nomenklatur Program Daerah	Bidang Urusan
	terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika
	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan susut dan sisa pangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup
	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kehutanan
	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup
	Peningkatan kualitas ekosistem gambut	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup
	Perubahan perilaku dan penguatan tata	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Nomenklatur Program Daerah	Bidang Urusan
	kelola persampahan		
	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup
PN3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika
	Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika
	Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
PN4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
	Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, inservice training), perlindungan hukum, dan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidikan

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Nomenklatur Program Daerah	Bidang Urusan
	kesejahteraan berbasis kinerja		
	Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pendidikan
	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian dan Pengembangan
	Penurunan kematian ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kesehatan

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Nomenklatur Program Daerah	Bidang Urusan
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kebudayaan
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian dan Pengembangan
	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kepemudaan dan Olahraga
PN5	Pengembangan hilirisasi Bauksit	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Perdagangan
PN6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial
	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perdagangan
	Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial
	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Nomenklatur Program Daerah	Bidang Urusan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
PN7	Pencegahan tindak pidana korupsi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kepegawaian
	Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika
	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Keuangan
	Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Keuangan
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Keuangan
PN8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTERKEBANGSAAN	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2.6 Dukungan Program Strategis Nasional (ProSN)

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab

pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia.

Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

Tabel 3-18 Program Strategis Nasional (ProSN)

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
1.	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 3. Sekolah Rakyat 4. Pembangunan 3 Juta Rumah	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 7. Program Pengembangan Perumahan 8. Program Kawasan Permukiman 9. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 10. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 11. Program Penanggulangan Bencana 12. Program Pemberdayaan Sosial 13. Program Rehabilitasi Sosial 14. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 15. Program Penanganan Bencana

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			16. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Program Penempatan Tenaga Kerja 18. Program Hubungan Industrial 19. Program Perlindungan Perempuan 20. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 21. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 22. Program Penanganan Kerawanan Pangan 23. Program Pendaftaran Penduduk 24. Program Pencatatan Sipil 25. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 26. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 27. Program Penataan Desa 28. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			29. Program Administrasi Pemerintahan Desa 30. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 31. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 32. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 33. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 34. Program Pengelolaan Pelayaran 35. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 36. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 37. Program Pengembangan UMKM

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			38. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 39. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 40. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 41. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 42. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 43. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 44. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 45. Program Penyuluhan Pertanian 46. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 47. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 48. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 49. Penataan Bangunan Gedung

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			50. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 51. Program Pengembangan Permukiman
2.	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan) 2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian 3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah 4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 6. Program Penyuluhan Pertanian
3.	Kesehatan untuk semua	1. Stunting 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 3. Jaminan Kesehatan Nasional 4. Penuntasan TBC 5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 7. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 9. Program Pengembangan Permukiman 10. Program Kawasan Permukiman 11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 12. Program Pemberdayaan Sosial

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			13. Program Rehabilitasi Sosial 14. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 15. Program Penanganan Kerawanan Pangan 16. Program Pengawasan Keamanan Pangan 17. Program Pengelolaan Persampahan 18. Program Administrasi Pemerintahan Desa 19. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 20. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 21. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 22. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 23. Program Pemberdayaan dan

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			Perlindungan Koperasi 24. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 25. Program Pengembangan UMKM 26. Program Pelayanan Penanaman Modal 27. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 28. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 29. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 30. Program Penyuluhan Pertanian 31. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 32. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			Pembangunan Daerah 33. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 34. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 35. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 36. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD 2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran 4. Makan Bergizi Gratis	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5.	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan) 5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengembangan Permukiman 3. Program Penyelenggaraan Jalan

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			4. Program Pengembangan Perumahan 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Penanganan Kerawanan Pangan 8. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 10. Program Pengelolaan Pelayaran 11. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 12. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 13. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 14. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			15. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 16. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 17. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 18. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 19. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 20. Program Perizinan Usaha Pertanian 21. Program Penyuluhan Pertanian 22. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 23. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 24. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 25. Program Perekonomian dan Pembangunan

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			26. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 27. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 28. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 29. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 30. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 31. Program Penyelenggaraan Pengawasan 32. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 33. Program Perencanaan Tenaga Kerja 34. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 35. Program Penempatan Tenaga Kerja

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			36. Program Pengembangan UMKM 37. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 38. Program Promosi Penanaman Modal 39. Program Pelayanan Penanaman Modal 40. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 41. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 42. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 43. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 44. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 45. Program Pengembangan Ekspor 46. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

No	ProSN	Proyek/Kegiatan	Dukungan Nomenklatur Program Daerah
			47. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 48. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 49. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 50. Program Pengelolaan Persampahan

3.2.7 Dukungan Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029, sinkronisasi dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara kabupaten dan provinsi. Berikut tabel penyelarasan program prioritas daerah Provinsi dan Kabupaten):

Tabel 3-19 Program Dukungan Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029

No	Program Prioritas Kalimantan Tengah	Rincian Program Prioritas Kalimantan Tengah	Nomenklatur Program Daerah
1	**Kalteng Bermartabat**	Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

No	Program Prioritas Kalimantan Tengah	Rincian Program Prioritas Kalimantan Tengah	Nomenklatur Program Daerah
2	**Betang Maju**	Pembangunan 1.000 km jalan desa, yaitu membangun jalan sepanjang 1.000 km bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antardesa serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Revitalisasi infrastruktur lintas kabupaten dan kota, yaitu memperbaiki dan memperbarui infratsruktur jalan di seluruh kabupaten dan kota untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif, yaitu mengembangkan wilayah khusus ekonomi dengan fokus pada hilirisasi mineral, transportasi, dan distribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi mineral dan sumber daya alam bertujuan untuk mengolah mineral dan sumber daya alam secara lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan Kereta Api Palangkaraya – Gunung Mas – Katingan untuk memperlancar transportasi dan distribusi serta menghubungkan pusat-pusat ekonomi yang penting. Zona Distribusi Lintas Timur Sungai Kapuas bertujuan untuk membentuk zona distribusi di sepanjang Sungai Kapuas untuk memperlancar aliran barang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
		Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa, yaitu meningkatkan akses masyarakat desa terhadap air bersih yang layak melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
		Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar, yaitu menyediakan akses listrik bagi seluruh desa di Provinsi Kalimantan Tengah	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman, yaitu memperluas jangkauan sinyal telekomunikasi dan akses internet di daerah pedalaman untuk menghubungkan masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

No	Program Prioritas Kalimantan Tengah	Rincian Program Prioritas Kalimantan Tengah	Nomenklatur Program Daerah
3	**Betang Makmur**	Rp2 juta per Kartu Keluarga Bantuan Pangan, yaitu menyediakan bantuan pangan sebesar Rp2 juta per keluarga untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan mengurangi angka kemiskinan.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Operasi Pasar Murah, yaitu dengan menyelenggarakan pasar murah secara berkala untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		250 Miliarder Muda Baru, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan 250 pengusaha muda sukses melalui dukungan modal dan bimbingan bisnis yang tepat.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		Milenial Job Center, yaitu fasilitas pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi SDM berbasis wirausaha untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi generasi milenial.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		Inkubasi UMKM, yaitu menyediakan program pendampingan dan dukungan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, akses pasar, legalitas hukum, dan daya saing.	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM
		Asuransi Petani dan Nelayan, yaitu memberikan perlindungan asuransi bagi petani dan nelayan untuk menjamin kelangsungan usaha mereka dari risiko alam dan ekonomi.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Bantuan Perahu dan Alat Tangkap, yaitu untuk mendukung nelayan dengan menyediakan perahu dan alat tangkap yang lebih modern untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan warga pesisir.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
4	**Betang Cerdas**	Sekolah/Kuliah Gratis, yaitu menyediakan akses pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

No	Program Prioritas Kalimantan Tengah	Rincian Program Prioritas Kalimantan Tengah	Nomenklatur Program Daerah
		Satu Keluarga Harus Ada Sarjana, yaitu mendorong setiap keluarga untuk memiliki minimal satu anggota keluarga lulusan perguruan tinggi guna meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan sosial- ekonomi di masyarakat.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		1.000 Rumah Guru, yaitu dengan membangun 1.000 rumah untuk guru sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar mereka dapat tinggal dekat dengan tempat mengajar serta meningkatkan kenyamanan dan kinerja pengajaran.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Insentif Guru Agama, yaitu memberikan insentif khusus bagi guru mengaji, guru sekolah minggu, Balai Basarah, dan guru agama lainnya untuk menghargai peran mereka dalam membentuk karakter dan moral anak-anak.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Kalteng Mengaji, yaitu program untuk memperdalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, seperti menghafal kitab suci, memahami ajaran agama, dan memperkuat spiritualitas dan toleransi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5	**Betang Sehat**	Berobat Gratis Berbasis KTP, yaitu memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah hanya dengan menunjukkan KTP sehingga semua warga dapat menerima perawatan medis tanpa khawatir biaya.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Insentif Tenaga Kesehatan Desa, yaitu menyediakan insentif bagi tenaga kesehatan yang bekerja di desa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja sehingga memastika layanan kesehatan yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		Revitalisasi Puskesmas Desa, yaitu memperbaiki dan memperbarui fasilitas puskesmas di desa- desa untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas serta mendekatkan akses kesehatan ke seluruh masyarakat.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; PROGRAM AKREDETASI PELAYANAN KESEHATAN

No	Program Prioritas Kalimantan Tengah	Rincian Program Prioritas Kalimantan Tengah	Nomenklatur Program Daerah
		Pendampingan Ibu Hamil dan Pascahamil, yaitu menyediakan program pendampingan komprehensif bagi ibu hamil dan setelah melahirkan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi, mencegah komplikasi, dan memberikan edukasi terkait perawatan kesehatan, serta memastikan kesehatan ibu dan bayi terjaga. Ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan generasi masa depan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		1 Desa 1 Ambulans, yaitu menyediakan satu ambulans untuk setiap desa guna memastikan respon cepat dalam situasi darurat, meningkatkan kemampuan penanganan medis di daerah pedesaan, dan memastikan akses layanan kesehatan darurat.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
6	**Betang Harmoni**	Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata), yaitu mengembangkan 100 desa wisata dengan memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan potensi pariwisata lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui sektor pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		Rp150 Miliar Bantuan Provinsi untuk Kabupaten Kota, yaitu mengalokasikan dana Rp150 miliar untuk mendukung pembangunan dan program prioritas di seluruh kabupaten dan kota dalam memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Rp250 Juta Stimulus Desa, yaitu memberikan stimulus Rp250 juta kepada setiap desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup warga desa dalam rangka mempercepat pertumbuhan desa mandiri.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No	Program Prioritas Kalimantan Tengah	Rincian Program Prioritas Kalimantan Tengah	Nomenklatur Program Daerah
		Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW se Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu menyediakan insentif bagi pemimpin desa dan tokoh masyarakat lainnya sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memimpin dan menjaga keharmonisan serta ketertiban di masyarakat.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga, yaitu membentuk tim respon cepat untuk menangani kebakaran lahan dan memberikan bantuan langsung kepada warga terdampak serta melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dari bencana kebakaran.	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Katingan tahun 2025–2029 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya, guna memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program. Maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2025–2029 dan indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan Kabupaten Katingan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4-1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					412.512.921.000		430.919.443.000		440.369.465.000		448.390.006.000		456.964.015.000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					312.827.319.000		322.212.138.000		326.878.502.000		329.684.857.000		333.075.403.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	70,8	70,81	70,81	312.827.319.000	70,82	322.212.138.000	70,83	326.878.502.000	70,84	329.684.857.000	70,85	333.075.403.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					97.636.282.000		106.423.547.000		111.001.666.000		115.991.816.000		120.931.080.000	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	66,83	69,87	72,91	97.636.282.000	75,95	106.423.547.000	78,99	111.001.666.000	82,03	115.991.816.000	85	120.931.080.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	98,54	98,75	98,96		99,17		99,38		99,58		99,79		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	95,66	96,28	96,9		97,52		98,14		98,76		99,38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	36,33	41,31	46,28		51,26		56,24		61,22		66,19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	52,11	56,55	65,23		76,8		91,26		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	73,75	66,25	67		67,75		68,5		69,25		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	56,89	59,39	61,89		64,39		66,89		69,39		71,89		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	58,37	60,77	63,17		65,57		67,97		70,37		72,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	73,27	74,17	75,07		75,97		76,87		77,77		78,67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	71,35	72,85	74,35		75,85		77,35		78,85		80,35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	69,37	70,37	71,37		72,37		73,37		74,37		75,37		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	71,9	72,9	73,9		74,9		75,9		76,9		77,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					460.000.000		501.400.000		546.526.000		595.713.000		649.327.000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	75	76	78	460.000.000	87	501.400.000	93	546.526.000	100	595.713.000	100	649.327.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					50.000.000		54.500.000		59.405.000		64.751.000		70.579.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	95	95,01	95,02	50.000.000	95,03	54.500.000	95,04	59.405.000	95,05	64.751.000	95,06	70.579.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	75	80	81		82		83		84		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					0		50.000.000		54.500.000		59.405.000		64.751.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	76,3	78,3	80,3	0	82,3	50.000.000	84,3	54.500.000	86,3	59.405.000	88,3	64.751.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					1.539.320.000		1.677.858.000		1.828.866.000		1.993.464.000		2.172.875.000	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	60	70	75	1.539.320.000	80	1.677.858.000	85	1.828.866.000	90	1.993.464.000	100	2.172.875.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					281.667.450.000		299.459.640.000		312.087.045.000		325.631.418.000		342.653.949.000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					133.132.459.232		137.126.433.000		139.240.225.000		141.417.432.000		143.659.955.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	133.132.459.232	65	137.126.433.000	66	139.240.225.000	67	141.417.432.000	71	143.659.955.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					143.781.882.752		157.152.321.000		167.199.654.000		178.058.575.000		192.284.596.000	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	78,24	77	75	143.781.882.752	74	157.152.321.000	72	167.199.654.000	70	178.058.575.000	69	192.284.596.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	19,6	19,1	18,25		17,4		16,55		15,7		14,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	6	5,8	5,6		5,4		5,2		5		4,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	50	50	50		50		50		50		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	22,5	23	23		23		23		23		23		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	70	70	70		70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	60	75	85		90		95		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	30	40	50		60		70		80		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	70	70	70		70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	0	60	62		64		66		69		71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	9	8,8	8,5		8,3		8		7,7		7,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	70	75	80		83		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Kesehatan
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	0,86	0,86	0,86		0,86		0,86		0,86		0,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pelayanan kesehatan sesuai standar (%)													menangani Bidang Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.908.600.266		3.170.374.000		3.455.707.000		3.766.721.000		4.105.726.000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100	2.908.600.266	100	3.170.374.000	100	3.455.707.000	100	3.766.721.000	100	4.105.726.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	70	70	70		70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	70	70	70		70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	6.74:6.74	6.75:6.75	6.75:6.75		6.75:6.75		6.75:6.75		6.75:6.75		6.75:6.75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					1.199.560.050		1.307.520.000		1.425.197.000		1.553.465.000		1.693.276.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	75	75	75	1.199.560.050	75	1.307.520.000	75	1.425.197.000	75	1.553.465.000	75	1.693.276.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	20	20	20		20		20		20		20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	40	42	44		46		48		50		52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					644.947.700		702.992.000		766.262.000		835.225.000		910.396.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	644.947.700	100	702.992.000	100	766.262.000	100	835.225.000	100	910.396.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					106.738.119.000		117.205.362.000		123.082.918.000		132.446.785.000		143.700.620.000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.986.421.192		10.468.713.000		10.782.775.000		11.106.258.000		11.439.446.000	
Meningkatnya Pelayanan dan	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	18.986.421.192	65	10.468.713.000	66	10.782.775.000	67	11.106.258.000	71	11.439.446.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah														Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					11.433.913.139		14.662.965.000		15.482.632.000		16.876.069.000		18.394.915.000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	9,22	9,77	10,33	11.433.913.139	10,88	14.662.965.000	11,44	15.482.632.000	11,99	16.876.069.000	12,55	18.394.915.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	63,87	64,3	64,72		65,15		65,58		66		66,43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					2.200.000.000		2.935.300.000		3.199.477.000		3.487.429.000		3.801.298.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota (Persentase)	51,63	52,49	53,35	2.200.000.000	54,21	2.935.300.000	55,07	3.199.477.000	55,94	3.487.429.000	56,8	3.801.298.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0		2.000.000.000		2.180.000.000		2.376.200.000		2.590.058.000	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	100	100	100	0	100	2.000.000.000	100	2.180.000.000	100	2.376.200.000	100	2.590.058.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					310.000.000		337.900.000		368.311.000		401.458.000		437.590.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	100	100	100	310.000.000	100	337.900.000	100	368.311.000	100	401.458.000	100	437.590.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.000.000.000		1.090.000.000		1.188.100.000		1.295.029.000		1.411.581.000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.090.000.000	100	1.188.100.000	100	1.295.029.000	100	1.411.581.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					3.495.000.000		4.009.550.000		4.370.409.000		4.763.746.000		5.192.483.000	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	3.495.000.000	100	4.009.550.000	100	4.370.409.000	100	4.763.746.000	100	5.192.483.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					4.841.680.000		5.277.431.000		5.752.400.000		6.270.116.000		6.834.426.000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	4.841.680.000	100	5.277.431.000	100	5.752.400.000	100	6.270.116.000	100	6.834.426.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	99,99	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					7.464.287.727		11.786.073.000		12.846.820.000		14.003.034.000		15.263.307.000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	7.464.287.727	100	11.786.073.000	100	12.846.820.000	100	14.003.034.000	100	15.263.307.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					55.985.856.942		63.524.584.000		65.698.992.000		70.545.274.000		76.894.349.000	
Meningkatnya aksesibilitas jalan yang nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	37,88	39,48	41,08	55.985.856.942	42,68	63.524.584.000	44,28	65.698.992.000	45,88	70.545.274.000	47,48	76.894.349.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					140.000.000		152.600.000		166.334.000		181.304.000		197.621.000	
Meningkatnya kompetensi tenaga kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	100	100	100	140.000.000	100	152.600.000	100	166.334.000	100	181.304.000	100	197.621.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	15,63	16,52	17,41		18,29		19,18		20,07		20,96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					880.960.000		960.246.000		1.046.668.000		1.140.868.000		1.243.546.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%)	100	100	100	880.960.000	100	960.246.000	100	1.046.668.000	100	1.140.868.000	100	1.243.546.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					18.573.764.000		20.802.976.000		22.219.546.000		23.749.933.000		25.403.977.000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.373.764.000		7.594.976.000		7.822.826.000		8.057.511.000		8.299.236.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	71,65	72	72,5	7.373.764.000	73	7.594.976.000	73,5	7.822.826.000	73,8	8.057.511.000	74	8.299.236.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.000.000.000		1.090.000.000		1.188.100.000		1.295.029.000		1.411.581.000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.090.000.000	100	1.188.100.000	100	1.295.029.000	100	1.411.581.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)													Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.860.000.000		2.027.400.000		2.209.866.000		2.408.753.000		2.625.541.000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani (Persentase)	78,98	0	30	1.860.000.000	47	2.027.400.000	59	2.209.866.000	65	2.408.753.000	75	2.625.541.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					240.000.000		261.600.000		285.144.000		310.806.000		338.779.000	
Meningkatnya kualitas perumahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh	(Persentase) berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Persentase)	10	10	10	240.000.000	10	261.600.000	10	285.144.000	10	310.806.000	10	338.779.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					8.100.000.000		8.829.000.000		9.623.610.000		10.489.734.000		11.433.811.000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0,84	37,6	40,2	8.100.000.000	42,8	8.829.000.000	45,5	9.623.610.000	48	10.489.734.000	51	11.433.811.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					0		1.000.000.000		1.090.000.000		1.188.100.000		1.295.029.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, utilitas umum PSU	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	100	100	100	0	100	1.000.000.000	100	1.090.000.000	100	1.188.100.000	100	1.295.029.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					38.065.531.000		39.601.711.000		41.219.458.000		42.924.409.000		44.722.664.000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.495.261.518		32.440.118.000		33.413.322.000		34.415.721.000		35.448.194.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	70	70,25	70,5	24.801.317.210	71	25.545.356.000	71,25	26.311.717.000	71,5	27.101.068.000	72	27.914.101.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	66,95	66,96	66,97	6.693.944.308	66,98	6.894.762.000	66,99	7.101.605.000	67	7.314.653.000	71	7.534.093.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.222.701.396		2.422.744.000		2.640.791.000		2.878.462.000		3.137.524.000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	920.061.396	100	970.061.396	100	970.061.396	100	970.061.396	100	1.020.061.396	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase ganggungan trantibum yang dapat diselesaikan (Persentase)	100	100	100	852.640.000	100	952.640.000	100	1.170.687.000	100	1.220.687.000	100	1.429.749.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	450.000.000	100	500.042.604	100	500.042.604	100	687.713.604	100	687.713.604	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.995.681.692		3.265.293.000		3.559.169.000		3.879.494.000		4.228.649.000	
Meningkatnya penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	100	100	100	224.621.584	100	218.245.000	100	239.770.000	100	263.426.000	100	289.425.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pra bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	100	100	100	744.940.227	100	754.000.000	100	812.870.000	100	875.303.000	100	942.638.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	1.035.000.000	100	1.133.442.000	100	1.241.661.000	100	1.360.879.000	100	1.490.881.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	0,59	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya sistem dasar penanggulangan bencana	Cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana (Persentase)	100	100	100	991.119.881	100	1.159.606.000	100	1.264.868.000	100	1.379.886.000	100	1.505.705.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.351.886.394		1.473.556.000		1.606.176.000		1.750.732.000		1.908.297.000	
Meningkatnya layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	1.351.886.394	100	1.473.556.000	100	1.606.176.000	100	1.750.732.000	100	1.908.297.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perlindungan Masyarakat
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	11,54	15	15		15		15		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					8.422.504.000		9.484.916.000		9.988.121.000		10.526.104.000		11.101.675.000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.670.486.178		5.840.600.000		6.015.818.000		6.196.293.000		6.382.182.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	65	65,5	67	5.670.486.178	69	5.840.600.000	71	6.015.818.000	74	6.196.293.000	77	6.382.182.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					237.478.904		658.852.000		718.148.000		782.782.000		853.232.000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial (Persentase)	79	80	81	237.478.904	82	658.852.000	83	718.148.000	84	782.782.000	85	853.232.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					781.375.060		1.096.316.000		1.194.984.000		1.302.533.000		1.419.761.000	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	100	100	100	781.375.060	100	1.096.316.000	100	1.194.984.000	100	1.302.533.000	100	1.419.761.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.200.000.000		1.308.000.000		1.425.720.000		1.554.034.000		1.693.897.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (Persentase)	68	70	73	1.200.000.000	76	1.308.000.000	79	1.425.720.000	82	1.554.034.000	85	1.693.897.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					500.103.921		545.113.000		594.173.000		647.649.000		705.937.000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	500.103.921	100	545.113.000	100	594.173.000	100	647.649.000	100	705.937.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					33.059.937		36.035.000		39.278.000		42.813.000		46.666.000	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	70	72	74	33.059.937	76	36.035.000	78	39.278.000	80	42.813.000	82	46.666.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					9.006.962.950		3.684.870.000		4.016.508.000		4.377.992.000		4.772.012.000	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.626.348.000		0		0		0		0	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	67	70	70	5.626.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					130.000.000		141.700.000		154.453.000		168.353.000		183.505.000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	82,35	70	75	130.000.000	75	141.700.000	80	154.453.000	80	168.353.000	100	183.505.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					900.000.000		981.000.000		1.069.290.000		1.165.526.000		1.270.423.000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	1,13	20	25	900.000.000	25	981.000.000	30	1.069.290.000	30	1.165.526.000	30	1.270.423.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	69,43	69,77	72,24		74,7		77,15		79,58		82,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					400.614.950		436.670.000		475.970.000		518.807.000		565.500.000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayang Kabupaten/kota (%)	79,36	80	81	400.614.950	82	436.670.000	83	475.970.000	84	518.807.000	85	565.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	35	40	40		40		40		40		50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.950.000.000		2.125.500.000		2.316.795.000		2.525.306.000		2.752.584.000	
Meningkatnya perlidungan hak-hak pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	11.595	11.682	11.799	1.950.000.000	11.916	2.125.500.000	12.033	2.316.795.000	12.150	2.525.306.000	12.267	2.752.584.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	71,05	95	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.717.233.031		10.728.749.000		11.217.411.000		11.735.741.000		12.285.990.000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.717.233.031		7.948.750.000		8.187.212.000		8.432.828.000		8.685.813.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	7.717.233.031	65	7.948.750.000	66	8.187.212.000	67	8.432.828.000	71	8.685.813.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.100.000.000		1.199.000.000		1.306.910.000		1.424.531.000		1.552.739.000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	5,65	5,6	4,5	1.100.000.000	4,6	1.199.000.000	4,7	1.306.910.000	4,8	1.424.531.000	4,9	1.552.739.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					276.039.945		300.883.000		327.963.000		357.479.000		389.652.000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	90	90	90	276.039.945	90	300.883.000	90	327.963.000	90	357.479.000	90	389.652.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					100.000.000		409.000.000		445.810.000		485.932.000		529.666.000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	10	10	10	100.000.000	10	409.000.000	10	445.810.000	10	485.932.000	10	529.666.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					100.000.000		209.000.000		227.810.000		248.312.000		270.661.000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	209.000.000	100	227.810.000	100	248.312.000	100	270.661.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					300.000.000		427.000.000		465.430.000		507.318.000		552.977.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	70	73	76	300.000.000	80	427.000.000	83	465.430.000	87	507.318.000	90	552.977.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					123.960.055		235.116.000		256.276.000		279.341.000		304.482.000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	65	70	74	123.960.055	78	235.116.000	82	256.276.000	86	279.341.000	90	304.482.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	90	90	90		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					14.840.610.204		15.366.450.000		15.915.320.000		16.488.566.000		17.087.630.000	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.496.916.507		13.901.824.000		14.318.878.000		14.748.445.000		15.190.898.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	13.496.916.507	65	13.901.824.000	66	14.318.878.000	67	14.748.445.000	71	15.190.898.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.164.875.325		1.269.714.000		1.383.988.000		1.508.547.000		1.644.316.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya diverfisikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	75	80	85	1.164.875.325	90	1.269.714.000	95	1.383.988.000	98	1.508.547.000	100	1.644.316.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase peningkatan ragam pangan dan pangan olahan (Persentase)	10	11	12		13		14		15		16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase cadangan pangan (%)	75	80	85		90		95		98		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	87	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					78.818.372		85.912.000		93.644.000		102.072.000		111.258.000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	100	100	100	78.818.372	100	85.912.000	100	93.644.000	100	102.072.000	100	111.258.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					100.000.000		109.000.000		118.810.000		129.502.000		141.158.000	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	109.000.000	100	118.810.000	100	129.502.000	100	141.158.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.700.000.000		1.852.999.000		2.019.768.000		2.201.547.000		2.399.687.000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					100.070.000		109.076.000		118.893.000		129.593.000		141.256.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	100	100	100.070.000	100	109.076.000	100	118.893.000	100	129.593.000	100	141.256.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN					310.800.000		338.772.000		369.261.000		402.495.000		438.719.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	310.800.000	100	338.772.000	100	369.261.000	100	402.495.000	100	438.719.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					393.412.000		428.819.000		467.412.000		509.479.000		555.333.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	100	100	100	393.412.000	100	428.819.000	100	467.412.000	100	509.479.000	100	555.333.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
	Tersedianya tanah untuk masyarakat (%)	0	30	40		50		60		80		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					895.718.000		976.332.000		1.064.202.000		1.159.980.000		1.264.379.000	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	100	100	100	895.718.000	100	976.332.000	100	1.064.202.000	100	1.159.980.000	100	1.264.379.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
	Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal. (%)	98,85	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					21.095.761.000		22.289.032.000		23.568.537.000		24.941.402.000		26.415.380.000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.755.759.600		12.108.432.000		12.471.685.000		12.845.835.000		13.231.210.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	11.755.759.600	65	12.108.432.000	66	12.471.685.000	67	12.845.835.000	71	13.231.210.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					200.000.000		218.000.000		237.620.000		259.005.000		282.316.000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	200.000.000	100	218.000.000	100	237.620.000	100	259.005.000	100	282.316.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.150.001.400		1.253.501.000		1.366.316.000		1.489.285.000		1.623.320.000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	100	100	100	1.150.001.400	100	1.253.501.000	100	1.366.316.000	100	1.489.285.000	100	1.623.320.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.232.600.000		1.343.534.000		1.464.452.000		1.596.252.000		1.739.915.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	1.232.600.000	100	1.343.534.000	100	1.464.452.000	100	1.596.252.000	100	1.739.915.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					50.000.000		54.500.000		59.405.000		64.751.000		70.579.000	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	54.500.000	100	59.405.000	100	64.751.000	100	70.579.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					307.400.000		335.066.000		365.221.000		398.091.000		433.920.000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	307.400.000	100	335.066.000	100	365.221.000	100	398.091.000	100	433.920.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					25.000.000		27.250.000		29.702.000		32.375.000		35.289.000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	25.000.000	100	27.250.000	100	29.702.000	100	32.375.000	100	35.289.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					115.000.000		125.350.000		136.631.000		148.928.000		162.331.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	115.000.000	100	125.350.000	100	136.631.000	100	148.928.000	100	162.331.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					97.840.000		106.645.000		116.243.000		126.705.000		138.109.000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	97.840.000	100	106.645.000	100	116.243.000	100	126.705.000	100	138.109.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					70.000.000		76.300.000		83.167.000		90.652.000		98.810.000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	70.000.000	100	76.300.000	100	83.167.000	100	90.652.000	100	98.810.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6.092.160.000		6.640.454.000		7.238.095.000		7.889.523.000		8.599.581.000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	10	10	10	6.092.160.000	10	6.640.454.000	10	7.238.095.000	10	7.889.523.000	10	8.599.581.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					8.388.020.000		8.875.660.000		9.193.170.000		9.524.814.000		9.871.438.000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.788.020.000		8.021.660.000		8.262.310.000		8.510.179.000		8.765.485.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	70	70	70	7.788.020.000	70	8.021.660.000	70	8.262.310.000	70	8.510.179.000	70	8.765.485.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					200.000.000		218.000.000		237.620.000		259.005.000		282.316.000	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Perekaman KTP elektronik (%)	98,34	97,5	98	200.000.000	99	218.000.000	99,5	237.620.000	99,9	259.005.000	99,9	282.316.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	62,82	50	55		60		65		70		70,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					200.000.000		218.000.000		237.620.000		259.005.000		282.316.000	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran (%)	98,81	96	97	200.000.000	98	218.000.000	99	237.620.000	99,8	259.005.000	99,9	282.316.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					200.000.000		218.000.000		237.620.000		259.005.000		282.316.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	11,54	24	32	200.000.000	40	218.000.000	48	237.620.000	56	259.005.000	64	282.316.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN					0		200.000.000		218.000.000		237.620.000		259.005.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	0	100	200.000.000	100	218.000.000	100	237.620.000	100	259.005.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					9.327.516.000		9.837.441.000		10.383.373.000		10.968.255.000		11.595.288.000	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.492.516.000		5.657.291.000		5.827.010.000		6.001.820.000		6.181.875.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	65	66	68	5.492.516.000	70	5.657.291.000	72	5.827.010.000	74	6.001.820.000	76	6.181.875.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					1.000.000.000		1.090.000.000		1.188.100.000		1.295.029.000		1.411.581.000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.090.000.000	100	1.188.100.000	100	1.295.029.000	100	1.411.581.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					195.000.000		212.550.000		231.679.000		252.530.000		275.258.000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	195.000.000	100	212.550.000	100	231.679.000	100	252.530.000	100	275.258.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.420.000.000		1.547.800.000		1.687.102.000		1.838.941.000		2.004.445.000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang	100	100	100	1.420.000.000	100	1.547.800.000	100	1.687.102.000	100	1.838.941.000	100	2.004.445.000	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengawasan pemerintah desa	Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)													menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.220.000.000		1.329.800.000		1.449.482.000		1.579.935.000		1.722.129.000	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100	1.220.000.000	100	1.329.800.000	100	1.449.482.000	100	1.579.935.000	100	1.722.129.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4.688.482.969		5.110.445.000		5.570.385.000		6.071.720.000		6.618.175.000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					46.973.000		51.200.000		55.808.000		60.831.000		66.306.000	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,26	1,7	1,6	46.973.000	1,5	51.200.000	1,4	55.808.000	1,3	60.831.000	1,2	66.306.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.845.759.246		3.101.877.000		3.381.046.000		3.685.340.000		4.017.021.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	79,035	79,5	79,6	2.845.759.246	79,7	3.101.877.000	79,8	3.381.046.000	79,9	3.685.340.000	80	4.017.021.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7	6,9	6,8		6,7		6,6		6,5		6,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) (%)	70	70	70		70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	57	58	59		60		61		62		63		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.795.750.723		1.957.368.000		2.133.531.000		2.325.549.000		2.534.848.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	100	100	100	1.795.750.723	100	1.957.368.000	100	2.133.531.000	100	2.325.549.000	100	2.534.848.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					12.963.745.000		14.402.390.000		15.154.671.000		15.958.339.000		16.817.530.000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.801.521.534		9.065.567.000		9.337.534.000		9.617.660.000		9.906.190.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	8.801.521.534	65	9.065.567.000	66	9.337.534.000	67	9.617.660.000	71	9.906.190.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					4.066.147.866		4.432.101.000		4.830.990.000		5.265.779.000		5.739.699.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	100	100	100	4.066.147.866	100	4.432.101.000	100	4.830.990.000	100	5.265.779.000	100	5.739.699.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2	80	85		87		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					96.075.600		904.722.000		986.147.000		1.074.900.000		1.171.641.000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai	Konektivitas Laut (Unit)	1	1	1	96.075.600	1	904.722.000	1	986.147.000	1	1.074.900.000	1	1.171.641.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					11.258.334.951		11.884.727.000		12.555.890.000		13.275.504.000		14.047.570.000	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.447.615.202		6.641.043.000		6.840.274.000		7.045.483.000		7.256.847.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	72,05	73	73,05	6.447.615.202	74	6.641.043.000	74,5	6.840.274.000	75	7.045.483.000	75,5	7.256.847.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					910.000.049		991.900.000		1.081.171.000		1.178.476.000		1.284.539.000	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	100	100	100	910.000.049	100	991.900.000	100	1.081.171.000	100	1.178.476.000	100	1.284.539.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pemerintah daerah kabupaten/kota (%)													
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.900.719.700		4.251.784.000		4.634.445.000		5.051.545.000		5.506.184.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	3.900.719.700	100	4.251.784.000	100	4.634.445.000	100	5.051.545.000	100	5.506.184.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8.810.959.000		9.237.586.000		9.691.620.000		10.175.196.000		10.690.634.000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.105.959.000		6.289.137.000		6.477.811.000		6.672.146.000		6.872.310.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	6.105.959.000	65	6.289.137.000	66	6.477.811.000	67	6.672.146.000	71	6.872.310.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					75.000.000		81.750.000		89.107.000		97.127.000		105.868.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	100	100	100	75.000.000	100	81.750.000	100	89.107.000	100	97.127.000	100	105.868.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					77.002.000		83.932.000		91.486.000		99.719.000		108.694.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	100	77.002.000	100	83.932.000	100	91.486.000	100	99.719.000	100	108.694.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					500.000.000		545.000.000		594.050.000		647.514.000		705.790.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	545.000.000	100	594.050.000	100	647.514.000	100	705.790.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					25.000.000		27.250.000		29.702.000		32.375.000		35.289.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100	25.000.000	100	27.250.000	100	29.702.000	100	32.375.000	100	35.289.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					547.998.000		597.317.000		651.076.000		709.673.000		773.543.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (Persentase)	32,11	32,2	32,4	547.998.000	32,6	597.317.000	32,8	651.076.000	33	709.673.000	33,2	773.543.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Informal ke Formal (Persentase)													menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.480.000.000		1.613.200.000		1.758.388.000		1.916.642.000		2.089.140.000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	100	100	100	1.480.000.000	100	1.613.200.000	100	1.758.388.000	100	1.916.642.000	100	2.089.140.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					8.742.730.000		9.131.378.000		9.543.061.000		9.979.491.000		10.442.526.000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.636.590.000		6.835.687.000		7.040.758.000		7.251.981.000		7.469.540.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	6.636.590.000	65	6.835.687.000	66	7.040.758.000	67	7.251.981.000	71	7.469.540.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					1.022.490.000		1.114.514.000		1.214.820.000		1.324.154.000		1.443.328.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	1.022.490.000	100	1.114.514.000	100	1.214.820.000	100	1.324.154.000	100	1.443.328.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					308.650.000		336.428.000		366.707.000		399.710.000		435.684.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	308.650.000	100	336.428.000	100	366.707.000	100	399.710.000	100	435.684.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					525.000.000		572.250.000		623.752.000		679.890.000		741.080.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	525.000.000	100	572.250.000	100	623.752.000	100	679.890.000	100	741.080.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					149.343.050		162.783.000		177.434.000		193.403.000		210.809.000	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	149.343.050	100	162.783.000	100	177.434.000	100	193.403.000	100	210.809.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.656.950		109.716.000		119.590.000		130.353.000		142.085.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	100.656.950	100	109.716.000	100	119.590.000	100	130.353.000	100	142.085.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.310.000.000		8.684.000.000		8.980.000.000		9.299.000.000		9.650.000.000	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.133.116.977		1.174.000.000		1.210.000.000		1.290.000.000		1.350.000.000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	13,77	13,85	14	1.133.116.977	14,14	1.174.000.000	14,28	1.210.000.000	14,4	1.290.000.000	14,52	1.350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	13,77	9,13	9,16		9,18		9,21		9,23		9,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	8,87	13,85	14		14,14		14,28		14,4		14,52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					6.910.000.000		7.230.000.000		7.450.000.000		7.659.000.000		7.870.000.000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	10	12	14	6.910.000.000	16	7.230.000.000	18	7.450.000.000	20	7.659.000.000	22	7.870.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0	20	25		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					266.883.023		280.000.000		320.000.000		350.000.000		430.000.000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	12	14	16	266.883.023	18	280.000.000	20	320.000.000	22	350.000.000	24	430.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					385.600.000		420.304.000		458.131.000		499.363.000		544.305.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					385.600.000		420.304.000		458.131.000		499.363.000		544.305.000	
Tercapanya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	100	100	100	385.600.000	100	420.304.000	100	458.131.000	100	499.363.000	100	544.305.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	perencanaan pembangunan daerah (%)													
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					204.400.049		222.796.000		242.847.000		264.703.000		288.527.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					204.400.049		222.796.000		242.847.000		264.703.000		288.527.000	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	53,8	400	410	204.400.049	420	222.796.000	430	242.847.000	440	264.703.000	450	288.527.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					8.832.662.000		9.696.799.000		10.470.466.000		11.300.598.000		12.369.445.000	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.336.662.000		7.799.299.000		8.345.466.000		8.835.598.000		9.519.445.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	70,15	70,5	70,75	7.336.662.000	71	7.799.299.000	71,25	8.345.466.000	71,5	8.835.598.000	71,75	9.519.445.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.101.410.000		1.207.500.000		1.380.000.000		1.625.000.000		1.880.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	45	47	1.101.410.000	49	1.207.500.000	51	1.380.000.000	53	1.625.000.000	55	1.880.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					300.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000		340.000.000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	-	-	12	300.000.000	24	310.000.000	36	320.000.000	48	330.000.000	60	340.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					94.590.000		130.000.000		150.000.000		200.000.000		240.000.000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	47	47	60	94.590.000	73	130.000.000	87	150.000.000	100	200.000.000	100	240.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Terlestarikannya cagar budaya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					0		250.000.000		275.000.000		310.000.000		390.000.000	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	-	-	-	0	-	250.000.000	6	275.000.000	7	310.000.000	8	390.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.303.348.630		1.420.650.000		1.548.508.000		1.687.874.000		1.839.782.000	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.303.348.630		1.420.650.000		1.548.508.000		1.687.874.000		1.839.782.000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	-	60	60,5	1.303.348.630	60,6	1.420.650.000	60,7	1.548.508.000	60,8	1.687.874.000	60,9	1.839.782.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					196.051.370		213.695.000		232.928.000		253.891.000		276.742.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					146.051.370		159.195.000		173.523.000		189.140.000		206.163.000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	16,6	61,6	17	146.051.370	18	159.195.000	18	173.523.000	18	189.140.000	19	206.163.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	75	75	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	75	75	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					50.000.000		54.500.000		59.405.000		64.751.000		70.579.000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100	100	100	50.000.000	100	54.500.000	100	59.405.000	100	64.751.000	100	70.579.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					4.050.116.000		4.629.969.000		5.046.667.000		5.500.867.000		5.995.945.000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					500.016.000		545.017.000		594.069.000		647.535.000		705.813.000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	100	100	100	500.016.000	100	545.017.000	100	594.069.000	100	647.535.000	100	705.813.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					3.512.621.360		3.828.757.000		4.173.345.000		4.548.946.000		4.958.351.000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	100	100	100	3.512.621.360	100	3.828.757.000	100	4.173.345.000	100	4.548.946.000	100	4.958.351.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					37.478.640		256.195.000		279.253.000		304.386.000		331.781.000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	10	10	10	37.478.640	10	256.195.000	10	279.253.000	10	304.386.000	10	331.781.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.950.000.000		4.320.000.000		4.840.000.000		5.410.000.000		5.850.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					3.740.000.000		3.940.000.000		4.400.000.000		4.840.000.000		5.220.000.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	5,85	6,2	7,78	3.740.000.000	9,02	3.940.000.000	9,93	4.400.000.000	10,54	4.840.000.000	10,9	5.220.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatauan mancaanegara per kebangsaan (%)	-3,26	2,25	4,4		7,37		9,8		12,5		15,87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	5,83	6,19	7,77		9,02		9,93		10,54		10,9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					210.000.000		280.000.000		300.000.000		370.000.000		400.000.000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Target PAD (Persentase)	3,64	3,75	4,09	210.000.000	4,42	280.000.000	4,74	300.000.000	5,05	370.000.000	5,36	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					0		100.000.000		140.000.000		200.000.000		230.000.000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	-	-	-	0	5	100.000.000	10	140.000.000	15	200.000.000	20	230.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					5.870.546.796		7.298.894.000		7.955.794.000		8.671.816.000		9.452.280.000	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.251.999.676		1.864.679.000		2.032.500.000		2.215.425.000		2.414.814.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	100	100	100	1.251.999.676	100	1.864.679.000	100	2.032.500.000	100	2.215.425.000	100	2.414.814.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	41,32	4,28	4,43		4,58		4,73		4,88		5,03		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.730.620.000		3.176.375.000		3.462.249.000		3.773.852.000		4.113.498.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	100	100	100	2.730.620.000	100	3.176.375.000	100	3.462.249.000	100	3.773.852.000	100	4.113.498.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					367.000.000		400.030.000		436.032.000		475.275.000		518.050.000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	0	30	31	367.000.000	33	400.030.000	34	436.032.000	35	475.275.000	36	518.050.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					949.927.120		1.235.420.000		1.346.608.000		1.467.803.000		1.599.905.000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	949.927.120	100	1.235.420.000	100	1.346.608.000	100	1.467.803.000	100	1.599.905.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terhadap Pertanian (Persentase)													Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					0		0		0		0		0	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					571.000.000		622.390.000		678.405.000		739.461.000		806.013.000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperas Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	100	100	100	571.000.000	100	622.390.000	100	678.405.000	100	739.461.000	100	806.013.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					0		1.000.000.000		1.090.000.000		1.188.100.000		1.295.029.000	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					0		1.000.000.000		1.090.000.000		1.188.100.000		1.295.029.000	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)	0	0	0,5	0	0,5	1.000.000.000	0,5	1.090.000.000	0,5	1.188.100.000	0,5	1.295.029.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					44.732.000.000		26.057.880.000		28.403.087.000		30.959.364.000		33.745.708.000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					15.000.000		16.350.000		17.821.000		19.425.000		21.173.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	15.000.000	100	16.350.000	100	17.821.000	100	19.425.000	100	21.173.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan	56,41	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)													
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					43.065.000.000		23.940.850.000		26.095.526.000		28.444.123.000		31.004.095.000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	100	100	100	43.065.000.000	100	23.940.850.000	100	26.095.526.000	100	28.444.123.000	100	31.004.095.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					794.000.000		865.460.000		943.351.000		1.028.253.000		1.120.795.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	91,85	100	100	794.000.000	100	865.460.000	100	943.351.000	100	1.028.253.000	100	1.120.795.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					58.000.000		263.220.000		286.909.000		312.731.000		340.877.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	100	100	100	58.000.000	100	263.220.000	100	286.909.000	100	312.731.000	100	340.877.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					700.000.000		763.000.000		831.670.000		906.520.000		988.107.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100	100	100	700.000.000	100	763.000.000	100	831.670.000	100	906.520.000	100	988.107.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN					100.000.000		209.000.000		227.810.000		248.312.000		270.661.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PRODUK DALAM NEGERI														
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	100.000.000	100	209.000.000	100	227.810.000	100	248.312.000	100	270.661.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.850.465.000		7.812.143.000		8.167.528.000		8.544.466.000		8.944.585.000	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					0		5.795.138.000		5.968.992.000		6.148.062.000		6.332.504.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	0	65	5.795.138.000	66	5.968.992.000	67	6.148.062.000	71	6.332.504.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.689.325.831		1.841.365.000		2.007.088.000		2.187.725.000		2.384.621.000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%)	0	0	25	1.689.325.831	45	1.841.365.000	55	2.007.088.000	100	2.187.725.000	100	2.384.621.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota (%)	-77,39	1,09	1,11		1,13		1,15		1,17		1,19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					24.186.118		26.362.000		28.735.000		31.321.000		34.140.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	60	60	62	24.186.118	64	26.362.000	65	28.735.000	66	31.321.000	67	34.140.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)													Bidang Perindustrian
	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	40	1,5	1,6		1,7		1,8		1,9		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota (%)	0	1	1,1		1,2		1,3		1,4		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					136.953.051		149.278.000		162.713.000		177.358.000		193.320.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	70	70	80	136.953.051	90	149.278.000	95	162.713.000	100	177.358.000	100	193.320.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	65	70	80		90		95		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					169.353.050		184.594.000		201.208.000		219.317.000		239.055.000	
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					169.353.050		184.594.000		201.208.000		219.317.000		239.055.000	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	169.353.050	100	184.594.000	100	201.208.000	100	219.317.000	100	239.055.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					72.083.173.000		53.105.911.000		54.947.954.000		56.897.657.000		58.962.966.000	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					49.681.307.793		34.037.879.000		35.163.800.000		36.332.929.000		37.547.413.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	48.079.090.935	65	32.291.463.000	66	33.260.207.000	67	34.258.013.000	71	35.285.754.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	20	20	20	750.994.600	20	818.584.000	20	892.256.000	20	972.559.000	20	1.060.090.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya tata laksana protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan yang terlaksana sesuai SOP protokol (%)	100	100	100	851.222.258	100	927.832.000	100	1.011.337.000	100	1.102.357.000	100	1.201.569.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					18.804.925.350		15.147.368.000		15.510.631.000		15.906.588.000		16.338.180.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100	3.485.346.000	100	3.799.027.000	100	4.140.939.000	100	4.513.624.000	100	4.919.850.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100	1.319.579.350	100	1.438.341.000	100	1.567.792.000	100	1.708.893.000	100	1.862.693.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	65	65	65	14.000.000.000	65	9.910.000.000	65	9.801.900.000	65	9.684.071.000	65	9.555.637.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					3.596.939.857		3.920.664.000		4.273.523.000		4.658.140.000		5.077.373.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	1.328.443.387	100	1.448.003.000	100	1.578.323.000	100	1.720.372.000	100	1.875.206.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan Jasa	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (%)	8,35	9,25	9,5	1.500.000.000	9,75	1.635.000.000	10	1.782.150.000	10,25	1.942.543.000	10,5	2.117.372.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	18,069	10,25	10,5		10,75		11		11,25		11,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	0	0	0		0		0		0		0		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	60,74	40,25	4,5		40,75		50		50,25		50,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	35,56	40	40		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	768.496.470	100	837.661.000	100	913.050.000	100	995.225.000	100	1.084.795.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					36.003.593.000		44.583.700.000		46.986.074.000		49.556.358.000		52.308.213.000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.054.343.342		26.835.973.000		27.641.052.000		28.470.284.000		29.324.392.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	26.054.343.342	65	26.835.973.000	66	27.641.052.000	67	28.470.284.000	71	29.324.392.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN					9.949.249.658		17.747.727.000		19.345.022.000		21.086.074.000		22.983.821.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	9.949.249.658	100	17.747.727.000	100	19.345.022.000	100	21.086.074.000	100	22.983.821.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					11.546.470.000		10.643.060.000		11.145.066.000		11.678.577.000		12.246.018.000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.376.517.000		7.597.812.000		7.825.746.000		8.060.519.000		8.302.334.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	71,25	71,5	71,75	7.376.517.000	72	7.597.812.000	72,25	7.825.746.000	72,5	8.060.519.000	72,75	8.302.334.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					985.600.000		1.074.304.000		1.170.991.000		1.276.380.000		1.391.254.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	95	95	95	985.600.000	95	1.074.304.000	95	1.170.991.000	95	1.276.380.000	95	1.391.254.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					3.184.353.000		1.970.944.000		2.148.329.000		2.341.678.000		2.552.430.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	95	95	95	2.193.353.000	95	890.754.000	95	970.922.000	95	1.058.305.000	95	1.153.553.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, SDA , dan infrastruktur	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	991.000.000	100	1.080.190.000	100	1.177.407.000	100	1.283.373.000	100	1.398.877.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					315.344.517.000		328.106.314.000		336.962.384.000		343.559.581.000		348.692.926.000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.161.321.557		31.066.160.000		31.998.145.000		32.958.090.000		33.946.832.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	21.955.264.557	65	22.613.922.000	66	23.292.340.000	67	23.991.110.000	71	24.710.843.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	8.206.057.000	65	8.452.238.000	66	8.705.805.000	67	8.966.980.000	71	9.235.989.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					281.183.206.331		292.680.166.000		300.211.852.000		305.421.390.000		309.099.785.000	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	20	21	22	279.183.206.331	23	290.500.166.000	24	297.835.652.000	25	302.831.332.000	26	306.276.623.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30	30	30		30		30		30		30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.090.000.000	100	1.188.100.000	100	1.295.029.000	100	1.411.581.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.090.000.000	100	1.188.100.000	100	1.295.029.000	100	1.411.581.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					999.989.112		1.089.988.000		1.188.087.000		1.295.014.000		1.411.566.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	10	10	10	999.989.112	10	1.089.988.000	10	1.188.087.000	10	1.295.014.000	10	1.411.566.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.000.000.000		3.270.000.000		3.564.300.000		3.885.087.000		4.234.743.000	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	8	8	8	1.000.000.000	8	1.090.000.000	8	1.188.100.000	8	1.295.029.000	8	1.411.581.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan pengelolaan pendapatan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.090.000.000	100	1.188.100.000	100	1.295.029.000	100	1.411.581.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.090.000.000	100	1.188.100.000	100	1.295.029.000	100	1.411.581.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					7.266.789.000		7.604.790.000		7.963.735.000		8.345.218.000		8.750.979.000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.266.789.000		5.424.792.000		5.587.536.000		5.755.162.000		5.927.817.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	5.266.789.000	65	5.424.792.000	66	5.587.536.000	67	5.755.162.000	71	5.927.817.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					2.000.000.000		2.179.998.000		2.376.199.000		2.590.056.000		2.823.162.000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100	1.000.000.000	100	1.090.000.000	100	1.188.100.000	100	1.295.029.000	100	1.411.581.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	25,02	25,07	25,13		25,2		25,28		25,37		25,47		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	78,21	78,26	78,32		78,39		78,47		78,56		78,66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	487.395.223	100	531.260.000	100	579.074.000	100	631.190.000	100	687.998.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	15,48	15,53	15,59		15,66		15,74		15,83		15,93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	336.548.341	100	366.837.000	100	399.853.000	100	435.839.000	100	475.065.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	100	100	100	176.056.436	100	191.901.000	100	209.172.000	100	227.998.000	100	248.518.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.000.000.000		2.180.000.000		2.376.200.000		2.590.056.000		2.823.160.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					2.000.000.000		2.180.000.000		2.376.200.000		2.590.056.000		2.823.160.000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	545.000.000	100	594.050.000	100	647.514.000	100	705.790.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	545.000.000	100	594.050.000	100	647.514.000	100	705.790.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	545.000.000	100	594.050.000	100	647.514.000	100	705.790.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	100	100	100	500.000.000	100	545.000.000	100	594.050.000	100	647.514.000	100	705.790.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.363.700.000		1.266.432.000		1.380.411.000		1.504.648.000		1.640.066.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					3.363.700.000		1.266.432.000		1.380.411.000		1.504.648.000		1.640.066.000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	30	40	100	1.509.643.657	40	568.380.000	50	619.535.000	50	675.293.000	50	736.069.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	90	82	85	1.854.056.343	87	698.052.000	90	760.876.000	92	829.355.000	95	903.997.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					20.416.411.000		21.408.841.000		22.765.239.000		24.226.601.000		25.801.862.000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.084.096.801		9.506.619.000		9.791.818.000		10.085.572.000		10.388.140.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	70,9	71	80	14.084.096.801	81	9.506.619.000	84	9.791.818.000	84	10.085.572.000	90	10.388.140.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					4.697.714.720		9.120.509.000		9.941.354.000		10.836.076.000		11.811.323.000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	100	100	100	4.697.714.720	100	9.120.509.000	100	9.941.354.000	100	10.836.076.000	100	11.811.323.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.634.599.479		2.781.713.000		3.032.067.000		3.304.953.000		3.602.399.000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Optimum (Optimizing)	Optimum (Optimizing)	Optimum (Optimizing)	1.634.599.479	Optimum (Optimizing)	2.781.713.000	Optimum (Optimizing)	3.032.067.000	Optimum (Optimizing)	3.304.953.000	Optimum (Optimizing)	3.602.399.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					49.138.392.000		51.141.022.000		53.182.327.000		55.330.511.000		57.592.885.000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					41.446.343.086		42.689.729.000		43.970.419.000		45.289.531.000		46.648.216.000	
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	4.078.182.168	65	4.200.527.000	66	4.326.543.000	67	4.456.339.000	71	4.590.029.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	2.588.804.893	65	2.666.469.000	66	2.746.463.000	67	2.828.857.000	71	2.913.722.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	3.218.933.892	65	3.315.501.000	66	3.414.966.000	67	3.517.415.000	71	3.622.938.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	3.250.171.990	65	3.347.677.000	66	3.448.107.000	67	3.551.550.000	71	3.658.097.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	4.631.703.000	65	4.770.654.000	66	4.913.773.000	67	5.061.186.000	71	5.213.022.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	3.930.544.850	65	4.048.461.000	66	4.169.915.000	67	4.295.012.000	71	4.423.862.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	3.623.837.355	65	3.732.552.000	66	3.844.529.000	67	3.959.864.000	71	4.078.660.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	4.217.659.242	65	4.344.189.000	66	4.474.514.000	67	4.608.750.000	71	4.747.012.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	2.670.335.212	65	2.750.445.000	66	2.832.958.000	67	2.917.947.000	71	3.005.485.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	2.381.083.522	65	2.452.516.000	66	2.526.091.000	67	2.601.874.000	71	2.679.930.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	3.115.418.911	65	3.208.881.000	66	3.305.147.000	67	3.404.302.000	71	3.506.431.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	1.832.165.442	65	1.887.130.000	66	1.943.744.000	67	2.002.056.000	71	2.062.118.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	1.907.502.609	65	1.964.727.000	66	2.023.669.000	67	2.084.379.000	71	2.146.910.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.683.824.057		1.822.929.000		1.986.993.000		2.165.824.000		2.360.750.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	142.675.888	100	155.516.000	100	169.513.000	100	184.769.000	100	201.398.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	162.364.100	100	176.976.000	100	192.904.000	100	210.266.000	100	229.190.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	73.112.944	100	79.693.000	100	86.865.000	100	94.683.000	100	103.204.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	93.640.734	100	102.068.000	100	111.254.000	100	121.267.000	100	132.181.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	74.999.755	100	81.749.000	100	89.107.000	100	97.126.000	100	105.868.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	138.135.422	100	138.135.000	100	150.567.000	100	164.118.000	100	178.889.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	115.850.000	100	126.276.000	100	137.641.000	100	150.029.000	100	163.531.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	207.814.008	100	226.517.000	100	246.903.000	100	269.125.000	100	293.346.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	61.153.400	100	66.657.000	100	72.656.000	100	79.195.000	100	86.323.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	169.831.590	100	185.116.000	100	201.776.000	100	219.936.000	100	239.731.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	212.451.776	100	231.572.000	100	252.413.000	100	275.131.000	100	299.893.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	84.070.608	100	91.636.000	100	99.884.000	100	108.873.000	100	118.672.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	147.723.832	100	161.018.000	100	175.510.000	100	191.306.000	100	208.524.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.676.017.272		2.944.266.000		3.209.248.000		3.498.080.000		3.812.908.000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	660.562.944	100	720.013.000	100	784.814.000	100	855.448.000	100	932.438.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
masyarakat desa dan kelurahan	di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	0	100	5.410.000	100	5.896.000	100	6.427.000	100	7.006.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	5.410.000	100	5.896.000	100	6.427.000	100	7.006.000	100	7.636.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	0	100	5.500.000	100	5.995.000	100	6.534.000	100	7.122.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	665.028.550	100	724.881.000	100	790.120.000	100	861.231.000	100	938.742.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	325.000.000	100	354.250.000	100	386.132.000	100	420.884.000	100	458.764.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	0	100	5.500.000	100	5.995.000	100	6.534.000	100	7.122.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	425.120.000	100	463.380.000	100	505.085.000	100	550.542.000	100	600.091.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	90.877.368	100	99.056.000	100	107.971.000	100	117.688.000	100	128.280.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	0	100	5.500.000	100	5.995.000	100	6.534.000	100	7.122.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	325.000.000	100	354.250.000	100	386.132.000	100	420.884.000	100	458.764.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	179.018.410	100	195.130.000	100	212.691.000	100	231.834.000	100	252.699.000	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
masyarakat desa dan kelurahan	di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)													menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	100	100	100	0	100	5.500.000	100	5.995.000	100	6.534.000	100	7.122.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3.123.674.316		3.404.801.000		3.711.231.000		4.045.243.000		4.409.314.000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	241.050.000	100	262.744.000	100	286.391.000	100	312.166.000	100	340.261.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	251.413.257	100	274.040.000	100	298.704.000	100	325.587.000	100	354.890.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	147.711.164	100	161.005.000	100	175.495.000	100	191.290.000	100	208.506.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	204.188.500	100	222.565.000	100	242.596.000	100	264.430.000	100	288.228.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	382.971.820	100	417.439.000	100	455.008.000	100	495.959.000	100	540.595.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	143.159.888	100	156.044.000	100	170.088.000	100	185.396.000	100	202.081.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	196.875.645	100	214.594.000	100	233.907.000	100	254.959.000	100	277.906.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	365.860.750	100	398.788.000	100	434.679.000	100	473.800.000	100	516.442.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	251.378.420	100	274.002.000	100	298.662.000	100	325.542.000	100	354.841.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	257.700.000	100	280.893.000	100	306.173.000	100	333.728.000	100	363.764.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	207.131.313	100	225.773.000	100	246.092.000	100	268.241.000	100	292.382.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	227.600.000	100	248.084.000	100	270.411.000	100	294.748.000	100	321.275.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	246.633.559	100	268.830.000	100	293.025.000	100	319.397.000	100	348.143.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					208.533.269		279.297.000		304.436.000		331.833.000		361.697.000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	12.000.000	100	13.080.000	100	14.257.000	100	15.540.000	100	16.938.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	70.751.750	100	77.119.000	100	84.060.000	100	91.625.000	100	99.871.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	0	100	12.000.000	100	13.080.000	100	14.257.000	100	15.540.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	31.251.776	100	34.064.000	100	37.130.000	100	40.471.000	100	44.114.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	100	100	100	24.999.875	100	27.249.000	100	29.702.000	100	32.375.000	100	35.289.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemerintahan Desa (Persentase)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	14.036.840	100	15.300.000	100	16.677.000	100	18.178.000	100	19.814.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)	95	95	95	0	95	10.000.000	95	10.900.000	95	11.881.000	95	12.950.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	0	100	10.000.000	100	10.900.000	100	11.881.000	100	12.950.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	11.426.600	100	12.454.000	100	13.575.000	100	14.797.000	100	16.129.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	36.975.888	100	40.303.000	100	43.931.000	100	47.884.000	100	52.194.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	0	100	10.000.000	100	10.900.000	100	11.881.000	100	12.950.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan (Persentase)	100	100	100	7.090.540	100	7.728.000	100	8.424.000	100	9.182.000	100	10.008.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	0	100	10.000.000	100	10.900.000	100	11.881.000	100	12.950.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					8.124.278.000		8.588.886.000		9.087.312.000		9.622.358.000		10.197.076.000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.442.929.381		4.576.217.000		4.713.503.000		4.854.908.000		5.000.556.000	
Meningkatnya Pelayanan dan	Nilai LAKIP (Skor)	62	62	63	4.442.929.381	65	4.576.217.000	66	4.713.503.000	67	4.854.908.000	71	5.000.556.000	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah														Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.117.418.619		1.217.986.000		1.327.605.000		1.447.089.000		1.577.327.000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	1.117.418.619	100	1.217.986.000	100	1.327.605.000	100	1.447.089.000	100	1.577.327.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.426.730.000		1.555.135.000		1.695.097.000		1.847.656.000		2.013.945.000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	1.426.730.000	100	1.555.135.000	100	1.695.097.000	100	1.847.656.000	100	2.013.945.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					170.000.000		185.300.000		201.977.000		220.154.000		239.968.000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	100	170.000.000	100	185.300.000	100	201.977.000	100	220.154.000	100	239.968.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					550.000.000		599.500.000		653.455.000		712.265.000		776.369.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	550.000.000	100	599.500.000	100	653.455.000	100	712.265.000	100	776.369.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					417.200.000		454.748.000		495.675.000		540.286.000		588.911.000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	417.200.000	100	454.748.000	100	495.675.000	100	540.286.000	100	588.911.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					**1.591.662.510.000**		**1.640.466.455.000**		**1.702.230.133.000**		**1.766.478.146.000**		**1.837.098.314.000**	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Tahun 2025–2029

Kerangka penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi hal esensial yang mengukur perwujudan dari pembangunan sekaligus merupakan *core areal business*. IKU merupakan parameter makro utama untuk mengetahui kinerja prioritas pembangunan kepala daerah yang dioperasionalisasikan melalui tujuan dan sasaran pembangunan. Keberadaannya menjadi instrumen pengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan cita–cita yang dicanangkan oleh kepala daerah selama lima tahun ke depan.

Seluruh indikator utama berlaku mulai dari awal periode di tahun 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi menuju Tahap II RPJPD Kabupaten Katingan 2025–2045. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 tetap berlaku, akan tetapi pencapaiannya menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan RPJMD 2025–2029 guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kabupaten Katingan.

Tabel 4-2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Katingan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,41	75,93	76,44	76,95	77,46	
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	5,7	5,8	5,9	6	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76	77	78	79	81	
4.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,78	6,8	6,82	6,84	6,88	
5.	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	10	15	20	25	30	
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	77,08	77,29	77,5	77,72	77,93	
7.	Indeks Infrastruktur	Angka	45	50	55	60	65	
8.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,35	13,43	13,5	13,57	13,64	
9.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,18	10,31	10,43	10,55	10,67	
10.	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,19	72,27	73,34	74,42	75,5	
11.	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	26,78	26,85	26,93	27	27,08	
12.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	15,76	15,84	15,92	16	16,08	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
13.	Kontribusi PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,04	3,1	3,17	3,23	3,3	
14.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	8,12	8,25	8,37	8,5	8,63	
15.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	5,77	6,06	6,34	6,62	6,9	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75	4,70	4,65	4,60	4,55	
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,9	68,1	68,3	68,5	68,7	
17.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
18.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,62	3,63	3,64	3,65	3,66	
19.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	71,25	72,5	73,75	75	76,25	
20.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Predikat	63	65	66	67	71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
21.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,23	3,29	3,36	3,42	3,49	
22.	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Indeks	1	1,1	1,2	1,3	1,4	
23.	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	60	63	65	68	70	
24.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	80,88	81,36	81,83	82,31	82,79	
25.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	59,34	60,15	60,95	61,76	62,57	
26.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	71.31	72.63	73.94	75.25	76.56	
27.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,558	0,535	0,513	0,49	0,468	
28.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	138,98	138,1	137,22	136,34	135,46	
29.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	60,26	61,43	62,82	63,76	64,89	
30.	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0.61	0.61	0.62	0.62	0.63	

Perbandingan antara Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD Kabupaten Katingan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD bertujuan untuk memastikan adanya keterpaduan arah dan konsistensi pengukuran kinerja pembangunan daerah. IUP dalam RPJPD memiliki sifat makro dan jangka panjang, berperan sebagai tolok ukur pencapaian visi pembangunan 20 tahun yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, IKU dan IKD dalam RPJMD diturunkan dari IUP untuk mengukur capaian sasaran strategis lima tahunan yang bersifat lebih operasional dan fokus pada prioritas pembangunan daerah. Melalui perbandingan ini, dapat diidentifikasi kesesuaian indikator antar dokumen perencanaan serta peluang penyelarasan target sehingga seluruh instrumen perencanaan dapat saling mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan.

Tabel 4-3 Perbandingan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Katingan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Katingan

No	Indikator	Satuan	RPJPD Kabupaten Katingan		RPJMD Kabupaten Katingan	
			Baseline 2025	Target 2029	Baseline 2025	Target 2029
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,11	74,42	74,2	74,5
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	121	107,9	77	70
3	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persentase	16,1	10,75	19,1	15,7
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*)	Persentase	54,3	93,25	54,3	100
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persentase	73,1	93,25	73,1	100
6	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase	99,5	99,5	98,93	98,93
7	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi	Persentase	30	40	30	40

No	Indikator	Satuan	RPJPD Kabupaten Katingan		RPJMD Kabupaten Katingan	
			Baseline 2025	Target 2029	Baseline 2025	Target 2029
	minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca					
8	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi	Persentase	16,94	28,33	16,94	28,33
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	74,27	78,9525	50	62,04
10	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,06	10,545	10,06	10,55
11	Harapan lama sekolah	Tahun	13,28	13,5675	13,28	13,57
12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persentase	14,83	18,6225	11,23	11,7
13	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persentase	32,13	44,0975	32,13	80
14	Tingkat Kemiskinan	Persentase	4,71	3,6075	5	4,9
15	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase	43,97	56,4925	43,97	94,06
16	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persentase	29,49	43,3675	29,49	85
17	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Rasio	11,21	12,1575	11,21	12,16
18	Rasio PDRB Penyediaan	Rasio	2,97	3,2275	2,97	3,23

No	Indikator	Satuan	RPJPD Kabupaten Katingan		RPJMD Kabupaten Katingan	
			Baseline 2025	Target 2029	Baseline 2025	Target 2029
	Akomodasi Makan dan Minum					
19	Pertumbuhan Kunjungan Tamu Wisatawan Mancanegara	Persentase	0,5	0,875	10	15
20	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,13	3,5225	3,33	3,5
21	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian terhadap Seluruh UKM pada Level Kabupaten	Proporsi	11,68	13,1475	84,9	85
22	Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio	5,49	6,6175	5,49	6,62
23	Return on Asset (ROA) BUMD	Persentase	1,89	2,7225	1,89	2,72
24	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,26	3,945	4,8	4,6
25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	47,58	53,185	47,58	53,19
26	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	1,56	2,085	0,98	1,78
27	Kontribusi PDRB Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Persentase	0,05	0,05	0,05	0,05
28	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase	26,92	27,19	26,92	28
29	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap internet	Persentase	87	90	87	99
30	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase	2,59	2,6925	2,59	3

No	Indikator	Satuan	RPJPD Kabupaten Katingan		RPJMD Kabupaten Katingan	
			Baseline 2025	Target 2029	Baseline 2025	Target 2029
31	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	42,48	38,035	44,1	44,2
32	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-11,64	-3,73	-11,64	-3,73
33	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase	65,36	74,02	65,36	74,02
34	Persentase Desa Mandiri	Persentase	0,2	12,65	5,84	8,44
35	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	75	70	75
36	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,78	3,335	2,78	3,34
37	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,5	3,125	2,5	3,13
38	Skor SPI (Survei Penilaian Integritas)	Skor	70	75,5	74	75,5
39	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,16	3,42	3,16	3,42
40	Cakupan penanganan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM	Persentase	100	100	100	100
41	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	70	73,75	10	73,75
42	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio	0,8	0,975	0,2	0,23
43	Pertumbuhan Deflator PDRB Kabupaten	Persentase	2,58	2,71	2,58	2,71
44	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persentase	23,19	33,1175	23,19	33,12
45	Total Kredit/PDRB (%)	Persentase	21,8	31,5	10,44	11
46	Persentase Individu Memiliki Rekening di Bank	Persentase	0	0		
47	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	71,5	75	79
48	Nilai Sistem Akuntabilitas	Nilai	71	76,25	62	67

No	Indikator	Satuan	RPJPD Kabupaten Katingan		RPJMD Kabupaten Katingan	
			Baseline 2025	Target 2029	Baseline 2025	Target 2029
	Kinerja Instansi Pemerintahan					
49	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	58,53	61,7575	58,53	61,76
50	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	80,4	82,3075	80,4	82,31
51	i-Bangga	Indeks	70	75,25	70	75,25
52	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,49	0,425	0,58	0,49
53	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	75,64	76,73	89,66	89,94
54	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,03	82,36	76,87	77,72
55	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persentase	11,1	30,825	2,37	3,51
56	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persentase	71,52	77,39	71,52	74,89
57	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase	37,76	53,32	37,76	53,32
58	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Berlistrik PLN	Persentase	83	84,75	86,5	86,9
59	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	Persentase	9,943	7,95725	8,5	7,35
60	Kapasitas Air Baku	m3/detik	1,52	2,0725	0,035	0,06
61	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persentase	35,34	51,505	35,34	51,51
62	Indeks Risiko Bencana	Indeks	87,52	85,9325	139,86	136,34
63	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,47	92,3525	80,58	80.88

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Adapun penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang di dalamnya juga mencakup Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome*. IKD dan IKK mencerminkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada prioritas kepala daerah. Pada tingkat kabupaten, IKD mencakup indikator pembangunan daerah yang memastikan pembangunan di Kabupaten Katingan berkontribusi dan sinergis dengan capaian pembangunan regional di tingkat provinsi serta nasional. Di sisi lain, IKK yang merupakan bagian dari IKD merupakan parameter kinerja pada setiap urusan yang upayanya dikerjakan oleh setiap OPD terkait. Seluruh indikator berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 tetap berlaku, akan tetapi pencapaiannya menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan RPJMD lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kabupaten Katingan.

Pemilihan indikator dalam IKD meliputi indikator yang strategis, berdampak luas, serta berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik. Indikator lain kemudian tetap akan diakomodasi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai bagian dari perencanaan operasional masing–masing sektor. Setiap indikator yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 4-4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Katingan

No	Indikator	Capaian	Target						Keterangan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Kualitas Lahan	87,54	89.66	89.73	89.80	89.87	89.94	90.01	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76.81	76.87	77.08	77.29	77.5	77.72	77.93	
3	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	2,08	2,37	2,65	2,94	3,22	3,51	3,80	
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	-	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	
5	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	-	34,75	37,25	39,25	42,25	44,75	47,25	
6	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama Berlistrik PLN (%)	86,43	86,50	86,60	86,70	86,80	86,90	87,00	
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9.57	8,50	8,30	8,10	7,70	7,35	7,00	
8	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,010	0,035	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	-	35,34	39,38	43,42	47,46	51,51	55,55	
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	140,74	139,86	138,98	138,10	137,22	136,34	135,46	
11	Indeks Kualitas Udara	95,20	79,68	79,98	80,28	80,58	80,88	81,18	
12	Penurunan GRK Kumulatif	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,14	74,20	74,28	74,35	74,43	74,50	74,58	
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	78,24	77,00	75,00	74,00	72,00	70,00	69,00	

No	Indikator	Capaian	Target						Keterangan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	19,60	19,10	18,25	17,40	16,55	15,70	14,85	
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	-	54,30	56,84	59,39	61,93	64,48	67,02	
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	69,40	73,10	74,66	76,21	77,77	79,33	80,88	
6	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98.42	98,50	98,93	99,00	99,50	99,80	100,00	
7	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,41	1,70	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	
8	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,00	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	
9	Jumlah Kematian Balita	1,29	1,00	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	
10	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	Cakupan imunisasi bayi lengkap	63,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :								
	i) Literasi Membaca	57,88	59,68	61,48	63,28	65,08	66,88	68,68	
	ii) Numerasi	52,27	54,47	56,67	58,87	61,07	63,27	65,47	

No	Indikator	Capaian	Target						Keterangan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,00	50,00	62,01	62,02	62,03	62,04	62,05	
16	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,95	10,06	10,18	10,30	10,42	10,55	10,67	
17	Harapan lama sekolah (tahun)	12,99	13,28	13,35	13,42	13,50	13,57	13,64	
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,00	11,23	11,35	11,46	11,58	11,70	11,81	
19	Presentase pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	0,00	32,13	35,12	38,11	41,11	44,10	47,09	
20	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (%)	0,00	1,00	1,10	1,12	1,13	1,14	1,15	
21	Tingkat Kemiskinan (%)	5,26	5,00	4,98	4,95	4,93	4,90	4,88	
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	-	43,97	47,10	50,23	53,36	56,49	59,62	
23	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	-	29,49	32,96	36,43	39,90	43,37	46,84	
24	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,88	4,80	4,75	4,70	4,65	4,60	4,55	
25	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	0,00	2	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	
26	Gini Ratio	0,253	0,240	0,240	0,230	0,230	0,230	0,230	
27	PDRB Perkapita (Rp Juta)	67,93	72,45	77,27	82,40	87,87	93,71	99,94	
28	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	0,00	58,53	59,34	60,14	60,95	61,76	62,56	
29	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	0,00	80,4	80,88	81,36	81,83	82,31	82,79	

No	Indikator	Capaian	Target						Keterangan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga);	64,24	70	71,31	72,63	73,94	75,25	76,56	
31	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,59	0,58	0,56	0,54	0,51	0,49	0,47	
32	Indeks Perlindungan Anak	67,00	67,50	71,50	72,50	73,50	74,50	75,50	
33	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK);	61,50	69,9	75,30	78,70	81,00	82,40	83,00	
34	Persentase Kehamilan Tidak direncanakan (KTD);	6,50	5,6	5,00	4,60	4,40	4,30	4,20	
35	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja;	83,40	84,6	85,70	86,70	87,70	88,60	89,50	
36	Indeks Lansia Berdaya	59,00	60,7	62,30	63,80	65,30	66,60	67,50	
37	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	11,80	12,6	13,40	14,20	14,90	15,60	16,50	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,67	15,68	15,76	15,84	15,92	16,00	16,08	
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,33	2,97	3,03	3,10	3,16	3,23	3,29	
3	Pertumbuhan Kunjungan Tamu Wisatawan Mancanegara (%)	-	10,00	11,25	12,50	13,75	15,00	16,25	
4	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	84.68	84.9	85,00	85.1	85.2	85,00	85,00	
5	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	0,00	1,90	2,04	2,18	2,31	2,00	3,00	
6	Rasio kewirausahaan daerah (%)	5,46	5,49	5,77	6,05	6,34	6,62	6,90	
7	Return of Asset (ROA) BUMD (%)	0,00	1,89	2,10	2,31	2,51	2,72	2,93	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,82	47,58	48,98	50,38	51,78	53,19	54,59	
9	Persentase Pekerja Informal	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

No	Indikator	Capaian	Target						Keterangan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
11	Indek Kapabilitas Inovasi	0,94	0,98	1,05	1,12	1,50	1,78	2,00	
12	Kontribusi PDRB Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (%)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
13	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	26,68	26,70	26,78	26,85	26,93	27,00	27,08	
14	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap internet (%)	74,23	75,00	77,50	80,00	82,50	85,00	87,50	
15	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	5,08	5,08	5,10	5,12	5,13	5,15	5,17	
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	44,07	44,10	44,13	44,15	44,18	44,20	44,23	
17	Net Ekspor Barang dan Jasa (%)	-14,57	-11,64	-10,89	-10,15	-9,40	-8,65	-7,90	
18	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	0,00	65,36	67,53	69,69	71,86	74,02	76,19	
19	Persentase Desa Mandiri (%)	5,19	5.84	6.49	7.14	7.79	8,44	9,09	
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,19	0	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	
21	Pertumbuhan Deflator PDRB Kabupaten (%)	3,71	2,58	2,59	2,60	2,61	2,62	2,63	
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	0,00	23,19	25,67	28,15	30,64	33,12	35,60	
23	Total Kredit/PDRB (%)	10,26	10,44	10,58	10,72	10,86	11,00	11,14	

No	Indikator	Capaian	Target						Keterangan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
24	Kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Diberikan Bank Umum (Juta Rp.)	1.198.211,00	1.198.511,00	1.203.324,94	1.208.138,88	1.212.952,81	1217766,75	1.222.580,69	
25	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	2.63	2.74	2.80	2.85	2.90	2.96	2.98	
26	Indeks Zakat Nasional	0,00	0,2	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Daya Saing Daerah	3,32	3,33	3,4	3,42	3,48	3,5	3,56	
2	Indeks Reformasi Hukum	-	70	71,25	72,5	73,75	75	76,25	
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,25	3,26	-	-	-	-	-	
4	Indeks Pelayanan Publik	3,60	3,62	3,64	3,66	3,68	3,7	3,72	
5	Skor SPI (Survei Penilaian Integritas)	74,00	74	74,375	74,75	75,13	75,5	75,88	
6	Cakupan penanganan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM (%)	100	100	100	100	100	100	100	
7	Angka Kriminalitas	10,30	10	9,5	9	8,5	7	7,5	
8	Indeks Demokrasi Indonesia	0,00	70	70,94	71,88	72,81	73,75	74,69	
9	Indeks Reformasi Birokrasi	73,53	75	76	77	78	79	81	
10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	61,13	62	63	65	66	67	71	

Tabel 4-5 Indikator Kinerja Kunci *Outcome* Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	66,83	69,87	72,91	75,95	78,99	82,03	85	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	98,54	98,75	98,96	99,17	99,38	99,58	99,79	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	95,66	96,28	96,9	97,52	98,14	98,76	99,38	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)	97,62	97,85	98,08	98,31	98,54	98,78	99,01	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	36,33	41,31	46,28	51,26	56,24	61,22	66,19	
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	52,11	56,55	65,23	76,8	91,26	100	100	
	Skor Kemampuan Numerasi SD (Poin)	46,52	49,42	52,32	55,22	58,12	61,02	63,92	
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	73,75	66,25	67	67,75	68,5	69,25	70	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Skor Kemampuan Numerasi SMP (Poin)	58,02	59,52	61,02	62,52	64,02	65,52	67,02	
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	56,89	59,39	61,89	64,39	66,89	69,39	71,89	
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	58,37	60,77	63,17	65,57	67,97	70,37	72,77	
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	73,27	74,17	75,07	75,97	76,87	77,77	78,67	
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	71,35	72,85	74,35	75,85	77,35	78,85	80,35	
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	69,37	70,37	71,37	72,37	73,37	74,37	75,37	
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	71,9	72,9	73,9	74,9	75,9	76,9	77,9	
	Skor Kemampuan Literasi SD (Poin)	52,17	54,67	57,17	59,67	62,17	64,67	67,17	
	Skor Kemampuan Literasi SMP (Poin)	63,58	64,68	65,78	66,88	67,98	69,08	70,18	
	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	75	76	78	87	93	100	100	
	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	95	95,01	95,02	95,03	95,04	95,05	95,06	
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	75	80	81	82	83	84	85	
	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	76,3	78,3	80,3	82,3	84,3	86,3	88,3	
	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	60	70	75	80	85	90	100	
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	78,24	77	75	74	72	70	69	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	19,6	19,1	18,25	17,4	16,55	15,7	14,85	
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	6	5,8	5,6	5,4	5,2	5	4,8	
	Persentase desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	50	50	50	50	50	50	50	
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	22,5	23	23	23	23	23	23	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	70	70	70	70	70	70	70	
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	80	80	80	80	80	80	80	
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	60	75	85	90	95	98	100	
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	30	40	50	60	70	80	90	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	70	70	70	70	70	70	70	
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	0	0	0	0	0	0	0	
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	0	60	62	64	66	69	71	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	9	8,8	8,5	8,3	8	7,7	7,4	
	Penemuan Kasus TBC (%)	70	75	80	83	86	88	90	
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (%)	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)								
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	70	70	70	70	70	70	70	
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	70	70	70	70	70	70	70	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	6.74	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	
	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	75	75	75	75	75	75	75	
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	20	20	20	20	20	20	20	
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	80	80	80	80	80	80	80	
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	80	80	80	80	80	80	80	
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	80	80	80	80	80	80	80	
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	40	42	44	46	48	50	52	
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	9,22	9,77	10,33	10,88	11,44	11,99	12,55	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	63,87	64,3	64,72	65,15	65,58	66	66,43	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota (Persentase)	51,63	52,49	53,35	54,21	55,07	55,94	56,8	
	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	dalam Kondisi Baik (Persentase)								
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	99,99	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	37,88	39,48	41,08	42,68	44,28	45,88	47,48	
	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	15,63	16,52	17,41	18,29	19,18	20,07	20,96	
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)								
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani (Persentase)	78,98	0	30	47	59	65	75	
	(Persentase) berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (Persentase)	10	10	10	10	10	10	10	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0,84	37,6	40,2	42,8	45,5	48	51	
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)								
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ganggungan trantibum yang dapat diselesaikan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)								
	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	0,59	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	11,54	15	15	15	15	15	15	
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam peningkatan kesejahteraan sosial (Persentase)	79	80	81	82	83	84	85	
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)								
	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (Persentase)	68	70	73	76	79	82	85	
	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	70	72	74	76	78	80	82	
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	82,35	70	75	75	80	80	100	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	1,13	20	25	25	30	30	30	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	69,43	69,77	72,24	74,7	77,15	79,58	82,04	
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayang Kabupaten/kota (%)	79,36	80	81	82	83	84	85	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	35	40	40	40	40	40	50	
	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	11.595	11.682	11.799	11.916	12.033	12.150	12.267	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	71,05	95	95	95	95	95	95	
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	5,65	5,6	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	90	90	90	90	90	90	90	
	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	12,56	100	100	100	100	100	100	
	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	10	10	10	10	10	10	10	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	70	73	76	80	83	87	90	
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	65	70	74	78	82	86	90	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	90	90	90	90	90	90	90	
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	75	80	85	90	95	98	100	
	Persentase peningkatan ragam pangan dan pangan olahan (Persentase)	10	11	12	13	14	15	16	
	Persentase cadangan pangan (%)	75	80	85	90	95	98	100	
	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	87	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Mutu Keamanan Pangan (Persentase)								
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Tersedianya tanah untuk masyarakat (%)	0	30	40	50	60	80	100	
	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	luas izin lokasi yang diterbitkan (%)								
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal. (%)	98,85	100	100	100	100	100	100	
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,81	76,87	77,08	77,29	77,50	77,72	77,93	
	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Kualitas Air (Indeks)	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	10	10	10	10	10	10	10	
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Perekaman KTP elektronik (%)	98,34	97,5	98	99	99,5	99,9	99,9	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	62,82	50	55	60	65	70	70,5	
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Kepemilikan akta kelahiran (%)	98,81	96	97	98	99	99,8	99,9	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama (%)	11,54	24	32	40	48	56	64	
	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Persentase pengentasan desa tertinggal	21,875	32	37,5	43,4	50,1	57,14	65	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	6,52	8,13	9,42	10,71	13,25	14,6	16	
	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,26	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	79,035	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9	80	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7	6,9	6,8	6,7	6,6	6,5	6,4	
	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) (%)	70	70	70	70	70	70	70	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	57	58	59	60	61	62	63	
	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
	Rasio konektivitas kabupaten/kota (rasio)	0,00	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	
	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (V/C ratio)	58,33	59	59	59	59	59	59	
	Konektivitas Darat (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2	80	85	87	90	95	100	
	Konektivitas Laut (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)								
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (Persentase)	32,11	32,2	32,4	32,6	32,8	33	33,2	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	4,35	0,5	1	1,5	2	2,5	3	
	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	13,77	13,85	14	14,14	14,28	14,4	14,52	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	13,77	9,13	9,16	9,18	9,21	9,23	9,25	
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	8,87	13,85	14	14,14	14,28	14,4	14,52	
	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	10	12	14	16	18	20	22	
	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0	20	25	30	35	40	45	
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	12	14	16	18	20	22	24	
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(8)	(9)	(10)
	dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)								
	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
	Indeks Keamanan Informasi (Indeks)	53,8	400	410	420	430	440	450	
	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	100	100	100	100	100	100	100	
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	45	47	49	51	53	55	
	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	-	-	12	24	36	48	60	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	47	47	60	73	87	100	100	
	Terlestarikannya cagar budaya (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	-	-	-	-	6	7	8	
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	-	60	60,5	60,6	60,7	60,8	60,9	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62,21	50	62,01	62,02	62,03	62,04	62,05	
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	16,6	61,6	17	18	18	18	19	
	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	75	75	100	100	100	100	100	
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	75	75	100	100	100	100	100	
	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	100	100	100	100	100	100	100	
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	10	10	10	10	10	10	10	
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	5,85	6,2	7,78	9,02	9,93	10,54	10,9	
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	-3,26	2,25	4,4	7,37	9,8	12,5	15,87	
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	5,83	6,19	7,77	9,02	9,93	10,54	10,9	
	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Target PAD (Persentase)	3,64	3,75	4,09	4,42	4,74	5,05	5,36	
	Tingkat Hunian Akomidasi	20,39	21,50	23,25	25,00	26,75	27,50	30,25	
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	2,27	2,39	2,51	2,63	2,75	2,87	2,99	
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	3,26	3,00	4,79	6,85	9,08	11,77	14,90	
	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	-	-	-	5	10	15	20	
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	41,32	4,28	4,43	4,58	4,73	4,88	5,03	
	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	0	30	31	33	34	35	36	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kelembagaan Koperas Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN								
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	56,41	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	91,85	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%)	0	0	25	45	55	100	100	
	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	0	0	0	0	0	0	0	
	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota (%)	-77,39	1,09	1,11	1,13	1,15	1,17	1,19	
	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	60	60	62	64	65	66	67	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	0	0	0	0	0	0	0	
	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	40	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota (%)	0	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	70	70	80	90	95	100	100	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	65	70	80	90	95	100	100	
	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH								

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	20	20	20	20	20	20	20	
	Persentase kegiatan pimpinan yang terlaksana sesuai SOP protokol (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	65	65	65	65	65	65	65	
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (%)	8,35	9,25	9,5	9,75	10	10,25	10,5	
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	18,069	10,25	10,5	10,75	11	11,25	11,5	
	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke	0	0	0	0	0	0	0	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)								
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	60,74	40,25	4,5	40,75	50	50,25	50,5	
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	35,56	40	40	40	40	40	40	
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	4.02 - SEKRETARIAT DPRD								
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	5.01 - PERENCANAAN								
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	95	95	95	95	95	95	95	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	95	95	95	95	95	95	95	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Perekonomian dan SDA (Persentase)								
	5.02 - KEUANGAN								
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	11,16	30	30	30	30	30	30	
	Rasio PAD	4,31	4	4	4	4	4	4	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	59,60	47,93	47,63	51,74	50,75	50,75	52,72	
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	12,13	9,76	10,37	10,43	10,49	12,50	13,43	
	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	42,11	39,94	41,12	42,25	43,34	44,39	45,40	
	Assets Management	4	4	4	4	4	4	4	
	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	11,71	3,43	0,98	0,69	0,49	0,38	0,31	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100	100	100	100	100	100	100	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	(Public access to fiscal information)								
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	20	21	22	23	24	25	26	
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30	30	30	30	30	30	30	
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	50	50	50	50	50	50	50	
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	10	10	10	10	10	10	10	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	8	8	8	8	8	8	8	
	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	5.03 - KEPEGAWAIAN								

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	25,02	25,07	25,13	25,2	25,28	25,37	25,47	
	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	78,21	78,26	78,32	78,39	78,47	78,56	78,66	
	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	15,48	15,53	15,59	15,66	15,74	15,83	15,93	
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	30	40	100	40	50	50	50	
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	90	82	85	87	90	92	95	
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Optimum (Optimizing)	Optimum (Optimizing)	Optimum (Optimizing)	Optimum (Optimizing)	Optimum (Optimizing)	Optimum (Optimizing)	Optimum (Optimizing)	
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
	7.01 - KECAMATAN								
	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	tingkat kecamatan yang difasilitasi (Persentase)								
	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)								
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	



BAB V
PENUTUP

Dokumen RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029 disusun sebagai salah satu bentuk tanggung jawab formal atas rangkaian proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Katingan untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari rencana pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2025–2045. Sebagaimana posisinya yang menjadi manifestasi pertama dari operasionalisasi rencana pembangunan 20 tahun, maka dokumen ini memuat peta jalan lima tahunan pertama (Tahap 1 RPJPD) pembangunan Kabupaten Katingan sesuai dengan mandat **"Pemantapan Fondasi"** daerah. Perwujudan fondasi pembangunan yang kokoh di tahun 2029 kemudian diterjemahkan ke dalam Visi RPJMD Tahun 2025–2029: **Kabupaten Katingan Hidup Rukun, Berbudaya, dan Damai Bersama Menuju Masyarakat Sejahtera, Adil, dan Makmur.** Adapun langkah konkret menuju terbangunnya Kabupaten Katingan yang siap memasuki tahap kedua dalam pembangunan jangka panjang di atas ialah melalui 7 (tujuh) misi beserta tujuan dan sasarannya yang pada akhirnya berkontribusi dalam membangun cita-cita jangka menengah Kabupaten Katingan secara utuh, yang disimbolkan sebagai terbangunnya Huma Betang Katingan.

Pada pelaksanaannya, dibutuhkan sistem pengawasan dan evaluasi sebagai instrumen pengendalian pembangunan agar sesuai dengan peta jalan yang telah dibuat. Secara lebih luas, evaluasi dimaknai juga dengan penilaian terhadap kinerja kolaborasi antar *stakeholder*, termasuk antar Perangkat Daerah. Mengacu pada hidup berdampingan dan gotong royong dalam filosofi Huma Betang Katingan serta semangat kebersamaan dan fokus pada tujuan pembangunan yang lebih besar, diharapkan setiap Perangkat Daerah dapat menjalin kolaborasi yang erat dan terkoordinasi, sehingga sinergi yang tercipta mampu mengakselerasi kemajuan Kabupaten Katingan.

5.1 Skema Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029

Proses monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian proses pembangunan daerah serta pemantauan capaian target pembangunan sebagaimana telah tertulis dalam dokumen RPJMD ini. Terdapat tiga jenis monitoring dan evaluasi yang harus dilaksanakan, pertama yaitu proses monitoring yang dilakukan setiap tahun yang juga diselaraskan dengan proses pelaksanaan RKPD. Kedua adalah proses peninjauan kembali yang dapat dilakukan ketika terjadi kondisi *force majeure* selama masa pembangunan. Ketiga, yaitu proses evaluasi yang harus dilakukan sebelum proses perencanaan RPJMD pada periode selanjutnya.

Mengacu pada *Shewhart Cycle*, terdapat sebuah metodologi berupa empat langkah tindakan yang dapat menjadi instrumen manajemen perencanaan guna mencapai

perkembangan yang senantiasa berkelanjutan. Rangkaian empat langkah tersebut meliputi (1) *planning* yang mencakup penentuan target, (2) *doing* yang merupakan tahap implementasi, (3) *checking* dalam hal ini merupakan evaluasi atas performa kinerja pembangunan yang telah berjalan, dan (4) *acting* yang mencakup tindak lanjut dari hasil evaluasi dan berorientasi pada kesiapan menuju tahap selanjutnya dalam RPJPD Kabupaten Katingan. Adapun pendetailan beberapa proses monitoring dan evaluasi dapat dilihat dalam Tabel 5–1 di bawah ini.

Tabel 5-1 Skema Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029

No	Jenis	Waktu					Target
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Monitoring	V	V	V	V		Penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD dengan RKPD; beserta monitoring capaian indikator kinerja dalam RPJMD dan RKPD
2	Peninjauan Kembali			V			Review terhadap dokumen RPJMD dapat dilakukan jika terjadi kondisi *force majeure* yang tidak bisa terhindarkan.
3	Evaluasi				V	V	**Evaluasi pada tahun keempat** dilakukan untuk melihat kinerja selama tiga tahun berjalannya pembangunan dan menentukan langkah pada tahun kelima yang akan menjadi tahun transisi memasuki tahap perencanaan berikutnya. **Evaluasi pada tahun kelima** dilakukan untuk menilai pencapaian target arah pembangunan dan pencapaian target indikator pembangunan, sebelum proses perencanaan RPJMD periode selanjutnya dilaksanakan.

Di samping itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini harus dilakukan dengan prinsip demokrasi, artinya dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan daerah. Hal ini difungsikan untuk meningkatkan partisipasi pembangunan oleh berbagai pihak. Beberapa

forum dapat dirancang dalam upaya meningkatkan partisipasi pembangunan sebagaimana yang dimaksud sebelumnya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5-2 Jenis Forum Monitoring dan Evaluasi RPJMD Tahun 2025–2029

No.	Jenis Forum Monev	Sasaran Forum Monev	Waktu Pelaksanaan
1	Forum Monitoring Lintas OPD	Pelaksanaan forum dilakukan pada internal Pemerintah Daerah antar OPD	Dilaksanakan pada setiap tahun dan bertepatan dengan awal tahun anggaran
2	Forum Pengendalian Pembangunan Daerah	Forum ini disusun untuk memberikan ruang partisipasi pembangunan kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah baik dari sisi eksekutif, legislatif, organisasi masyarakat, akademisi, serta media, dll.	Forum dilaksanakan setiap tahun pasca hasil monitoring kinerja setiap OPD dilaksanakan
3	Publikasi dan Sosialisasi Hasil Pembangunan Daerah	Skema ini dilaksanakan dengan sasaran melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan	Dilaksanakan setelah dua forum pengendalian pembangunan daerah

Pada prosesnya, monitoring, pengendalian, dan evaluasi akan membentuk suatu siklus yang berkesinambungan dan saling menguatkan. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dalam sistem perencanaan pembangunan.

5.2 Pelaksanaan

Dokumen perencanaan yang baik adalah dokumen yang dapat dilaksanakan sebagai acuan proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu beberapa penekanan skema pelaksanaan dalam setiap rancangan kebijakan, program, sampai dengan kegiatan dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD. Beberapa penekanan yang diperlukan tertuang sebagai berikut:

1. Dokumen ini meneruskan mandat pembangunan dari tingkat nasional dan provinsi, baik jangka panjang maupun menengah. Oleh karena itu, pelaksanaan dan perbaikan di dalamnya harus selalu mengacu pada dokumen–dokumen perencanaan tersebut untuk memastikan keselarasan pembangunan.
2. Perbaikan basis data pembangunan yang terintegrasi antarbidang perlu dilakukan untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi pembangunan ke depan.
3. Kolaborasi antar Perangkat Daerah harus menjadi perhatian agar dapat mengusung kinerja yang sinergis dan efektif secara berkelanjutan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pembangunan harus dilakukan secara konsisten dan tepat waktu, sebagai proses pengendalian pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan dan target pembangunan.

Bupati Katingan



Saiful



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Katingan
Provinsi Kalimantan Tengah